

MENGIJAKAN SEKTOR SAWIT MELALUI PETANI

Lesson-Learned Hivos untuk Isu Sawit Berkelanjutan



E. Panca Pramudya, Agung Prawoto, Rini Hanifa



MENGIJAKAN SEKTOR SAWIT MELALUI PETANI

Lesson-Learned Hivos untuk Isu Sawit Berkelanjutan

MENGIJAUKAN SEKTOR SAWIT MELALUI PETANI

Lesson-Learned Hivos untuk Isu Sawit Berkelanjutan

Oleh: E. Panca Pramudya, Agung Prawoto, Rini Hanifa

Copyright © 2015 Hivos Southeast Asia

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Pemindai Aksara : Estu Putri dan Agus Khudlori

Design Cover & Layouter : Novan Syahrizal

Sketsa : Wahono

Ukuran: 15 x 23 cm, 252 hal

ISBN: 978-602-1201-24-4

Dukungan Pendanaan:

Hivos Southeast Asia

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit ReneBook bekerjasama dengan Hivos Southeast Asia.

Cetakan 1, Oktober 2015

renebook

House of Enlightenment & Eternity

Jl. Moch. Kahfi II (Kawasan Setu Babakan) No. 119
Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12640
Telp./Faks.: (021) 29127123
www.renebook.com

 @renebooks

 Penerbit Renebook

Hivos
people unlimited

Jl. Kemang Selatan XII No. 1
Jakarta Selatan 12560 | Indonesia
Tel. +62-21 7892489
Fax. +62-21 7808115
www.hivos.nl

KATA PENGANTAR

DENGAN SANGAT BAHAGIA kami menghaturkan buku yang ditulis berdasarkan pengalaman para penulis dalam melaksanakan program dari Hivos, baik sebagai staf dari Kantor Regional Hivos di Asia Tenggara yang berkedudukan di Jakarta maupun dari organisasi mitra yang didukung Hivos dalam isu sawit berkelanjutan.

Buku ini mencoba memaparkan pengalaman Hivos pada isu sawit berkelanjutan di mana keterlibatannya sudah berlangsung sejak tahun 2003. Hivos mendukung isu sawit berkelanjutan dalam posisinya yang berubah. Itu berawal dari kesadaran mengenai berbagai dampak yang muncul akibat perkembangan perkebunan sawit yang sangat pesat. Kesadaran itu lantas berubah menjadi keterlibatan para petani kecil dalam rantai komoditas. Dalam kesadaran tersebut, Hivos menemukan dirinya sebagai bagian dari upaya pengembangan tata kelola sawit berkelanjutan yang merupakan upaya bersama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil di tingkat internasional dan jejaringnya di tingkat nasional dan lokal.

Perkembangan dukungan ini di satu sisi memperlihatkan perjuangan Hivos untuk bisa masuk dan memahami isu keberlanjutan dan upaya-upaya penerapannya. Di sisi lain, juga diperlihatkan interaksi antara perubahan kebijakan Hivos dan program para mitra. Interaksi ini selain didorong oleh kebijakan internal organisasi, juga dibawa oleh relasi yang terbentuk dalam keterlibatan Hivos dalam jejaring isu sawit berkelanjutan.

Semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, Agustus 2015



Biranchi Upadhyaya

Direktur Kantor Regional Hivos Asia Tenggara



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	5
Daftar Isi	7
01 PENDAHULUAN.....	9
Munculnya Isu Sawit Berkelanjutan	11
Tata Kelola Sawit Berkelanjutan.....	25
02 HIVOS DAN ISU SAWIT BERKELANJUTAN	33
Posisi Hivos sebagai Lembaga Pendukung Petani	35
Program Hivos	38
Dukungan Hivos untuk Isu Sawit.....	40
Hivos Mendukung Masyarakat Sipil dalam Advokasi Masyarakat Terdampak Sawit	47
Hivos Mendukung Penerapan Sawit Berkelanjutan.....	54
03 SAWIT BERKELANJUTAN DARI PERSPEKTIF MUTU	57
Memahami Isu Sawit Berkelanjutan dari Perspektif Penjaminan Mutu.....	59
Penjaminan Mutu Kelompok untuk Produksi Sawit Berkelanjutan	60
Fungsi Kelembagaan Petani dalam Pemenuhan Prinsip dan Kriteria RSPO.....	64
04 ANALISIS PENERAPAN SAWIT BERKELANJUTAN	69
Gambaran Umum Kondisi Perkebunan Sawit di Jambi.....	71
Konsep Sertifikasi RSPO untuk Kelompok Tani Sawit.....	81
Identifikasi Kesesuaian Penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO	85
05 MENDUKUNG PETANI SWADAYA DI JAMBI.....	91
Kerjasama Hivos dengan Yayasan SETARA Jambi.....	93
Latar Belakang Masalah.....	97
Implementasi Kegiatan	98

06	PENGALAMAN DARI LAPANGAN.....	125
	Keberlanjutan Petani Sawit di Indonesia	127
	Sertifikasi RSPO Pertama untuk Petani Sawit di Indonesia	129
	Sertifikasi RSPO Petani Dukungan Hivos di Indonesia	131
	Pengalaman di Jambi.....	133
07	PARTISIPASI DALAM FORUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL.....	159
	Partisipasi di RSPO	161
	Aktif di INA-SWG	166
	Pengakuan dari Kalangan Pemerintah	168
	Pengakuan dari Dunia Usaha.....	173
	Pengakuan atas Prestasi Yayasan SETARA Jambi	174
	Pengakuan atas Prestasi BIOCert.....	176
08	BUTIR-BUTIR PEMBELAJARAN.....	181
	Hivos	183
	BIOCert	187
	Yayasan SETARA Jambi.....	188
	Gapoktan Tanjung Sehati	195
09	PENUTUP	203
	Referensi	207
	Lampiran	210
	Lampiran 1. Identifikasi Kesesuaian Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Petani Sawit	210
	Lampiran 2. Pengalaman Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah, Kabupaten Pelalawan, Riau	231

01

PENDAHULUAN



“

Di Asia Tenggara,
sawit telah menjadi
pendorong utama
pembangunan dan
diversifikasi pertanian
dari pertanian
subsisten di Indonesia
dan Malaysia.

”

Munculnya Isu Sawit Berkelanjutan

1. Sekilas Isu Keberlanjutan (*Sustainability*)

GAGASAN MENGENAI KEBERLANJUTAN (*sustainability*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) muncul pada tahun 1990-an bersamaan dengan kesadaran adanya saling ketergantungan antara lingkungan hidup, perekonomian dan kondisi sosial masyarakat. Sementara perkembangan dunia memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan, ketidakstabilan ekonomi dan kekacauan masyarakat terjadi secara luas di banyak negara, bersamaan dengan pembangunan di berbagai belahan dunia paska Perang Dunia Kedua.

Pembangunan berkelanjutan mencakup makna yang luas dan menuntut perubahan dalam berbagai segi kehidupan (Lee & Boateng, 2013). Dalam wacana pembangunan berkelanjutan, salah satu yang cukup gencar dipromosikan ialah mengubah “sampah” menjadi “hal-hal yang berharga”. Namun demikian, jalan menuju pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari terciptanya produksi dan konsumsi yang berkelanjutan di mana faktor lingkungan, sosial dan kesetaraan dipertimbangkan dalam penggunaan berbagai sumber daya alam.

Singkatnya, keberlanjutan ialah penggunaan barang dan jasa secara efisien dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok maupun meningkatkan kehidupan seseorang dalam masyarakat yang menggunakan sesedikit mungkin sumber daya alam, bahan-bahan beracun dan emisi dari limbah dan polutan, sehingga tidak mengorbankan kebutuhan-kebutuhan generasi mendatang. Di sisi lain, sumber daya alam yang menggunakan proses-proses teknologi—yang menciptakan produk-produk tambahan yang tidak secara langsung bermanfaat bagi manusia dan kemungkinan menghasilkan kondisi kehidupan lebih sengsara—merupakan jalan yang berlawanan dengan gagasan keberlanjutan.

Pembangunan berkelanjutan, oleh karenanya, berdiri di atas dua pilar yaitu produksi yang berkelanjutan dan konsumsi yang berkelanjutan (Lee & Boateng, 2013). Produksi berkelanjutan bukan sekadar “tanpa limbah” atau “tanpa emisi” karena produksi mustahil dilakukan tanpa hasil samping atau *by-product* (termasuk limbah dan emisi). Produksi berkelanjutan oleh karena itu mencakup penggunaan bahan-bahan dapat diperbarui dan

aman dalam rangka menghasilkan produk tidak memboroskan biaya melalui teknologi aman yang tidak merusak lingkungan.

Barang dan jasa yang diproduksi harus dapat diuraikan dengan proses di alam (*biodegradable*), tahan lama, aman dan proses produksinya ramah lingkungan termasuk dalam penggunaan energi. Jasa yang ditawarkan harus secara efisien memenuhi kebutuhan manusia dalam mendorong kesetaraan. Bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan tidak boleh dipakai dan limbah yang dihasilkan harus sesedikit mungkin dan dapat diolah-ulang. Teknologi yang digunakan memenuhi prinsip-prinsip konservasi energi serta persyaratan-persyaratan proses dalam produksi yang berkelanjutan.

Akhirnya, personel yang bekerja harus diorganisasikan sedemikian rupa sehingga bisa bekerja dalam efisiensi dan kreativitas maksimum. Pengambilan keputusan harus dibuat terbuka dan dapat diterima oleh para pekerja. Komunitas yang berhubungan dengan setiap langkah produksi harus dalam kondisi yang baik secara ekonomi, sosial, lingkungan, politis, kultural dan fisik. Sementara di sisi konsumsi, peningkatan konsumsi barang dan jasa telah membawa kondisi ekonomi global melebihi daya dukung planet. Pola konsumsi yang dijalankan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Untuk itu perlu perubahan pola konsumsi dengan menerapkan konsumsi berkelanjutan.

Konsumsi berkelanjutan itu berlandaskan pada konsumsi atau penggunaan barang dan jasa berdasarkan prinsip kesejahteraan sosial (yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia), layak secara ekonomis, menimbulkan dampak minimum terhadap lingkungan, dan meningkatkan gaya hidup manusia saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan-kebutuhan generasi mendatang.

2. Lonjakan Produksi dan Konsumsi Minyak Sawit

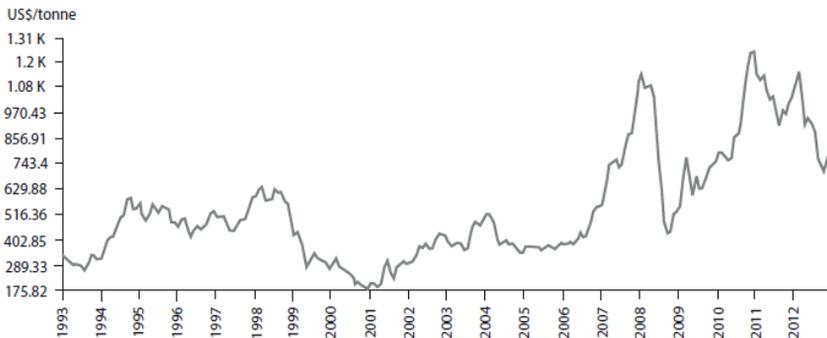
Kemajuan dalam standar hidup orang-orang termiskin di dunia lazimnya disertai peningkatan konsumsi mereka terhadap lemak (Rival & Levang, 2013). Bersamaan dengan proses urbanisasi yang cepat, gaya hidup dan pola makan orang pun berubah. Makanan cepat saji serta merta menggantikan makanan tradisional, dengan keseragaman yang luar biasa di berbagai belahan dunia.

Secara global, konsumsi lemak per orang meningkat dua kali lipat dari 11 kg pada tahun 1976 menjadi 24,7 kg pada tahun 2009, walaupun masyarakat

di belahan bumi utara tetap mendominasi konsumsi ini. Misalnya di Prancis atau Amerika Serikat, orang mengkonsumsi lebih dari 50 kg lemak per tahun, sementara di Madagaskar hanya 10 kg per orang. Berkaca dari peningkatan ini, diperkirakan produksi lemak akan meningkat sampai dua kali lipat pada tahun 2050, dengan sudah memperhitungkan peran minyak sebagai bahan bakar (*biofuel*).

Peningkatan permintaan lemak ini mendorong peningkatan harga minyak sawit di dunia. Ditambah lagi, harga minyak bumi dunia meroket sejak pertengahan dekade 2000-an yang meningkatkan penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar. Peningkatan harga minyak sawit dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 1.1. Harga CPO CIF Rotterdam 1993-2012



Sumber: Bank Dunia seperti dikutip oleh Rival & Levang (2013)

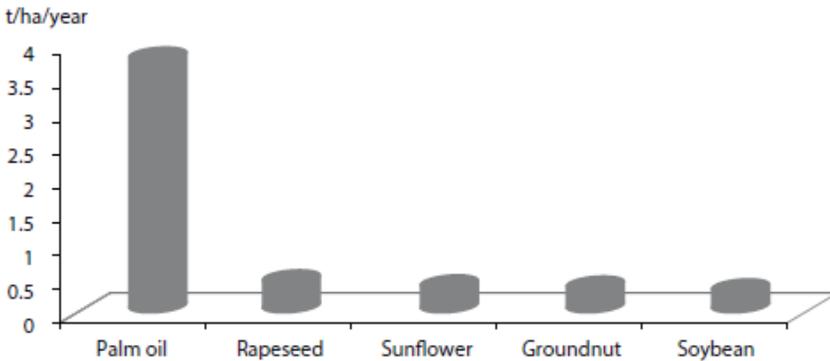
Sawit dapat dikatakan “mesin alami penghasil minyak” karena sifatnya yang unik (Rival & Levang, 2013). Buahnya mengandung dua macam minyak dengan komposisi berbeda. Bagian luarnya menghasilkan minyak sawit yang terdiri atas setengah asam lemak jenuh dan setengahnya lagi asam lemak tak jenuh, yaitu terdiri atas 44% asam palmitik (asam lemak jenuh), 5% asam stearik (asam lemak jenuh), 39% asam oleik (asam lemak tunggal tak jenuh) dan 10% asam linoleik (asam lemak berganda tak jenuh), serta 2% sisanya ialah asam miristik dan laurik.

Sementara bagian dalam buah sawit menghasilkan minyak kernel dengan komposisi kimia yang sama dengan minyak kelapa. Minyak kernel terdiri atas

82% asam lemak jenuh, yaitu asam laurik 48%, asam miristik 16% dan asam palmitik 8%. Hampir 18% minyak kernel merupakan minyak tak jenuh, yaitu terdiri atas asam oleik 15% dan asam linoleik (asam lemak berganda tak jenuh) 10%. Sampai saat ini, minyak kernel lebih dipandang sebagai hasil samping dari produksi minyak sawit dan penggunaannya bersaing langsung dengan minyak sawit seperti minyak goreng, margarin, sabun, kosmetik, oleochemical dan dicampur berbagai minyak sayur lainnya.

Produktivitas minyak sawit sangat tinggi dengan rata-rata 3,8 ton/ha dan bisa mencapai 6 ton/ha untuk perkebunan terbaik di Asia Tenggara. Selain itu, lebih dari 10 ton/ha minyak sawit dengan bibit-bibit jenis baru yang masih dikembangkan di lembaga penelitian. Produktivitas ini jauh lebih tinggi daripada berbagai tanaman penghasil minyak nabati lainnya.

Grafik 1.2. Perbandingan Produktivitas Minyak Sawit

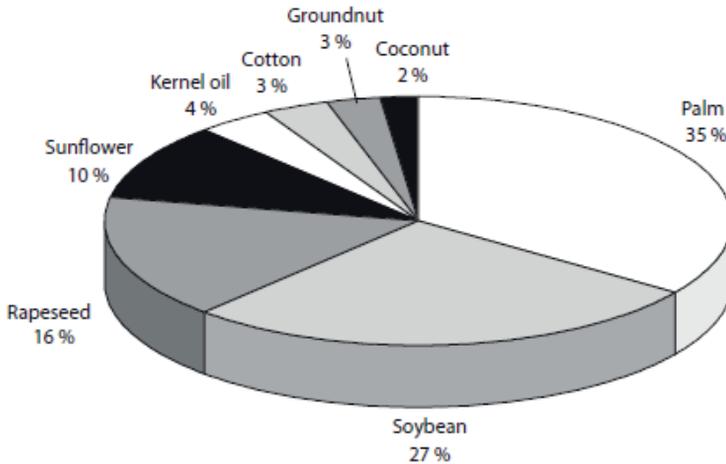


Sumber: Rival & Levang, 2013

Dari total lahan pertanian di dunia yang digunakan untuk berbagai tanaman penghasil minyak nabati, kebun kelapa sawit dengan total luas sekitar 20 juta hektar hanya menguasai 7% dari seluruh lahan, namun bisa memproduksi 39% dari total minyak sayur dunia. Proporsi luasan yang ditanami sawit ini jauh di bawah kedelai (61%), rapeseed (18%) dan bunga matahari (14%). Biaya produksi minyak sawit juga paling rendah dibandingkan minyak nabati lainnya, yaitu 20% di bawah biaya produksi minyak kedelai. Dengan segala keunggulan produksi ini, tidaklah mengherankan jika minyak sawit mendominasi proporsi minyak nabati yang diproduksi di dunia, menggeser posisi minyak kedelai dan

rapeseed yang sebelumnya merupakan tanaman penghasil minyak utama di dunia.

Grafik 1.3. Diagram Produksi Minyak Nabati di Dunia



Sumber: FAOSTAT, seperti dikutip dalam Rival & Levang (2013)

Tumbuhan kelapa sawit merupakan berkah bagi negara-negara berkembang di kawasan tropis (Rival & Levang, 2013). Kebanyakan kelapa sawit ditanam di daerah tropis lembab dan menjadi sumber pendapatan utama bagi penduduk di negara-negara tersebut, baik sebagai hasil ekspor maupun bahan baku untuk industri lokal (fraksinasi dan penyulingan). Dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, merupakan produsen terbesar yang memasok 87% pasokan dunia.

Minyak sawit lebih banyak dikonsumsi oleh berbagai negara berkembang (Rival & Levang, 2013). Konsumsi didorong oleh negara-negara di belahan bumi selatan dan terus berkembang seiring pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan di negara-negara seperti India, Indonesia dan Tiongkok. Konsumsi Eropa hanya sekitar 12% dari total dunia dan Amerika Serikat hanya sekitar 3%. Minyak sawit dikonsumsi sebagian besar (80%) untuk industri pangan, 19% untuk *oleochemical* (bahan kosmetik, sabun, pelumas, lilin, obat-obatan, kulit, cat, agrokimia, elektronik, dan lain-lain), serta 1% untuk biodiesel.

Komposisi asam lemak dari minyak sawitlah yang memberikan karakteristik istimewa lagi menarik berbagai perusahaan pemroses di belahan bumi utara. Di negara-negara belahan dunia utara, minyak sawit terbukti konsisten pada suhu kamar sehingga memberikan sifat “leleh di mulut” dan bisa digunakan untuk menggantikan *butter* pada berbagai industri pangan. Sifat teknis dan organoleptik ini dapat diperoleh dari minyak-minyak lain seperti rapeseed, kedelai dan bunga matahari, tetapi minyak-minyak ini harus dihidrogenisasi yang bisa menimbulkan asam lemak trans, yang secara hukum dilarang dalam produk pangan. Oleh karena itu minyak sawit mempunyai sifat relatif aman untuk pangan dibandingkan minyak-minyak nabati lainnya.

3. Berkah Sawit bagi Pembangunan

Sampai saat ini, pertanian masih menjadi dasar bagi pembangunan secara berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan. Dalam melakukan pembangunan, ada empat hal yang menjadi hambatan mendasar yang harus diatasi yaitu: masalah tabungan, surplus yang dapat dipasarkan, permintaan dan tenaga kerja (Ikpe, 2013). Untuk dapat membangun, suatu negara harus mengembangkan sektor pertaniannya sehingga bisa menghasilkan pajak dan memungkinkan manipulasi nilai tukar dalam perdagangan komoditas pertanian.

Bersamaan dengan itu, keterbatasan surplus yang bisa dipertukarkan juga ditangani dengan memungkinkan produk pangan dari para petani bisa dibeli dengan harga yang cukup masuk akal, investasi publik dalam skala yang besar untuk meningkatkan *output* sektor pertanian dan mendukung kebijakan proteksionis sehubungan dengan sektor pertanian. Keterbatasan permintaan diatasi dengan melindungi sektor industri domestik dari kompetisi dan meningkatkan pendapatan para petani.

Hambatan dalam ketenagakerjaan diatasi dengan menempatkan aktivitas industri pada daerah-daerah pedesaan dan melakukan investasi pada infrastruktur pedesaan dan layanan publik yang memungkinkan penganekaragaman aktivitas perekonomian serta memprioritaskan teknologi yang hemat lahan dan tenaga kerja sehingga tenaga kerja tidak terikat pada pekerjaan-pekerjaan pertanian dan dapat bekerja pada berbagai sektor

industri yang lebih banyak menghasilkan nilai tambah. Dari keempat hambatan ini, restrukturisasi sektor pertanian memegang peranan yang penting.

Sampai saat ini, sektor pertanian merupakan instrumen mendasar bagi pembangunan perekonomian yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan (Teoh, 2010). Tiga dari empat orang miskin di negara-negara berkembang hidup di daerah pedesaan dan tergantung pada sektor pertanian untuk penghidupan mereka. Di Asia Tenggara, sawit telah menjadi pendorong utama pembangunan dan diversifikasi pertanian dari pertanian subsisten di Indonesia dan Malaysia. Di kedua negara ini, kelapa sawit merupakan tanaman yang diusahakan sejak perkebunan skala besar dikembangkan di Sumatera dan Semenanjung Malaya.

Namun demikian, perkebunan besar pada saat itu mengandalkan karet sebagai komoditas utama. Ketergantungan pada karet harus dikurangi karena harga karet mentah dunia jatuh. Malaysia kemudian menggenjot pengembangan sektor sawit skala besar. Total nilai ekspor minyak sawit dan produk-produk turunannya di Malaysia berkembang dari RM 1,98 milyar (US\$ 903 juta) pada tahun 1980 (yang merupakan 6,1% dari total nilai ekspor Malaysia) meningkat menjadi RM 45,61 milyar (USD 13,8 milyar) pada tahun 2007.

Selama krisis ekonomi Asia Timur tahun 1997/98, minyak sawit tetap merupakan penghasil devisa terbesar melampaui pendapatan yang diperoleh dari minyak bumi dan produk-produk minyak lainnya serta pendapatan dari kehutanan. Bahkan dikatakan bahwa sektor sawit Malaysia lah yang berjasa besar menyelamatkan Malaysia dari krisis ekonomi. Sama halnya dengan Malaysia, sawit menghasilkan pendapatan ekspor yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, yaitu mencapai USD 7,9 milyar pada tahun 2007.

Pertumbuhan sektor sawit merupakan model bagi pertumbuhan sektor pertanian yang didukung intensif oleh pemerintah (Teoh, 2010). Di Malaysia, berdasarkan rekomendasi dari Bank Dunia dibentuklah Federal Land Development Authority (Felda) pada bulan Juli 1956. Felda mempunyai dua tujuan yaitu memukimkan orang miskin dan tidak mempunyai tanah serta diversifikasi dari ketergantungan terhadap komoditas karet. Felda mulai beroperasi di tahun 1961 dan sampai tahun 2010 merupakan produsen minyak sawit terbesar

di Malaysia dengan 720 ribu hektar kebun sawit dan 112.635 keluarga tanpa tanah dimukimkan.

Selain Felda, Malaysia juga mendirikan Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority (Felcra) dan berbagai lembaga negara lainnya di Malaysia. Pada pertengahan tahun 1990-an, Malaysia mengembangkan skema alternatif pengembangan kebun baru yang dinamakan Konsep Baru di mana perusahaan patungan didirikan dengan pemegang saham yaitu perusahaan swasta (60% saham), komunitas lokal (30% saham) dan lembaga pemerintah yang terkait (10% saham). Perusahaan swasta akan menyewa lahan dengan masa sewa 60 tahun dan memberikan modal untuk pengembangan kebun. Model Konsep Baru ini banyak dikembangkan di Sarawak.

Indonesia, walaupun mewarisi perkebunan yang cukup besar, memulai proses pembangunan secara intensif untuk sektor perkebunan sejak awal kemerdekaan karena kebun-kebun yang ada dalam kondisi yang rusak sementara lahannya banyak yang diduduki warga serta kompetensi manajerial dan staf terbatas pasca nasionalisasi perkebunan Belanda (Mackie, 1971). Ketika rezim pembangunan Orde Baru berdiri di Indonesia, sektor kelapa sawit diidentifikasi sebagai sektor penting dari perekonomian yang memerlukan upaya serius untuk revitalisasi, dimulai tahun 1967 untuk perkebunan negara dan 1974 untuk perkebunan besar swasta nasional (Badrun, 2010). Namun demikian segera disadari bahwa keterbatasan lahan merupakan masalah yang menghambat pertumbuhan sektor perkebunan sementara dengan lahan yang dikuasai pada saat itu pun perusahaan-perusahaan perkebunan sudah menjadi salah satu sumber gesekan sosial dengan masyarakat-masyarakat yang tidak punya lahan.

Dalam rangka mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia mengembangkan skema PIR (Perkebunan Inti Rakyat) yang diperkenalkan sejak tahun 1978. Pertama program PIR dilaksanakan oleh perkebunan milik negara di mana perusahaan perkebunan besar wajib membangun perkebunan bagi petani kecil terpilih yang akan mengelola lahan seluas 2 hektar sebagai petani plasma. Pada tahun 1986, perkebunan besar swasta nasional memperoleh kesempatan untuk melaksanakan program PIR melalui kerjasama dengan petani kecil yang berasal dari para peserta program transmigrasi.

Subsidi Pemerintah diberikan kepada perusahaan sampai tahun 1990, baru kemudian tahun 1994 subsidi diberikan kepada koperasi petani, yang disebut dengan program KKPA (Kredit kepada Koperasi Primer dan para Anggotanya). Program kredit bersubsidi ini berakhir sejalan dengan diakhirinya peran Bank Indonesia sebagai penyalur kredit likuiditas pada saat negara dalam kondisi sulit keuangan akibat krisis multidimensi pada tahun 1997-1998. Sisa anggaran KKPA dialihkan kepada BUMN yang mengelola kredit kepada UMKM, yaitu Permodalan Nasional Madani (PNM).

Pada tahun 2006, Pemerintah kembali meluncurkan kredit bersubsidi dalam rangka program revitalisasi perkebunan yang ditujukan untuk peremajaan kebun-kebun petani, bukan untuk ekspansi. Walaupun intervensi langsung pemerintah untuk mengatur kredit bersubsidi secara teknis sudah diakhiri tahun 1998, namun telah berkembangnya berbagai pabrik pengolah minyak-banyak yang berkembang tanpa mempunyai luasan kebun yang cukup sehingga posisinya ialah mengumpulkan tandan buah segar (TBS)—telah memotivasi berbagai pihak untuk membuka kebun.

Sementara minyak sawit menghadapi prospek pemasaran yang bagus dengan terus meningkatnya permintaan baik domestik maupun dunia. Alhasil, luasan perkebunan terus melonjak baik itu untuk perkebunan besar swasta maupun perkebunan rakyat milik petani. Belakangan perkebunan petani ini terus berkembang di berbagai tempat.

Antara tahun 1986 sampai 1999, skema PIR telah mengembangkan 164 ribu hektar perkebunan inti dan 425.000 hektar perkebunan plasma milik petani (Rival & Levang, 2013 mengutip Rosediana Suharto). Perkembangan ini terus berlanjut dengan skema KKPA yang berhasil mengembangkan 193 ribu hektar perkebunan plasma dan 79.000 hektar perkebunan inti. Sampai tahun 2011, luas perkebunan sawit di Indonesia menurut Statistik Perkebunan ialah sekitar 9 juta hektar yang terdiri atas 3,75 juta hektar perkebunan rakyat, 678.378 perkebunan milik pemerintah dan 4,67 juta hektar perkebunan swasta nasional (Juga & Hendaryati, 2012).

Belakangan bahkan diperkirakan luas perkebunan secara total mencapai 11 juta hektar (SPKS, 2014). Perkebunan rakyat yang meningkat pesat jumlahnya ialah perkebunan petani swadaya yang tidak mempunyai ikatan dengan

perusahaan inti. Di satu sisi mereka bebas menjual produknya ke mana saja sesuai dengan harga yang baik. Namun di sisi lain, sebagian besar perkebunan petani swadaya tidak menggunakan bibit yang baik sementara pupuk dan obat tidak diberikan secara cukup serta pengetahuan mengenai teknis perkebunan juga terbatas dengan tidak adanya kerjasama dengan perkebunan besar. Akibatnya, kebanyakan perkebunan rakyat mempunyai produktivitas yang rendah.

4. Ekspansi Perkebunan Sawit

Lonjakan produksi dan konsumsi minyak sawit otomatis mendorong perubahan ekosistem di negara-negara penghasilnya. Gesekan antara ekspansi perkebunan dan aspek lingkungan hidup menjadi tidak terhindarkan lagi. Berbagai masalah lingkungan dan sosial yang ditimbulkan ialah sebagai berikut:

a. Konversi hutan dan agroforestri

Kebutuhan akan lahan untuk perkebunan tak pelak lagi mengakibatkan konversi lahan menjadi lahan perkebunan. Isu kehilangan hutan bertambah besar dengan kerancuan tata ruang sehingga banyak area yang tidak jelas pengawasannya oleh otoritas kehutanan di mana daerah-daerah ini diklaim sebagai wilayah hutan namun pada kenyataannya di lapangan tidak ada penggunaan, pengawasan, pembinaan dan zonasi yang jelas.

Turunnya kondisi sektor perkayuan juga mengakibatkan banyaknya area konsesi hutan produksi yang tidak digunakan secara produktif atau penguasaannya tidak ekonomis lagi, mengakibatkan konversi pada komoditas sawit yang lebih menguntungkan. Masyarakat pun melakukan konversi secara luas pada kawasan agroforestri yang berupa kebun produksi campur (yang biasanya ditanami berbagai tanaman seperti karet, pohon buah dan pohon kayu). Berbagai masalah ini muncul dalam pengamatan tutupan tanaman di mana tutupan tanaman yang rapat mulai digantikan dengan kanopi sawit yang tersebar luas di mana-mana.

Berbagai kerangka regulasi telah dikembangkan untuk mencegah perkembangan lahan-lahan perkebunan di daerah hutan. Prinsip dan kriteria RSPO juga telah melarang pengembangan kebun di daerah yang

mempunyai nilai konservasi tinggi (HCV atau *High Conservation Value*). Namun demikian berbagai pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semakin banyak konversi menjadi perkebunan.

Menurut Rival & Levang (2014), antara perkebunan dan penggundulan hutan hubungannya tidak terjadi secara langsung atau serta-merta. Konsesi lahan diberikan oleh otoritas publik kepada perusahaan perkebunan yang mengambil kayu. Hutan yang sudah rusak kadang menjadi lahan gundul, savana atau lahan yang digunakan untuk pertanian.

Dari 21 juta hektar hutan primer yang hilang pada tahun 1990-2005, tidak lebih dari 3 juta hektar yang menjadi perkebunan sawit. Namun demikian, untuk daerah-daerah yang menjadi area baru ekspansi sawit, hubungan antara perluasan area perkebunan dengan konversi hutan primer terjadi lebih jelas seperti 30% hutan primer telah ditanami sawit di Pulau Kalimantan (baik di wilayah Indonesia maupun Indonesia) sementara pembukaan-pembukaan di daerah baru ini menyumbang 10% dari seluruh konversi hutan yang terjadi di Indonesia.

b. Kehilangan keanekaragaman hayati

Hal ini terutama berkaitan bahwa tanaman sawit paling cocok hanya tumbuh di daerah tropis yang secara bersamaan merupakan daerah yang kekayaan keanekaragaman hayatinya paling tinggi di dunia seperti Congo Basin, Amazon dan Kalimantan. Prasyarat pengelolaan kebun sawit yang menuntut penanganan sebagai perkebunan monokultur memicu kehilangan keanekaragaman hayati di mana berbagai spesies menjadi langka seperti orangutan, harimau Sumatera, gajah Sumatera, beruang madu dan berbagai satwa lainnya, yang kemudian menjadi target dari berbagai kampanye organisasi advokasi lingkungan dan liputan media massa. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa fragmentasi dari habitat hutan alam yang sebagian telah dikonversi menjadi perkebunan sawit telah memicu konflik yang serius antara manusia dengan alam liar.

c. Konflik tanah

Konflik tanah merupakan masalah besar dalam sektor sawit, yang melibatkan petani sawit, masyarakat lokal, masyarakat adat serta perusahaan-perusahaan perkebunan. Sawit Watch, yang pernah didukung Hivos pada tahun 2005-2010, mendokumentasikan lebih dari 500 konflik-konflik tanah sehubungan dengan ekspansi perkebunan sawit. Walhi mencatat 200 kasus konflik di Kalimantan Barat. FPP mencatat lebih dari 150 kasus hukum sengketa tanah yang melibatkan masyarakat asli, di mana 40 di antaranya terkait dengan sawit.

Menurut Rival & Levang (2014), sebenarnya sangat jarang dari kasus ini disebabkan dari penjualan yang tidak adil dari anggota masyarakat sendiri. Tidak satu pun dari konflik-konflik ini antara masyarakat dan perusahaan lokal menunjukkan penolakan masyarakat terhadap tanaman sawit. Dari 119 konflik yang teridentifikasi di Kalimantan Barat oleh LSM antara tahun 1999-2009, 49% merupakan sengketa tanah dengan perusahaan, 20% penolakan terhadap kehadiran perusahaan perkebunan, 17% berhubungan dengan pembagian biaya dan pendapatan yang dirasakan tidak adil, 8% ingkar janji, dan sisanya ialah polusi, konflik dengan komunitas, pencurian tandan atau tindakan sewenang-wenang dari perusahaan.

Sengketa tanah dengan perusahaan biasanya berhubungan dengan pembabatan serampangan yang dilakukan oleh perusahaan tanpa persetujuan dari masyarakat yang berada di tempat tersebut serta pembabatan di daerah yang dianggap sakral atau makam kuno. Hal-hal ini dapat terjadi karena kesalahan pemetaan, pembabatan yang menyalahi izin (dengan pemaksaan terhadap pemilik tanah), persetujuan memang dibuat tapi melibatkan segelintir individu tanpa melibatkan para anggota kelompok-kelompok dan keluarga-keluarga di lokasi, dan klaim kompensasi telah dilakukan oleh perusahaan di daerah-daerah sakral atau makam-makam kuno. Di berbagai tempat, sebenarnya walaupun banyak juga kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, namun banyak juga kasus di mana masyarakat tahu bagaimana mencari jalan penyelesaian dan memaksa pembayaran oleh perusahaan.

Untuk kasus di mana terjadi penolakan masyarakat lokal terhadap perkebunan, biasanya bukan karena mereka betul-betul tidak mengharapkan hadirnya perkebunan, namun lebih karena apa yang ditawarkan oleh perusahaan tidak cukup menarik. Beberapa perusahaan juga berupaya mengatasi penolakan ini dengan melibatkan otoritas lokal dan tokoh masyarakat baik secara resmi maupun di bawah tangan.

Sehubungan dengan konflik yang terjadi dari pembagian biaya dan keuntungan yang dirasakan tidak adil, dalam banyak hal berkaitan dengan metode perhitungan harga yang kurang jelas sementara biaya dikenakan terhadap masyarakat untuk hal-hal yang sulit dimengerti. Seringkali sebetulnya biaya-biaya ini sudah tertera pada kontrak, namun petani tidak selalu membaca persyaratan-persyaratan perjanjian yang ada.

Masyarakat seringkali mengandalkan penjelasan lisan yang dilakukan oleh otoritas lokal yang menjadi penghubung komunikasi antara mereka dengan perusahaan. Ketika pejabat setempat yang menjelaskan tersebut sudah tidak ditempatkan di posisi tersebut lagi, penjelasan yang ada hampir tidak berarti dibandingkan dengan pemahaman yang diperoleh bilamana masyarakat membaca kontrak.

Lebih jauh Rival dan Levang (2014) menjelaskan bahwa selama masa Orde Baru, pembabatan-pembabatan serampangan oleh perusahaan terus berlanjut tanpa adanya tindakan, sementara masyarakat lokal enggan untuk memprotes. Sejak jaman reformasi, masyarakat lokal tidak segan-segan mempertahankan hak-haknya dengan dukungan aktif dari berbagai LSM.

Sengketa-sengketa ini tidak jarang diselesaikan lewat mekanisme pengadilan. Sementara penyelesaian hukum berlangsung cukup lama, masyarakat yang kecewa tidak jarang mengadakan demonstrasi yang cukup rusuh sehingga mengakibatkan penyerangan terhadap fasilitas publik dengan kendaraan atau pembakaran kantor.

Akibatnya mereka-mereka inilah yang ditindak lebih dahulu oleh sistem hukum karena kerusakan-kerusakan tersebut yang terjadi. Kondisi ini menjadikan sistem peradilan menjadi sasaran empuk kritik bahwa 'Hukum itu tajam ke bawah namun tumpul ke atas'.

d. Perubahan iklim

Perubahan iklim yang terjadi karena ekspansi ke lahan gambut diliput secara luas karena memang luas lahan gambut di Indonesia juga cukup luas. Indonesia memiliki 22,5 juta hektar lahan gambut yang menyumbang 12% dari total luasan lahan. Bilamana lahan gambut ini dikeringkan untuk keperluan pembukaan kebun, dengan sendirinya menjadi rawan terhadap kebakaran yang akan menyumbang emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang sangat besar serta polusi udara dalam skala yang masif meliputi sampai ke negara-negara tetangga.

e. Kehilangan keanekaragaman hayati

Dampak dari perkebunan sawit terhadap kehilangan keanekaragaman hayati tergantung pada bagaimana ekspansi perkebunan sawit mendorong pembukaan kawasan hutan. Menurut Fitzherbert et.al (2008), kelapa sawit merupakan pengganti yang buruk dari hutan tropis karena hanya mendukung kemungkinan hidup sedikit spesies serta memengaruhi keanekaragaman hayati dari habitat-habitat di sekitarnya melalui fragmentasi, polusi dan *edge-effect*.

Sebenarnya banyak daerah yang bisa digunakan untuk ekspansi perkebunan tanpa harus melakukan pembabatan hutan, namun seringkali perkembangan perkebunan tetap mengarah pada pembukaan kawasan-kawasan hutan karena kerumitan politis dan kurangnya wawasan serta kapasitas mengakibatkan pembabatan hutan menjadi pilihan yang lebih mudah dan murah.

Dampak keanekaragaman hayati dari kebun sawit tergantung pada bagaimana sawit dikelola dan dikembangkan. Kebanyakan dampak paling parah terjadi pada proses awal pembersihan dan persiapan lahan, seperti dengan pembakaran yang bisa menjalar ke mana-mana sehingga membunuh berbagai spesies yang hidup di sekitar lahan.

Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

1. Munculnya Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO)

Factsheet RSPO (http://www.rspo.org/file/RSPO_factsheet_120705_25july.pdf) menjelaskan bahwa organisasi yang pertama kali menjajaki kemungkinan adanya suatu platform *governance* yang berfokus dalam isu *sustainability* minyak sawit ialah WWF (World Wide Fund). Secara internasional telah diidentifikasi adanya tekanan untuk memerhatikan aspek kelestarian lingkungan dan keadilan sosial pada sektor minyak sawit.

RSPO berupaya memastikan bahwa tidak akan ada hutan baru atau area bernilai konservasi tinggi lainnya yang dikorbankan untuk perkebunan kelapa sawit; bahwa perkebunan-perkebunan kelapa sawit menerapkan praktik-praktik terbaik yang di sepakati; dan bahwa hak dan kondisi kehidupan dasar jutaan pekerja perkebunan, petani dan penduduk asli sepenuhnya dihormati. Penjajagan itu dimulai pada tahun 2001 dengan kerjasama informal antara WWF dengan Aarhus United UK Ltd, Golden Hope Plantation Berhad, Migros, Malaysian Palm Oil Association, Sainsbury's dan Unilever pada tahun 2002.

Kerjasama informal ini ditindaklanjuti dengan pertemuan persiapan di London pada tanggal 20 September 2002 dan pertemuan lanjutan di Gland, Swiss pada tanggal 17 Desember 2002. Organisasi-organisasi ini kemudian mempersiapkan landasan struktur organisasi dan tata kelola pendirian RSPO. Pada bulan Agustus 2003, diadakan Roundtable Meeting (RT) pertama di Kuala Lumpur, Malaysia, dihadiri oleh 200 peserta dari 16 negara.

RSPO akhirnya resmi berdiri pada tahun 2004 berdasarkan Pasal 60 Swiss Civil Code dengan tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk-produk minyak sawit yang berkelanjutan melalui standar global yang kredibel dan melibatkan para pemangku kepentingan (*multistakeholder*). Para pemangku kepentingan yang ikut serta adalah para produsen minyak sawit, pengolah, pedagang, produsen barang konsumen, perusahaan ritel, bank, investor, ornop lingkungan dan konservasi alam, serta ornop sosial dan pembangunan.

Secara badan hukum, RSPO berkedudukan di Zurich, Swiss, sedangkan sekretariatnya berlokasi di Kuala Lumpur dengan kantor perwakilan di

Jakarta. Organisasi-organisasi yang termasuk anggota pendiri RSPO ialah Aarhus United UK Ltd. (Inggris), Karlshamns AB (Swedia), Malaysian Palm Oil Association/MPOA (Malaysia), Migros Genossenschafts Bund (Swiss), Unilever NV (Belanda) dan Worldwide Fund for Nature/WWF. Sementara di Dewan Eksekutif RSPO Golden Hope Plantations Berhad (Malaysia), Loders Croklaan (Belanda), Pacific Rim Palm Oil Ltd (Singapura) dan The Body Shop (Inggris) telah terlibat dari awal. Sebanyak 47 organisasi menandatangani Statement of Intent yang mendeklarasikan niat mereka untuk berpartisipasi dalam prakarsa RSPO.

Pada bulan November 2005, Principles and Criteria (P&C) RSPO diadopsi sebagai sebuah contoh implementasi awal selama dua tahun oleh 14 perusahaan. Pada bulan yang sama disepakati pembentukan dan adopsi Members' Code of Conduct serta didirikan kantor perwakilan RSPO (RSPO Indonesian Liaison Office - RILO) di Jakarta.

Selanjutnya, pada bulan Oktober 2007 Principles and Criteria (P&C) RSPO ditinjau ulang oleh Criteria Working Group (CWG) RSPO. Peninjauan ulang ini meliputi konsultasi publik; pertemuan; pengumpulan komentar publik; masukan dari interpretasi nasional; musyawarah kelompok kerja kecil dan hasil uji lapangan percontohan. Sebulan kemudian Sistem Sertikasi RSPO disetujui oleh Dewan Eksekutif RSPO dan diadopsi oleh General Assembly (GA4). Sistem Sertikasi secara resmi diluncurkan pada RT5 (The 5th Roundtable Meeting on Sustainable Palm Oil) di Malaysia, oleh Menteri Industri Perkebunan & Komoditas, Malaysia, yang ketika itu dijabat oleh Datuk Peter Chin Fah Kui.

Pada tahun 2008, National Interpretations (NIs) dari Principles & Criteria (P&C) untuk Indonesia, Malaysia dan PNG disetujui. Tanggal 21 Agustus 2008, sertikasi P&C yang pertama untuk United Plantations disetujui. Pengiriman pertama CSPO tiba di Rotterdam pada bulan November 2008. Pada Agustus 2008, supply Chain Certification System RSPO dikembangkan dan diselesaikan serta pada November 2009 Supply Chain Certification System RSPO ditinjau dan diadopsi.

Pada bulan Oktober 2010, keanggotaan RSPO mencapai 500 anggota kategori Ordinary Member dari seluruh dunia. Pada bulan Juni 2011, merek dagang RSPO diluncurkan. Pada Agustus 2011, industri minyak sawit mencapai

titik balik dengan tembusnya angka 1 juta hektar pertama untuk area produksi yang disertifikasi di seluruh dunia. Pada bulan April 2012, Indonesia menyusul Malaysia sebagai produsen CSPO nomor satu dunia.

Principle & Criteria (P&C) RSPO untuk produksi minyak sawit berkelanjutan adalah petunjuk global tentang cara memproduksi minyak sawit dengan praktik berkelanjutan. Ada 8 prinsip RSPO, yaitu:

- Prinsip 1: Komitmen terhadap transparansi LSM;
- Prinsip 2: Kepatuhan pada peraturan perundangan yang berlaku;
- Prinsip 3: Komitmen terhadap kelangsungan hidup ekonomi dan keuangan jangka panjang;
- Prinsip 4: Penggunaan praktik-praktik terbaik yang tepat oleh perkebunan dan pabrik pengolahan;
- Prinsip 5: Tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- Prinsip 6: Bertanggung jawab terhadap para karyawan, individu serta masyarakat yang terkena dampak oleh perkebunan dan pabrik pengolahan (studi kasus);
- Prinsip 7: Perluasan penanaman baru yang bertanggung jawab;
- Prinsip 8: Komitmen terhadap perbaikan secara terus menerus pada area-area utama program yang dilakukan

Berdasarkan Annual Communications of Progress 2013/2014 (RSPO, 2014), sampai bulan Juli 2014 tercatat sudah ada 855 anggota yang terdiri atas 107 perusahaan perkebunan dan asosiasi pekebun, 288 pemroses dan pedagang, 323 produsen *consumer goods*, 45 pengecer, 11 bank dan investor, 25 LSM lingkungan, 11 LSM sosial-kemasyarakatan, 92 *affiliate* dan 70 *associates*. RSPO memiliki tiga kategori keanggotaan, yaitu:

- *Ordinary Membership* (OM) terdiri atas pelaku-pelaku utama dalam rantai suplai minyak kelapa sawit, seperti petani kelapa sawit, pengolah dan pedagang, produsen barang konsumen, peritel, bank dan investor, LSM lingkungan dan sosial atau LSM pembangunan.
- *Affiliate Membership* terbuka untuk siapapun atau organisasi apapun yang tidak tergabung dalam 7 sektor *Ordinary Membership* dan tertarik untuk mendukung tujuan serta aktivitas RSPO.

- Kategori ketiga yang diperkenalkan baru-baru ini memungkinkan organisasi-organisasi yang aktif dalam rantai pasokan minyak sawit berkelanjutan yang tersertifikasi, namun pembelian produk minyak sawitnya per tahun tidak melebihi 500 juta ton untuk layak menjadi Supply Chain Associates.

Untuk Indonesia, telah dicapai anggota 222 management unit dan 125 (56,3%) di antaranya sudah disertifikasi, dengan luasan anggota 881.486 hektar dan 418.138 hektar (47,4%) sudah disertifikasi; di mana total produksi ialah 4.808.662 ton CPO.

RSPO sudah mengeluarkan merek dagang (*trademark*) yang dapat digunakan oleh para anggota untuk secara proaktif mendemonstrasikan komitmen mereka terhadap minyak sawit yang berkelanjutan serta produk-produk lainnya yang berasal dari minyak sawit berkelanjutan. Bahan-bahan dasar yang dapat mencantumkan merek dagang RSPO harus bersumber dan sesuai dengan satu atau lebih dari tiga sistem rantai pasok yaitu *Preserved*, *Segregated* dan *Mass Balanced*. Merk dagang RSPO saat ini terdaftar di lebih dari 60 negara di seluruh dunia, termasuk di dalamnya pasar-pasar minyak sawit utama.

2. Munculnya Indonesian Sustainable Palm Oil

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Soeharto (2010), kalangan pemerintah Indonesia merasa perlu untuk menjawab berbagai tekanan dan searangan yang telah ditujukan kepada sektor minyak sawit Indonesia dari berbagai pihak seperti kalangan LSM, permintaan yang ketat dari RSPO dan kondisi yang diberlakukan oleh negara-negara Uni Eropa. Negara-negara Uni Eropa telah mengeluarkan EU Directive dalam mendorong penggunaan sumber-sumber energi terbarukan dalam Directive 2001/77/EC and 2003/30/EC (EURED).

Bila mengacu pada RSPO, perkebunan baru yang dibuka setelah tahun 2007 tidak diperbolehkan berada di kawasan hutan primer dan lahan gambut serta harus menjaga HCV (*High Conservation Value*) sementara EU Renewable Energy Directive juga mempersyaratkan kriteria-kriteria untuk penggunaan kelapa sawit sebagai bahan baku untuk produksi biofuel di mana minyak sawit

tidak boleh diproduksi dari perkebunan yang dibuka setelah tahun 2008 di lahan yang mengandung keanekaragaman hayati tinggi dan stok karbon tinggi.

EU juga menetapkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 35% per tahun 2017, dan 60% per tahun 2020. Biodiesel dari minyak sawit bersama-sama dengan minyak kedelai tidak memenuhi persyaratan ini karena penghematan emisi hanya mencapai 19%. Belakangan EU Directive menambahkan persyaratan tentang Land Use Change (LUC) dan Indirect Land Use Change (ILUC).

Secara domestik, pemerintah Indonesia juga berusaha mencapai target yang dinyatakan dalam Konferensi Kopenhagen (Desember 2009) mengenai penurunan emisi GRK sampai 26%, dan kalau ada bantuan dari negara maju akan menambah targetnya mencapai 41%. Di samping itu pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia setuju untuk kerjasama dalam mengurangi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan yang tidak memperbolehkan pembukaan lahan baru selama 2011-2013. Moratorium pembukaan hutan ini diperpanjang sampai 2015 dan kemudian diperpanjang lagi sampai 2017, walaupun pemerintahan sudah berganti.

Dalam mendukung pencapaian-pencapaian di atas, dipandang perlu untuk meningkatkan kesadaran dari para produsen minyak sawit untuk mempercepat pelaksanaan sistem produksi yang berkelanjutan di satu sisi, namun di sisi lain mampu meningkatkan daya saing dan mengurangi emisi GRK dari pembukaan dan operasi perkebunan kelapa sawit di Indonesia. RSPO sebagai organisasi yang terlalu besar dianggap terlalu lamban, terutama di mana anggota dari Indonesia tidak sampai 5% dari jumlah perkebunan di Indonesia yang mencapai lebih dari 2000 unit.

ISPO berupaya untuk mencari terobosan dengan tidak mengenakan biaya keanggotaan dan mencari cara biaya sertifikasi yang tidak mahal. Persyaratan dan kondisi ISPO ditentukan serupa dengan sistem pengawasan lingkungan lainnya, dengan berdasarkan berbagai kerangka kebijakan yang berlaku dari Kementerian Pertanian, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Pertanahan Nasional.

Penilaian sertifikasi ISPO dimulai dengan penilaian usaha perkebunan menurut Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 7 tahun 2009.

Perkebunan yang masuk dalam kelas I,II dan III dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan audit sementara yang masuk kelas IV dan V masih harus dievaluasi lebih lanjut. Untuk perkebunan-perkebunan yang tidak menunjukkan kemajuan dalam pemenuhan berbagai persyaratan yang diminta dalam jangka waktu 3 tahun dapat diturunkan kelasnya menjadi kelas IV dan V.

Selanjutnya, dalam presentasi Direktur Tanaman Tahunan Kementerian Pertanian (2011), dijelaskan bahwa dengan maksud agar mengikat secara utuh untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit secara lestari/berkelanjutan, maka ketentuan terkait diikat dalam satu ketentuan. ISPO sebagai ketentuan tersebut diterbitkan melalui Permentan no.19/Permentan/Ot.140/3/2011 yang sudah diperbaharui dengan 11/Permentan/Ot.140/3/2015 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil /ISPO).

Penerapan ISPO adalah penerapan semua ketentuan terkait yang berlaku di Indonesia. ISPO bersifat *mandatory*, wajib dipatuhi seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit (Perkebunan Besar/Perusahaan dan Perkebunan Rakyat/Petani), akan ditindak bagi yang melanggar. ISPO secara resmi berlaku mulai Maret 2012 dengan target awal bahwa pada tahun 2014 semua kebun sudah harus disertifikasi. Namun demikian dengan berjalannya proses sertifikasi, terungkap bahwa banyak sekali peraturan-peraturan yang tidak ditaati sehingga sampai akhir 2014 belum sampai 70 perkebunan sawit sudah memperoleh sertifikasi. Demikian juga untuk P&C perkebunan rakyat swadaya, baru keluar pada bulan Maret 2015.

ISPO meliputi 7 prinsip, 39 (41) kriteria dan 128 indikator. Ketujuh prinsip tersebut ialah:

1. Sistem perizinan dan manajemen perkebunan;
2. Penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit;
3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
4. Tanggung jawab terhadap pekerja;
5. Tanggung jawab sosial dan komunitas;
6. Pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan

Perkebunan kelapa sawit yang telah disertifikasi berdasarkan standar-standar lainnya seperti RSPO dapat memperoleh kemudahan, dengan persyaratan:

- Memenuhi kriteria klasifikasi perkebunan kelas I, II dan III
- Tim ISPO akan memeriksa hasil audit terakhir
- Audit akan dilaksanakan pada kriteria-kriteria yang ada dalam ISPO namun tidak tercakup dalam sertifikasi yang telah dilaksanakan.

ISPO merupakan persyaratan yang sifatnya wajib. Sehingga, ketidaktaatan akan membawa sanksi hukum berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Sistem ISPO juga diakui oleh WTO serta berbagai perjanjian multilateral atau bilateral dengan para pembeli untuk memperoleh jaminan pasar.

Pada awal bulan Oktober 2011, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) secara resmi menarik diri dari RSPO untuk lebih fokus mendukung ISPO. Sebelumnya, GAPKI terlibat sebagai anggota RSPO yang dipandang menjadi hambatan bagi banyak anggota GAPKI yang tidak berpartisipasi dalam RSPO.

3. Munculnya Standar-standar Lainnya

Menurut informasi dari website ISCC (<http://www.iscc-system.org/en/>), ISCC merupakan inisiatif untuk memenuhi EU Renewable Energy Directive (RED 2009/28/EC) yang menetapkan penurunan emisi GRK di Eropa untuk penggunaan biomassa dan biofuel menuntut adanya sistem sertifikasi yang sesuai untuk tujuan ini. Sertifikasi ISCC membuktikan bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk biofuel dan biomassa memenuhi persyaratan yang dituntut oleh Directive tersebut.

Dalam EU Directive tersebut, ditargetkan bahwa sampai 2017 emisi CO₂ harus dikurangi 35% dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Pada tahun 2017, angka target ini meningkat menjadi 50% dan setelah 2017 menjadi 60%.

ISCC merupakan sistem sertifikasi yang didorong oleh German Federal Agency for Agriculture and Food (BLE), namun dapat dipandang sebagai sistem global karena sertifikasi ISCC dapat berlangsung di negara-negara Eropa dan berbagai negara lainnya di mana biofuel dapat dibeli dari negara-negara ini dan dijual di Eropa dengan mematuhi EU Renewable Directive. ISCC berdasarkan pada dua kriteria yaitu:

- Bukti *sustainability* dari biomassa: yaitu tidak diproduksi dari wilayah-wilayah yang tidak diperbolehkan, *sustainability* produksi dan operasi, serta *sustainability* sosial.
- Pengurangan emisi GRK: biofuel dan bio-liquid harus menghasilkan pengurangan emisi GRK paling sedikit sebanyak 35%
- Lacak balak (*traceability*) dan *mass balance* harus dapat dijamin

Wilayah yang tidak diperbolehkan ialah area-area dengan keanekaragaman hayati atau stok karbon yang tinggi. Komunikasi yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa pada bulan Juni 2010 menyatakan bahwa bahan mentah tidak boleh berasal dari lahan basah (*wetlands*), daerah-daerah yang terus menerus dibuka hutannya, daerah-daerah dengan tutupan kanopi 10-30%, ataupun dari lahan gambut. Komisi Eropa juga sedang mempersiapkan kriteria dan jangkauan geografis untuk menentukan lahan-lahan berumput yang dianggap mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi.

Untuk fasilitas pengolahan biofuel yang tidak bisa memenuhi persyaratan pengurangan emisi GRK 35% masih dapat memperoleh sertifikat asal dilakukan perhitungan GRK untuk fasilitas tersebut dan hasilnya menunjukkan pengurangan emisi minimum 35%.

Traceability dinyatakan dalam asal-muasal, kuantitas dan emisi GRK terkait dari biomassa, biofuel dan bioliquid yang harus dinyatakan dalam setiap tingkatan rantai pasok melalui sistem yang memungkinkan *traceability* terlacak. Pencampuran biomassa, bioliquid dan biofuel yang *sustainable* dan *non-sustainable* dimungkinkan sejauh bahan-bahan yang dicampur tidak melebihi nilai emisi GRK yang diizinkan.

02

HIVOS DAN ISU SAWIT BERKELANJUTAN



“

Hivos mengambil keputusan mendukung kerja-kerja masyarakat sipil di sektor sawit. Pertama-tama fokus dukungan ini ialah program advokasi hak masyarakat petani sawit kecil dan terdampak oleh sawit.

”

Posisi Hivos sebagai Lembaga Pendukung Petani

MEMASUKI TAHUN 2000-AN, Hivos mengusung makalah posisi yang berjudul “Civil Voices on a Global Stage” di mana Hivos meletakkan pemikiran dasar pada perlunya ‘suara’ kaum miskin dan orang-orang yang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan kehidupan dan kesempatan mereka.

Asumsi Hivos ialah proses pengambilan keputusan yang semakin inklusif dan transparan pada tingkat nasional dan internasional akan menuju kepada hasil yang lebih adil terhadap kaum miskin dan terpinggirkan serta kepada terciptanya pembangunan dunia yang lebih berkelanjutan secara keseluruhan. Hivos – bersama dan melalui para mitra dan aliansinya – memfokuskan diri pada siklus: akses → keterwakilan → pengambilan keputusan → akses untuk tiap tahapannya.

Untuk memfokuskan diri pada siklus tersebut, Hivos memutuskan untuk mengambil spesialisasi pada dua ranah kebijakan utama yaitu Civil Society Building (CSB) dan Economy and Sustainable Development (ESD). CSB berfokus pada penguatan dan pengkondisian proses pengambilan keputusan yang demokratis, seperti dimandatkan oleh perjanjian-perjanjian internasional dan peraturan-peraturan nasional dengan pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*).

Sementara ESD berfokus pada aspek ekonomi pada pembangunan dengan perspektif *sustainability* sosial dan lingkungan yang ditujukan kepada kelompok sasaran yaitu kelompok-kelompok miskin dan terpinggirkan di negara-negara berkembang. Kelompok-kelompok ini terintegrasi dengan pasar dan oleh karenanya pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan yang berbasis pasar, di mana berbagai elemen pembangunan masyarakat sipil dan pemberdayaan didekati dengan perspektif pasar.

Hivos melihat bahwa penyebab utama kemiskinan produsen kecil dan buruh di negara-negara berkembang serta penghalang utama untuk bisa memproduksi yang memenuhi tuntutan kualitas disebabkan oleh:

- Kelebihan produksi secara struktural dan harga yang rendah di pasar yang disebabkan oleh subsidi pertanian dan liberalisasi perdagangan sehingga

para produsen kecil menerima pendapatan yang tidak cukup untuk menjaga dan meningkatkan mutu dari proses produksi mereka

- Pasar dan rantai komoditas didominasi oleh produsen skala besar di mana produsen skala kecil dipinggirkan oleh produsen skala besar di pasar nasional dan internasional yang mempunyai akses lebih baik pada modal dan keterampilan.

Seringkali walaupun para produsen kecil dapat memasarkan produk-produk mereka, produsen-produsen kecil seringkali menemukan bahwa pembagian dari pendapatan mereka terhadap nilai akhir terus menurun. Tren ini terus meningkat di mana pola-pola pembangunan cenderung untuk mengakumulasi modal di sentra-sentra produksi dan kelompok-kelompok berpendapatan tinggi sehingga peluang untuk para produsen membalik proses ini sangat kecil.

- Pertumbuhan berdasarkan pada pendekatan-pendekatan yang tidak *sustainable* baik pada sektor industri maupun sektor komoditas primer. Pola-pola konsumsi aktual di negara-negara kaya hanya dapat dijaga dengan tetap terjaganya pendapatan yang sedikit di belahan dunia Selatan.

Memang, berbagai konvensi internasional sudah dibuat untuk hak-hak ekososob, perburuhan, lingkungan hidup dan kaum perempuan—yang juga sudah diratifikasi di hampir semua negara. Selain itu berbagai *code of conducts* berbasis kesukarelaan telah dikembangkan dan ditandatangani oleh sektor bisnis. Namun skema-skema ini tidak secara cukup dilaksanakan sehingga dampak negatif berupa pola pembangunan yang tidak *sustainable* terus berlanjut.

Ditambah lagi bahwa sejumlah kasus dari perjanjian-perjanjian internasional seperti di WTO mendorong munculnya berbagai regulasi yang melemahkan daya tawar negara-negara berkembang dan menghalangi orang untuk mengikuti jalur kepada pembangunan seperti diinginkannya.

- Tidak koherennya perilaku konsumen dan pemerintah seperti rantai produksi yang kurang transparan, ketidaktahuan akan proses yang melatarbelakangi produksi suatu barang atau jasa yang mereka beli, serta keengganan pelanggan untuk membayar lebih mahal pada barang dengan kualitas yang terjamin (dengan sertifikasi).

Pemerintah juga seringkali menunjukkan perilaku yang kontradiktif khususnya antar kementerian misalnya subsidi yang diberikan kepada petani yang menyebabkan harga pasar komoditas di tingkat internasional rendah—yang sebenarnya bertentangan dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang sama dalam meningkatkan sektor pertanian.

- Akses yang terbatas terhadap sumber daya alam, sumber daya genetik, teknologi, keuangan dan pasar menghambat perkembangan potensi produsen kecil.

Trend terbaru ialah bahwa hambatan-hambatan impor untuk produk yang berasal dari negara maju diciptakan dengan pengembangan standar-standar baru, persyaratan kesehatan, *phyto-sanitary* dan keamanan hayati, dan tuntutan pemenuhan standar-standar perburuhan. Berkaitan dengan *trend* ini, Hivos mendorong aspek mutu sebagai strategi untuk mengejar harga lebih baik dan akses pasar untuk produsen skala kecil dengan menyadari bahwa mutu bisa menjadi penghambat juga akses.

Hivos mendukung organisasi-organisasi yang dapat menolong produsen-produsen kecil yang mengembangkan keterampilan dan akses pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan proses penjaminan mutu berdasarkan standar yang diberlakukan di belahan bumi Utara sehingga bisa mencegah proses penjaminan mutu menjadi hambatan bagi produsen-produsen kecil.

Tujuan dari kebijakan Hivos untuk *Sustainable Economic Development* dapat dibagi menjadi dua yaitu (A) fokus pada akses dan (B) fokus pada mutu. Untuk tujuan A, strategi yang dilakukan ialah dengan meningkatkan akses terhadap sumber daya keuangan, sumber daya alam produktif, pasar, teknologi dan keterampilan, serta manfaat dari keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya genetik untuk dapat menuju penciptaan pendapatan secara berkelanjutan.

Untuk tujuan B, strategi yang ditempuh ialah meningkatkan proses produksi berkualitas sehingga produsen kecil dapat terbantu untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai titik impas untuk bisa beroperasi dalam ranah sosial dan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan.

Untuk ini, Hivos mendukung organisasi-organisasi yang dapat menolong para produsen kecil untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk,

meningkatkan bagian nilai tambah untuk para produsen kecil, meningkatkan akses kepada layanan keuangan dan informasi, meningkatkan daya tawar untuk memperoleh bagian yang lebih tinggi dari nilai tambah, serta meningkatkan kapasitas produksi dari sumber daya yang berpengaruh pada pendapatan mereka seperti tanah, hutan dan sumber-sumber air.

Penghargaan kepada dimensi-dimensi sosial menjadi penting untuk menjamin pembangunan dapat berkelanjutan, misalnya dengan menjamin pengupahan dan kondisi perburuhan minimum, melarang eksploitasi anak, serta kepatuhan dari sektor korporasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Perhatian khusus diberikan untuk kesetaraan gender.

Program Hivos

Dalam mewujudkan visi dan misi yang tercantum di atas, Hivos merumuskan langkah-langkah operasionalisasi dalam program. Kerangka kerja program dituliskan dalam dokumen yang disebut dengan *Business Plan*. Pada publikasi ini dibahas berkaitan dengan dua *business plan* yaitu untuk periode 2006-2010 dan 2010-2015.

Pada *Business Plan* 2006-2010, Program Sustainable Economic Development berupaya untuk bisa menghasilkan dampak pengurangan kemiskinan dan adanya penghidupan berkelanjutan untuk orang-orang miskin dan terpinggirkan. Indikator dari program ini ialah peningkatan kondisi penghidupan (terutama pendapatan) dari para produsen skala kecil. Indikator ini akan diupayakan dicapai melalui peningkatan bagian pasar dari produk-produk produsen skala kecil, yaitu melalui:

1. Peningkatan akses pasar untuk produk berkualitas yang dihasilkan oleh kelompok produsen skala kecil.
2. Kaum miskin mempunyai hak atas tanah, air, hasil hutan bukan kayu (NTFP), energi, pasar dan sumberdaya genetik.
3. Promosi atas konsumsi produk hasil dari petani kecil
4. Penguatan basis sumber daya berdasarkan keanekaragaman hayati
5. Peningkatan akses dan kondisi yang memungkinkan untuk berkembangnya sumber-sumber energi baru dan terbarukan.

Mengacu pada *Business Plan 2006-2010*, Program Sustainable Economic Development dari Hivos mendukung mitra yang bekerja dalam isu kelapa sawit berkelanjutan untuk mencapai *outcome* memperjuangkan hak-hak kaum miskin atas air, tanah, produk kehutanan bukan kayu, energi, pasar dan sumber daya genetik. Indikator dari tercapainya *outcome* ini ialah adanya bukti bahwa para pengambil kebijakan dan manajemen dunia usaha menanggapi berbagai tuntutan untuk menghormati atau memberikan hak-hak kaum miskin tersebut di atas.

Output yang hendak diraih ialah penguatan aktor-aktor sipil untuk memperjuangkan hak-hak dan lingkungan yang mendukung perjuangan tersebut. Berkaitan dengan isu petani sawit, di Indonesia jumlah petani kecil kelapa sawit meningkat terus, namun kasus-kasus konflik dan keterbatasan akses petani kecil terhadap sumberdaya yang ada di sepanjang rantai produksi menjadi perhatian yang relevan dengan *output* ini.

Namun demikian untuk pengembangan program di Hivos, diambil perspektif yang berbeda dari sebelumnya terutama karena berdasarkan *Business Plan* ini program Sustainable Economic Development memfokuskan diri bukan hanya untuk isu kemiskinan dan perjuangan hak, tapi bagaimana membuka akses yang lebih besar dalam hubungan pasar.

Setelah tahun 2010 *Business Plan 2011-2015* berlaku dan menjadi acuan dari Program Green Entrepreneurship. Secara mendasar, *Business Plan 2011-2015* mempunyai semangat melanjutkan arah program yang telah diletakkan oleh *Business Plan 2006-2010*. Untuk Program Green Entrepreneurship, sasaran yang hendak dituju ialah meningkatnya posisi secara ekonomi dari orang miskin, laki-laki dan perempuan terpinggirkan sedemikian rupa sehingga mereka dapat berpartisipasi dengan kemampuan penuh.

Business Plan 2011-2015 mempunyai kelompok sasaran spesifik yaitu laki-laki dan perempuan pengusaha di daerah pedesaan, terutama produsen skala kecil (L/P) dan perempuan di dalam peran ekonomi selain dari produsen. Ada tujuh tema kegiatan yang dipilih dalam menjalankan Program Green Entrepreneurship ini yaitu:

1. Memfasilitasi pembentukan organisasi kelompok produsen skala kecil dalam organisasi produsen, kelompok simpan dan lain-lain.

2. Memperkuat kapasitas kewirausahaan kelompok produsen, kelompok perempuan dan UKM melalui penyediaan informasi, pelatihan manajemen mutu, pengembangan kepemimpinan dan layanan bisnis (BDS).
3. Penyediaan modal dan dukungan dari LKM
4. Memfasilitasi hubungan/kontak dengan pelaku pasar
5. Penguatan kapasitas produsen skala kecil (L/P), perempuan dan UKM melalui pengembangan pengetahuan & pelatihan untuk memperkuat sumberdaya berbasis keanekaragaman hayati dan berkelanjutan, metode produksi yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim
6. Promosi dan pemasaran energi yang berkelanjutan serta pelatihan bagi pengguna (terutama perempuan)
7. Memfasilitasi akses pembiayaan untuk dan pemantauan kualitas dari instalasi energi berkelanjutan

Mengacu pada *Business Plan* 2011-2015 ini, semua program ditujukan untuk memperkuat basis, dukungan dan lingkungan pendukung yang mendorong berkembangnya kegiatan-kegiatan kewirausahaan dari para produsen kecil. Berkaitan dengan dukungan kepada isu kelapa sawit, fokus diberikan kepada para petani swadaya yang menghadapi masalah keterbatasan akses dalam pengetahuan produksi, *input* dan modal. Pendekatannya ialah dengan memperkuat kelembagaan di satu sisi, sementara di sisi lain ialah memperkuat mitra lokal untuk menjadi *Business Development Services* (BDS) yang tugasnya membantu perkembangan kelompok produsen kecil ini untuk bisa lebih berperan dalam rantai komoditas sawit secara global.

Dukungan Hivos untuk Isu Sawit

Sebagai organisasi yang mempunyai sejarah panjang untuk mendukung petani kecil dan pergerakan sosial, adalah strategis bagi Hivos untuk berkontribusi mendukung isu sawit berkelanjutan. Perkebunan sawit di berbagai negara melibatkan para petani kecil. Di negara-negara asal tanaman sawit seperti Ghana, sawit merupakan tanaman pekarangan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Petani kecil memegang peran yang penting dalam rantai komoditas sawit di Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia, petani sawit diorganisasikan dalam Felda untuk meningkatkan kesejahteraan para petani kecil dan mengurangi kesenjangan perekonomian antar etnis. Secara terorganisir Felda meningkatkan peran petani kecil dalam rantai komoditas sawit di Malaysia. Demikian juga di Thailand yang belum dua dekade ini mengembangkan sawit, 80% dari lahan perkebunan sawit merupakan milik petani kecil.

Di Indonesia, petani kecil dikondisikan menjadi bagian dari rantai komoditas sawit sehubungan dengan kesadaran bahwa sawit sangat potensial untuk mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dalam program PIR. Perubahan yang sangat mendasar terjadi dalam peta perkebunan sawit di Indonesia, sampai sekitar tahun 1980-an awal hanya ada perkebunan-perkebunan besar yang memproduksi tandan sawit. Namun dengan adanya pola PIR maka perkebunan rakyat mulai memproduksi tandan sawit.

Jumlah perkebunan rakyat pun terus meningkat dengan permintaan yang meningkat dari minyak sawit dari pasar internasional. Sampai saat sekarang diperkirakan bahwa perkebunan rakyat mencapai sekitar 43% dari seluruh total areal perkebunan sawit di Indonesia.

Namun demikian, berbagai masalah dihadapi para petani sawit yang bergabung sebagai aktor rantai komoditas sawit. Masalah-masalah tersebut seperti berikut ini:

1. Para petani sawit yang bergabung dalam skema PIR menjadi petani plasma kadang mengungkapkan kekecewaannya sehubungan hal-hal yang mereka rasakan kurang adil. Salah satu contohnya ialah pada penentuan harga. Harga sawit ditentukan dengan formula yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 395/2005 yaitu:

$$H_{TBS} = k \{ (H_{ms} \times R_{ms}) + (H_{is} + R_{is}) \}$$

di mana:

H_p = harga TBS yang diterima oleh Pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam rupiah per kilogram

K = indeks proporsi dalam persentase yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%)

H_m = harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam rupiah per kilogram

R_{ms} = Rendemen minyak sawit kasar (CPO), dinyatakan dalam persentase (%)

H_{is} = Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam rupiah per kilogram

R_i = Rendemen inti sawit (PK), dinyatakan dalam persentase (%)

Harga pembelian TBS ditetapkan minimal satu kali setiap bulan berdasarkan harga real rata-rata tertimbang minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) sesuai realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan. Besarnya indeks “k” ditetapkan minimum satu kali setiap bulan oleh Gubernur Cq Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perkebunan berdasarkan usulan Team Penetapan Harga Pembelian TBS.

Namun demikian, kadang petani melihat bahwa pertimbangan dalam penetapan indeks “k” kurang memerhatikan aspirasi dan kepentingan mereka. Mungkin ada benarnya mengingat lemahnya daya tawar dari petani, apalagi keberadaan organisasi petani yang kuat masih belum terwujud sampai saat ini. Sementara pihak perusahaan lebih kuat dalam mengembangkan komunikasi dengan para pembuat kebijakan.

2. Kebun petani kecil biasanya produktivitas dan mutunya kurang begitu baik. Hal ini karena mereka banyak menanam dari bibit yang kurang baik, bahkan dari bibit jatuh yang tumbuh (“mariles”). Dengan bibit yang kurang baik, waktu yang diperlukan pohon untuk bisa panen menjadi lebih lama (bisa mencapai 7 tahun, padahal dengan bibit yang baik hanya perlu 4-5 tahun saja).

Bibit yang kurang baik juga produktivitasnya rendah, bahkan ada beberapa pohon yang lebih dominan sifat ‘pejantan’-nya sehingga hanya berbunga tanpa menghasilkan buah. Bibit yang baik harus dibeli dalam partai besar di mana kalau hanya beberapa orang petani yang membeli dipastikan akan terlalu banyak; dalam hal petani swadaya yang banyaknya

ialah mengusahakan secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil. Selain itu pembelian harus disertai oleh status kelembagaan yang jelas dari para petani, di mana umumnya petani swadaya tidak terlibat dalam badan usaha yang mempunyai status legal formal seperti KUD.

3. Para petani swadaya juga tidak memberikan *input* yang memadai kepada kebun mereka. Salah satu masalah yang utama ialah kekurangan pemupukan, sementara pupuk kadang sulit diperoleh di mana kelangkaan pupuk terus menghantui para petani di seantero Indonesia. Pupuk yang mutunya baik harganya mahal, sementara mutu pupuk pun beragam dan bahkan banyak beredar pupuk palsu juga.

Di samping itu pengetahuan tentang pengelolaan kebun yang baik juga masih terbatas. Bagi petani plasma dan petani yang masuk pola kemitraan mungkin tidak menjadi masalah besar karena tenaga penyuluh dari perusahaan masih berkunjung mendampingi mereka. Sementara tenaga penyuluh perkebunan pemerintah minim dan lebih banyak terikat pada tugas-tugas di pemerintahan kabupaten yang setelah era otonomi daerah tidak terkoordinasi langsung lagi dengan kementerian.

4. Petani kecil yang tidak tergabung dalam skema inti-plasma (atau petani swadaya) biasanya menjual TBS melalui para pedagang perantara. Di tingkat pedagang perantara ini kadang timbul ketidakpuasan mengenai faktor harga dan kualitas. Pedagang perantara kadang juga bermain mata dengan para mandor untuk mengambil keuntungan dari skema perdagangan ini, dengan cara-cara yang kadang merugikan para petani di luar plasma.

Petani yang tidak ikut sistem inti-plasma daya tawarnya lebih rendah dibandingkan dengan para petani plasma, biasanya mereka menerima harga paling rendah setelah para petani plasma dan para petani kemitraan. Namun demikian dari sisi kualitas, kadang memang harus diakui bahwa produk petani swadaya masih kalah dengan petani plasma dan kemitraan sehingga memperoleh penilaian harga yang lebih rendah.

5. Status lahan petani kecil kadang juga lemah misalnya menurut peta pemerintah pusat masuk ke kawasan hutan ataupun berada di kawasan perkebunan besar. Dalam kondisi seperti ini, sering kali kalau dipermasalahkan para petani kecil lebih kecil kemungkinannya untuk memenangkan

kasus. Apalagi dalam beberapa kasus para petani kecil menghadapi pendekatan kekerasan yang melibatkan aparat. Lebih lanjut, kadang hal ini memicu rasa diperlakukan tidak adil karena biasanya masalah dengan petani kecil akan berlarut-larut.

6. Sebagian petani kecil banyak yang melakukan ekspansi ke lahan yang bisa mereka akses dengan mudah, misalnya lahan gambut, lahan di dataran tinggi, maupun lahan yang ditetapkan sebagai penggunaan lain (hutan, produksi pangan atau lainnya). Lahan-lahan ini kadang kualitasnya kurang baik sehingga buah yang dihasilkan oleh kebun para petani kecil pun kualitasnya kurang baik.
7. Lemahnya pengorganisasian petani kecil juga berakibat pada kesulitan dalam mengakses modal. Lembaga keuangan dalam mengurangi risiko lebih memilih memberikan fasilitas pendanaan pada kelompok berbadan hukum yang kuat atau pengusaha.

Selain petani kecil, rantai komoditas sawit juga berpengaruh signifikan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat. Banyak dari antara mereka tidak mempunyai pilihan karena perubahan lanskap di sekitar mereka, padahal belum tentu masyarakat asli ini cocok untuk bekerja di sektor perkebunan. Minimnya upaya mempertimbangkan aspek-aspek sosial budaya untuk menyambungkan kehidupan masyarakat asli dengan kehidupan sektor perkebunan memicu terjadinya berbagai konflik dari masyarakat asli yang terpinggirkan dan kehilangan kehidupan sementara perkebunan yang berhasil melakukan akumulasi modal terus berkembang dan memperoleh akses terhadap lahan.

Peluang terjadinya konflik semakin meningkat dengan beroperasinya berbagai perusahaan skala menengah yang mampu menguasai lahan sekitar puluhan sampai ratusan hektar. Perusahaan-perusahaan ini kadangkala juga bekerja sama dengan petani kecil dalam mengupayakan pembukaan lahan sawit. Ada yang melakukan kerjasama dengan petani dengan memberikan bibit dan pupuk untuk lahan yang dibuka. Setelah berkembang, kerjasama ini bisa terus berlanjut dalam hubungan petani dengan pedagang perantara, maupun petani akhirnya menjual lahan tersebut kepada perusahaan-perusahaan ini.

Tanaman sawit, sebagai tanaman yang banyak menyerap air, mengakibatkan perubahan hidrologis dari daerah sekitar. Perubahan hidrologis ini mengakibatkan masyarakat semakin sulit memperoleh air, baik untuk kebutuhan sehari-hari apalagi untuk penghidupannya. Merupakan hal yang lazim ditemui di sekitar kawasan kebun sawit bahwa makin sulit sawah-sawah memperoleh air. Demikian juga usaha-usaha seperti perikanan darat pun menghadapi kelangkaan air. Kondisi berkurangnya cadangan air ini memicu kerentanan dari penghidupan masyarakat sekitar yang tergantung pada sumber air.

Di samping itu, kehilangan keanekaragaman hayati terjadi secara luas pada daerah-daerah perkebunan sawit. Sawit yang merupakan tanaman perkebunan dengan berkembang dengan pesat di berbagai daerah telah meningkatkan pembukaan hutan. Masalahnya, perkebunan sawit tidak dapat mendukung terjaganya berbagai spesies untuk hidup. Selain itu terjadi fragmentasi habitat dengan adanya perkebunan sawit yang memotong jalur-jalur pencarian makan hewan liar, serta diperbaikinya infrastruktur transportasi yang memungkinkan makin banyak dilakukan pengangkutan berbagai hasil hutan yang akan mendorong lebih intensifnya lagi pembukaan hutan.

Di Indonesia, bersamaan dengan ketidakjelasan kepemilikan lahan dan korupsi yang makin merajalela dengan pelaksanaan otonomi daerah, pembukaan hutan menjadi marak terjadi di mana-mana. Kebun sawit biasanya muncul akhirnya menggantikan hutan yang sebelumnya sudah dirusak oleh kebakaran dan pembabatan liar. Perkebunan sawit juga berkembang di kawasan-kawasan konservasi. Kehilangan keanekaragaman hayati ini bisa mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang tergantung sumber daya hutan yang beranekaragam.

Berbagai masalah yang ditimbulkan oleh sawit ini sejalan dengan keprihatinan Hivos akan berbagai ancaman terhadap penghidupan masyarakat dan hal-hal yang bisa mengakibatkan terpinggirnnya masyarakat dan mendorong masyarakat ke jurang kemiskinan. Keterpinggiran dan kemiskinan ini terjadi karena masyarakat yang tadinya hidup secara subsisten terganggu pola penghidupannya. Penghidupan mereka terancam karena perubahan geografis yang terjadi di sekitarnya. Mereka tidak mampu menghadapi perubahan tersebut. Di sisi lain, ada juga para petani yang mampu memperoleh kesempatan

dari perkembangan komoditas sawit. Namun demikian, peluang mereka untuk lompat dari jurang kemiskinan juga terbatas karena pengetahuan dan modal yang mereka miliki terbatas.

Memang, komoditas sawit telah terbukti bisa meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah-daerah terpencil di seantero Indonesia. Banyak petani kecil sekarang sudah menjadi sangat sejahtera karena berkah dari komoditas sawit. Namun di tengah berbagai cerita sukses tadi, banyak juga petani yang tidak beruntung. Kebun mereka produktivitasnya rendah karena bibit yang dipakai kurang baik. Pengetahuan budidaya mereka juga terbatas. Kadang juga lahan yang mereka miliki sebetulnya kurang baik untuk lahan sawit seperti lahan gambut, yang tidak mungkin dilakukan karena memerlukan teknologi dan biaya yang lebih untuk bisa melakukan konversi menjadi kebun yang baik.

Apalagi dengan persyaratan mengenai *sustainability* yang mengemuka akhir-akhir ini. Berbagai persyaratan tersebut menuntut penyesuaian praktik budidaya dari kalangan petani. Tanpa perubahan praktik budidaya, produk para petani ini akan termasuk produk yang tidak bisa menembus pasar dengan diberlakukannya syarat-syarat baru tersebut. Di sisi lain, penerapan aspek-aspek *sustainability* secara teoritis akan mampu meningkatkan produktivitas petani karena praktik-praktik yang dijalankan diarahkan untuk semakin harmonis dengan lingkungan.

Dalam mengaplikasikan praktik-praktik *sustainability*, tidak terlepas dari masalah utama yaitu lemahnya pengorganisasian di kalangan petani. Berbagai koperasi yang dikembangkan di masa lalu banyak yang perkembangannya stagnan. Lembaga-lembaga lain seperti kelompok tani dan gapoktan pun kurang bisa berkembang baik. Padahal berbagai peluang mensyaratkan adanya skala yang memadai untuk bisa diakses. Contohnya adanya jumlah minimum pembelian bibit dan pupuk, peluang kerjasama yang harus ditandatangani dengan lembaga perekonomian modern, serta pendampingan akan dilaksanakan untuk sejumlah orang di tingkat basis. Selain itu, akses pendanaan secara umum tersedia untuk kelompok.

Dengan hal-hal ini, Hivos mengambil keputusan untuk mendukung kerja-kerja masyarakat sipil di sektor sawit. Pertama-tama fokus dukungan ini

ialah untuk program advokasi hak untuk masyarakat petani sawit kecil dan terdampak oleh sawit. Dalam perkembangannya, dengan diberlakukannya pendekatan berbasis standar oleh para pemangku kepentingan sawit, Hivos memfasilitasi lembaga-lembaga yang mempunyai kemampuan di bidang standar dan lembaga pendamping petani sawit. Dalam menjembatani hal ini, Hivos mencoba mendekati isu sawit berkelanjutan melalui pendekatan penjaminan mutu seperti dijelaskan pada bab berikut.

Hivos Mendukung Masyarakat Sipil dalam Advokasi Masyarakat Terdampak Sawit

Bersama-sama dengan beberapa organisasi lain, Hivos mulai mendukung pekerjaan lembaga masyarakat sipil untuk isu sawit pada tahun 2004. Pada saat itu Hivos ikut serta dalam aliansi dengan lembaga-lembaga Belanda yaitu DOEN, IUCN-Netherlands dan SSNC untuk mendanai Sawit Watch. Berdasarkan informasi pada *website* Sawit Watch,¹ Sawit Watch adalah organisasi nonpemerintah di Indonesia berbasis keanggotaan individu yang prihatin terhadap dampak-dampak negatif sistem perkebunan besar kelapa sawit.

Sawit Watch didirikan pada tahun 1998 dan sampai saat ini sudah berjejaring dengan 50 mitra lokal yang menangani langsung lebih dari 40.000 kepala keluarga yang terkena dampak perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia. Tercatat, sampai tahun 2011 Sawit Watch memiliki 135 anggota yang terdiri atas pekebun, buruh kebun, masyarakat adat, aktivis ornop, wakil rakyat, guru, dan akademisi di perguruan tinggi.

Tujuan dibentuknya Sawit Watch ialah untuk mewujudkan perubahan sosial bagi petani, buruh, dan masyarakat adat/lokal menuju keadilan ekologis. Dalam mencapai tujuan tersebut, Sawit Watch melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:

- Melakukan kajian terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan pengelolaan perkebunan besar kelapa sawit dan dampaknya terhadap petani, buruh dan masyarakat adat.

1 <http://sawitwatch.or.id/>

- Memantau praktik-praktik pembangunan perkebunan kelapa sawit serta aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan lembaga keuangan pemberi kredit.
- Membangun ekonomi alternatif atas model perkebunan kelapa sawit skala besar.
- Memfasilitasi terbangunnya resolusi konflik akibat pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit skala besar.
- Mendorong terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak kepada petani, buruh dan masyarakat adat.
- Melakukan pendidikan publik untuk mendorong model-model pembangunan berbasis lingkungan hidup.
- Melakukan promosi, pendidikan publik, dan kampanye untuk pencapaian keadilan ekologis.
- Memfasilitasi masyarakat untuk melakukan dialog dengan pemerintah, parlemen dan dunia usaha dalam rangka penyelesaian konflik dan perubahan kebijakan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
- Melakukan penguatan kapasitas anggota dan pengembangan organisasi.

Visi dan misi Sawit Watch, sebagaimana tercantum dalam AD/ART Perkumpulan Sawit Watch Pada BAB III Pasal 7 dan Pasal 8, yaitu:

Visi: terwujudnya kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan serta penguasaan sumberdaya alam secara adil dan lestari.

Misi:

- 1) Mendorong meningkatnya posisi tawar petani dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
- 2) Mendorong penyelesaian konflik-konflik perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
- 3) Mendorong terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.

1. Dukungan Tahap Awal (2004-2006)

Program Sawit Watch yang didukung oleh Hivos merupakan bagian dari proposal berjudul: "Providing an Equal Balance: Community Networking and Campaign Program on Oil Palm Plantation Development in Indonesia."

Proposal ini bertujuan untuk meningkatkan daya tawar dari masyarakat yang terkena dampak perkebunan sawit dalam hal akses ke lahan, penentuan nasib sendiri dalam memilih jalan pembangunan, perlakuan yang adil dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan melalui ekspansi dan penguatan jejaring Sawit Watch, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Program yang dikembangkan ini berupaya untuk mencapai *output*:

1. Terhubungnya 150 masyarakat lokal (sekitar 75.000 keluarga) dan 100 lembaga pendamping lokal di Indonesia melalui jejaring Sawit Watch.
2. Sedikitnya 40 kasus yang melibatkan komunitas lokal dalam mempertahankan hak-hak dan keinginan-keinginannya melalui cara-cara non-kekerasan didampingi oleh jejaring Sawit Watch.
3. Memberikan masukan kepada lembaga-lembaga nasional dan tingkat kabupaten/provinsi sehingga menghasilkan peningkatan secara nyata dalam rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama dalam perumusan UU Perkebunan yang baru dan the Netherlands-Malaysia-Indonesia Partnership for Market Access for Palm Oil.
4. Memberikan masukan yang dapat terlihat dalam perumusan kebijakan investor nasional dan internasional, kebijakan pembelian dari para importir minyak sawit dan organisasi-organisasi yang hendak mengembangkan proyek-proyek *green palm oil*.
5. Perluasan jejaring Sawit Watch pada tingkat lokal, nasional dan internasional dengan para petani, buruh, gerakan perempuan dan pembangunan, serta membantu organisasi-organisasi ini melakukan negosiasi, lobi dan kampanye.
6. Mengembangkan jejaring masyarakat terdampak dan organisasi-organisasi yang bisa mewakili para korban di sedikitnya 3 kabupaten Papua Barat serta mempromosikan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan masyarakat-masyarakat lain di Indonesia (dan kemungkinan di Papua New Guinea).
7. Memfasilitasi 14 organisasi yang merepresentasikan masyarakat lokal dari tujuh provinsi untuk mempelajari keberhasilan mekanisme simpan pinjam berbasis masyarakat di Kalimantan Barat.

8. Sawit Watch mengidentifikasi setidaknya 5 potensi *pilot project* untuk manajemen kebun berbasis masyarakat atau kehutanan masyarakat dan mendukung masyarakat yang terlibat untuk mengembangkan rencana aksi.

Pendekatan yang digunakan oleh Sawit Watch ialah pendekatan berbasis kelompok-kelompok yang terlibat langsung dan terdampak oleh perkembangan sawit di Indonesia, yaitu:

- Masyarakat yang hidup atau penghidupannya bergantung pada perkebunan sawit (seperti para petani sawit, buruh, dan lain-lain).
- Masyarakat di luar perkebunan sawit (seperti masyarakat adat yang terancam atau kehilangan haknya atas tanah, sumber daya hutan, dan lain-lain.)

Pada saat itu, kerja-kerja Sawit Watch lebih mengarah pada kelompok kedua, namun adanya program ini diharapkan bisa memperluas kerja-kerja Sawit Watch kepada kelompok pertama.

Sementara itu, pembelajaran dari Program Equal Balance ini ialah:

- Berkembangnya keanggotaan dan jejaring masyarakat sipil telah meningkatkan kepercayaan dari para donatur, serta mengembangkan kontak dengan industri dan pemerintah baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- Sawit Watch dapat meningkatkan posisinya di tengah diskusi tentang *sustainability* pada sektor kelapa sawit dan mampu memberikan *input-input* yang penting terhadap pengembangan kriteria sosial dalam RSPO Criteria Working Group serta kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pembeli dan investor minyak swait.
- Perjuangan yang dilakukan oleh Sawit Watch telah memperlihatkan hasil dalam meningkatkan isu penggunaan lahan dan praktik-praktik manajemen perkebunan, kebijakan yang lebih adil serta pelaksanaan *good governance*.
- Makin diperhitungkannya Sawit Watch oleh pemerintah dan industri dalam isu masyarakat dan petani kecil.

2. Dukungan Tahap Kedua (2006-2007)

Dukungan untuk Sawit Watch berlanjut pada tahap kedua yaitu pada tahun 2006. Dukungan ini sifatnya jangka pendek karena bertujuan untuk menjembatani dukungan yang sudah dilakukan sebelumnya, sementara proposal baru masih dikembangkan. Dalam dukungan ini, pada pokoknya ialah melanjutkan dukungan yang sudah diberikan pada Sawit Watch sejak tahun 2004 dengan mengacu pada proposal yang sama yaitu Equal Balance.

Pada saat pelaksanaan program ini, ada upaya melakukan *fundraising* ke European Union Commission untuk mendukung program jangka panjang Sawit Watch berikutnya. Namun demikian upaya ini gagal. *Concept paper program* diterima oleh European Union, namun pengembangannya menjadi proposal kurang begitu berhasil, terutama pada aspek keuangan.

3. Dukungan Tahap Ketiga (2007-2009)

Selanjutnya, pada tahap berikutnya Hivos mendukung proposal yang dikembangkan oleh Sawit Watch untuk tahun 2007-2009 yang berjudul: “Providing an Equal Balance 2007-2009 (EB II): Community Networking and Campaign Program on Oil Palm Plantations in Indonesia”.

Sasaran besar dari program Equal Balance II ialah menjamin bahwa masyarakat terdampak perkebunan sawit—termasuk petani kecil—mempunyai daya tawar yang cukup dalam perjuangan mereka untuk mengakses lahan, penentuan nasib sendiri dalam pembangunan, perlakuan adil dan sumber daya berkelanjutan melalui ekspansi dan penguatan jejaring Sawit Watch pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Ada empat tujuan yang hendak dicapai oleh Program Equal Balance II, yaitu:

1. Memfasilitasi kelompok-kelompok sasaran dan mitra-mitra utama Sawit Watch dalam mengorganisasikan kekuatan bersama untuk mendorong kebijakan dan pengelolaan kebun sawit secara lebih adil.
2. Memengaruhi dunia usaha dan pemerintah agar bisa menerima dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik yang lebih bertanggung jawab dan berkeadilan sosial.

3. Mendukung masyarakat lokal dan petani dalam mengembangkan pendekatan-pendekatan alternatif terhadap perkebunan kelapa sawit dan penggunaan lahan untuk kebun sawit.
4. Mengembangkan lebih lanjut Sawit Watch menjadi organisasi yang dikelola dengan baik, profesional dan efektif sebagai organisasi jejaring.

Untuk program Equal Balance II ini, Sawit Watch mengarah kepada kelompok-kelompok sasaran sebagai berikut:

1. Komunitas lokal dan petani di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan daerah-daerah lain yang dibantu mengembangkan informasi, jejaring, dialog dengan industri dan pemerintah, bantuan hukum dan menjangkau media. Pada tahun 2007 Sawit Watch bekerja dengan 220 kelompok masyarakat dari seluruh Indonesia (sekitar 66.000 keluarga).
2. Pekerja perkebunan belum menjadi kelompok sasaran langsung karena melibatkan mereka memerlukan pengkajian dan pengembangan strategi lebih lanjut.
3. Dunia usaha dan pemerintah (di berbagai tingkatan) termasuk anggota-anggota RSPO dan perusahaan-perusahaan perkebunan, pembeli minyak sawit dan pengecer dan bank/investor dari Indonesia dan di luar negeri.
4. Para anggota dan organisasi mitra lokal Sawit Watch serta berbagai LSM di tingkat nasional serta internasional.

Output dari program ini adalah:

1. Kelompok-kelompok akar rumput yang terdampak perkebunan sawit mampu mengorganisasikan diri, yaitu untuk 120 pertemuan tingkat desa di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Jawa.
2. Jejaring antaranggota dan mitra daerah berkembang dengan baik melalui 3 pertemuan regional di Sumatera, Kalimantan dan Jawa.
3. Asistensi kasus diberikan kepada komunitas-komunitas di daerah-daerah berkasus di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, yaitu adanya informasi mendasar dan penuntun pengorganisasian komunitas untuk 15 kasus per tahun, 10 kasus per tahun sudah dibantu untuk mengadakan dialog dengan perusahaan dan pemerintah, 1 kasus per

tahun memperoleh sorotan media dan 1 kasus konflik perusahaan dapat dibawa ke pengadilan.

4. Organisasi petani kecil independen yang dibentuk di 7 Provinsi (Riau, Jambi, Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah).
5. Memengaruhi perumusan kebijakan pemerintah kepada 4 kementerian dan 3 pemerintah provinsi yang relevan dengan hasil nyata dalam kebijakan dan rencana pembangunan.
6. Memengaruhi dunia usaha melalui dialog dalam keikutsertaan di RSPO.
7. Memengaruhi dunia usaha melalui aksi pasar yaitu kampanye pasar dan aktivisme pemegang saham untuk mempertimbangkan dampak negatif perkebunan sawit.
8. Memengaruhi sektor keuangan melalui dialog, termasuk memberikan *input* terhadap aspek-aspek sosial dalam *due diligence handbook* untuk bank-bank komersial yang dikembangkan oleh Profundo dan WWF Indonesia.
9. Mempromosikan perencanaan alternatif untuk daerah-daerah terancam di perbatasan Kalimantan Barat (Bengkayang dan Sambas) dan melobi pemerintah tingkat kabupaten agar mengadopsi pendekatan penggunaan lahan yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kebutuhan masyarakat lokal.
10. Mendukung pihak ketiga dengan praktik-praktik pengelolaan sosial yang lebih baik, misalnya pinjaman untuk peremajaan kebun, peningkatan kapasitas untuk petani kecil, pengembangan produk, audit kilang dan penanganan tanaman.
11. Alternatif-alternatif terhadap sawit yang dikembangkan komunitas melalui kegiatan-kegiatan *agroforestry* berbasis masyarakat seperti nilam, kakao dan rotan didukung melalui 5 proyek di Kalimantan dan Sulawesi.
12. Penguatan kapasitas kelembagaan Sawit Watch dengan partisipasi para anggota dan jejaring melalui pelatihan fasilitasi, resolusi konflik, lobi dan negosiasi, kampanye, komunikasi dan media, bahasa Inggris, HAM,

investigasi, PRA, manajemen waktu, manajemen keuangan, FPIC, isu-isu buruh, kampanye dan penelitian, *monitoring* serta evaluasi.

13. Peningkatan keterlibatan para anggota Sawit Watch sehingga meningkatkan anggota lokal yang aktif dari 40% menjadi 60%.
14. Peningkatan kemandirian keuangan dengan meningkatkan kontribusi para anggota dan membangun cadangan keuangan yang memungkinkan sekretariat beroperasi tanpa pendanaan dari luar selama tiga bulan ke depan.

Pada tahap ketiga ini, sesuai Business Plan, Hivos memfokuskan diri untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan petani kecil. Kegiatan-kegiatan seperti lobi lingkungan internasional lebih diarahkan untuk dukungan dari Oxfam-Novib, sementara penelitian lebih mengandalkan dukungan dari IUCN-Netherlands dan SSNC.

Hivos Mendukung Penerapan Sawit Berkelanjutan

Dukungan untuk program Sawit Watch ternyata bukan satu-satunya dukungan Hivos untuk isu sawit berkelanjutan. Bersamaan dengan dukungan kepada Sawit Watch, Hivos juga mulai terhubung dengan jejaring yang ingin mendorong penerapan prinsip sawit berkelanjutan. Sehubungan dengan sudah dirumuskannya Prinsip dan Kriteria Keberlanjutan RSPO, Hivos mulai didekati oleh mitra-mitra aliansi pendanaan sawit, terutama Oxfam-Novib, untuk lebih banyak terlibat dalam mendorong penerapan Prinsip dan Kriteria Sawit Berkelanjutan.

Hivos, yang sudah dikenal di Belanda sebagai organisasi yang fokus mendukung petani, diminta lebih berperan dalam implementasi Prinsip dan Kriteria Sawit Berkelanjutan dengan menggunakan pengetahuannya dalam mendorong penerapan pertanian berkelanjutan yang sudah dilaksanakan dengan berbagai mitra yang didukung selama ini. Sebagai catatan, dalam isu pertanian berkelanjutan Hivos sudah aktif dalam diskusi-diskusi di tingkat IFOAM (The International Federation of Organic Agriculture Movement) untuk menyesuaikan standar pertanian organik bagi petani kecil.

Bersama IFOAM dan jejaringnya, Hivos mendorong agar sistem penjaminan mutu dapat dilakukan oleh petani kecil melalui ICS (*Internal Control System* atau Sistem Pengendalian Internal). Pada tahun 1990-an, ICS diakui sebagai sistem pengendalian mutu oleh Uni Eropa untuk produk-produk organik. Dengan diakuinya ICS, sistem pengendalian mutu bukan hanya milik perusahaan-perusahaan besar yang sudah mempunyai sistem mapan. Para petani juga bisa menerapkan standar organik dengan sistem yang mereka kembangkan sendiri.

Berdasarkan pengalaman ini, Hivos didekati guna mengembangkan pendekatan serupa untuk isu keberlanjutan sawit. Hivos berusaha berkontribusi dengan memfasilitasi terciptanya diskusi antara mitra-mitra pertanian organik, terutama yang mempunyai kompetensi di bidang standar, dengan Sawit Watch. Selain itu Hivos mulai mendekati mitra yang secara spesifik melakukan pendampingan terhadap petani sawit dan berpotensi untuk menerapkan standar keberlanjutan sawit dengan para petani. Upaya penerapan standar ini bukan bertujuan untuk memperoleh sertifikasi, namun untuk membangun pengetahuan tentang interaksi petani dengan introduksi standar yang dilakukan oleh tata kelola internasional melalui RSPO.

Setelah melalui diskusi panjang, akhirnya pada tahun 2009 Hivos mendukung Yayasan SETARA Jambi untuk program penguatan petani swadaya dalam strategi untuk menguatkan mereka di rantai komoditas sawit. Lokasi program yang didukung ialah di Wilayah Hitam Ulu di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Wilayah ini semula merupakan wilayah transmigrasi umum yang dibuka pada tahun 1980-an.

Para peserta transmigrasi yang sebagian besar berasal dari pulau Jawa, mendapat lahan seluas $3 \frac{1}{2}$ Ha dari pemerintah dengan rincian : $2 \frac{1}{4}$ Ha adalah lahan usaha 2 (LU 2) yang dipersiapkan untuk tanaman keras seperti perkebunan, 1 Ha untuk lahan usaha 1 (LU 1) untuk lahan pertanian, dan $\frac{1}{4}$ Ha lahan pekarangan (LP). Untuk kebun mandiri, petani banyak menggunakan LU 1, sementara untuk LU 2 Pemerintah memfasilitasi adanya kemitraan antara petani dan perkebunan besar yang memiliki fasilitas pemrosesan (pabrik kelapa sawit).

Para petani ini dalam perkembangannya termotivasi untuk melakukan perbaikan kehidupan berdasarkan pengalaman berkebun sawit yang diperoleh sendiri ketika bermitra atau bekerja dengan perusahaan, atau dengan mengamati apa yang sesama petani lakukan di berbagai perkebunan. Hal ini mendorong mereka untuk melakukan konversi dari LU 1 menjadi kebun swadaya.

Bekal dari pengalaman ini ternyata tidak cukup karena kebun swadaya yang mereka miliki tidak terlalu memberikan kesejahteraan dan penjualannya pun masih tergantung pada perusahaan besar pemilik pabrik. Seringkali mereka juga harus menghadapi permainan harga yang tidak hanya dilakukan oleh tengkulak, tapi juga oleh perusahaan-perusahaan di sekitar mereka. Jika tengkulak mempermainkan harga dengan dalih biaya transportasi yang mahal akibat infrastruktur yang buruk, maka perusahaan akan mempermainkan harga melalui penerapan kriteria dan standar mutu produk.

03

SAWIT BERKELANJUTAN DARI PERSPEKTIF MUTU



“

Pemerintah Indonesia sendiri semula tidak begitu mempedulikan keberadaan petani sawit swadaya yang dianggap sebagai perkembangan dari petani plasma yang nantinya akan bermitra dengan perkebunan besar juga

”

Memahami Isu Sawit Berkelanjutan dari Perspektif Penjaminan Mutu

SEBAGAI PRODUSEN MINYAK sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki 9,2 juta hektar kebun sawit, di mana 3,8 juta hektar atau 42 persen dari total luasan kebun sawit dikelola oleh petani sawit swadaya. Hal ini menunjukkan kalau petani swadaya memiliki kontribusi cukup besar bagi perkembangan industri sawit di Indonesia.

Selain itu, mempertimbangkan karakteristik komoditi di mana tandan buah segar (TBS) sawit yang harus diolah dalam waktu 24 jam setelah panen untuk menghindari penurunan kualitas TBS. Bagi petani, kondisi ini mengharuskan mereka segera mengangkut hasil panennya ke penggilingan kepala sawit (PKS) terdekat.

Praktik yang terjadi di Indonesia, PKS memperoleh pasokan TBS dari kebun sendiri dan sisanya diperoleh dari luar kebun seperti dari petani plasma dan petani swadaya. Kondisi ini saling menguntungkan dan dapat meningkatkan keberlanjutan sosial dan lingkungan yang menyatu dalam pengembangan produksi sawit. Petani memperoleh kepastian pemasaran TBS, dan di sisi lainnya perkebunan besar yang memiliki PKS atau PKS tanpa memiliki kebun memperoleh pasokan TBS untuk diolah.

Menyadari kondisi tersebut, keterlibatan petani sawit swadaya dalam isu sawit berkelanjutan menjadi kebutuhan. Namun skema sertifikasi sawit berkelanjutan yang dikembangkan oleh RSPO hanya mengatur kebun yang dikelola oleh petani plasma sebagai bagian dari sertifikasi perkebunan besar. Sementara kebun sawit yang dikelola oleh petani swadaya belum diatur dalam skema sertifikasi RSPO.

Pemerintah Indonesia sendiri tidak mengakui keberadaan petani sawit swadaya. Pemerintah mengharapkan petani-petani sawit bermitra dengan perkebunan besar seperti konsep perkebunan inti plasma. Petani-petani plasma memasok TBS ke pabrik kelapa sawit perkebunan besar, dan sebaliknya perkebunan besar memberikan akses pelatihan dan sarana produksi pertanian ke petani plasma. Pemerintah berpendapat petani plasma lebih mudah dikelola.

Pertanyaan kritisnya adalah, apakah kita tidak mengakui petani-petani swadaya, sementara mereka berjumlah banyak dan berkontribusi besar pada produksi sawit nasional? Di mana posisi petani swadaya dalam produksi sawit berkelanjutan?

Penjaminan Mutu Kelompok untuk Produksi Sawit Berkelanjutan

BIOCert terlibat dalam diskusi secara aktif dengan Sawit Watch dan RSPO Indonesia Liasion Office (RILO) sejak 2007 untuk menjawab pertanyaan: bagaimana melibatkan petani swadaya dalam sertifikasi RSPO?

Pengalaman BIOCert yang terlibat dalam pengembangan sertifikasi kelompok untuk produksi tanaman pangan selama ini mendapatkan tantangan. Apakah bisa mengembangkan sistem sertifikasi kelompok yang dapat diterapkan untuk petani sawit swadaya? Apakah sawit sangat berbeda karakteristiknya dengan tanaman pangan? Apakah petani sawit sangat berbeda kondisinya dengan petani tanaman pangan?

Berangkat dari pertanyaan tersebut, kami terlebih dahulu melihat bagaimana kondisi dan permasalahan yang dihadapi petani sawit swadaya di Indonesia. Petani sawit swadaya dapat dibagi menjadi dua jenis. *Pertama*, petani yang mengelola kebun sawitnya secara swadaya sejak dari awal. *Kedua*, petani plasma yang telah selesai kerjasama inti plasma dengan perkebunan besar dan kemudian mengelola kebun sawitnya sendiri.

Karena mengelola kebun secara swadaya, petani sawit memiliki keterbatasan untuk mengelola kebunnya sehingga menyebabkan produksi sawitnya tidak berkelanjutan. Mengenai legalitas usaha, mayoritas petani belum memiliki sertifikat kebun kelapa sawit. Umumnya petani sawit hanya memiliki Surat Keterangan Tanah dari kepala desa.

Penggunaan bibit kelapa sawit yang tidak bersertifikat

Petani sawit swadaya umumnya memperoleh bibit dari penjual bibit yang tidak jelas atau membeli kecambah kemudian dibuat penyemaian sendiri. Luas kebun petani swadaya beragam dan tersebar. Ada yang memiliki luasan kurang

dari 1 hektar dan ada pula yang lebih. Sementara letak kebun petani satu dengan yang lain pun terpisah-pisah atau tidak dalam satu hamparan.

Dalam pemasaran TBS, petani swadaya selalu berhubungan dengan tengkulak. Jarang ditemui petani swadaya memasarkan hasil produksinya langsung ke pabrik kelapa sawit. Hal ini dapat dipahami karena faktor bibit yang tidak jelas dan kecilnya besaran produksi petani.

Diagram 3.1. Lemahnya Kelembagaan Petani



Sumber: Rukaiyah Rafiq, Februari 2015

Infrastruktur pengangkutan yang buruk

Kondisi jalan pengangkutan hasil panen yang sangat buruk memengaruhi proses pengangkutan TBS. Jarak antara kebun dan pabrik yang jauh memaksa petani menggunakan jasa tengkulak walaupun memperoleh harga di bawah harga pasar. Selain itu, ada pula risiko yang timbul akibat terlambatnya proses pengangkutan buah sawit di musim hujan. Terkadang satu minggu lebih, tandan sawit baru dapat diangkut. Tidak teraturnya jadwal panen, kondisi jalan kebun yang buruk dan kurangnya truk pengangkut sawit menjadi pelengkap masalah petani swadaya.

Permasalahan itu bertambah parah karena petani swadaya umumnya tidak berkelompok, melainkan bergerak secara perorangan. Tidak ada proses pengorganisasian petani dalam pembangunan kebun sawit swadaya seperti yang ditemukan di petani plasma yang terorganisir dalam koperasi atau perusahaan inti.

Untuk petani-petani swadaya eks plasma, kondisi kebun sawit mereka umumnya seperti kebun inti, karena mereka mengikuti persyaratan pengelolaan kebun sawit yang baik seperti anjuran kebun inti. Dengan berakhirnya program inti plasma, petani eks plasma beranggapan mereka bebas menjual TBS ke mana saja. Hal ini menyebabkan keterikatan antara mantan petani plasma dan kebun inti menjadi longgar.

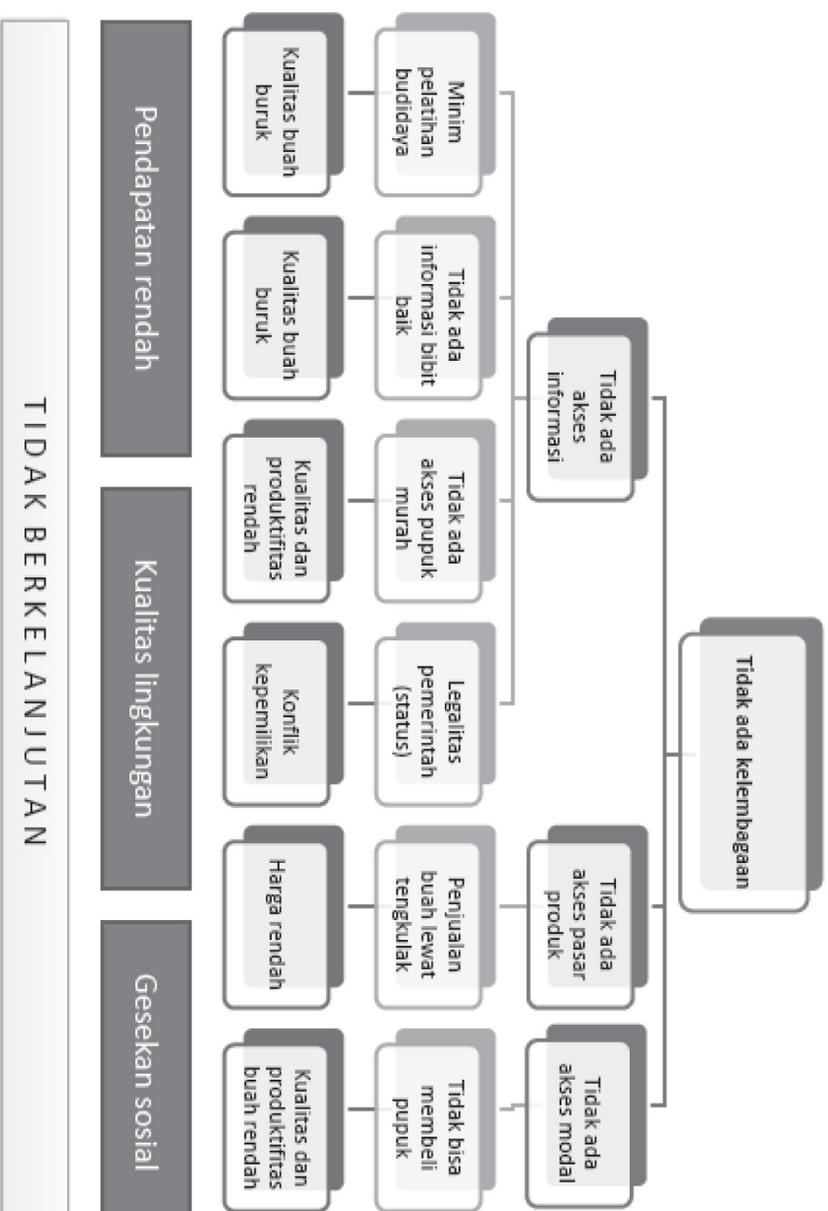
Dengan berakhirnya kerjasama inti plasma, maka berakhir pula pendampingan teknis dari kebun inti dan pasokan pupuk melalui koperasi. Koperasi yang awalnya dibentuk sebagai mekanisme penyaluran sarana produksi dan pembayaran pinjaman petani ke bank selama masa kerjasama inti plasma, turut berhenti beroperasi. Selain itu, beberapa kasus kesalahan manajemen koperasi menyebabkan kebangkrutan koperasi. Ini menyebabkan petani swadaya bekas plasma mengalami kondisi traumatis untuk berorganisasi.

Tantangan kelembagaan petani selama ini ialah sebagian besar kelembagaan petani belum terorganisir dalam koperasi, kelompok tani, atau badan usaha bersama lainnya, koperasi yang ada umumnya berukuran kecil dan rendahnya profesionalitas pengelolaan koperasi (kapasitas SDM, pencatatan, pengaturan tata kelola ke dalam—terhadap anggota—dan ke luar).

Penurunan produktivitas kebun sawit terjadi karena pemupukan yang tidak rutin dilakukan petani. Pemupukan amat tergantung pada ketersediaan dana di tingkat petani untuk membeli pupuk dan keterbatasan akses pasokan pupuk.

Kebun-kebun sawit yang dimiliki petani bekas plasma umumnya berusia tua, di mana diperlukan peremajaan sekitar 10-15 tahun lagi. Peremajaan kebun sawit memerlukan dana besar yang membayangi para petani bekas plasma.

Diagram 3.2. Praktik Ketidakterlanjutan Pengelolaan Perkebunan Sawit Petani Swadaya Akibat Ketiadaan Kelembagaan Petani



Sumber: Rukayah Rafiq, Februari 2015

Melihat kondisi dan permasalahan tersebut, sulit bagi petani swadaya mengikuti program produksi sawit berkelanjutan RSPO bila dilakukan secara perorangan. Mereka akan dihadapkan permasalahan lain dalam proses sertifikasi berupa keterbatasan sumber daya untuk mengelola penjaminan mutu agar tetap sesuai dengan standar RSPO (Prinsip dan Kriteria RSPO Bagi Petani Swadaya) serta mahalannya biaya untuk audit dan sertifikasi RSPO.

Karenanya, skema sertifikasi kelompok RSPO bagi petani swadaya dikembangkan. Sertifikasi ini diberikan untuk kelompok, bukan perorangan. Oleh karena itu, petani-petani swadaya harus berkelompok. Kelembagaan petani swadaya menjadi prasyarat agar mereka bisa mengelola dirinya secara bersama guna dapat memperoleh sertifikasi RSPO.

Adanya kelembagaan petani tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan para anggotanya, tetapi diharapkan secara berkelompok dapat merespons kebutuhan-kebutuhan secara efektif mengenai kualitas, gangguan mendadak terhadap produksi (serangan hama dan bencana alam), dan peningkatan cara berproduksi sehingga dapat bersaing secara lebih baik di pasar.

Salah satu cara untuk meningkatkan mutu ialah melalui “Sistem Manajemen Mutu” (SMM). Sebagai permulaan, SMM dimulai dengan mempelajari kondisi awal (*baseline*) sebagai persiapan, baru kemudian menyusun sistem manajemen mutu dan menentukan apa saja yang akan menjadi pokok perhatian pada saat ini. Bilamana sudah diketahui kondisi awal dan apa masalahnya, proses dapat dilakukan dengan siklus Perencanaan–Pelaksanaan–Pengecekan–Perbaikan (*Plan-Do-Check-Action* [PDCA]).

Perencanaan dan penentuan prioritas dilakukan dengan cara mencatat dan merencanakan bagaimana berbagai kegiatan dilakukan. Kemudian melaksanakan kegiatan peningkatan mutu dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan. Lalu kelembagaan petani melakukan pengecekan capaian dari pelaksanaan kegiatan. Dari hasil pengecekan, kelembagaan petani dapat belajar dari pengalaman untuk melakukan perbaikan langkah-langkah yang sudah dilakukan maupun hal-hal yang ditemukan dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan saat ini.

Kelembagaan petani dapat berupa kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi, koperasi atau lainnya. Kelembagaan petani memegang peranan penting

untuk menjalankan sistem manajemen internal guna memastikan setiap anggota organisasi petani memahami dan menerapkan standar secara konsisten.

Fungsi Kelembagaan Petani dalam Pemenuhan Prinsip dan Kriteria RSPO

Prinsip dan Kriteria (P&K) RSPO ialah standar penerapan produksi sawit yang berkelanjutan. P&K RSPO memiliki 7 prinsip yang kemudian dijabarkan dalam kriteria-kriteria indikator. Untuk mendapatkan sertifikasi RSPO, kebun harus menerapkan P&K yang dilekatkan dalam praktik-praktik pengelolaan kebun (*business process*).

Berikut fungsi kelembagaan petani dalam pemenuhan P&K RSPO:

Tabel 3.1. Fungsi Kelembagaan Perani dalam Pemenuhan P&K RSPO

Prinsip RSPO	Fungsi kelembagaan petani
Prinsip 1: Komitmen terhadap transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani menyediakan formulir standar untuk kegiatan pencatatan dan/atau pelaporan dari para anggotanya. 2. Informasi yang diberikan: keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, produktivitas, lokasi kebun serta informasi yang berkaitan dengan isu legal, lingkungan dan sosial.
Prinsip 2: Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani menginformasi peraturan hukum penting dan relevan yang sudah berlaku dan memiliki petunjuk pemberlakuan kepada petani anggota, termasuk informasi status tanah: status tanah saat ini atau yang sedang dalam tahap pengurusan. 2. Kelembagaan petani membantu anggotanya dalam hal administrasi surat menyurat terkait pengurusan legalitas kepemilikan lahan. 3. Jika dalam lahan terdapat suatu hak legal atau hak tradisional kemungkinan harus dilakukan penentuan melalui kegiatan pemetaan bersama yang melibatkan masyarakat yang terkena dampak maupun masyarakat sekitar. 4. Lembaga petani membantu menegosiasikan perjanjian tanpa paksaan dan dibuat sebelum investasi baru atau operasi dilakukan, berdasarkan kesepakatan yang terbuka atas semua informasi terkait dalam bentuk dan bahasa yang sesuai.

Prinsip RSPO	Fungsi kelembagaan petani
	<p>5. Waktu yang memadai harus diberikan bagi pengambilan keputusan secara adat dan dapat dilakukan negosiasi berulang-ulang, jika diminta. Perjanjian yang telah dinegosiasi harus dapat mengikat semua pihak terkait, dan dapat dijadikan alat bukti dalam proses pengadilan. Menetapkan kepastian dalam negosiasi lahan merupakan suatu keuntungan jangka panjang bagi seluruh pihak terkait.</p>
<p>Prinsip 3: Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang.</p>	<p>Kelembagaan petani menyediakan informasi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prediksi produksi kebun. • akses kepada informasi teknologi baru dan informasi pasar/harga. • faktor-faktor yang memengaruhi biaya produksi.
<p>Prinsip 4: Penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan Panduan Pengelolaan Kebun Sawit yang Baik. 2. Kelembagaan petani memfasilitasi rekaman penggunaan pestisida dan pemupukan serta mengorganisasikan laporan hasil pengamatan serta pengendalian hama dan penyakit di kelembagaan petani 3. Kelembagaan petani dianjurkan untuk menguji kualitas saprotan yang mereka terima sebelum disalurkan kepada petani anggotanya. 4. Kelembagaan petani membina anggotanya agar dapat melakukan pencatatan sederhana mengenai kegiatan perkebunannya. 5. Kelembagaan petani mengorganisasikan <i>monitoring</i> pelaksanaan praktik terbaik dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan. 6. Kelembagaan petani melaksanakan pelatihan PHT kepada anggota kelompoknya. 7. Kelembagaan petani melaksanakan pelatihan praktik penggunaan agrokimia secara umum. 8. Kelembagaan petani memiliki kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. 9. Kelembagaan petani memiliki program dan realisasi pelatihan bagi petani yang cukup dan dapat diperoleh melalui kegiatan penyuluhan dari: <ul style="list-style-type: none"> • pekebun atau pengolah yang membeli TBS mereka, organisasi petani atau melalui kerja sama dengan lembaga dan organisasi lain. • Pencatatan dan dokumentasi pelatihan bagi petani tidak diharuskan, tetapi setiap pekerja di perkebunan harus mendapatkan pelatihan yang cukup untuk operasional kerja yang dilakukan.

Prinsip RSPO	Fungsi kelembagaan petani
Prinsip 5: Tanggung jawab lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati.	Kelembagaan petani mengidentifikasi area-area konservasi bernilai tinggi dan bersama-sama dengan petani melakukan upaya untuk memperbaiki/melindungi.
Prinsip 6: Tanggung Jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari kebun dan pabrik	<ul style="list-style-type: none"> • Petani dapat menerangkan dampak sosial kegiatan perkebunan mereka dan anggota akan bukti respons konstruktif terhadap keluhan, jika ada. • Identifikasi dampak sosial dapat dilakukan oleh kelembagaan petani bersama-sama dengan pihak yang terkena dampak sesuai tuntutan situasi. Pelibatan ahli independen dapat dilakukan jika dipandang perlu untuk memastikan seluruh dampak (baik positif maupun negatif) telah diidentifikasi. • Mekanisme komunikasi dan konsultasi dirancang oleh kelembagaan petani bersama masyarakat lokal dan pihak yang terkena dampak atau pihak berkepentingan lainnya. • Mekanisme ini perlu mempertimbangkan: penggunaan mekanisme dan bahasa setempat (forum multi pihak). Komunikasi perlu mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap informasi bagi kaum wanita dan pria, pemimpin desa dan buruh harian, kelompok masyarakat lama dan baru, serta berbagai kelompok etnis. • Kelembagaan petani menyediakan prosedur dan memfasilitasi penanganan keluhan dan ketidakpuasan yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak.. • Kelembagaan petani memfasilitasi para anggotanya dalam mengidentifikasi hak-hak legal dan tradisional masyarakat yang berhak menerima kompensasi atas pengalihan hak legal atau hak tradisional melalui sistem terdokumentasi. Mengembangkan prosedur untuk menghitung dan membagikan kompensasi yang memadai (dalam wujud uang atau bentuk lainnya) dibuat dan diimplementasikan dengan mengacu pada prinsip <i>free prior informed consent</i> dan kesetaraan gender, dan pembayaran kompensasi atas pemindahan hak dari pihak lain harus dilakukan secara transparan, wajar dan tanpa tekanan sehingga tidak merugikan penduduk atau masyarakat yang memiliki hak atas lahan

Prinsip RSPO	Fungsi kelembagaan petani
	<ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan petani menginformasikan dan memfasilitasi petani dalam memahami dan memberikan pembuktian mengenai tidak mempekerjakan anak-anak, sesuai peraturan yang berlaku. • Kelembagaan petani memiliki kebijakan tenaga kerja yang menganut persamaan hak. • Kelembagaan petani memiliki aturan kepada para anggotanya untuk tidak melakukan pelecehan seksual dan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan serta menghargai hak-hak reproduksi perempuan dan diimplementasikan. Kelembagaan petani memiliki kebijakan untuk melakukan hubungan bisnis dengan anggota dan pihak lain (bisnis lokal) secara adil dan terbuka, termasuk di dalamnya memfasilitasi tersedianya rekaman mekanisme penentuan harga TBS dan saprotan. • Kelembagaan petani sebaiknya terlibat dalam penentuan harga TBS. • Kelembagaan petani secara aktif melakukan perundingan dengan perusahaan mitra dalam hal penentuan pemotongan hasil penjualan TBS petani untuk kontribusi pembangunan lokal dan pengelolaannya. • Kelembagaan petani turut menentukan arah pemanfaatan dan pengelolaan dana kontribusi. • Kelembagaan petani memfasilitasi adanya analisis dampak sosial dan lingkungan serta tersedianya dokumen analisis dampak sosial dan lingkungan sebelum pembangunan perkebunan dilaksanakan.
<p>Prinsip 7: Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung Jawab</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk petani yang pada saat membangun perkebunan tidak melakukan analisis dampak lingkungan dan sosial, masih dimungkinkan untuk bergabung dengan kelompok sertifikasi sepanjang kelembagaan petani melakukan inspeksi internal untuk membuktikan tidak ada pelanggaran terhadap kriteria ini. • Petani swadaya, melalui kelembagaan petani, berkonsultasi dengan instansi berwenang untuk mendapatkan informasi mengenai NKT yang ada di dalam atau di sekitar lahan mereka.

04

ANALISIS PENERAPAN SAWIT BERKELANJUTAN



“

Penggunaan pupuk secara berlebihan untuk meningkatkan produktivitas kebun berkontribusi mencemari tanah dan sumber air (sungai dan mata air) sekitar kebun.

”

ANALISIS PENERAPAN SAWIT berkelanjutan dilakukan melalui studi awal Sertifikasi RSPO Kelompok Petani Sawit berlokasi di Desa Bungo Tanjung dan Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tapir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Studi awal ini merupakan kerjasama dengan Yayasan SETARA Jambi dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Jambi, didukung oleh HIVOS.

Studi awal ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik perkebunan sawit yang dikelola oleh petani kemitraan dan petani swadaya; mengidentifikasi kesesuaian penerapan prinsip dan kriteria RSPO bagi petani sawit di lokasi studi; mengidentifikasi peluang dan risiko dari replikasi sertifikasi kelompok. Produk organik untuk penerapan program sertifikasi RSPO bagi kelompok petani sawit disesuaikan dengan prinsip dan kriteria RSPO mereka; memberikan rekomendasi bagi pengembangan program sertifikasi kelompok di lokasi studi.

Lokasi studi merupakan daerah perkebunan sawit yang menjadi lokasi dampingan Yayasan SETARA Jambi (selanjutnya disebut SETARA Jambi) dan SPKS Jambi. Di lokasi itu terdapat petani dan perkebunan yang masih dan telah bermitra dengan PT Sari Aditya Loka (PT SAL) serta petani swadaya.

Gambaran Umum Kondisi Perkebunan Sawit di Jambi

Perkebunan sawit di Sumatera seluas 4,58 juta hektar atau 68 persen dari total luasan perkebunan sawit di Indonesia. Sementara perkebunan sawit di Provinsi Jambi seluas 1.238.962 hektar di tahun 2008, di mana sebagian besar di antaranya merupakan perkebunan rakyat seluas 1.073.443 hektar, milik negara seluas 22.979 hektar, dan milik swasta seluas 22.979 hektar.² Bila dibandingkan dengan luas Provinsi Jambi (5,4 juta ha), berarti 20 persen di antaranya diperuntukkan perkebunan sawit. Dari sepuluh kabupaten dan kota di Jambi, hanya Kota Jambi dan Kabupaten Kerinci yang tidak memiliki lahan perkebunan sawit. Sembilan lainnya memiliki lahan yang potensial untuk ditanami sawit.³

2 <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0804/14/eko04.html>, 14 April 2008.

3 <http://www.kapanlagi.com/h/0000211556.html>, 02 Februari 2008.

Sementara itu, kontribusi pendapatan bruto petani kelapa sawit di Provinsi Jambi senilai Rp 2,2 triliun dengan volume ekspor sebesar 33 juta ton senilai US\$11 juta. Produk hilir kelapa sawit Jambi sampai kini baru sebatas minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) dan belum sampai kepada *oleo-chemical* untuk bahan baku industri kosmetik, detergen, dan biofuel.

Jambi menjadi Provinsi yang paling ekspansif mengembangkan perkebunan sawit di Sumatera. Terjadi perluasan perkebunan sawit sebesar 2,5 kali dibanding tahun 2006, di mana luas areal perkebunan kelapa sawit saat itu mencapai 409.445 ha dengan tanaman menghasilkan 296.095 ha dan belum menghasilkan seluas 105.977 ha. Luas kebun kelapa sawit itu telah menghasilkan produk tandan buah segar (TBS) sebanyak 4,7 juta ton atau 946.437 ton CPO.

Pembukaan perkebunan sawit baru ini dengan mengkonversi hutan Jambi. Hilangnya hutan menjadi perkebunan sawit dalam luasan yang besar mengubah bentang alam yang mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.

Pembukaan perkebunan sawit di Jambi selama ini selalu bermasalah dengan masyarakat di wilayah yang dijadikan perkebunan itu. Kebanyakan lahan yang dikonversi adalah tanah perkebunan rakyat dan hutan adat. Pembukaan kebun kelapa sawit juga akan mengubah corak produksi masyarakat yang sebelumnya merupakan pemilik lahan menjadi buruh bagi perkebunan.

Selain persoalan di atas, terdapat persoalan dalam beroperasinya perusahaan perkebunan sawit, seperti pengingkaran kesepakatan yang telah dibuat antara perusahaan dan masyarakat yang terlibat dalam kemitraan, dan tidak adanya transparansi saat perusahaan melakukan operasi di beberapa daerah yang telah mengantongi izin. Di sisi lain ada penyalahgunaan praktik yang dilakukan perusahaan, di mana izin lahan yang diberikan dinas terkait adalah untuk komoditi karet, tetapi dalam praktiknya ditanami sawit.

Praktik monokultur perkebunan sawit mengancam keragaman hayati ekosistem di sekitar areal kebun sawit. Penggunaan pupuk secara intensif untuk meningkatkan produktivitas kebun berkontribusi mencemari tanah dan sumber air (sungai dan mata air) sekitar kebun.

SETARA Jambi mencatat terdapat 140 konflik terkait perkebunan sawit di Provinsi Jambi di tahun 2007. Konflik-konflik tersebut timbul karena permasalahan pembagian dan kepemilikan lahan, pendirian kamp-kamp di komunitas lokal, tanah adat, limbah, Hak Guna Usaha (HGU) dan kemitraan.

1. Karakteristik petani sawit kemitraan

Saat ini terdapat 20 pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Provinsi Jambi, di mana tiga pabrik di antaranya berada di Kabupaten Merangin, salah satu di antaranya adalah PT Sari Aditya Loka (PT SAL) yang berada di Hitam Hulu Kabupaten Merangin.⁴ PT SAL dimiliki oleh Astra Agro Lestari (90% kepemilikan sahamnya) beroperasi sejak tahun 1995. Luas lahan tertanam yang dikelola PT SAL sebesar 5020 ha dengan total aset per 30 Juni 2008 sebesar Rp. 423,643 milyar.⁵

PT SAL memiliki lahan inti seluas sekitar 5000 ha. Namun hasil TBS dari kebun inti belum mencukupi kebutuhan kapasitas mesin terpasang, maka mensyaratkan PT SAL untuk bermitra dengan petani. Kemitraan pertama dilakukan pada tahun 1995-1996.

Untuk di Desa Bungo Tanjung dan Desa Rawa Jaya Kec. Tapir Selatan Kab. Merangin Jambi yang sebagian besar masyarakat transmigran.⁶ Petani menyerahkan Lahan Usaha 1 (LU1) dan Lahan Usaha 2 (LU2) seluas 3,25 ha untuk bermitra dengan PT SAL. Kemudian PT SAL membangun kebun sawit. Pembukaan kebun yang sebelumnya adalah hutan, pengolahan kebun, penyediaan dan penanaman bibit serta pemupukan sawit dilakukan oleh PT SAL hingga pohon sawit berbuah.

Masa ini disebut dengan periode konversi. Pada periode konversi, kayu hasil pembukaan lahan menjadi milik PT SAL. Selama waktu pembukaan dan pengembangan lahan sekitar 4-5 tahun, petani bekerja di kebun plasma dan diberi upah oleh PT SAL.

Kebun kemudian diserahkan ke petani pada masa akad kredit, sebagai tanda beralihnya tanggung jawab pengelolaan kebun ke petani. Pembagian lahan ini melalui pengundian. Umumnya petani mitra mendapatkan lahan masing-masing seluas 2 ha (disebut kapling) di lokasi yang berbeda den-

4 <http://www.pempropjambi.go.id/content.php?page=potensi-detail.php&view=potensi-perkebunan2>

5 PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk dan Anak Perusahaan: Catatan Atas Laporan Keuangan dan Konsolidasian. 30 Juni 2008 dan 2007.

6 Setiap petani transmigran memiliki lahan seluas 3,5 ha di mana masing-masing digunakan sebagai Lahan Usaha 1 (LU1) seluas 1 ha untuk tanaman pangan, Lahan Usaha 2 (LU2) seluas 2,25 ha untuk tanaman perkebunan dan Lahan Pekarangan (LP) seluas 0,25 ha.

gan lahan miliknya. Petani mengeluhkan, mekanisme pengundian membuat dirinya memperoleh lahan yang jauh dari desanya.

Selain itu, luas dan bentuk lahan tidak sesuai dengan sertifikat lahan sebenarnya. Terjadi penyusutan luasan dan perbedaan bentuk lahan dengan yang tercantum di sertifikat tanah. Hal ini diketahui oleh petani setelah masa kredit selesai karena selama masa kredit berjalan, sertifikat tanah yang dikelola petani dipegang oleh pihak bank. Penyusutan luas lahan disebabkan pertama karena pihak perusahaan membagi lahan berdasarkan banyaknya pohon sawit di kebun.

Untuk lahan 2 ha seharusnya ditanam 240 pohon sawit dengan jarak tanam 9 x 9 meter. Namun pada kenyataannya jarak tanam pohon sawit beragam dan kurang dari 9x9 meter. Kedua, perusahaan beralasan penyusutan luas lahan karena adanya pembuatan jalan di antara kebun sawit untuk transportasi pengangkutan TBS.

Biaya pengembangan kebun sawit termasuk penyediaan pupuk dialihkan menjadi beban petani sebagai hutang ke perusahaan. Masa kredit berlangsung selama 5-7 tahun dan petani melakukan pembayaran hutang dengan mencicil sebesar 30-35 persen dari penjualan TBS ke perusahaan. Perusahaan akan memotong langsung sebesar 30-35% dari jumlah penyeteroran TBS petani setiap bulannya, ditambah dengan pemotongan untuk pembelian pupuk dan herbisida. Jumlah hutang petani dan masa kredit diinformasikan oleh perusahaan kepada petani. Sementara itu, petani diwajibkan memasarkan TBS ke PT SAL. Harga dan mutu TBS ditentukan sepihak oleh perusahaan.

Berdasarkan informasi dari para petani yang pernah bermitra dengan PT SAL yang saat ini kreditnya telah lunas, kemitraan yang dibangun tidak dilakukan secara transparan. Beberapa kesepakatan dalam kemitraan tidak dilaksanakan atau diinformasikan sebelumnya kepada petani sebagai mitranya sehingga memberikan ketidakjelasan dan kepastian kepada petani mengenai kemitraan yang dijalankan.

Dalam kemitraan yang dibangun, PT SAL disyaratkan bekerjasama dengan koperasi dan organisasi tani. Selama masa kredit, koperasi beroperasi dengan baik. Koperasi lebih banyak berperan sebagai

kepanjangan tangan PT SAL dalam hal penyaluran pupuk, pembelian TBS petani dan pembayaran cicilan petani. Namun di lokasi studi, setelah banyak petani yang telah melunasi kreditnya, peran koperasi menjadi berkurang dan bahkan tidak beroperasi lagi.

Untuk mempermudah pengorganisasian petani untuk produksi dan pembinaan, setiap alur lahan sawit yang berisi 5 petani dibuat menjadi satu kelompok tani. Mandor kebun datang secara rutin minimal 10 hari sekali untuk memberikan pembinaan mengenai manajemen produksi kebun, penggunaan dan penanganan pupuk yang baik.

Menurut petani, selama periode kredit sebagian petani memperoleh pupuk dan herbisida dari perusahaan sebagai pinjaman. Pupuk Urea, TSP, KCl umum digunakan sebagai pupuk di perkebunan sawit. Sementara herbisida merek Gromoxon and Round Up umum digunakan untuk mengendalikan gulma kebun sawit.

Selain model kemitraan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) seperti di atas, terdapat model kemitraan lainnya seperti Koperasi Kredit Premier Anggota (KKPA) yang dikembangkan oleh PT SAL sejak awal tahun 2000-an.

Pola KKPA seperti pola bapak asuh. Petani mengizinkan lahan miliknya dikelola oleh PT SAL untuk dikembangkan kebun sawit. Semua biaya pengembangan, perawatan dan pemanenan dilakukan sepenuhnya oleh PT SAL. Petani hanya menerima 40% dari hasil sawit tiap bulannya dari PT SAL karena sudah dipotong untuk biaya awal pengembangan kebun. Hasil yang diperoleh petani tersebut akan dikurangi lagi untuk biaya tenaga kerja dan biaya perawatan kebun.

Menurut para petani di kedua lokasi studi menjelaskan bahwa konflik kepemilikan lahan dengan masyarakat lokal menjadi penyebab timbulnya konflik sosial dengan masyarakat lokal. Selain itu, terjadi kecemburuan sosial masyarakat lokal dengan pendatang yang mengikuti program kemitraan.

2. Karakteristik Petani Sawit Swadaya

Setiap warga transmigran memperoleh Lahan Pekarangan (LP) seluas 0,25 ha yang diperuntukkan bagi tanaman pangan. Namun sejak perkebunan sawit berkembang, lahan pekarangan tersebut turut dialihkan

secara swadaya menjadi kebun sawit. Petani swadaya mengelola kebun sawitnya secara swadaya. Proses pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan kebun sawit ditanggung oleh petani.

Selain itu, petani yang telah lunas kreditnya dan telah berhenti kemitraan dengan PT SAL mengelola kebunnya secara swadaya. Mereka tidak diwajibkan memasarkan TBS miliknya ke PT SAL.⁷

TBS yang dihasilkan dipasarkan secara bebas kepada tengkulak desa yang menawarkan harga paling tinggi.⁸ Biasanya, para tengkulak ini memiliki surat *order* lebih dari satu pabrik kelapa sawit (PKS). Mereka dapat memasarkan ke TBS yang membeli dengan harga tertinggi.

Tengkulak memiliki peran penting bagi petani swadaya. Selain sebagai agen pemasar TBS, ia juga berfungsi sebagai alternatif sumber pendanaan petani. Tengkulak dapat memberikan pinjaman uang kepada petani swadaya untuk keperluan pemeliharaan kebun seperti membeli pupuk dan peralatan kebun, serta untuk keperluan rumah tangga petani. Pinjaman tengkulak ini menjadi pengikat hubungan petani dengan tengkulak karena mewajibkan petani menjual TBS miliknya ke tengkulak berdasarkan harga pasaran dan memotong hasil penjualan TBS untuk mencicil pembayaran hutang.

Petani menyimpan nota penjualan TBS terakhir. Dalam nota penjualan tersebut secara jelas terdapat informasi mengenai jumlah dan harga TBS yang dijual ke tengkulak. Petani mengaktifkan kembali organisasi tani yang telah mati sejak berakhirnya masa kredit. Organisasi tani ini lebih bertujuan untuk perbaikan kondisi jalan kebun dan untuk menghadapi rencana penanaman kembali (*replanting*) dalam waktu 10 tahun mendatang.⁹

7 Pada awal masa berakhirnya kredit petani, PT SAL masih mewajibkan petani menjual TBS ke PT SAL. PT SAL akan melaporkan kepada polisi bila petani memasarkan TBS ke miliknya di luar PT SAL melalui jalan yang dibangun oleh PT SAL. Tindakan tersebut dianggap PT SAL sebagai pencurian. Namun sejak terjadi protes dari petani bekas mitra PT SAL pada tahun 2005, petani dapat bebas menjual TBS kemana saja.

8 Jumlah tengkulak di desa Bungo Tanjung dan Rawa Jaya masing-masing berjumlah 4 orang.

9 Di Desa Bungo Tanjung dan Rawa Jaya masing-masing memiliki 4 kelompok tani. Di Desa Bungo Tanjung, tiap anggota kelompok tani bersedia dipotong Rp 10 per kg dari TBS yang dijual ke tengkulak CV Pangrupo Jiwo. Dana tersebut disimpan ke tengkulak untuk dipergunakan sebagai dana perbaikan jalan kebun dan rencana *replanting* yang akan terjadi 10 tahun lagi.

Namun aspek teknis, mutu dan penguatan organisasi belum menjadi prioritas program organisasi tani. Petani swadaya di lokasi studi tidak memperoleh pelatihan atau penyuluhan mengenai manajemen produksi kebun, termasuk dari dinas perkebunan kabupaten Merangin.

Tabel 4.1. Karakteristik Petani Sawit PT. SAL di Desa Bungo Tanjung dan Desa Rawa Jaya Kec. Tapir Selatan Kab. Merangin Jambi

TOPIK	PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
Kepemilikan lahan	Petani transmigrasi memperoleh Lahan Usaha 1 (LU1) seluas 1 ha, Lahan Usaha 2 (LU2) seluas 2,25 ha dan Lahan Pekarangan (LP) seluas 0,25 ha.	
	LU1 dan LU2 diserahkan kepada PT SAL untuk masuk kebun plasma pada tahun 1995-1996. PT SAL membangun dan mengelola kebun sawit hingga tanaman sawit berbuah (sampai masa akad kredit).	LP yang berlokasi di belakang rumah dikelola oleh petani sendiri untuk perkebunan sawit.
	PT SAL membagi kebun sawit ke petani seluas 2 ha berdasarkan mekanisme pengundian. Dari hasil pengundian, petani memperoleh kebun bukan lahan asal miliknya, bahkan berada di desa berbeda.	Lahan menjadi milik sendiri setelah lunas masa kreditnya. Pengelolaan lahan sepenuhnya ditangan petani.
	Sertifikat tanah dalam masa kredit dipegang oleh pihak bank sebagai jaminan pinjaman bank.	Sertifikat tanah LP dipegang oleh petani. Sertifikat kebun plasma yang telah lunas masa kreditnya dipegang oleh petani.
	Ketidaksesuaian luasan dan bentuk kebun sawit yang diterima dengan sertifikat tanah. Hal ini baru diketahui setelah masa kredit selesai, di mana sertifikat tanah baru diterima petani.	

TOPIK	PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
Kemitraan	Petani bermitra sampai masa kredit selesai. Waktu kredit antara 3-7 tahun.	Tengkulak memiliki peran penting bagi petani swadaya. Selain sebagai agen pemasar TBS, ia juga berfungsi sebagai alternatif sumber pendanaan petani berupa pinjaman uang. Pinjaman uang ini menjadi pengikat hubungan petani dengan tengkulak karena mewajibkan petani menjual TBS miliknya ke tengkulak berdasarkan harga pasaran dan memotong hasil penjualan TBS untuk mencicil pembayaran hutang.
	Petani tidak memegang salinan perjanjian kemitraan. Salinan perjanjian dipegang oleh PT SAL dan pihak bank.	
	Mekanisme kemitraan yang dibangun tidak transparan. Beberapa kesepakatan yang dibuat tidak dilaksanakan oleh perusahaan dan diputuskan sepihak oleh PT SAL.	
	Sistem bagi hasil dengan perusahaan sebagai pembayaran cicilan kredit petani. Besaran bagi hasil 30-35 persen dari hasil panen.	
	Sejak tahun 2000-an, model kemitraan berupa KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) di mana kebun sepenuhnya dikelola oleh perusahaan. Petani hanya memperoleh hasil setiap bulannya setelah dikurangi biaya pembangunan dan perawatan kebun sawit.	

TOPIK	PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
Organisasi tani	Kelompok tani dibangun oleh perusahaan untuk pengorganisasian produksi	Di Desa Bungo Tanjung dan Rawajaya masing-masing terdapat 4 kelompok tani
	Tiap kelompok tani terdiri atas 5 petani yang berada dalam satu alur kebun sawit.	Kelompok tani tujuan untuk perbaikan jalan atau persiapan rencana <i>replanting</i> .
	Koperasi didirikan sebagai prasyarat kemitraan perusahaan dengan petani. Koperasi menjadi kepanjangan tangan perusahaan untuk pemasaran dan pembayaran hutang petani. Saat ini, di mana sebagian besar petani telah lunas kreditnya, koperasi tidak berfungsi lagi.	Tidak terorganisir dengan baik. Aspek teknis, mutu dan penguatan organisasi belum menjadi prioritas program organisasi tani. SPKS Jambi mulai mendampingi petani sawit di Desa Bungo Tanjung dan Rawajaya. Kegiatan yang dilakukan baru sebatas identifikasi dan membangun kontak dengan kelompok tani yang ada di desa tersebut.
Pemasaran	Pemasaran dilakukan melalui pemasar yang memiliki surat <i>order</i> dari perusahaan.	
	Pemasaran TBS ke perusahaan inti melalui koperasi	Pemasaran dilakukan sendiri oleh petani ke tengkulak berdasarkan harga tertinggi di desa tersebut.
	Harga TBS ditentukan oleh perusahaan inti.	Di Desa Bungo Tanjung dan di Desa Rawa Jaya masing-masing terdapat 4 tengkulak.

TOPIK	PETANI KEMITRAAN	PETANI SWADAYA
Keuangan	Pendanaan pengembangan kebun sebelum akad kredit berasal dari PT SAL dan menjadi bagian dari hutang petani.	Pendanaan terbatas dan bersumber keuangan sendiri.
	Selama masa kredit, petani dapat meminjam dana untuk pemeliharaan kebun ke koperasi.	Tengkulak dapat meminjamkan uang ke petani untuk pembelian pupuk, peralatan kebun dan kebutuhan keluarga petani. Pembayaran utang dicitil dari penjualan TBS ke tengkulak.
	Koperasi menjadi pengelola pembayaran hutang petani dan pemasar TBS ke PT SAL.	
	Besarnya hutang ke PT SAL dan ke koperasi diinformasikan kepada petani secara reguler saat pembayaran cicilan kredit tiap bulannya.	
Akses sarana produksi pertanian	Pupuk dan herbisida dibeli dari koperasi dan dibayar dengan mencicil melalui penjualan TBS	Bibit, pupuk, penanaman dan pemeliharaan kebun swadaya dari petani.
Pelatihan	Pelatihan manajemen kebun diberikan ke petani plasma (selama masa kredit) oleh mandor ke bun secara reguler.	Tidak ada pelatihan teknis dan manajemen produksi dan mutu produk, termasuk dari dinas perkebunan setempat.
	Petani mitra tidak diinformasikan mengenai persyaratan mutu TBS (rendemen) dengan jelas. Rendemen TBS berpengaruh terhadap harga TBS yang dibeli PT SAL	
Dokumentasi	Dokumentasi tidak tersedia, termasuk kontrak kemitraan dan sertifikat tanah	Sertifikat tanah dipegang petani
		Nota penjualan TBS terakhir disimpan oleh petani.
Tenaga kerja	Tenaga kerja keluarga dan tenaga harian. Untuk panen, pekerja dibayar berdasarkan hasil panen TBS (Rp.10 per kg TBS)	

3. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) JAMBI

SPKS Jambi dideklarasikan pada bulan November 2007 sebagai organisasi rakyat independen yang peduli terhadap nasib petani kelapa sawit. SPKS Jambi

mengembangkan organisasi tani sebagai kebutuhan untuk memperjuangkan nasib petani sawit terhadap ketidakadilan penguasaan tanah dan sumber alam lainnya yang didominasi oleh perusahaan perkebunan besar sawit dengan berupaya memperjuangkan tata kuasa dan tata kelola petani sawit terhadap tanah dan produktivitas kebunnya.

Upaya SPKS Jambi yang dilakukan dengan membangun sistem data dan memberikan pelayanan informasi, komunikasi, konsultasi hukum terkait konflik perkebunan sawit, membangun sumber daya petani dan kelembagaan organisasi, mengembangkan sistem perekonomian petani dalam bentuk badan usaha yang swadaya dan produktif.¹⁰

Konsep Sertifikasi RSPO untuk Kelompok Tani Sawit

Konsep sertifikasi RSPO untuk kelompok tani sawit berdasarkan pengalaman dalam pengembangan sertifikasi pertanian organik bagi kelompok tani, yang mensyaratkan adanya organisasi tani (koperasi, asosiasi tani, serikat petani) yang terorganisir dengan baik. Organisasi tani yang mengembangkan sistem kesesuaian standar bagi petani yang menjadi anggota organisasi tani. Lembaga sertifikasi kemudian mengevaluasi apakah sistem ini dapat berjalan dengan efisien dan benar.

Sistem kesesuaian standar yang digunakan yaitu Sistem Pengawasan Internal (*Internal Control System*=ICS), yaitu sistem penjaminan mutu terdokumentasi yang memperkenankan lembaga sertifikasi mendelegasikan inspeksi tahunan ke anggota organisasi tani ke lembaga/unit yang teridentifikasi dalam organisasi yang disertifikasi.

Dalam praktiknya, secara prinsip dengan menggunakan ICS, organisasi tani melakukan sendiri pengawasan bagi seluruh petani terhadap kesesuaian aturan produksi organik seperti prosedur yang telah ditentukan. Lembaga sertifikasi kemudian mengevaluasi, apakah sistem pengawasan internal bekerja dengan baik dan efisien. Evaluasi dilakukan untuk mengecek sistem dokumentasi ICS, kualifikasi staf dan melakukan inspeksi ulang ke beberapa petani.

¹⁰ Menurut Sekjen SPKS Jambi, saat ini SPKS Jambi sedang tahap persiapan pembentukan organisasi. Syarat pembentukan SPKS Jambi, terdapat 5 organisasi tani sawit masing-masing di dua kecamatan di dua kabupaten di Jambi.

Organisasi tani memiliki kecukupan sumber daya manusia untuk menjalankan ICS. Setiap anggota didaftar dan dijelaskan mengenai aturan main organisasi tani, Prinsip dan Kriteria (P&K) RSPO. Petani menyepakati bahwa ia akan menjalankannya aturan main organisasi dan P&K RSPO secara konsisten. Saat didaftar, petani dijelaskan dan setuju bahwa dirinya bersedia diinspeksi secara internal oleh organisasi tani dan secara eksternal oleh lembaga sertifikasi. Dan apabila ditemukan ketidaksesuaian/pelanggaran terhadap aturan main organisasi dan P&K RSPO, dirinya akan dikenakan sanksi.

Semua personel, termasuk anggota organisasi tani dilatih secara regular mengenai ICS, P&K RSPO, dan teknis budidaya dan mutu sawit. Setiap petani anggota organisasi tani diinspeksi oleh organisasi tani untuk mengecek kesesuaian praktik di lapangan dengan P&K RSPO dan aturan main organisasi tani. Semua proses diatas didokumentasikan dan rekaman dokumen tersebut terpelihara oleh organisasi tani. Organisasi tani kemudian mengajukan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi (sertifikasi kelompok tani).

Organisasi yang mengelola ICS (disebut dengan organisasi ICS) bertanggungjawab mengelola sistem pengawasan mutu internal dengan inspeksi tahunan dan evaluasi oleh pihak ketiga (lembaga sertifikasi). Kemudian lembaga sertifikasi melakukan inspeksi tahunan ke organisasi ICS dan sampling inspeksi ke anggota organisasi dan entitas dalam rantai pasokan berdasarkan P&K RSPO.

1. Persyaratan ICS Dalam Organisasi Tani

Untuk menjalankan ICS dengan baik diperlukan organisasi tani yang terorganisir dengan baik. Selain itu, terdapat kriteria keanggotaan petani sawit yang jelas. Hal ini dapat ditentukan berdasarkan luasan lahan, menggunakan tenaga kerja keluarga, keseragaman anggota dari aspek geografis, lokasi.

Untuk memudahkan pengawasan dan pengkoordinasian, diperlukan sistem pemasaran bersama (*one stop marketing*). Di mana semua anggota kelompok yang memenuhi persyaratan yang disepakati dapat menjual TBS ke organisasi tani.

Dalam sistem ICS ini, hanya petani skala kecil yang menjadi anggota organisasi tani dan dapat masuk sebagai sertifikasi kelompok. Petani skala besar (petani dapat membayar biaya sertifikasi eksternal sebesar 2% dari penjualannya atau berdasarkan luasan lahan), prosesor dan eksportir dapat juga masuk dalam sertifikasi kelompok namun diinspeksi tersendiri tiap tahun oleh lembaga sertifikasi eksternal.

2. Rantai pasokan sawit

Di lokasi studi, terdapat dua model rantai pasokan sawit hingga ke PT SAL, yaitu:

- Petani swadaya menjual TBS ke tengkulak (pemasar) yang memiliki surat *order* dari PT SAL. Biasanya tengkulak ini memiliki surat *order* dari beberapa pabrik kelapa sawit. Tengkulak ini kemudian menjual TBS ke PT SAL atau ke pabrik kelapa sawit lainnya sepanjang harganya sesuai.
- Petani mitra menjual TBS kepada koperasi yang telah ditunjuk oleh PT SAL. Kemudian koperasi mengirikan TBS ke PT SAL.

3. Konsep model sertifikasi kelompok

Berikut konsep beberapa model sertifikasi kelompok yang dapat dikembangkan untuk RSPO petani sawit:

a. Sertifikat kelompok atas nama organisasi tani

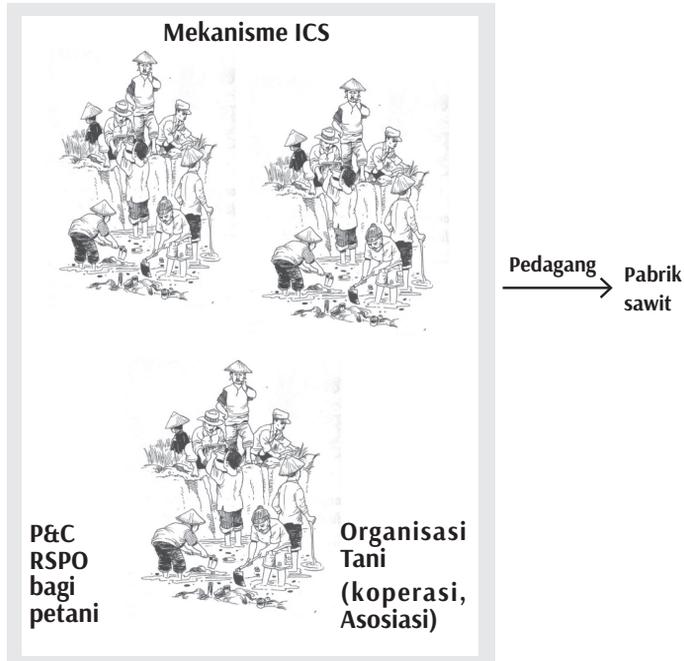
Organisasi tani mengelola pengawasan internal (ICS) kepada semua anggotanya. Biaya pengoperasian ICS dan sertifikasi ditanggung oleh organisasi tani.

Sertifikat RSPO diberikan atas nama organisasi tani. Untuk itu, semua anggota organisasi tani memiliki kebanggaan bersama dan bertanggung jawab menjaga kesesuaian terhadap P&K RSPO. Tiap anggota organisasi tidak dapat menggunakan sertifikat untuk keperluan sendiri. Apabila ada anggota organisasi yang melanggar kesepakatan aturan main organisasi dan P&K RSPO dan memengaruhi ke-RSPO-an seluruh produk TBS organisasi, maka semua anggota organisasi harus menanggung risikonya berupa penarikan sertifikat.

Karena sertifikatnya atas nama organisasi tani, maka organisasi tani dapat menjual TBS ke pabrik kelapa sawit mana saja (tentunya yang juga telah mendapatkan sertifikat RSPO) sepanjang harganya disepakati.

Karena sertifikat atas nama organisasi tani, maka biaya sertifikasi ditanggung renteng bersama anggota organisasi tani. Pendanaan sertifikasi dan pengoperasian ICS dapat diperoleh dengan pemotongan sebagian hasil penjualan TBS tiap anggota ke organisasi tani.

Diagram 4.1. Konsep model pertama untuk sertifikasi kelompok, di mana ICS dikelola oleh organisasi tani



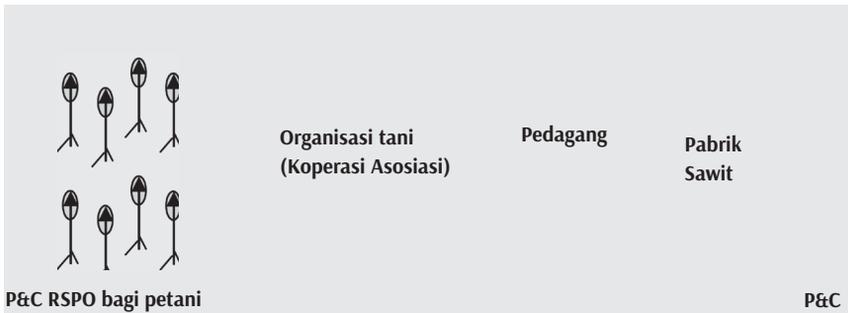
Bicara keberlanjutan program sertifikasi RSPO bagi organisasi tani yang menggunakan model ini, tetap mengharuskan organisasi tani bekerjasama dengan pedagang TBS dan atau pabrik sawit yang telah mendapatkan sertifikasi RSPO. Tentunya dengan sertifikat RSPO yang dimilikinya, posisi tawar organisasi tani menjadi lebih kuat dalam kerjasama dengan pemasar dan atau dengan pabrik sawit.

b. Sertifikat kelompok menggunakan mekanisme kontrak produksi

Pabrik sawit yang ingin memperoleh sertifikat RSPO bekerjasama dengan petani mitra dan atau dengan petani swadaya yang bergabung dalam organisasi tani dan atau dengan pedagang TBS. Pabrik sawit memiliki kontrak dengan organisasi tani dan menjalankan ICS bagi semua rantai pasokan sawitnya. Semua pelaku dalam rantai pasokan terdaftar dan menjadi subjek inspeksi yang dilakukan oleh pabrik sawit.

Sertifikat RSPO dapat diajukan dan diberikan atas nama pabrik sawit. Pabrik sawit yang membiayai dan bertanggungjawab bagi penerapan ICS untuk memastikan kesesuaian P&K RSPO di seluruh rantai pasokannya.

Diagram 4.2. Sertifikat kelompok menggunakan mekanisme kontrak produksi di mana ICS dikelola oleh pabrik sawit



Identifikasi Kesesuaian Penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO

Dalam mempersiapkan intervensi lebih lanjut untuk mendukung langsung para petani dalam isu keberlanjutan sawit, Hivos menugaskan BIOCert untuk melakukan identifikasi kesenjangan (*gap identification*) antara hal-hal yang tercakup dalam Prinsip dan Kriteria RSPO dengan praktik yang dijalankan sehari-hari oleh para petani sawit di lapangan.

1. Hasil Identifikasi Kesesuaian Penerapan Prinsip Dan Kriteria RSPO

Hasil identifikasi ini dapat dilihat pada tabel di Lampiran 1.

2. Kesimpulan dari Penugasan

Berdasarkan kondisi di lapangan dan analisa kesesuaian penerapan P&K RSPO, petani kemitraan dan petani swadaya di Desa Bungo Tanjung dan Desa Rawa Jaya Kec. Tapir Selatan Kab. Merangin Jambi belum memenuhi P&K RSPO. Hal ini disebabkan karena:

- Kurangnya sosialisasi RSPO kepada petani. Petani tidak mengetahui dan memahami mengenai RSPO.
- Konflik sosial
 - a. Terdapat berbagai masalah yang terjadi dalam program kemitraan. Hal ini disebabkan karena ketiadaan transparansi mekanisme kemitraan yang dibangun antara PT SAL dengan petani kemitraan, termasuk mengenai penentuan harga dan mutu TBS. Hal lainnya disebabkan karena PT SAL tidak konsisten dalam pelaksanaan kesepakatan kemitraan yang telah dibuat.
 - b. Permasalahan lainnya berupa konflik lahan dengan masyarakat lokal akibat pembukaan kebun sawit di lokasi studi tanpa persetujuan dan kompensasi dengan masyarakat lokal. Konflik lahan juga terjadi dengan petani kemitraan, di mana lahan yang diterima tidak sesuai luas dan bentuknya dengan sertifikat tanah yang diterima.
- Organisasi tani
 - a. Petani kemitraan: koperasi dan kelompok tani lebih berfungsi sebagai kepanjangan tangan PT SAL terkait aspek pembelian TBS dan produksi sawit. Koperasi melakukan pembelian TBS sesuai harga yang ditetapkan PT SAL dan sebagai tempat pembayaran cicilan petani.
 - b. Petani swadaya. Fungsi kelompok tani sudah berjalan dengan baik untuk mengelola perbaikan jalan dan rencana peremajaan

kebun sawit. Aspek teknis, mutu dan penguatan organisasi belum menjadi prioritas program organisasi tani. SPKS Jambi diharapkan mampu melakukan pendampingan kelompok tani untuk penguatan aspek teknis, mutu dan penguatan organisasi, namun kegiatan yang dilakukan baru sebatas identifikasi dan membangun kontak dengan kelompok tani yang ada di desa tersebut.

- Aspek kesehatan dan lingkungan.
 - a. Petani menggunakan agrokimia (pupuk, herbisida) tanpa memakai alat pelindung.
 - b. Agrokimia digunakan dekat sumber air (anak sungai, kurang dari 2 meter) sehingga berpotensi mencemari sumber air.
 - c. Kemasan bekas agrokimia disimpan di belakang rumah atau dibuang/dikubur di kebun tanpa dibersihkan terlebih dahulu.
 - d. Praktik monokultur perkebunan sawit mengancam keragaman hayati.

3. Rekomendasi Pengembangan Sertifikasi RSPO bagi Kelompok Tani

Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil studi, untuk saat ini pengembangan sertifikasi RSPO bagi kelompok tani lebih sesuai dikembangkan kepada petani swadaya, dengan alasan bahwa:

- a. Petani swadaya (memiliki lahan pekarangan dan petani yang telah selesai masa kreditnya) umum terdapat di lokasi studi dan memiliki potensi kapasitas produksi besar.
- b. Organisasi tani (dimasing-masing desa terdapat 4 kelompok tani) yang ada dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem pengawasan mutu internal. Inisiatif pengumpulan dana dari hasil penjualan menunjukkan semangat petani swadaya untuk berorganisasi. Tujuan untuk perbaikan jalan dan *replanting* dapat menjadi pintu masuk untuk membangun penguatan organisasi dan pengembangan sistem pengawasan mutu internal.

Rekomendasi bagi pengembangan sertifikasi RSPO bagi kelompok tani di desa lokasi studi:

- a. Penguatan organisasi tani.
- b. Sosialisasi P&K RSPO dan program sertifikasi RSPO kepada semua pihak yang terlibat (petani, kelompok tani dan pemasar yang selama ini terlibat dalam pemasaran dengan petani swadaya, pemda, SPKS JAMBI dan SETARA Jambi). Sosialisasi ini untuk mengetahui harapan dan menyatukan visi bagi semua pihak yang terlibat terkait dengan pengembangan program sertifikasi RSPO bagi kelompok tani.
- c. Pengembangan ICS di organisasi tani.
 - i. Pelatihan ICS bagi organisasi tani. Semua pihak yang terlibat ikut serta dalam pelatihan ICS. Bagi petani dan kelompok tani, pelatihan ini menjadi panduan dalam pengembangan ICS di organisasinya. Bagi SETARA Jambi dan SPKS JAMBI, pelatihan ini penting untuk mengetahui sistem ICS karena mereka dapat berfungsi untuk mendampingi kelompok tani untuk pengembangan ICS.
 - ii. Membangun ICS di organisasi tani. Komponen ICS seperti struktur dan personel tani, aturan main organisasi termasuk keanggotaan, menyusun P&K RSPO berdasarkan konteks lokal dan sangsi, program pelatihan dan monitoring internal dibangun bersama kelompok tani, SETARA Jambi dan SPKS JAMBI berdasarkan karakteristik lokal (bahasa, pengetahuan lokal).
- d. Membangun akses pasar.
 - i. Membangun koperasi petani sawit. Kelompok tani yang ada bersatu dalam koperasi. Koperasi berfungsi untuk mengelola ICS dan pemasaran TBS petani. Sebagai penanggung jawab ICS, koperasi memiliki unit ICS yang bertugas mengidentifikasi petani anggota dan monitoring secara regular, kelompok tani yang ada dapat berperan menjalankan fungsi pengorganisasian dan pelatihan bagi anggota. Pembiayaan program ICS dan sertifikasi RSPO dapat berasal dari penjualan TBS petani ke koperasi yang mekanismenya disepakati bersama anggotanya.

- ii. Mengidentifikasi pabrik kelapa sawit. Produksi TBS yang dihasilkan koperasi harus dihubungkan dengan pabrik kelapa sawit. Hal ini sungguh penting untuk keberlanjutan program ICS dan sertifikasi RSPO. Koperasi petani sawit perlu mengidentifikasi pabrik kelapa sawit yang memiliki komitmen dan sertifikasi RSPO sebagai mitra produksi. Apabila pabrik sawit tersebut bersedia menerima TBS bersertifikasi RSPO dengan harga yang sesuai dan mekanisme kerjasama yang transparan, selanjutnya koperasi mengajukan sertifikasi RSPO.
- e. Sertifikasi RSPO.

Koperasi mengajukan sertifikasi RSPO kepada lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi RSPO. Sertifikat diajukan bagi dan atas nama koperasi. Sertifikat ini menjadi kebanggaan bersama dan meningkatkan posisi tawar koperasi.



05

**MENDUKUNG PETANI
SWADAYA DI JAMBI**



“

Yayasan
SETARA Jambi
mengidentifikasi
hampir tidak ada
organisasi yang
bekerja di isu sawit
yang fokus pada
peningkatan mutu
dan mempersiapkan
petani menghadapi
sertifikasi.

”

Kerjasama Hivos dengan Yayasan SETARA Jambi

HIVOS SUDAH MEMULAI komunikasi dengan Yayasan SETARA Jambi semenjak pertengahan tahun 2007. Pada waktu itu Hivos mendapatkan tawaran untuk bergabung dalam Palm Oil Monitoring Initiative (POMI) yang didukung oleh gabungan beberapa donor. Inisiatif gabungan tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang terkena dampak dari perluasan kebun sawit di Indonesia.

Hivos tidak bisa mendukung POMI karena disana sudah ada salah satu lembaga Belanda, Cordaid, yang juga mendukung inisiatif tersebut, hal yang sudah disepakati bersama oleh beberapa NGO Belanda yang disebut sebagai *gentle agreement*. Selain itu, Hivos juga lebih tertarik untuk mendukung inisiatif langsung di tingkat akar rumput, dalam rangka mempersiapkan petani sawit skala kecil dan marginal untuk mendapatkan sertifikasi RSPO.

Sebelumnya Hivos berharap kalau mitra lamanya, Sawit Watch, yang didukung semenjak tahun 2003, bersedia untuk melakukan pembinaan untuk petani sawit skala kecil dalam rangka mempersiapkan sertifikasi kelompok. Tetapi pada saat itu, suara anggota di Sawit Watch masih belum menemukan kata sepakat, masih ada sebagian anggota yang enggan untuk bergabung dalam RSPO, yang menurut pertimbangan mereka, sertifikasi RSPO tidak akan banyak memberikan keuntungan kepada petani kecil, sertifikasi tersebut hanya akan memperjuangkan kepentingan perusahaan sawit besar.

Pada saat itu juga masih belum ada konsep yang jelas mengenai sertifikasi sawit untuk petani kecil, terutama untuk petani sawit swadaya. Dikarenakan Hivos memiliki banyak pengalaman mempersiapkan petani menghadapi sertifikasi organik, maka Hivos dianggap bisa menjadi salah satu pelopor dalam mengembangkan panduan dan ketentuan sertifikasi kelompok untuk petani sawit swadaya dengan menggunakan konsep yang sama pada sertifikasi organik petani padi atau kelapa, yaitu dengan terlebih dahulu membangun kelompok *Internal Control System (ICS)*, yang disebut juga dengan penjaminan mutu internal. ICS memungkinkan petani untuk saling menginspeksi dan saling mengoreksi kebun mereka, yaitu melihat apakah kebun tersebut sudah menjalankan prinsip dan kriteria RSPO.

Memasukan isu petani sawit kecil ke dalam agenda RSPO adalah hal yang penting untuk dilakukan, karena pada saat itu permasalahan petani kecil masih belum banyak dibahas dalam forum tersebut, ada ketakutan kalau forum tersebut hanya akan didominasi oleh perusahaan besar, sehingga keberadaan forum tersebut tidak memberikan manfaat kepada petani sawit, terutama petani sawit swadaya. Beberapa dari anggota RSPO yang berasal dari perusahaan masih ada yang melanggar hak-hak petani dan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah kebun di mana perusahaan tersebut beroperasi.

Wacana bahwa semua produsen sawit, termasuk petani kecil harus mendapatkan sertifikasi RSPO, juga ditakutkan akan membuat petani sawit kecil dan marjinal kesulitan dalam mengakses pasar dengan harga yang layak. Banyak pihak yang meragukan apakah petani sawit skala kecil tersebut yang pada umumnya berpendidikan rendah mampu untuk menerapkan prinsip dan kriteria RSPO tersebut sehingga jika wacana sertifikasi tersebut akan dilanjutkan maka penting bagi petani sawit kecil tersebut untuk terlibat dalam merumuskan prinsip dan kriteria yang sesuai dengan konteks lokal sehingga bisa mereka terapkan. Selain itu, tentunya juga dibutuhkan investasi yang tidak sedikit guna membangun kapasitas mereka sehingga bisa memahami dan menerapkan prinsip dan kriteria RSPO tersebut.

Yayasan SETARA Jambi mengidentifikasi kalau hampir tidak ada organisasi yang bekerja di isu sawit yang fokus pada peningkatan mutu dan mempersiapkan petani dalam menghadapi sertifikasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa banyak pihak yang meragukan kalau sertifikasi RSPO bisa diterapkan pada petani sawit skala kecil, terutama petani swadaya. Untuk bisa membantah keraguan tersebut maka harus ada pembuktian, maka untuk kerja langsung di tingkat petani; mempersiapkan mereka dalam menerapkan prinsip dan kriteria RSPO penting untuk dilakukan.

Yayasan SETARA Jambi memenuhi kriteria untuk menjadi mitra kerja Hivos. Yayasan SETARA Jambi memiliki hubungan yang sangat baik dengan beberapa perusahaan sawit yang ada di Jambi, meskipun mereka selalu memperjuangkan kepentingan petani sawit swadaya dan masyarakat yang tinggal di lokasi sawit yang terkena dampak negatif dari sawit. SETARA juga memiliki pengalaman bekerja di tingkat akar rumput terkait dengan isu sawit yaitu mulai

dari melakukan penelitian, diskusi kelompok, pelatihan untuk petani dengan berbagai macam topik, dan juga lobi terhadap banyak pihak guna membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh petani.

Hal ini membuat SETARA merupakan mitra yang tepat untuk bekerja sama dalam hal membangun kapasitas petani, membangun organisasi atau memperkuat kelompok yang ada, dan mempersiapkan mereka sehingga mereka nantinya mampu memperoleh sertifikasi kelompok. Dalam diskusi lebih lanjut, baik Hivos dan Yayasan SETARA memiliki pemahaman yang sama, bahwa sertifikat RSPO bukanlah tujuan akhir dari proyek yang akan didukung oleh Hivos, tetapi penerapan P&K RSPO tersebut adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas dari petani sawit swadaya.

Jika petani menerapkan ketentuan yang ada dalam P&K seperti ketentuan pemupukan maka dapat dipastikan kalau hasil kebun akan lebih baik. Sertifikasi kelompok juga mengharuskan adanya kelompok atau organisasi petani yang kuat, dan tentu saja melalui organisasi maka petani dapat melakukan pemasaran kolektif, mereka dapat menegosiasikan harga yang lebih baik, dan melalui organisasi mereka juga akan dapat melakukan lobi dan advokasi kepada pemerintah, perusahaan, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Pada tahun 2008, Hivos pernah mendukung Yayasan SETARA Jambi (pada waktu itu bernama YKR) melalui *microfund*, yaitu dukungan pendanaan untuk proyek berdurasi pendek, untuk penguatan hak-hak petani sehubungan dengan penyelesaian konflik lahan, dan pada saat yang sama Hivos juga mengirimkan konsultan, BIOCert, guna melihat apakah kelompok yang di dampingi Yayasan SETARA memungkinkan untuk menjadi kelompok ujicoba dalam menerapkan prinsip dan kriteria RSPO, dan hasilnya adalah mungkin bisa berhasil.

Kontrak kerja sama Hivos dengan Yayasan SETARA Jambi terkait dengan persiapan sertifikasi terhadap petani sawit swadaya dibagi kedalam dua tahapan, yaitu tahap satu, dari November 2008 hingga November 2009. Kemudian dilanjutkan dengan tahap dua yaitu dari bulan Juni 2010 hingga Juni 2013.

Kegiatan Yayasan SETARA yang didukung oleh Hivos sejalan dengan kebijakan program *Sustainable Production* Hivos yaitu: 1) meningkatkan akses pasar petani skala kecil melalui peningkatan kualitas produk, 2) membangun

kapasitas CSO guna mendorong terciptanya lingkungan yang berbasis hak dan pasar. Kegiatan yang dapat dilakukan guna mendukung kebijakan pertama adalah: mendorong peningkatan mutu TBS di tingkat petani sawit swadaya sehingga bisa bersaing dalam rantai nilai perdagangan sawit baik di tingkat nasional maupun internasional.

Untuk itu maka kapasitas semua aktor yang terlibat, misal dalam hal sistem manajemen kualitas (QMS), harus ditingkatkan. Sedangkan terkait dengan kebijakan yang kedua maka hal-hal yang bisa dilakukan adalah: membangun kapasitas petani swadaya sehingga mampu melakukan lobi untuk meminta perbaikan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan mereka, dan juga untuk agar memiliki kepercayaan diri untuk memberikan masukan pada *national platform* sehingga standar global prinsip dan kriteria RSPO dapat diturunkan kepada konteks nasional/lokal sehingga realistis untuk diterapkan.

Kerja yang dilakukan oleh Yayasan SETARA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja-kerja yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil lainnya dalam merespons perkembangan isu sawit berkelanjutan di tingkat nasional dan global. Dalam kerjanya Yayasan SETARA Jambi juga tidak sendiri, Yayasan SETARA Jambi berjejaring dengan Sawit Watch di tingkat nasional.

Yayasan SETARA memiliki *track record* yang bagus, terutama di Provinsi Jambi, dalam menggerakkan banyak pihak sehingga menjadi peduli terhadap isu sawit berkelanjutan dan bahkan juga memengaruhi kebijakan lokal. Dukungan pendanaan dari Hivos, akan membuka lebih banyak ruang dan kesempatan bagi Yayasan SETARA untuk memengaruhi kebijakan sawit lokal dan nasional bahkan internasional.

Ketika pertama menjalin kerja sama dengan Hivos, Yayasan SETARA Jambi masih belum memiliki pengalaman kerja dalam hal teknis budi daya sawit, peningkatan mutu, ataupun akses pasar. Sertifikasi kelompok juga masih hal yang baru bagi Yayasan SETARA. Oleh karena itu, bagian dari dukungan pendanaan dari Hivos adalah *capacity building* untuk staf Setara, baik melalui pelatihan, *workshop*, pendampingan dan *coaching* yang dilakukan oleh beberapa konsultan yang di perbantukan oleh Hivos.

Konsultan tersebut memiliki *expertise* yang berbeda: konsultan pengorganisasian kelompok tani, penjaminan mutu dan sertifikasi kelompok,

seperti BIOCert. Atau konsultan yang memiliki banyak pengalaman di bidang perkoperasian, dalam hal manajemen dan tata kelola koperasi seperti Rekadesa, dan banyak konsultan lainnya.

Selain Hivos, Yayasan SETARA Jambi juga bekerja dengan beberapa NGO International lain, seperti Veco, Oxfam Novib, DOEN/AID Environment, Misereor, dan lain-lain. Tetapi mereka memberikan pendanaan untuk isu yang berbeda, seperti isu ketahanan pangan.

Latar Belakang Masalah

Di Provinsi Jambi, ekspansi kebun kelapa sawit terus terjadi. Ekspansi tersebut tidak lagi mengancam hutan-hutan dataran rendah, tetapi juga telah bergeser ke hutan dataran tinggi serta area perladangan masyarakat lokal. Perbatasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat kini telah masuk menjadi areal yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar. Tak mengherankan jika konflik yang terjadi tidak hanya dengan manusia tapi juga konflik dengan satwa.

Kampanye-kampanye yang gencar dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil tentang dampak dari ekspansi perkebunan kelapa sawit bagi kelangsungan lingkungan hidup, flora fauna dan kelangsungan kehidupan masyarakat, telah berhasil merubah cara pandang pasar, terutama di tingkat konsumen, mereka menjadi lebih peduli mengenai bagaimana produk yang mereka konsumsi dihasilkan. Tekanan pasar kemudian memaksa para aktor yang terlibat dalam rantai minyak sawit mencari cara agar pasar produk minyak sawit mereka tetap dapat diterima.

Forum RSPO merupakan salah satu jawaban atas tuntutan pasar tersebut, di mana forum menyepakati perlunya sebuah jaminan bahwa produk yang dihasilkan telah mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan. Sertifikat RSPO menjadi salah satu jaminan bahwa minyak sawit tersebut sudah dihasilkan dari praktik-praktik yang baik dan berkelanjutan. Bagaimanapun keanggotaan RSPO masih didominasi oleh perusahaan sawit skala besar. Padahal keberadaan petani kelapa sawit skala kecil dalam rantai minyak sawit juga tidak bisa dianggap remeh, karena petani sawit skala kecil (*small holders*)

merupakan pemasok bahan baku bagi industri minyak sawit dalam jumlah yang signifikan. Di Indonesia misalnya, hampir seluruh pabrik CPO memperoleh bahan baku (TBS) tidak hanya dari kebun inti, tapi juga sangat tergantung dari pihak luar dalam hal ini petani kelapa sawit (baik plasma atau mandiri).

Ketergantungan tersebut terlihat dari total luas perkebunan yang dikelola oleh petani kelapa sawit yang mencapai 30 persen dari luas total perkebunan, yaitu mencapai 6 juta Ha di tahun 2006, hal ini berarti bahwa petani kelapa sawit di tanah air menyumbang sekitar 30 persen TBS yang dipasok ke pabrik-pabrik minyak sawit di Indonesia, dan secara global menyumbang 25 persen sawit yang diperdagangkan di dunia.

Bahkan di Provinsi Jambi, Petani kecil tidak saja menguasai 63,48% dari total keseluruhan lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi, tapi juga menguasai *supply* bahan baku TBS, hal ini dapat dilihat dari produksi CPO petani yang mencapai 584.008 ton di tahun 2006, sedangkan produksi dari kebun inti hanya 434.760 ton. Artinya keberadaan petani kelapa sawit dalam rantai minyak sawit tidak bisa dianggap kecil.

Dari aspek sosial dan lingkungan, penting untuk melibatkan petani sawit swadaya dalam wacana sertifikasi RSPO. Karena petani swadaya sendiri juga merupakan aktor yang ikut mengkonversi hutan dan juga ikut menyumbang dampak negatif terhadap lingkungan, dan bahkan juga sosial. Tetapi bagaimanapun, tentu saja sertifikasi juga diharapkan dapat menjawab persoalan kemiskinan dan rendahnya posisi tawar petani di rantai sawit global. Artinya, dalam perumusan syarat dan ketentuan sertifikasi bagi petani sawit swadaya maka petani tersebut harus dilibatkan dalam setiap tahapan dan proses. Jika petani tidak dilibatkan, dikhawatirkan kalau prinsip dan kriteria RSPO akan dijadikan sebagai instrumen baru yang mengecilkkan peran petani kelapa sawit.

Implementasi Kegiatan

1. Kerjasama tahap I

Kerjasama Hivos dengan Yayasan SETARA tahap satu berjudul “Strengthening Small-Scale Farmers Position in the Global Chain of

Certified Palm Oil”, dengan periode proyek selama satu tahun yaitu dari bulan November 2008 hingga November 2009. Nilai total proyek adalah 478,600,000 rupiah. Penjelasan lebih rinci mengenai proyek dijelaskan sebagai berikut:

a. Longterm Objective

Meningkatkan pendapatan petani sawit dan memperbaiki posisi petani dalam rantai produksi global minyak sawit melalui harmonisasi relasi antara petani dengan perusahaan, mendorong akses pasar yang berkeadilan serta mengentaskan kemiskinan secara konsisten dengan membangun P&K minyak sawit berkelanjutan.

b. Short Time Objective

Mendorong kelompok petani sawit membangun pemaknaan P&K RSPO yang lahir dari kepentingan petani kecil dan budaya setempat dengan melibatkan partisipasi banyak pihak sehingga sistem yang dibangun lebih adil, demokratis dan menjawab persoalan mendasar petani kelapa sawit. Pemaknaan P&K Minyak sawit berkelanjutan diharapkan menjadi dasar pembentukan sistem pengawasan internal (ICS) yang bertujuan membangun kemandirian, posisi tawar dan meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit.

c. Project Activities

1. Memperkuat kelembagaan/organisasi petani sawit.

Kelembagaan, organisasi atau kelompok merupakan salah satu syarat penting dalam sertifikasi, hal ini sudah lama disadari oleh Yayasan SETARA Jambi. Oleh karena itu, salah satu kegiatan utama proyek adalah memperkuat kelompok yang sudah ada, seperti memfasilitasi restrukturisasi organisasi jika diperlukan, memfasilitasi agar kelompok/ organisasi tani tersebut memiliki AD/ART, memiliki rencana kerja, memiliki sumber pendanaan, dan banyak lainnya.

Bagaimanapun kelembagaan menjadi kuat maka dibutuhkan pengurus yang loyal, memiliki kapasitas, dipercaya dan peduli pada kepentingan anggota. Sebaliknya, anggota juga harus aktif dalam menghadiri rapat-rapat, aktif menjalankan program kerja yang sudah

disepakati, dan mendukung pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.

Ketika sekumpulan orang yang memiliki permasalahan seharusnya lebih mudah untuk disatukan, sehingga bersama-sama mereka bisa memperjuangkan kepentingan mereka. Tetapi membangun organisasi, terutama yang berbentuk koperasi, tidaklah mudah. Desa Bungo Tanjung yang menjadi lokasi proyek SETARA pernah mengalami pengalaman yang buruk dalam berorganisasi. Pengurus koperasi menyalahgunakan wewenangnya, tidak ada transparansi, dan juga terjadi korupsi sehingga banyak petani yang dirugikan. Trauma tersebut telah menyisakan kecurigaan, petani tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap pemimpin, dan mereka tidak tertarik lagi bergabung dalam sebuah organisasi untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

2. Memperkuat pemahaman mengenai RSPO

Belum banyak petani yang mengetahui keberadaan RSPO, apalagi mengenai P&K RSPO dan isu sertifikasi. Padahal Yayasan SETARA sudah mulai menyosialisasikan mengenai RSPO melalui diskusi-diskusi kelompok di desa semenjak tahun 2007, tetapi diskusi tersebut lebih banyak dilakukan di petani plasma bukan petani swadaya. Atas saran dari BIOCert, konsultan yang diperbantukan oleh Hivos yang melakukan *feasibility study*, Setara memfokuskan intervensi hanya untuk petani sawit swadaya, yaitu petani sawit swadaya di Desa Bungo Tanjung.

Dari beberapa kegiatan sosialisasi RSPO yang dilakukan berkembang diskusi bahwa petani swadaya tidak keberatan untuk menerapkan prinsip dan kriteria yang sudah ditetapkan tetapi untuk menerapkan hal itu bukan hal yang mudah, misal terkait dengan ketentuan pemupukan; akses pupuk petani masih terbatas, dan sulit didapatkan. Persoalan lainnya adalah mengenai sertifikat tanah milik petani swadaya, hingga saat ini ketika kebun sawit sudah mencapai umur 15 tahun, pemerintah tidak pernah mengeluarkan sertifikat tanah mereka. Tak hanya itu, kendala lain yang tak kalah penting adalah kurangnya pencatatan dari beberapa kegiatan pengelolaan kebun oleh petani swadaya, seperti pencatatan tentang jumlah luas kebun, jumlah pohon, penggunaan pestisida, peng-

gunaan pupuk, dan peta letak kebun. Padahal pendokumentasian beberapa hal diatas menjadi salah satu indikator mayor dalam P&K RSPO.

Beberapa aktivitas untuk memperkuat pemahaman petani mengenai P&K RSPO dengan mengadakan seminar. Misalkan seminar yang berjudul “Sertifikasi RSPO bagi Petani Kelapa Sawit; Ancaman atau Peluang?” yang terlaksana pada bulan Januari 2009. Pasca kegiatan seminar tersebut, sosialisasi P&K RSPO masih gencar dilakukan melalui diskusi-diskusi internal dan pertemuan yang diadakan di desa yang dilakukan sepanjang bulan Februari hingga April 2009.

3. Memperkuat Struktur ICS (*agreement*, P&C, keanggotaan, hak dan kewajiban)

Lokasi pilot proyek berada di Desa Bungo Tanjung, Kabupaten Merangin, dengan jumlah anggota yang siap untuk menerapkan P&K RSPO sebanyak 220 petani. Tapi inisiatif proyek ini diharapkan mampu memberi efek bola salju bagi 4.500 petani dengan luas kebun mandiri mencapai 6000 Ha di sembilan desa sekitarnya.

Sebetulnya di Desa Bungo Tanjung memiliki sebuah organisasi tetapi organisasi tersebut hanya aktif berfungsi pada waktu panen dan pada waktu kegiatan gotong royong. Sehingga susunan struktur organisasi masih sangat sederhana, yaitu hanya ada: ketua, bendahara, ketua blok dan anggota blok. Organisasi atau kelompok yang berfungsi untuk mengendalikan mutu TBS masih belum ada. Melihat ini, Yayasan SETARA menilai bahwa cikal bakal organisasi petani sudah ada, dan yang penting untuk dilakukan selanjutnya adalah memasukkan fungsi-fungsi pengawasan internal dalam struktur tersebut. Dengan penambahan fungsi-fungsi, tentu diperlukan juga penambahan divisi dan personal.

4. Memperkuat fungsi pengawasan kelompok, pengawasan mutu produk

SETARA bersama-sama dengan pengurus kelompok, mencoba membangun beberapa kesepakatan bersama tingkat internal. Walaupun SETARA terlibat dalam perumusan tapi seluruh kesepakatan tersebut adalah murni dari anggota kelompok. Kesepakatan itu seperti : syarat-syarat menjadi anggota, kewajiban dan hak. Selain kesepakatan internal

keanggotaan, juga mencoba membangun standar-standar internal tentang mutu kualitas produk dengan tetap mengacu pada P&K RSPO Mayor, tapi untuk tahapan ini, indikator-indikator yang digunakan masih berupa indikator sederhana.

5. Membangun kapasitas pengurus organisasi

Keterbatasan pengetahuan pengurus tentang pengelolaan organisasi, juga menjadi salah satu persoalan penting. Karena kelembagaan petani yang kuat adalah menjadi tonggak bagi kekuatan posisi petani anggotanya. Menjawab persoalan tersebut, maka pada tanggal 1-9 Juni 2009, tiga orang petani sawit dari Desa Bungo Tanjung dan satu orang staf Yayasan SETARA Jambi melakukan studi banding/ belajar ke manajemen ICS Koperasi Jatirogo, Kulon Progo, Yogyakarta.

Kunjungan berlangsung selama satu minggu, di mana peserta studi banding melihat dan mengamati serta berdiskusi dengan para pengurus dan anggota ICS gula semut. Mereka berbagi pengalaman tentang bagaimana membangun dan menguatkan organisasi petani, dan bagaimana agar produk petani menjadi produk yang berkualitas dan bermutu sehingga dapat menaikkan nilai jual. Selain itu, peserta studi banding juga belajar bagaimana membangun kesepahaman dan komitmen dalam kepengurusan.

Hal lain, peserta juga belajar bahwa mereka harus meningkatkan keterlibatan perempuan. Selain belajar mengenai ICS, peserta studi banding juga belajar mengenai bagaimana meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan pekarangan dengan bertanam sayur atau membuka kolam ikan.

Sekembali dari Kulon Progo, peserta studi banding membagi pengalaman mereka kepada semua anggota kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan ICS yang diikuti oleh seluruh pengurus dan perwakilan anggota kelompok. Peserta pelatihan mencapai 40 orang dengan waktu pelatihan selama 2 hari penuh. Pelatihan dilakukan pada pertengahan bulan Juli 2009.

6. Meningkatkan kapasitas anggota kelompok

Masalah utama yang dihadapi oleh petani swadaya adalah lemahnya pengetahuan dalam merawat kebun, dan dalam mengendalikan hama. Sehingga tak mengherankan jika kualitas dan produktivitas kebun petani swadaya jauh di bawah produksi petani plasma. Untuk menjawab ini, Yayasan SETARA bersama dengan pengurus kelompok menyelenggarakan pelatihan manajemen perawatan kebun. Pelatihan yang dilaksanakan pada tgl 25-26 Juni, diisi oleh pemateri dari Sub Dinas Pengembangan-Dinas Perkebunan Kabupaten Merangin. Pelatihan tersebut tidak hanya berupa teori, tetapi juga berupa praktik. Pada waktu praktik di kebun, petani menjadi paham mengenai kondisi kebun mereka dan juga memahami hama-hama apa saja yang sedang menyerang kebun mereka.

7. Memperkuat catatan dan pendokumentasian kelompok

Pelatihan ICS melahirkan beberapa rekomendasi bagi kelompok, yaitu bagaimana mereka membangun standar-standar berkelanjutan, kesepakatan keanggotaan, sanksi anggota yang melanggar, dan juga pendokumentasian dengan lebih sempurna. Kelompok tani sudah mulai melakukan pendataan dan mencatat nama-nama anggota kelompok, luas kebun, pupuk yang sering digunakan, sumber bibit, dan lain-lain. Mereka juga sudah mulai melakukan pemetaan kebun mereka.

8. Menyediakan perpustakaan petani

Untuk menambah referensi bagi petani swadaya dalam mengelola kebun, dan juga meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan pertanian-pertanian pangan lainnya, maka Yayasan SETARA bersama dengan pengurus kelompok bersama-sama membangun perpustakaan yang diisi dengan buku-buku seputar pertanian, pengelolaan kebun sawit, pengendalian hama, pembuatan pupuk organik, dan banyak buku pertanian lainnya. Buku-buku yang ada diperpustakaan tersebut disediakan oleh Yayasan SETARA sedangkan pengurus kelompok menyediakan rumah yang menjadi lokasi perpustakaan.

9. Mendorong pemerintah Kabupaten dan Provinsi agar mendukung inisiatif sertifikasi kelompok

Lobi dan *Focus Group Discussion* yang dilakukan oleh Yayasan SETARA terutama di tingkat Provinsi telah membuahkan hasil. Pada bulan April, Gubernur Provinsi Jambi mengeluarkan surat himbuan kepada seluruh perusahaan perkebunan dan petani di Provinsi Jambi untuk segera mengimplementasikan P&K RSPO.

10. Berbagi pengalaman mengenai penerapan P&K RSPO di Petani swadaya

Yayasan SETARA mampu menghadirkan rasa optimisme di banyak pihak mengenai kemungkinan petani sawit swadaya untuk terlibat dalam sertifikasi RSPO. Setara membagi pengalamannya bekerja dengan petani swadaya dalam menerapkan P&K RSPO di acara *Public Forum* yang diselenggarakan pada Tgl 11 Agustus 2009 di Jakarta. Bukan hanya karena jumlahnya lebih besar dari petani plasma, tapi juga bahwa petani swadaya yang selama ini terabaikan dari rantai minyak sawit dan sertifikasi ternyata mampu melakukan hal-hal yang dianggap banyak pihak adalah mustahil.

d. *Project Outputs*

Di bawah adalah rangkuman *output* kerja Yayasan SETARA Jambi Selama satu tahun program berjalan:

1. Telah terbentuk kelompok ICS/SPI (Sistem Pengawasan Internal), yang beranggotakan petani sawit swadaya di Desa Bungo Tanjung, Merangin, Jambi.
2. Adanya perpustakaan petani swadaya kelapa sawit di Desa Bungo Tanjung yang berfungsi sebagai *learning centre*, di mana gedung perpustakaan tersebut adalah kontribusi dari petani swadaya.
3. Meningkatnya kapasitas petani sawit swadaya melalui berbagai macam pelatihan yang diselenggarakan, baik yang terkait dengan peningkatan produksi dan kualitas (QMS), maupun terkait dengan manajemen organisasi, pengembangan SOP, dan banyak lainnya.
4. Pemanenan, pemupukan, dan perawatan kebun petani sawit swadaya menjadi lebih terorganisir sejak berjalannya kelompok ICS Bungo Tanjung.

5. Semakin membaiknya harga TBS milik petani swadaya di tingkat pabrik, terutama PT Sari Aditya Loka yang disebabkan pemasaran secara kolektif dan kualitas TBS yang lebih baik dari sebelumnya.
6. Terjadi perluasan dampak program, di mana petani sawit swadaya di beberapa desa di sekitar desa Bungo Tanjung juga mulai tertarik untuk membentuk kelompok ICS.
7. Telah terbentuknya koperasi anggota ICS, sebagai usaha untuk mendukung perbaikan produksi bagi anggota. Koperasi tersebut masih belum memiliki badan hukum, tetapi sudah memiliki AD/ART.

2. Kerjasama tahap II

Kerjasama Hivos dengan Yayasan SETARA tahap dua berjudul “Promoting Sustainable Palm Oil Practices for Smallholder Farmers in Jambi, Indonesia”, proyek berdurasi tiga tahun yaitu dari bulan Juli 2010 hingga Juli 2013. Nilai total proyek berdasarkan kontrak yang ditandatangani adalah 2,166,700,000 rupiah. Gambaran lebih rinci mengenai proyek dijelaskan sebagai berikut Di bawah:

a. Long Term Objective

Mempromosikan minyak sawit berkelanjutan di tingkat petani swadaya di Provinsi Jambi, melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan produksi melalui Good Agriculture Practice (GAP).

b. Short Time Objective

Memperkuat kelembagaan Petani swadaya melalui ICS/SPI (Replikasi ICS Bungo Tanjung), dan mendorong penggunaan praktik-praktik terbaik GAP dalam memproduksi minyak sawit berkelanjutan di Hitam Ulu Kabupaten Merangin.

c. Project Activities

1. Penguatan organisasi kelompok petani kelapa sawit mandiri

Pada proyek tahap I, Yayasan SETARA Jambi telah berhasil membentuk kelompok ICS di Desa Bungo Tanjung, Merangin, Jambi. Tetapi kelompok tersebut hanya beranggotakan 220 orang, jumlah tersebut masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah petani swadaya yang ada di Jambi. Oleh karena itu, pada fase dua ini, Yayasan SETARA Jambi bermaksud untuk melakukan perluasan dampak, dengan

menambah target penerima manfaat dan desa yang menjadi lokasi proyek. Pada fase dua ini Yayasan SETARA Jambi akan melakukan pendampingan di 10 desa. Pendampingan diarahkan untuk membentuk/memperkuat kelompok petani swadaya di desa-desa tersebut.

Yayasan SETARA Jambi melakukan pendampingan secara intensif di beberapa desa yang dianggap strategis, misal: Desa Mekar Jaya, Desa Gading Jaya, dan Desa Rawa Jaya di Kabupaten Merangin. Sedangkan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pendampingan intensif dilakukan di desa Bandar Jaya dan Desa Rantau Rasau.

Hasil dari pendampingan Yayasan SETARA adalah: 1) Terbentuknya Koperasi di Kecamatan Rantau Rasau, di mana anggotanya berasal dari 5 Desa. 2) Terbentuk beberapa Gapoktan di beberapa desa di Kabupaten Merangin, seperti: Gapoktan Gading Jaya, Gapoktan Bungo Tanjung, Gapoktan Tanjung Sehati dan Forum Komunikasi Petani swadaya di Desa Rawa Jaya.

2. Membangun koperasi petani sawit swadaya

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, petani sawit swadaya di Desa Bungo Tanjung menolak membentuk koperasi, mereka lebih memilih menjadi kelompok ICS dan kemudian berubah menjadi Gapoktan. Bagaimanapun, berdasarkan pengalaman Hivos mendukung berbagai kelompok tani di Indonesia, koperasi masih menjadi pilihan yang ideal, terutama jika kelompok tersebut bermaksud memberikan layanan simpan pinjam.

Ketika petani Sawit melakukan *replanting*, selama tiga hingga empat tahun pertama mereka akan kehilangan pendapatan. Selain itu biaya untuk melakukan *replanting* tidaklah sedikit, oleh karena itu harus dipersiapkan lebih awal. Jika petani sawit mulai menabung di koperasi maka 10 atau 15 tahun kedepan, uang mereka akan lebih dari cukup untuk melakukan *replanting*. Selain koperasi simpan pinjam, kelompok petani sawit swadaya juga bisa memberikan layanan lainnya seperti menjual saprotan, penjualan sawit secara kolektif, menjual kebutuhan Sembako dan banyak kegiatan lainnya.

Bersama dengan Rekadesa, Yayasan SETARA Jambi memberikan pelatihan membangun kesadaran berkooperasi: manfaat dan prinsip dasar kooperasi. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama tiga hari di bulan Februari 2011 di Desa Rantau Rasau. Beberapa petani sawit swadaya di beberapa desa tertarik untuk membentuk kooperasi sehabis mengikuti pelatihan tersebut. Kemudian Yayasan SETARA Jambi memfasilitasi pembentukan dan pengurusan izin kooperasi tersebut.

Kooperasi tersebut bernama kooperasi Kooperasi Serba Usaha Mitra Abadi Kesuma. Selanjutnya Yayasan SETARA Jambi berkonsentrasi untuk memberikan pelatihan kepada pengurus kooperasi, pelatihan untuk pengurus tersebut difokuskan pada pelatihan pembukuan. Kemudian pelatihan selanjutnya adalah pelatihan mengenai manajemen kooperasi yang diselenggarakan pada bulan September 2011. Penguatan kooperasi selanjutnya dilakukan melalui pendampingan intensif yang dilakukan oleh staf Yayasan SETARA Jambi dan konsultan Rekadesa yang ditempatkan di lokasi proyek.

KSU Mitra Abadi Kesuma bertujuan agar bisa menjadi mitra usaha bagi petani sawit swadaya, memberikan layanan pinjaman modal bagi petani sawit swadaya, pemasaran produk secara kolektif, memberikan berbagai macam pelatihan teknis budidaya sawit kepada petani sawit, dan juga petani karet, serta mengusahakan partisipasi aktif dari anggota perempuan.

3. Peningkatan kapasitas pengurus kelompok melalui ToT ICS dan GAP

Salah satu syarat peserta pelatihan ICS adalah orang tersebut memiliki jiwa kepemimpinan. Pelatihan ini dimaksudkan agar lahirnya tenaga pelatih yang berasal dari petani swadaya itu sendiri. Dan untuk selanjutnya para *trainer* lokal inilah yang akan melakukan pelatihan-pelatihan ditingkat desa sesuai dengan desa masing-masing.

Pelatihan ToT ini diselenggarakan sebanyak dua kali, yaitu pelatihan ToT ICS tahap I diselenggarakan di kota Jambi, pada bulan Maret 2011. Dan pelatihan ToT ICS tahap dua yang diselenggarakan di desa-desa yang menjadi lokasi proyek, baik di wilayah kabupaten

Tanjung Jabung Timur maupun di Kabupaten Merangin. Pelatihan ini telah menghasilkan sekitar 40 orang *trainer* lokal.

Pelatihan GAP dilakukan bekerjasama dengan PT SAL. Di mana PT SAL akan menyediakan tenaga ahli yang akan memberikan pelatihan GAP kepada petani. Sama halnya dengan ToT ICS, ToT GAP juga dilakukan melalui dua tahapan. Pelatihan ToT GAP tahap I diselenggarakan di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan pelatihan ToT Tahap II juga kembali diselenggarakan di tempat yang sama.

Setelah dilakukan pelatihan ToT ICS dan ToT GAP, Yayasan SETARA akan mengembangkan buku panduan mengenai ICS dan juga GAP. Buku tersebut adalah buku sederhana yang berisi gambar-gambar dan foto-foto tentang proses menuju ICS, syarat-syarat ICS. Sedangkan Buku manual GAP, mengacu pada buku panduan perkebunan kelapa sawit yang direkomendasikan oleh Departemen Pertanian RI, manual tersebut di cetak di tahun 2012 dan sudah dibagikan secara gratis kepada petani sawit swadaya di daerah kerja Yayasan SETARA Jambi.

4. Peningkatan kapasitas anggota kelompok melalui pelatihan ICS oleh *trainer* lokal

Materi yang disampaikan pada pelatihan ICS adalah pelatihan dokumentasi, manajerial, dan pelatihan kelembagaan. Pelatihan ini disampaikan oleh *trainer* lokal yang sebelumnya sudah mengikuti pelatihan ToT ICS.

5. Peningkatan kapasitas dan pengetahuan tentang GAP oleh *trainer* lokal

Materi yang disampaikan pada pelatihan GAP adalah pelatihan mengenai budidaya perkebunan, yaitu meliputi hal-hal yang terkait dengan proses pemilihan bibit sawit unggul, kondisi tanah, dan penanaman bibit. Pelatihan perawatan kebun dan pemanenan dilakukan dengan mengkombinasikan antara pelatihan di dalam ruangan (teori) dan di luar ruangan (praktik). Pada pelatihan terkait dengan lingkungan, petani dilatih oleh orang yang memang profesional dibidangnya, seperti

BKSDA, dan lembaga konservasi serta pemerintah daerah melalui dinas, bukan oleh *trainer* lokal.

6. Peningkatan pengetahuan tentang PHT

Pengetahuan petani sawit swadaya terkait dengan pengendalian hama secara terpadu sangat terbatas oleh karena itulah Yayasan SETARA memberikan pelatihan mengenai PHT. Pelatihan yang diberikan kepada petani adalah pelatihan penanggulangan hama; pelatihan cara aman menggunakan pestisida. Pelatihan ini diselenggarakan bersama dengan PT SAL yang menyediakan tenaga ahli yang akan melatih petani.

7. Mendorong penggunaan pupuk organik

Persoalan utama petani swadaya adalah terbatasnya akses terhadap pupuk bersubsidi, sementara harga pupuk non subsidi yang tersedia di pasaran tidak terjangkau oleh petani, selain itu juga banyak pupuk palsu beredar. Yayasan SETARA Jambi berusaha mempromosikan penggunaan pupuk organik oleh karena Yayasan SETARA menyelenggarakan pelatihan-pelatihan pembuatan pupuk kompos, dengan memanfaatkan bahan sisa di sekitar perkebunan, seperti tandan kosong, kotoran ternak dan limbah rumah tangga.

8. Peningkatan pengetahuan tentang *biodiversity* dan keseimbangan lingkungan

Banyak petani yang masih belum menyadari arti penting *biodiversity* (keragaman hayati), padahal *biodiversity* adalah salah satu aspek penting dalam prinsip sawit berkelanjutan. Oleh karena itu yayasan SETARA menyelenggarakan pelatihan mengenai *biodiversity*: menginformasikan mengenai jenis satwa dilindungi, tanaman yang dilindungi, dan kawasan-kawasan penting seperti sungai dan sumber mata air yang harus dijaga.

9. Membangun *Training Centre* di lokasi proyek

Training centre untuk petani sawit swadaya dibangun oleh Yayasan SETARA Jambi melalui kerja sama dengan PT Sal. *Training Centre* tersebut dibangun agar petani swadaya dapat secara cepat mengakses pelatihan-pelatihan yang terkait dengan budidaya teknis perkebunan,

dan pelatihan tentang organisasi. *Training Centre* juga menjadi tempat berkumpul dan tempat petani saling bertukar informasi.

10. Melakukan lobi dengan berbagai pihak

Penting untuk membangun kesepahaman dengan berbagai pihak, terutama dengan pemerintah dan perusahaan. Lobi dengan pemerintah dilakukan agar petani swadaya mendapat perhatian dan perlindungan, dan juga mendapatkan akses terhadap bibit berkualitas dan pupuk bersertifikat, selain itu agar petani swadaya bisa mendapatkan akses permodalan terkait dengan peningkatan produksi kebun petani swadaya. Sementara lobi dengan pihak perusahaan dimaksudkan agar petani swadaya bisa mendapat tempat lebih baik terutama untuk hasil produksi dari kebun mandiri, dengan tidak adanya pembedaan harga.

Beberapa lobi yang dilakukan oleh Yayasan SETARA Jambi menghasilkan beberapa capaian penting, seperti: terbukanya akses petani dalam mendapatkan informasi mengenai bibit yang kualitas baik dari lembaga kompeten penyedia bibit berkualitas, dan pemerintah daerah juga mulai mendukung inisiatif petani sawit swadaya dalam menerapkan praktik sawit berkelanjutan yang berpedoman pada penerapan P&K RSPO. Sedangkan untuk pihak perusahaan, Yayasan SETARA melakukan lobi kepada PT Sari Aditya Loka I/Astra Group, hasil dari lobi adalah bantuan tenaga ahli yang diberikan oleh PT Sal untuk memberikan pelatihan kepada anggota Gapoktan mengenai berbagai macam topik, seperti GAP, Pengendalian hama terpadu, dan banyak lainnya.

11. Peningkatan kapasitas lembaga pendamping

Keahlian Yayasan SETARA dalam hal lobi dan advokasi serta dalam memfasilitasi isu konflik lahan sudah tidak diragukan lagi, tetapi pengetahuan dan keahlian Staf Yayasan SETARA dalam teknis budidaya sawit, peningkatan mutu, ICS, GAP, akses pasar, masih terbatas. Melalui kerja sama ini, dengan pendampingan yang dilakukan oleh beberapa konsultan, terutama dari BIOCert, telah berhasil mengatasi kelemahan tersebut sehingga sekarang Yayasan SETARA Jambi menjadi salah satu

expert terkait dengan ICS dan penerapan praktik sawit berkelanjutan pada petani sawit swadaya.

Selain itu kerja sama Yayasan SETARA Jambi dengan Hivos juga membuka peluang peningkatan kapasitas di bidang lainnya, misal mengenai perpajakan, pelatihan keuangan, menghadiri pertemuan RSPO dan banyak lainnya. Saat ini Yayasan SETARA Jambi memiliki sistem keuangan yang *realible* dan *accountable*.

12. Penguatan organisasi kelompok petani kelapa sawit

Pada proyek fase I, Yayasan telah menginvestasikan banyak sumber daya, waktu dan biaya untuk memperkuat kelompok ICS di Desa Bungo Tanjung. Pada fase II ini, Yayasan SETARA masih melanjutkan pendampingan guna memperkuat kelompok tersebut, fokus dampingan adalah pada penerapan P&K RSPO oleh kelompok, dan peran dari kelompok ICS dalam melakukan fungsi kontrol. Yayasan SETARA Jambi dan kelompok ICS Bungo Tanjung berharap bahwa setelah pendampingan tahap II berakhir maka petani ICS Bungo Tanjung siap di audit demi mendapatkan sertifikasi RSPO.

Untuk mendapatkan sertifikasi RSPO, petani sawit swadaya harus tergabung sebagai anggota RSPO, oleh karena itu, Yayasan SETARA Jambi membantu mengurus proses pendaftaran sehingga akhirnya kelompok ICS Tanjung Sehati resmi menjadi anggota RSPO. Keikutsertaan petani menghadiri rapat RSPO yang dibiayai oleh Hivos juga telah meningkatkan wawasan dan pengetahuan petani terkait dengan P&K RSPO dan isu global sawit dunia lainnya.

Berbeda dengan tahap I, Yayasan SETARA Jambi juga melakukan pendampingan kepada beberapa kelompok sawit mandiri di beberapa desa lainnya. Dikarenakan Yayasan Stara sudah berpengalaman melakukan pendampingan di tahun sebelumnya, maka pendampingan untuk kelompok tani baru tersebut tidak terlalu sulit. Selain itu, Yayasan SETARA Jambi juga banyak dibantu oleh *trainer* lokal yang sudah mengikuti pelatihan ToT.

13. Peningkatan kapasitas dan pengetahuan mengenai sertifikasi RSPO

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan kurang lebih sama dengan proyek pada fase sebelumnya; yaitu melalui *meeting*, *workshop*, dan diskusi-diskusi tingkat desa. Hanya saja target kelompok yang menerima sosialisasi bukan lagi kelompok ICS di Bungo Tanjung, target sosialisasi adalah kelompok tani sawit yang baru terbentuk di desa-desa yang menjadi lokasi kerja Yayasan SETARA Jambi.

14. Percobaan penerapan ICS (*Internal Control System*)

Pada proyek fase I, Yayasan SETARA telah berhasil memfasilitasi terbentuknya kelompok ICS di Desa Bungo Tanjung, selanjutnya akan disebut dengan nama Gapoktan Tanjung Sehati sehubungan dengan perubahan nama dan pemekaran desa. Yayasan SETARA Jambi dengan di dampingi oleh BIOCert membantu kelompok ICS untuk melakukan fungsi kontrol, misal melakukan audit internal pada kebun anggotanya. Tim ICS akan memberikan rekomendasi perbaikan pada anggota yang masih belum memenuhi ketentuan P&K RSPO. Pada Fase II ini, Gapoktan Tanjung Sehati juga sudah mulai mengenal istilah *group manager*, di mana ketua gapoktan adalah *group manager*.

Penerapan ICS ini memiliki banyak tantangan, salah satunya adalah tantangan perubahan perilaku. Misal mengenai salah satu ketentuan P&K RSPO untuk mengenakan sepatu. Petani sudah memahami peraturan tersebut tetapi masih banyak yang melanggarnya. Banyak yang tidak memakai sepatu dengan alasan belum terbiasa. Hal tersebut merupakan salah satu temuan dari banyak temuan tim ICS lainnya. Bagaimanapun *group manager* memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, sehingga secara rutin kelompok ICS melakukan pertemuan, mendiskusikan temuan, dan terus berupaya melakukan perbaikan. Anggota kelompok juga secara konsisten berusaha melakukan perubahan sesuai dengan masukan yang diberikan oleh tim ICS berdasarkan temuan audit internal mereka. Inspeksi atau audit ini telah dilakukan secara teratur pada waktu yang sudah disepakati.

15. Studi Banding ke Riau

Studi banding perwakilan pengurus dan anggota Gapoktan Tanjung Sehati yang didampingi oleh Yayasan SETARA tidak masuk pada perencanaan awal program. Tetapi seiring dengan perkembangan program, Yayasan SETARA menganggap hal ini penting dilakukan. Kunjungan ke Riau adalah untuk belajar dari salah satu kelompok tani yang ada disana mengenai cara beternak sapi, pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk organik, atau pemanfaatan kotoran sapi untuk biogas. Studi banding ini dilakukan karena pemerintah Kabupaten Merangin telah menghibahkan sejumlah sapi kepada Gapoktan Tanjung Sehati sedangkan pengalaman anggota atau pengurus gapoktan dalam usaha ternak sapi masih terbatas.

16. Studi Banding ke Merlung

Tujuan studi banding ke Merlung adalah untuk melihat model dokumentasi persiapan sertifikasi oleh kelompok petani plasma mitra Asian Agri. Dari Studi Banding tersebut Yayasan SETARA Jambi dan Gapoktan Tanjung Sehati menjadi paham mengenai dokumen apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana cara melakukan pendokumentasian tersebut.

d. *Project Outputs*

Berikut Di bawah adalah ringkasan *output* dari kegiatan yang telah di implementasikan oleh Yayasan SETARA Jambi:

1. Terdapat sembilan kelompok petani sawit swadaya di sembilan desa.
2. Terdapat tenaga pelatih (*local trainer*) di sembilan desa yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai mengenai GAP dan ICS dan mereka mampu untuk mentransfer ilmu dan pengetahuan mereka kepada petani.
3. Harga TBS petani sawit swadaya meningkat seiring dengan meningkatnya mutu TBS.
4. Petani sawit swadaya mulai menerapkan pertanian sawit berkelanjutan dan mulai memanfaatkan pupuk organik.

5. Petani sawit swadaya mulai menerapkan P&K RSPO, memerhatikan aspek sosial dan lingkungan serta turut menjaga keanekaragaman hayati.
6. Terbentuk tiga *training centre* di tiga desa dan *training centre* tersebut menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas petani.
7. Kesadaran dan dukungan dari pemerintah dan pihak swasta dalam mendukung penerapan P&K RSPO pada petani sawit swadaya meningkat.
8. Setara memiliki catatan pengalaman dalam menerapkan P&K RSPO di tingkat petani sawit swadaya dan catatan tersebut telah disampaikan sebagai *feedback* terhadap sertifikasi RSPO untuk petani sawit swadaya.
9. Petani mendapatkan harga yang lebih baik dikarenakan pemasaran bersama yang dilakukan melalui koperasi.
10. Meningkatnya kapasitas staf Yayasan SETARA Jambi.
11. Terbentuk satu kelompok ICS yang berbadan hukum koperasi guna meningkatkan kualitas dan harga sawit dari anggotanya.

3. Pendampingan BIOCert

Sewaktu Yayasan SETARA Jambi masih dalam tahap mengembangkan proposal kerjasama fase pertama, Hivos meminta BIOCert untuk melakukan *feasibility study* ke lokasi yang akan menjadi daerah kerja Yayasan SETARA. Adapun tujuan dari *feasibility study* yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mengetahui karakteristik perkebunan sawit yang dikelola oleh petani kemitraan dan petani swadaya.
- Mengidentifikasi kesesuaian penerapan prinsip dan kriteria RSPO bagi petani sawit di lokasi studi.
- Mengidentifikasi peluang dan risiko dari replikasi sertifikasi kelompok produk organik bagi penerapan program sertifikasi RSPO bagi kelompok petani sawit disesuaikan dengan prinsip dan kriteria RSPO bagi petani sawit.
- Memberikan rekomendasi bagi pengembangan program sertifikasi kelompok di lokasi studi.

Studi tersebut dilakukan di Desa Bungo Tanjung dan Desa Rawa Jaya Kec. Tapir Selatan Kab. Merangin Jambi di bulan Agustus 2008, yang dibantu oleh Yayasan SETARA Jambi dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Jambi.

Hasil studi menemukan kalau budidaya kebun sawit di Desa Bungo Tanjung dan Desa Rawa Jaya masih belum memenuhi ketentuan P&C RSPO. Hal ini disebabkan oleh:

1. Kurang Sosialisasi. Petani masih belum memahami RSPO.
2. Konflik sosial. Hubungan yang tidak baik dengan PT SAL dikarenakan rendahnya transparansi dalam kemitraan antara PT SAL dengan petani plasma. Selain itu juga ada konflik lahan dengan masyarakat lokal kebun sawit tanpa ada persetujuan dan kompensasi kepada masyarakat lokal.
3. Organisasi tani. Pada petani kemitraan, organisasi yang ada lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan PT SAL terkait dengan pembelian TBS. Sedangkan organisasi pada kelompok tani swadaya sudah berjalan cukup baik, seperti pada kerja-kerja perbaikan jalan. Bagaimanapun juga mutu dari TBS dan juga penguatan organisasi masih belum menjadi prioritas dari petani sawit swadaya.
4. Kesehatan dan Lingkungan masih belum diperhatikan. Petani belum menggunakan pelindung sewaktu menggunakan pupuk kimia atau herbisida, pupuk atau pestisida digunakan dengan dengan sumber air, dan banyak lainnya.

Lebih lanjut BIOCert menyarankan kalau sertifikasi kelompok lebih cocok jika diterapkan pada kelompok tani swadaya dibandingkan dengan petani plasma. Selanjutnya BIOCert juga merekomendasikan bahwa untuk mempersiapkan sertifikasi RSPO pada kelompok tani tersebut maka hal pertama yang harus dilakukan adalah penguatan organisasi kelompok tani tersebut, Sosialisasi P&K RSPO dan program sertifikasi RSPO kepada semua pihak yang terlibat, memberikan pelatihan ICS dan membangun ICS pada organisasi tani tersebut, sedangkan untuk meningkatkan akses pasar maka kelompok tani tersebut dianjurkan untuk membentuk koperasi sehingga memungkinkan untuk melakukan pemasaran bersama dan koperasi dapat menjalankan banyak fungsi lainnya demi kesejahteraan anggota.

Temuan dari *feasibility study* BIOCert diinformasikan kepada Yayasan SETARA. Yayasan SETARA mempelajari masukan yang diberikan, dan mengakomodasi masukan tersebut ke dalam proposal. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, Setara masih belum memahami mengenai sistem manajemen mutu dan juga ICS. Sedangkan ICS adalah salah satu kegiatan inti dalam rangka mempersiapkan petani dalam menghadapi sertifikasi RSPO. Oleh karena itu, BIOCert diperbantukan oleh Hivos untuk meningkatkan kapasitas Yayasan SETARA Jambi.

Selain itu, BIOCert juga turun langsung ke petani untuk memberikan pelatihan ICS dan membantu pembentukan kelompok ICS. Peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh BIOCert untuk Yayasan SETARA Jambi dan petani sawit swadaya dilakukan melalui pelatihan, *workshop*, dan diskusi rutin secara langsung, melalui email, dan juga melalui telepon.

BIOCert juga membantu me-review modul ICS yang dikembangkan oleh Yayasan SETARA Jambi yang kemudian menjadi buku panduan petani dalam mengembangkan ICS. Selain itu, BIOCert juga membantu Yayasan SETARA Jambi dalam melakukan lobi terhadap berbagai pihak, seperti pemerintah, perusahaan dan juga lembaga *funding*/NGO internasional seperti Hivos untuk mendapatkan dukungan terhadap kerja yang dilakukan oleh Yayasan SETARA Jambi dalam mempersiapkan petani menghadapi sertifikasi.

Yayasan SETARA Jambi merasakan banyak manfaat dari pendampingan yang dilakukan oleh BIOCert; dari yang tidak tahu mengenai ICS menjadi salah satu pakar ICS yang diperhitungkan di tingkat nasional. Yayasan SETARA Jambi dan kelompok ICS Bungo Tanjung (yang kemudian berganti nama menjadi Gapoktan Tanjung Sehati) akhirnya berhasil membuktikan bahwa mereka lolos audit dan mendapatkan sertifikat RSPO.

Mereka adalah kelompok tani yang kedua di Indonesia yang berhasil memperoleh sertifikasi RSPO, atau yang ketiga di dunia. Yayasan SETARA dan Gapoktan Tanjung Sehati berpendapat bahwa kesuksesan tersebut tidak akan mungkin bisa mereka raih tanpa bantuan dari BIOCert.

4. Pendampingan Rekadesa

Rekadesa adalah perusahaan konsultan yang berkantor di Jakarta membantu kelompok masyarakat dan LKM dalam bentuk layanan konsultasi, pelatihan, teknologi, publikasi dan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Hivos sudah bekerja lama dengan Rekadesa dalam membangun kapasitas mitra Hivos terkait dengan keuangan mikro.

Rekadesa memberikan pendampingan dalam hal manajemen SDM, marketing, akuntansi dan keuangan dan banyak aspek lainnya sehingga LKM dan koperasi mitra Hivos terus berkembang menjadi lebih baik dan memberikan layanan ke lebih luas kepada klien yang mayoritas pelaku usaha kecil dan marjinal yang belum tersentuh oleh layanan perbankan komersial seperti bank.

Berbeda dengan banyak lembaga sejenis, Rekadesa sangat mengerti kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki akses informasi dan pengetahuan yang terbatas dan juga pendidikan yang rendah, oleh karena itu, materi dan pendekatan mereka sudah didesain dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pedesaan tersebut.

Yayasan SETARA Jambi menyambut baik kehadiran Rekadesa sebagai salah satu konsultan yang akan membangun kapasitas mereka dalam hal membangun koperasi di salah satu kelompok petani sawit swadaya di wilayah dampungannya. Kelembagaan dalam koperasi memiliki beberapa kelebihan, seperti koperasi memiliki landasan hukum yang kuat (UUD 1945) dan merupakan badan usaha dengan keanggotaan sukarela dan terbuka. Koperasi dapat berfungsi memberikan layanan finansial seperti pinjaman, tabungan, asuransi, pengiriman uang, pengobatan dan layanan pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya.

Technical assistance dari Rekadesa dimulai dari Februari 2011 hingga Januari 2013. Untuk memperkuat kapasitas Yayasan SETARA Jambi dan Petani sawit swadaya mengenai perkoperasian, Rekadesa menurunkan tiga konsultan, yaitu dua konsultan senior yang menetap di Jakarta, yang melakukan kunjungan ke Jambi ketika ada kegiatan pelatihan atau pendampingan, dan satu orang konsultan junior, yang tinggal menetap di

lokasi proyek selama enam bulan dan memberikan pendampingan intensif kepada pengurus dan anggota kelompok petani sawit swadaya di Rantau Rasau.

Adapun kegiatan asistensi yang dilakukan oleh Rekadesa adalah sebagai berikut:

- Memberikan pemahaman kepada peserta tentang koperasi, teori dan praktiknya.
- Melakukan analisis SWOT terhadap pengembangan koperasi di lingkungan SETARA Jambi.
- Menyusun rencana strategis pengembangan koperasi.
- Akuntansi.
- Manajemen Administrasi Koperasi.
- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- Pelatihan manajemen dasar koperasi:
 1. Memahami Jati Diri Koperasi
 2. Dasar dan Prinsip Koperasi
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Keluarga
 4. Struktur Organisasi Koperasi
 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi
 6. Fungsi dan Tanggung Jawab Pengurus
 7. Fungsi dan Tanggung Jawab Pengawas
 8. Hak dan Tanggung Jawab Anggota
 9. Pengantar Sistem Akuntansi Koperasi

Kegiatan yang dilakukan oleh konsultan rekadesa yang menetap di rantau rasau adalah sebagai berikut:

- Membantu *steering committee* (panitia persiapan pembentukan koperasi) dalam merumuskan draft AD/ART Koperasi.
- Bersama dengan panitia persiapan melakukan sosialisasi tentang rencana pembentukan KSU ke berbagai desa di Kecamatan Rantau Rasau.
- Membantu panitia persiapan pembentukan koperasi dalam menyusun draft rencana kerja KSU.

- Mendampingi panitia persiapan dalam menyelenggarakan rapat pembentukan koperasi.
- Membantu pengurus dalam mempersiapkan operasional KSU.
- Mendampingi dan memberikan advis kepada Pengurus, Pengawas, dan Penanggung Jawab Desa dalam mempersiapkan administrasi dan Organisasi KSU.
- Mendampingi dan membantu KSU dalam berhubungan dengan berbagai pihak menjelang KSU beroperasi.
- Mendampingi KSU dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Ringkasan *output* dari pendampingan Rekadesa:

- Terbentuknya koperasi petani swadaya “KSU Mitra Abadi”
- Setelah melalui serangkaian panjang kegiatan, pelatihan, diskusi, dan rapat-rapat, akhirnya pada 7 Juli 2011 koperasi petani sawit swadaya “KSU Mitra Abadi” atau disingkat “Kesuma” di Rantau Rasau terbentuk. Pendiri dari koperasi tersebut, sebanyak 52 orang, berasal dari beberapa desa di kecamatan Rantau Rasau, yaitu desa Harapan Makmur, Bangun Karya, Sungai Dusun, Rantau Rasau I, Rantau Rasau II, Rantau Jaya, Karya Bakti, Marga Mulya, dan kelurahan Bandar Jaya.

Dalam menjalankan kegiatannya Kesuma melandaskan pada prinsip dasar koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yaitu berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh karenanya keberadaan lembaga didasarkan pada prinsip dasar koperasi yaitu yang tumbuh dari anggota, dikelola oleh anggota, dan untuk kesejahteraan seluruh anggota. Pada 30 September 2011 KSU Kesuma memperoleh Badan Hukum dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan No.66/BH/VI.3/Kop.UMKM/IX/2011. Melalui badan hukum ini, keberadaan KSU Kesuma secara resmi memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah.

- Koperasi memberikan pelayanan kepada anggota dalam hal pemasaran sawit, mendapatkan sertifikasi, dan menyediakan *input* pertanian (benih, pupuk dan pestisida alami).
- Unit Usaha Waserda sudah mulai berjalan, dengan modal awal yang dipinjam kan oleh Yayasan SETARA Jambi. KESUMA memiliki

kesempatan yang besar untuk berkembang dan maju mengingat potensi usaha anggota serta masyarakat di Kecamatan Rantau Rasau. Rekadesa melihat bahwa KSU Mitra Abadi mampu membuktikan dirinya sebagai lembaga usaha yang menggerakkan dan memberdayakan ekonomi anggota, meskipun baru dalam lingkup yang terbatas.

- Koperasi memberikan layanan keuangan (simpan dan pinjam), terutama untuk kebutuhan modal petani sawit.
- Petani anggota koperasi kesuma juga sudah bisa mengakses dan pinjaman dari unit usaha simpan pinjam koperasi. Layanan ini dinilai sangat bermanfaat bagi anggota.
- Tersedianya kader-kader lokal yang memahami koperasi secara baik dan benar. Pendampingan intensif yang dilakukan oleh Rekadesa telah berhasil menciptakan pengurus koperasi yang memiliki kapasitas yang memadai yang sudah memahami prinsip koperasi dan juga mampu mengelola koperasi dengan baik. Bagaimanapun, meski kader lokal sudah tersedia, tetapi penguatan kapasitas pengurus koperasi secara berkala masih tetap harus diperhatikan.

Meski tidak mudah, tetapi Rekadesa dan Yayasan SETARA Jambi berhasil membentuk koperasi, di mana koperasi tersebut secara perlahan namun pasti telah mulai menjalankan perannya yaitu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani swadaya, permasalahan seperti yang sebelumnya sudah diidentifikasi oleh Rekadesa dan Yayasan SETARA Jambi, seperti rendahnya nilai jual TBS, banyaknya tengkulak, sulitnya mendapatkan pupuk dan saprotan, dan lain-lain. Melalui Waserba, koperasi sudah bisa mendapatkan kebutuhan saprotan jauh lebih mudah dan juga lebih murah dibanding sebelum ada koperasi.

Ke depan, koperasi di Rantau Rasau juga akan menjadi wadah untuk meningkatkan mutu produk sawit petani dan juga untuk mempromosikan praktik sawit berkelanjutan dengan mengacu kepada P&K RSPO. Diharapkan Koperasi mitra abadi juga berhasil mendapatkan sertifikat RSPO seperti halnya kelompok dampingan Yayasan SETARA yang lain, Gapoktan Tanjung Sehati di Merangin, Jambi.

5. Pendampingan Swisscontact

Swisscontact didirikan pada tahun 1959, yang merupakan sebuah yayasan independen yang berkantor pusat di Swiss, dan mulai terlibat dalam pembangunan internasional semenjak tahun 1961. Swisscontact berkeinginan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan oleh Swisscontact adalah dengan mendorong terciptanya akses yang berkeadilan dalam melakukan kegiatan ekonomi di mana semua orang bisa berpartisipasi; hal ini bisa dicapai dengan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pertumbuhan sektor swasta.

Swisscontact telah menyadari pentingnya keseimbangan antara membangun ekonomi, sosial dan ekologi. Swisscontact berfokus pada empat kegiatan utama yaitu: mengembangkan sektor swasta, pelatihan dan sekolah kejuruan, mengembangkan usaha kecil menengah (UKM) dan juga memberikan layanan finansial. Swisscontact telah bekerja di Indonesia selama kurang lebih 30 tahun, dan Swisscontact dikenal melalui expertise-nya dalam peningkatan standar mutu.

Sebelumnya Hivos telah bekerjasama dengan Swisscontact untuk beberapa proyek, di mana Swisscontact menjadi konsultan yang membantu meningkatkan standar mutu produk dari petani yang didukung oleh Hivos dan Swisscontact juga mempersiapkan mereka dalam menghadapi sertifikasi organik bahkan juga ikut mencarikan *buyer*. Hasil kerja Swisscontact pada kerja sama sebelumnya sangat memuaskan, dan pendampingan yang dilakukan oleh Swisscontact telah berhasil mengantarkan petani memperoleh sertifikat organik.

Produk organik yang telah disertifikasi dan berkualitas tinggi tersebut dapat dijual ke pasar Eropa, Jepang, dan juga Amerika, yang harga jualnya jauh lebih baik sehingga pendapatan petani menjadi meningkat dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya. Oleh karena itu, Hivos merasa penting untuk mengirimkan Swisscontact untuk membantu dan memberikan masukan kepada Yayasan SETARA Jambi dan juga masukan langsung ke petani.

Pada bulan Juli 2009, Hivos menugaskan Swisscontact untuk melakukan *assesment* mengenai potensi lain yang dapat dikembangkan

untuk meningkatkan pendapatan petani sawit swadaya yang didampingi oleh Yayasan SETARA Jambi. Berbeda pada gambaran petani sawit secara umum, petani sawit swadaya di Desa Bungo Tanjung (sekarang desa Mekar Sari) memiliki pendapatan terbatas bahkan terkadang tidak mencukupi dikarenakan hasil kebun yang tidak maksimal, sedangkan biaya produksi kebun sangat tinggi.

Selain itu banyak petani sawit yang harus membeli air bersih untuk minum karena mereka tidak memiliki sumber air yang layak. Kualitas air dari sumur galian tidak layak minum, ditandai dengan warna air yang kuning, keruh, dan juga berbau. Meskipun demikian air dengan kualitas kurang tersebut tetap dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya hasil produksi kebun yang rendah, harga jual TBS petani sawit swadaya juga dipermainkan oleh tengkulak, harga TBS dibeli jauh lebih rendah dari harga TBS yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, kondisi infrastruktur jalan yang buruk telah menghambat pengiriman TBS sampai ke *milling*, karena keterlambatan tersebut kualitas yang diterima oleh *milling* menurun sehingga harga jual menjadi rendah.

Swisscontact melakukan *assesment* di Jambi dengan mewawancarai petani sawit swadaya, Yayasan SETARA Jambi, pemerintah Jambi, perusahaan dan juga tengkulak yang membeli TBS petani di desa. Dari *assesment* tersebut, Swisscontact memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pendapatan petani sawit dengan mengembangkan potensi *livelihood* yang ada di desa mereka. Masukan tersebut disampaikan langsung kepada Yayasan SETARA Jambi dan petani swadaya di Desa Bungo Tanjung.

Beberapa masukan dari Swisscontact adalah sebagai berikut:

a. Mengintegrasikan program dengan budidaya ternak

Ternak bisa menjadi pemasukan tambahan petani, bahkan kotoran ternak juga dapat di manfaatkan sebagai pupuk organik yang juga merupakan solusi atas kelangkaan dan mahalnya harga pupuk. Konsultan menyarankan agar Gapoktan/kelompok ICS melakukan lobi dan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan dukungan sapi atau hewan ternak lainnya.

b. Memanfaatkan pekarangan dengan memelihara ikan dan juga berkebun sayuran

Konsultan menyarankan agar lahan pekarangan rumah petani agar di manfaatkan untuk menanam tanaman bumbu dapur, sayuran, dan juga tanaman obat keluarga (Toga). Petani memiliki pekarangan yang cukup luas yang pemanfaatannya masih belum optimal.

Selain itu, bagi kebun sawit yang baru ditanam dan tanamannya masih kecil, konsultan menyarankan agar melakukan tumpang sari, di mana petani bisa memanfaatkan lahan di sekitar pohon sawit yang baru ditanam dengan menanam kacang-kacangan, atau beberapa jenis sayuran. Dengan begitu, sementara menunggu Sawit berbuah, petani masih bisa memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

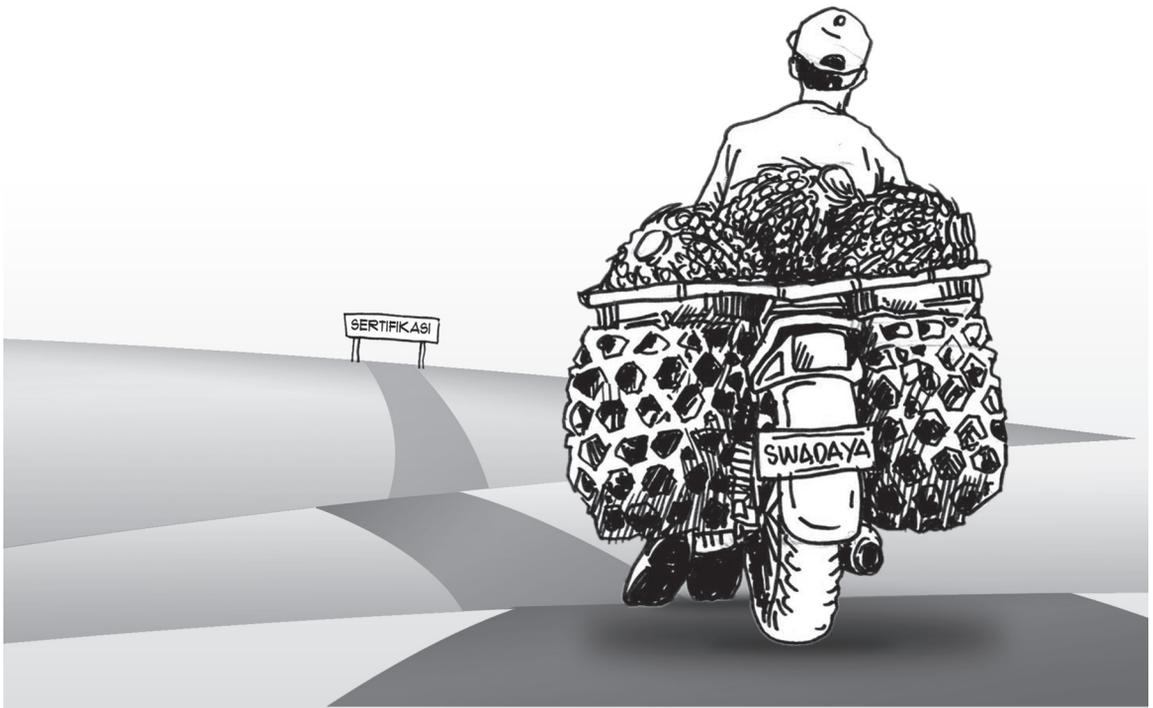
Selain dua masukan utama diatas, masukan lain yang diberikan dalam upaya meningkatkan pendapatan petani sawit swadaya adalah sebagai berikut:

- Menjajaki kerja sama dengan *milling* yang lain, sehingga petani tidak hanya tergantung dengan satu pembeli saja. Petani swadaya bebas untuk menjual TBS-nya ke *milling* manapun yang mau memberikan harga terbaik.
- Memanfaatkan tandan kosong untuk digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk kompos.
- Mengurangi biaya produksi kebun (dengan menggunakan pupuk organik untuk mengurangi kebutuhan dan biaya akan pupuk kimia, menggunakan tenaga kerja secara efisien, dan lain-lain).
- Meningkatkan kualitas TBS yang dihasilkan (seperti menggunakan bibit tenera, melakukan pemupukan secara teratur dan dengan jumlah yang tepat, mengirimkan panen di usia panen dan mengirimkan ke *milling* sesegera mungkin).
- Meningkatkan produktivitas kebun dengan menggunakan bibit unggul bersertifikat, misal Tenera.
- Menerapkan good agricultural practices (GAP), yaitu mengelola kebun dengan cara-cara yang berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan.



06

PENGALAMAN DARI LAPANGAN



“

Salah satu tantangan dalam mempersiapkan petani menuju sertifikasi adalah melatih budaya menulis atau mendokumentasikan aktivitas sehari-hari di kebun, seperti informasi mengenai pengaplikasian pupuk dan banyak informasi lainnya.

”

Keberlanjutan Petani Sawit di Indonesia

TANTANGAN BAGI RSPO ialah menerapkan skema sertifikasi bagi para pekebun skala kecil. Pekebun skala kecil masuk ke rantai komoditas sawit dengan difasilitasi oleh pemerintah sejak tahun 1977. Belakangan setelah terlihat bahwa kebun sawit merupakan usaha yang cukup menjanjikan, bermunculanlah para petani swadaya.

Para petani plasma menerima kebun yang sudah dibuka dan ditanami oleh perusahaan, serta mengambil-alih perjanjian kredit pengembangan kebun tersebut secara individual dengan pihak bank. Sementara, para petani swadaya mencari pengetahuan, mengusahakan lahan, mencari bibit dan mencari jalur penjualan TBS dengan daya upaya sendiri.

Bisa dikatakan bahwa munculnya para petani swadaya awalnya difasilitasi oleh Program KKPA. Bilamana sebelumnya kesempatan bagi para petani hanya terbuka melalui kepesertaan dalam program inti-plasma, program KKPA memungkinkan para petani bergabung dalam KUD untuk kemudian bersama-sama dengan perusahaan yang memberikan jaminan pembelian (avalis) mengakses kredit dari pemerintah.

Program KKPA ini dikembangkan setelah Pemerintah merasa cukup membantu ekspansi perkebunan sawit skala besar pada tahun 1990. Program KKPA, meskipun hanya berumur pendek karena terimbas krisis 1997, namun dalam skala yang lebih kecil tetap dilanjutkan oleh beberapa lembaga keuangan terpilih sampai belakangan ini.

Jumlah petani swadaya terus meningkat, terutama setelah tahun 2000-an. Krisis 1997 mengakibatkan tidak adanya lagi fasilitas kredit bersubsidi dari pemerintah. Namun demikian ketertarikan para petani terhadap usaha kebun sawit yang lebih menjanjikan terus meningkat. Akibatnya, dengan segala keterbatasannya para petani melakukan konversi atas lahan pangan dan kebun campuran (agroforestri) mereka diganti dengan tanaman sawit.

Bibit diperoleh dengan cara seadanya, yaitu dari penjual bibit yang belum tentu bibitnya bagus dan bersertifikasi, atau mengambil sawit jatuhan di kebun orang lain yang mulai tumbuh (dura). Perlu diketahui, sawit merupakan tanaman hasil budidaya di mana bibit jatuhan produktivitasnya jauh merosot.

Pada saat itu, minat para pekebun meningkat drastis sementara pengembangan bibit ketinggalan sehingga terjadi kelangkaan bibit.

Teknik penanaman pun dimiliki oleh para petani terbatas, sementara sistem penyuluan sejak otonomi daerah berkurang secara drastis. Tidaklah mengherankan kalau kemudian kebun para petani swadaya ini produktivitasnya rendah. Lahan untuk perkebunan juga makin sulit dicari, tidak jarang kebun-kebun ini dibuka di kawasan hutan dan lahan gambut. Tidak jarang, para petani swadaya ini bekerjasama dengan pemodal yang tidak melakukan sendiri kegiatan pembukaan kebun dan penanamannya. Bahkan, ada juga pemodal yang menyediakan juga bibit dan *input* sehingga para petani menjadi ujung tombak bagi pembukaan lahan dan pembalakan liar. Pembakaran menjadi cara paling murah dan mudah untuk membuka lahan.

Bagi RSPO, hal ini menjadi tantangan utama karena upaya untuk mewujudkan keberlanjutan pada rantai komoditas sawit tidaklah mencapai tujuannya bilamana mengabaikan para pekebun skala kecil ini. Belakangan, jumlah dan luasan perkebunan sawit swadaya terus meningkat, seiring dengan terus meningkatnya permintaan sawit di pasaran internasional. Karena produktivitas rendah, ekspansi kebun terus terjadi sehingga menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang terjadi di berbagai tempat. Perluasan kebun dalam skala luas ini berkontribusi pada tidak teratasinya kebakaran hutan dan lahan yang dibuka untuk kebun sawit.

Di sisi lain, tantangan bagi para pemangku kepentingan lainnya ialah bagaimana desakan untuk menjadikan sektor minyak sawit menjadi lebih berkelanjutan bisa dijabarkan dalam langkah-langkah nyata untuk meningkatkan keberlanjutan dalam praktik nyata. Keberlanjutan yang dijanjikan bukan hanya untuk kepentingan para aktor-aktor kuat, tapi bagaimana para petani kecil yang terlibat memperoleh manfaat yang lebih besar dari berkembangnya sektor minyak sawit melalui penerapan P & C RSPO. Belakangan, ketika keberlanjutan menjadi mandat dari pemerintah Indonesia melalui ISPO, para petani juga bisa lebih siap dengan mempelajari model-model yang sudah ada.

Sertifikasi RSPO Pertama untuk Petani Sawit di Indonesia

1. Sertifikasi Petani Plasma PT. Hindoli

Sertifikasi RSPO pertama di Indonesia diberikan kepada para Petani plasma kelapa sawit binaan PT Hindoli, perkebunan kelapa sawit milik Cargill pada bulan Februari 2009. Menurut informasi dari situs internet perusahaan Cargill (www.cargill.co.id), pabrik PT Hindoli di Sumatera Selatan memproses tandan buah segar dari perkebunan kelapa sawit perusahaan dan yang dibeli dari petani plasma. Petani plasma PT Hindoli terdiri atas 8.800 petani plasma yang teroganisir dalam 17 koperasi dengan wilayah seluas 17.594 hektar. Audit independen untuk mencapai sertifikasi oleh Badan Eksekutif RSPO tersebut dilakukan oleh BSi Management Systems.

Selanjutnya, berdasarkan informasi dari situs Cargill, perusahaan tersebut berupaya mendapatkan sertifikasi untuk perkebunan lainnya yaitu PT Harapan Sawit Lestari dan PT Indo Sawit Kekal. Pabrik penyulingan minyak Cargill di Eropa dan Malaysia juga telah mendapat izin untuk menawarkan produk bersertifikat RSPO. Cargill memiliki kebijakan perusahaan tentang produksi kelapa sawit yang bertanggung jawab dalam operasi perkebunannya. Di antaranya komitmen tidak menanam di hutan konservasi yang bernilai tinggi (*high conservation value forests* – HCVF); tidak akan membuka perkebunan di lahan gambut atau yang dapat mengancam keragaman lingkungan serta tidak membuka lahan dengan cara pembakaran.

Unit bisnis penyulingan minyak Cargill dan perkebunan PT Hindoli baru-baru ini telah menerima sertifikat resmi bagi rantai pasokan minyak sawit yang berkelanjutan menurut standar International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) yang pertama bagi perkebunan kelapa sawit. Sertifikat ISCC memungkinkan Cargill menyediakan minyak sawit bagi penggunaan yang bersifat energi sesuai dengan aturan *Renewable Energy Directive (RED)* serta *Fuel Quality Directive (FQD)* sebagaimana ketentuan negara-negara anggota Uni Eropa.

Pada bulan Juli 2010 Cargill telah mengumumkan kerjasama dengan World Wildlife Fund (WWF) untuk mengevaluasi pemasok kelapa sawitnya di Indonesia sebagai bagian dari komitmen terhadap produksi kelapa sawit berkelanjutan. Evaluasi akan mengukur kemajuan yang dicapai pemasok Cargill dalam menerapkan prinsip serta kriteria RSPO.

2. Sertifikasi Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah

Sertifikasi RSPO untuk petani swadaya pertama di Indonesia terealisasi di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau untuk Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah. Sertifikat dari RSPO (Roundtable of Sustainable Palm Oil) untuk pengelolaan kebun kelapa sawit yang dikeluarkan tanggal 29 Juli 2013 dan menjadi yang pertama bagi petani swadaya di Indonesia dan kedua di dunia (setelah di Thailand). Sebagai catatan, sertifikat untuk petani swadaya pertama di Thailand melibatkan 421 petani swadaya yang mengusahakan kebun seluas total 2.767,33 hektar dan dikeluarkan pada bulan Juli 2012.

Dalam mempersiapkan sertifikasi, Asosiasi Petani Swadaya Amanah difasilitasi oleh WWF-Indonesia. Menurut informasi di situs internet WWF-Indonesia (www.wwf.or.id), dengan dukungan dari Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah Riau, RSPO, Carrefour Foundation International dan PT. Inti Indosawit Subur, WWF-Indonesia memfasilitasi pembentukan Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah sebagai perintis sertifikasi RSPO bagi petani swadaya setelah melalui proses identifikasi yang dilakukan sejak 2011.

Sebanyak 349 petani swadaya yang memiliki lahan lebih dari 763 ha di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo bergabung dengan Asosiasi Amanah. Lebih lanjut, informasi dari situs internet tersebut menyebutkan bahwa Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah adalah badan hukum beranggotakan 349 petani swadaya yang dibentuk oleh WWF-Indonesia dan didaftarkan ke RSPO dalam mekanisme sertifikasi-kelompok.

Para anggota Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah telah merasakan manfaat langsung telah dirasakan oleh petani anggota, seperti diungkapkan oleh Haji Sunarno, Manager Asosiasi Amanah bahwa sebelum pelatihan diberikan, produksi rata-rata petani 20 ton tandan buah segar (TBS)

per tahun, namun dalam empat bulan pertama setelah pelatihan, hasil meningkat dengan proyeksi lebih dari 24 ton per tahun. Melalui pelatihan implementasi prinsip dan kriteria RSPO, petani swadaya memperoleh pemahaman mendalam mengenai lingkungan hidup.

Para anggota berkomitmen bahwa mereka hanya akan memperluas lahan ke kawasan yang diperuntukkan bagi perkebunan, bukan kawasan bernilai konservasi tinggi maupun daerah perlintasan satwa. Selain jumlah ini, ada 132 petani swadaya lainnya telah menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan RSPO melalui Amanah. Mereka pada awalnya meragukan manfaat sertifikasi RSPO, namun setelah mereka melihat peningkatan kemampuan dan produktivitas anggota Amanah menjadi tergerak untuk bergabung dengan kami, sebagai petani swadaya yang tersertifikasi oleh RSPO.

Pada pertengahan tahun 2014, dilakukan kunjungan untuk mengadakan pengumpulan data lapang mengenai perkembangan dari Asosisasi Petani Sawit Swadaya Amanah. Informasi yang dikumpulkan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Sertifikasi RSPO Petani Dukungan Hivos di Indonesia

Gapoktan Tanjuk Sehati di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Merangin yang didukung oleh Hivos melalui mitra Yayasan SETARA Jambi akhirnya berhasil memperoleh sertifikasi RSPO pada bulan Juli 2014. Penyerahan sertifikat RSPO tersebut dilakukan Jumat di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi itu yang diserahkan langsung oleh Perwakilan RSPO Indonesia Asril Darussamin dan didampingi Imam dan disaksikan Asisten II Pemprov Jambi, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan Dinas Perkebunan Kabupaten Merangin. Acara penyerahan itu juga dihadiri petani-petani swadaya dari Kecamatan Rencah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang saat ini juga sedang membangun inisiatif serupa.

Dalam upaya memperoleh sertifikasi ini, para petani harus bekerja keras guna meraih sertifikat RSPO, bukan hanya soal beradaptasi dengan tata kelola kebun tetapi juga dalam membiayai proses persiapan sertifikasi. Tak hanya

soal komunikasi, penerapan dokumentasi dan praktik pengelolaan kebun kerap menyulitkan petani. Petani yang sebelumnya bekerja sesuka hati wajib beradaptasi kegiatan dokumentasi seperti jadwal dan hasil panen, penggunaan pupuk dan pestisida, bukti penjualan.

Jalal Sayuti, Ketua Gapoktan Tanjung Sehati, menjelaskan banyak hal yang harus diubah dalam pengelolaan kebun untuk meraih sertifikasi. Bahkan dalam hal-hal teknis sederhana pun para petani harus beradaptasi seperti untuk menggunakan helm dan sepatu boot di kebun. Walaupun sulit pada awalnya, para petani tetap harus menjalankan prosedur keamanan tersebut karena salah satu kriteria dari sertifikasi RSPO adalah prosedur keselamatan kerja.

Proses sertifikasi akan mengubah pola pertanian konvensional menjadi lebih terorganisir seperti pengelolaan kebun, pencatatan panen, pupuk pestisida, keselamatan kerja, dan tidak boleh membawa anak untuk kerja di kebun. Kalau sebelumnya, pelepah ditaruh sembarang kini mulai disusun rapih. Good Agricultural Practice (GAP) adalah nilai mutlak bagi implementasi RSPO, tak terkecuali bagi petani.

Kendati berat, sudah ada manfaat yang dirasakan oleh petani. Contohnya saja, mengurangi penggunaan bahan kimia, takaran pemupukan, dan masa panen yang lebih teratur. “Walaupun setelah audit, masih ada petani yang sembarangan dalam kelola kebun. Lantaran tidak terbiasa untuk diatur,” tambah Jalal.

Berkaitan dengan biaya, Gapoktan Tanjung Sehati masih mengandalkan pendanaan dari donor. Hal ini karena biaya sertifikasi cukup besar, secara umum pemohon sertifikasi RSPO menyiapkan biaya sekitar Rp 100 juta hingga Rp 125 juta untuk biaya audit oleh lembaga sertifikasi. Besaran biaya ini berdasarkan kebutuhan seperti berapa lama proses audit berlangsung, biaya administrasi, biaya perjalanan ke lokasi, dan biaya pembuatan laporan.

Selain dari Hivos melalui Yayasan SETARA Jambi, RSPO juga mendukung melalui skema dana RSPO Smallholders Support Fund (RSSF). Dana RSSF berasal dari 10 persen alokasi penjualan Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) ditambah 50 persen surplus pemasukan selama tahun fiskal. Melansir data RSPO pada Maret 2013, dana RSSF mampu diberikan maksimal tiga tahun. Dana RSSF hanya bisa diberikan dua kali yakni untuk main audit dan satu kali

monitoring. Sertifikat RSPO sendiri punya lima tahun masa berlaku dengan pelaksanaan monitoring setiap tahunnya.

Pengalaman di Jambi

1. Pengalaman Yayasan SETARA dalam Sertifikasi

- Yayasan SETARA Jambi merupakan sedikit dari organisasi swadaya masyarakat yang menjadi pelopor dalam melakukan pendampingan terhadap petani sawit swadaya dalam rangka mempersiapkan petani menuju sertifikasi RSPO. Sebagai pelopor, tantangan yang dihadapi oleh Yayasan SETARA Jambi adalah kurangnya panduan atau tidak ada buku yang bisa dijadikan pedoman mengenai langkah demi langkah kegiatan yang harus dilakukan, biaya yang dibutuhkan, lamanya waktu dari awal pendampingan hingga petani bisa mendapatkan koperasi.
- Ketika Yayasan SETARA Jambi mulai mendampingi kelompok tani petani sawit swadaya di kabupaten Merangin, masih belum ada satupun petani sawit swadaya di dunia yang mendapatkan sertifikasi RSPO, sehingga, Yayasan SETARA Jambi juga tidak bisa belajar dari pengalaman pendampingan sebelumnya.
- Oleh karena itu, ketika akhirnya pada pertengahan tahun 2014 Yayasan SETARA Jambi berhasil mengantarkan Gapoktan Tanjung Sehati di Kabupaten Merangin meraih sertifikasi RSPO, Yayasan SETARA Jambi bersama dengan pengurus dan anggota Gapoktan Tanjung Sehati berusaha untuk menyusun buku panduan sederhana agar memudahkan organisasi swadaya lainnya, kelompok tani, atau pihak-pihak lain yang tertarik melakukan hal serupa untuk belajar dari pengalaman Yayasan SETARA.
- Buku panduan yang berjudul “Petani swadaya Menuju Sertifikasi Sawit Berkelanjutan saat ini bisa didapatkan secara gratis dengan mengunduh langsung dari website RSPO dan juga melalui website Yayasan SETARA Jambi: http://www.rspo.org/file/Buku_panduan_Petani_Mandiri.pdf atau http://www.setarajambi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=2

- Salah satu tantangan dalam mempersiapkan petani menuju sertifikasi adalah dalam melatih budaya menulis atau mendokumentasikan aktivitas sehari-hari di kebun seperti informasi mengenai pengaplikasian pupuk dan banyak informasi lainnya. Secara umum petani tidak memiliki budaya mencatat, selain itu, pendidikan mereka yang rendah juga menjadi hambatan dalam melakukan pendokumentasian.
- Yayasan SETARA Jambi hanya melakukan pendampingan pada petani swadaya, atau disebut juga petani swadaya. Adapun kriteria dari petani swadaya yang didampingi oleh Yayasan SETARA Jambi adalah: 1) Lahan milik sendiri dan dapat dibuktikan melalui sertifikat atau surat keterangan lainnya yang diakui sebagai surat hak milik, 2) Modal, bibit, penanaman, pemupukan, perawatan dilakukan sendiri. 3) Mereka bebas untuk menjual hasil produksi ke pabrik manapun. Hal ini membuat petani swadaya berbeda dengan petani plasma, yang meski sama-sama petani kecil, tetapi petani plasma memiliki “bapak angkat” yang membantu mereka.
- Yayasan SETARA Jambi mendorong petani sawit swadaya melakukan sertifikasi RSPO merupakan kalau hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk menghindari perusakan hutan yang dilakukan oleh petani karena pengetahuan mereka terbatas. Jumlah petani swadaya meningkat dari tahun ke tahun, hal ini tentunya akan menjadi tantangan bagi keberlanjutan lingkungan, pertumbuhan tersebut tidak bisa dicegah, tetapi dampak negatifnya dapat dikendalikan, yaitu melalui sertifikasi RSPO.
- Bagi organisasi masyarakat sipil lain seperti Yayasan SETARA yang tertarik untuk mempersiapkan dan mengantarkan petani menuju sertifikasi RSPO hal utama yang harus dilakukan adalah membangun kelembagaan dari petani sawit swadaya. Ketika lembaga sudah terbentuk hal selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota dengan memberikan beberapa pelatihan, seperti pelatihan manajemen administrasi lembaga, pelatihan GAP, HCV, P&K RSPO, pelatihan alat-alat kerja, dan kemudian menyediakan peralatan kerja seperti masker, sepatu, dan lain-lain.

- Ketika kelembagaan sudah kuat, kapasitas pengurus dan anggota meningkat, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mendorong agar pengurus dan anggota kelompok melakukan *assesment* mengenai kebun sawit mereka (status lahan, proses produksi, penjualan, GAP, kesesuaian lahan, penerapan P&K RSPO).
- Setelah *assesment* dilakukan langkah selanjutnya adalah memfasilitasi pengurus dan anggotanya untuk membuat rencana perbaikan kebun, rencana penerapan GAP, memperkuat kapasitas pengurus dan anggota, dan banyak lainnya. Dalam membuat perencanaan penting untuk menghitung waktu dan tenaga juga. Buatlah perencanaan realistis yang bisa dicapai sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada.
- Untuk menghemat biaya pelatihan, sebaiknya bekerjasama dengan perusahaan dan pemerintah untuk mendapatkan tenaga ahli yang dibutuhkan. Jasa tenaga ahli mereka terkadang bisa didapatkan secara gratis, atau jika harus membayar, biayanya tidak akan semahal jika mendatangkan tenaga ahli dari luar daerah. Untuk pelatihan dinamika kelompok misalnya, Yayasan SETARA Jambi bekerjasama dengan fasilitator daerah (fasda), sedangkan pelatihan mengenai nilai konservasi tinggi Yayasan SETARA Jambi bekerjasama dengan BKSDA, atau LSM konservasi.
- Untuk konsumsi pelatihan, petani bisa membawa konsumsi masing-masing dari rumah, atau mereka bisa mengorganisir sendiri dengan menyediakan makanan lokal sehingga biaya konsumsi menjadi lebih murah. Lebih lanjut mengenai berbagai jenis pelatihan, lama hari, manfaat pelatihan, hal-hal yang dibutuhkan, anggaran yang dibutuhkan bisa dipelajari dari buku manual yang disusun oleh Yayasan SETARA Jambi bersama dengan Gapoktan Tanjung Sehati yang sebelumnya sudah disebutkan diatas.
- Beberapa dokumen penting yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: STD-B (Surat tanda daftar usaha), SPPLH (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup), dan lain-lain. Lembaga pendamping bisa membantu petani dalam mempersiapkan berkas aplikasi dan menemani perwakilan kelompok

yang mengurus berkas-berkas tersebut, hal ini dikarenakan banyak petani yang tidak terbiasa berhadapan dengan birokrasi formal dan bahkan banyak yang grogi ketika harus pergi ke kantor pemerintah. Untuk awal-awal, hingga kepercayaan diri mereka terbangun, sebaiknya didampingi.

- Keberhasilan Gapoktan Tanjung Sehati dalam memperoleh sertifikasi RSPO merupakan kebanggaan Yayasan SETARA. Hal ini berarti kerja keras mereka telah membuahkan hasil. Bagaimanapun Yayasan SETARA melihat bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak (lembaga donor, pemerintah, perusahaan dan RSPO). Yayasan SETARA Jambi tidak akan berhasil tanpa dukungan dari pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu, Yayasan SETARA Jambi mendorong bagi organisasi lain yang tertarik melakukan hal serupa sebaiknya bekerjasama dengan lembaga donor, pemerintah atau perusahaan lewat CSR-nya.
- Biaya pendampingan untuk mempersiapkan petani swadaya menuju sertifikasi tidaklah murah, oleh karena itu, pihak yang tertarik untuk mendukung petani swadaya atau bahkan kelompok petani sawit swadaya itu sendiri haruslah bekerjasama dengan pihak eksternal.
- Selain itu, Yayasan SETARA Jambi, juga berkomitmen untuk menghasilkan beberapa buku panduan, atau memberikan informasi melalui website-nya yang bisa menjadi pembelajaran bagi banyak pihak yang tertarik dengan isu petani sawit swadaya dan sertifikasi. Yayasan SETARA Jambi juga bersedia menjadi narasumber atau memberikan masukan jika dibutuhkan.
- Yayasan SETARA Jambi berharap agar semakin banyak petani swadaya yang mendapatkan sertifikasi RSPO, hingga sekarang, Yayasan SETARA Jambi masih terus melakukan pendampingan, membantu beberapa kelompok tani lainnya di beberapa kabupaten di Jambi untuk mengikuti jejak sukses Gapoktan Tanjung Sehati mendapatkan sertifikasi RSPO.

2. Pengalaman Gapoktan Tanjung Sehati di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi

a. Petani sawit, usaha dan keluarganya

- Luas lahan milik anggota berbeda-beda. Ada yang hanya memiliki seperempat ha, ada yang satu ha, dan ada yang mencapai hingga tujuh ha.
- Total luas lahan sawit petani anggota Gapoktan adalah sebanyak 237,26 ha dengan jumlah anggota sebanyak 277 orang. Pada umumnya usia sawit berkisar 5-10 tahun yaitu seluas 163,65 ha. Rata-rata produksi sawit per ha adalah 11,87 ton.
- Baik suami dan istri sama-sama bekerja di kebun, mereka bekerja sekitar 2-3 jam sehari di pagi hari. Suami berangkat lebih dulu ke kebun sementara istri di rumah memasak dan mempersiapkan keperluan anak berangkat ke sekolah. Terkadang istri juga mengantarkan anak ke sekolah dengan sepeda motor, jika suami tidak bisa mengantarkan. Setelah semua itu selesai, istri akan menyusul suami ke kebun. Anak tidak ikut membantu orang tua bekerja di kebun karena mereka bersekolah.
- Sebagian istri cukup kritis dalam melihat pembagian waktu kerja antara suami dan istri. Dari pukul 4 pagi istri sudah bangun memasak untuk sarapan, kemudian sama-sama bekerja bersama suami di kebun, ketika pulang suami langsung beristirahat sementara istri masih harus mencuci pakaian, membersihkan rumah, belanja dan memasak untuk makan siang dan malam. Terkadang ada hari di mana istri tidak ke kebun, hal ini dikarenakan kelelahan.
- Di Jambi, pekerjaan di kebun antara laki-laki dan perempuan nyaris tidak berbeda. Istri juga ikut memanen sawit untuk pohon yang masih rendah dan terjangkau, sedangkan untuk pohon yang tinggi, biasanya diupahkan. Selain memanen, membrodol, istri juga turut mengangkut sawit dengan gerobak (engkol).
- Bagi tenaga upah, biasanya dikerjakan bersama suami dan istri, hal ini karena pekerjaan sawit adalah pekerjaan borongan yang sulit dilakukan oleh satu orang. Jika tenaga upah bekerja bersama orang lain, maka

pendapatan mereka akan dibagi dua, sedangkan jika yang melakukan adalah suami dan istri maka pendapatan mereka akan menjadi milik bersama, untuk keluarga. Upah yang diterima oleh tenaga upah berkisar Rp. 100,000 hingga 150,000 per ton TBS yang dipanen.

- Modal untuk menanam sawit adalah modal milik sendiri. Uang hasil kerja ditempat lain yang ditabung selama waktu tertentu. Dikarenakan modal terbatas, petani mencari bibit murah, meski ternyata bibit tersebut tidak produktif. Dikarenakan keterbatasan modal juga petani tidak memupuk kebunnya secara teratur.
- Dulu, sewaktu TBS dijual kepada pedagang perantara/tengkulak, nilai jualnya sangat rendah dan terkadang petani berhutang terhadap tengkulak yang membuat posisi tawar petani menjadi lebih lemah lagi. Tetapi semenjak penjualan buah sawit dikelola oleh gapoktan petani mendapatkan harga yang lebih baik. Jika petani memiliki kebutuhan uang, petani bisa meminjam ke gapoktan dengan bunga yang rendah.
- Hampir semua petani anggota gapoktan menggantungkan hidup ke usaha sawit dan tidak memiliki alternatif sumber pendapatan lainnya. Hanya beberapa orang yang menambah penghasilan dengan berjualan di pasar atau membuka kios.
- Dengan meningkatnya produktivitas kebun sawit, pendapatan yang dihasilkan dari sawit semakin menjanjikan. Melalui sawit petani bisa menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi, membangun rumah, membeli kendaraan, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lainnya.
- Di Desa Mekar Jaya terdapat SD di mana anak-anak petani sawit masih bisa berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki, tetapi untuk SMP dan SMA mereka harus pergi ke kecamatan yang jaraknya lumayan jauh yaitu berkisar 12 kilo. Untuk tingkat perguruan tinggi, anak-anak petani sawit bersekolah di Bangko, Jambi, hingga ke Pulau Jawa.
- Anak-anak tidak terlibat dalam mengurus kebun dikarenakan anak-anak harus bersekolah. Anak SMA berdasarkan kurikulum saat ini baru selesai sekolah sekitar pukul tiga sore, tetapi jika mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti gerak jalan, mereka bisa pulang lebih

lama lagi. Anak-anak sudah kelelahan sepulang dari sekolah. Di hari libur terkadang anak-anak ikut orang tua ke kebun, tetapi biasanya hanya menemani.

- Keluarga terbiasa dengan sarapan pagi, terutama bagi anak-anak agar mereka bisa berkonsentrasi dalam belajar, sedangkan untuk suami dan istri biar memiliki tenaga yang cukup untuk bekerja di kebun. Sebagian istri, juga menyiapkan bekal untuk makan siang anak di sekolah, hal ini untuk memastikan anak mengkonsumsi makanan sehat dan higienis.
- Di pagi hari, biasanya bapak minum kopi, mereka memiliki merek khas yang tidak bisa tergantikan, yaitu kopi jambi, AAA, yang ditanam di kabupaten merangin, kabupaten di mana mereka tinggal. Sebagian juga merokok dulu, menonton berita di TV dan baru berangkat ke kebun. Sudah hampir satu tahun ini rumah petani sawit di desa mekar jaya dialiri listrik PLN, hal ini membuat banyak keluarga yang membeli TV dan kulkas.
- Dulu, mereka terpaksa menggunakan generator, tidak hanya suara mesin yang gaduh, mereka juga harus mengeluarkan uang yang cukup besar untuk membeli bahan bakar generator.
- Istri ke pasar hanya satu kali seminggu, yaitu setiap hari Selasa. Di Pasar ini, suku anak rimba masih kerap dijumpai. Selain di pasar, istri juga berbelanja di kios yang ada di desa, kios menjual hampir semua kebutuhan dapur, mulai dari minyak goreng, garam, termasuk sayur, tetapi harganya lebih mahal dibandingkan di pasar. Harga pangan terus naik, oleh karena itu istri harus cermat mengatur keuangan rumah tangga. Dengan adanya kulkas memungkinkan istri untuk bisa lebih hemat berbelanja, karena istri bisa membeli dalam jumlah yang banyak di pasar, dan menyimpannya di kulkas.
- Di sela kesibukan bekerja di kebun dan di rumah, istri masih aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan berorganisasi, seperti: pengajian di mushola desa, yasinan, arisan, dan kegiatan rumah pangan lestari. Rumah pangan lestari adalah kegiatan memanfaatkan pekarangan untuk menanam sayuran, tanaman bumbu, dan obat-obatan.

- Meski sayur yang dihasilkan dari pekarangan bisa dijual, tetapi tidak semua petani berorientasi pada uang. Mereka sudah merasa berkecukupan dari hasil kebun sawit, sehingga untuk sayuran, lebih sering dibagikan kepada tetangga dari pada dijual. Pak Solihin dan istri berprinsip “Kapan kami bisa memberi kepada orang lain”, untuk petani sawit yang hidup sudah berkecukupan tidak mungkin bisa memberi dalam bentuk uang, tetapi memberi makanan dan sayuran masih diterima. Mereka tidak merasa rugi karena hanya sedikit tenaga yang dialokasikan ke kebun sayur yang terbayar ketika melihat tetangga senang.
- Istri mendukung kegiatan suaminya terlibat dalam gapoktan, istri yakin kalau dari keterlibatan tersebut hasil kebun mereka akan lebih baik lagi. Ibu tidak banyak terlibat, tetapi terkadang ikut menghadiri rapat menggantikan suami.

b. Kelembagaan

- Gapoktan Tanjung Sehati awalnya bernama Gapoktan Sawit Lestari, terbentuk pada tahun 2009, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui promosi sawit berkelanjutan. Kemudian Gapoktan Sawit Lestari berganti nama menjadi Gapoktan Tanjung Sehati dengan akte notaris/PPAT tercatat pada tanggal 8 Mei 2013.
- Ketua/*Group manager* dan pengurus induk dipilih dari dan oleh anggota gapoktan. Sedangkan ketua masing-masing unit bisnis berasal dari pengurus induk. Di kepengurusan induk terdapat ketua/*group manager*, sekretaris dan bendahara.
- Gapoktan percaya kalau mereka berjuang bersama dalam wadah organisasi mereka akan lebih didengar. Dulu sewaktu belum ada Gapoktan Tanjung Sehati tidak ada yang memerhatikan mereka, tetapi sekarang banyak pihak yang memerhatikan termasuk pemerintah.
- Aturan hak dan kewajiban tertulis dalam AD/ART, aturan tersebut disosialisasikan kepada anggota.
- Melalui Gapoktan, anggota juga bisa mengakses pupuk bersubsidi. Dulu petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk apalagi pupuk yang

bersubsidi. Sekarang dengan adanya pupuk, petani bisa memupuk kebun kelapa sawitnya secara rutin, sehingga hasilnya lebih baik.

- Gapoktan berusaha melibatkan anak muda yang sudah tamat sekolah dalam kepengurusan, tetapi mereka tidak begitu tertarik, mereka hanya tertarik untuk kegiatan atau pekerjaan yang dikompensasi dengan uang.
- Sedangkan pengurus yang ada sekarang memiliki motivasi untuk maju, untuk belajar, ingin mengetahui lebih banyak, tertarik untuk belajar mengenai sertifikasi, hal ini dikarenakan ada lembaga pendamping, yayasan SETARA Jambi yang mau membantu, tidak berorientasi uang.
- Total jumlah anggota Gapoktan adalah 277 orang, semuanya laki-laki, yang berasal dari 6 kelompok tani, baik anggota dan pengurus semuanya aktif terlibat dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Gapoktan.
- Setiap anggota mengisi dan menandatangani formulir ketika bergabung dengan Gapoktan. Ketika petani bergabung, hak dan kewajiban anggota dijelaskan, setelah anggota mengerti, barulah anggota tandatangan.
- Gapoktan Tanjung Sehati didirikan dan digagas oleh petani sawit swadaya dan difasilitasi oleh Yayasan SETARA Jambi. Gapoktan Tanjung Sehati merupakan gabungan dari 6 Kelompok tani yang terdiri atas 227 petani dan mengelola 346,57 Ha lahan sawit.
- Ketua Gapoktan atau Grup Manager bertanggungjawab untuk memberikan masukan dan nasihat ke gapoktan, melakukan evaluasi internal terhadap program dan unit bisnis gapoktan.
- *Group manager* bertanggung jawab untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban pada anggota setiap tahun, menghadiri rapat pengurus dan anggota, mengkoordinasikan dan mengharmonisasi prosedur ke kelompok tani, mewakili gapoktan menghadiri rapat-rapat di luar gapoktan, dan membangun jaringan dengan pihak-pihak lain.
- Keputusan tertinggi ada di rapat anggota, dan rapat anggota dilakukan satu kali dalam satu tahun.
- Syarat menjadi anggota adalah: 1) tinggal di Desa Bungo Tanjung, 2) berumur 17 tahun atau sudah menikah, 3) menyetujui AD/ART, program umum dan kebijakan, mengajukan permohonan ke pengurus, mengisi formulir.

- Meski sudah memenuhi syarat diatas tetapi keanggotaan baru dianggap sah jika sudah memiliki status kepemilikan lahan yang jelas.
- *Group manager* dipilih oleh dan dari anggota yang memiliki tugas: 1) Sebagai kontrol dan koordinasi seluruh elemen dalam struktur. 2) Penjamin implementasi standar-standar dan kesepakatan, 3) fungsi advokasi (pupuk, sertifikat, akses dana serta bantuan).
- Sekertaris berfungsi memastikan database dan pendokumentasian (data anggota, peta lahan, kesepakatan dan prinsip dan kriteria RSPO.
- Inspektor boleh berasal dari anggota dan luar anggota; melakukan inspeksi internal terhadap implementasi prinsip dan kriteria RSPO.

c. Pengalaman lembaga

- Petani anggota Gapoktan Tanjung Sehati pernah memiliki pengalaman buruk di masa lalu dalam berorganisasi, yaitu dalam berkoperasi. Pada waktu itu terjadi penyelewengan kekuasaan oleh sebagian pengurus yang hingga sekarang masih menimbulkan trauma. Hal inilah yang membuat sebagian dari petani sawit swadaya tidak mau bergabung dengan Gapoktan Tanjung Sehati, karena takut pengalaman yang sama terulang kembali.
- Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh petani anggota Gapoktan seperti permasalahan jalan dan infrastruktur yang buruk, sulit mendapatkan bibit sawit berkualitas, sulit mendapatkan pupuk, rendahnya harga jual TBS, rendahnya pengetahuan teknis dan banyak permasalahan lainnya yang membuat beberapa petani berani mencoba kembali berorganisasi. Petani menyadari jika berjuang sendiri-sendiri maka masalah mereka tidak akan pernah selesai, petani percaya dengan kekuatan kelompok oleh karena itulah mereka bergabung dalam gapoktan.
- Petani anggota Gapoktan Tanjung Sehati adalah generasi kedua dari keluarga transmigran Jawa yang mengikuti program transmigrasi pemerintah dari tahun 1980 hingga 1984. Masing-masing mendapatkan 2.25 Ha lahan untuk menanam tanaman keras (LU2), 1 Ha untuk menanam tanaman pangan (LU1) dan 0,5 Ha untuk perumahan.

- Pada tahun 1986, PT Sari Aditya Loka (anak perusahaan perusahaan kelapa sawit dari ASTRA Group) beroperasi di daerah ini dengan skema perkebunan inti. Petani kemudian menjalin kerjasama dengan perusahaan di mana 2,25 ha lahan milik mereka dijadikan kebun plasma. Petani yang menggarap lahan ini disebut sebagai petani plasma.
- Di sepanjang tahun 2000-an petani mulai menanam lahan 1 hektar yang diperuntukan untuk tanaman pangan dengan kelapa sawit dikarenakan lahan tersebut tidak cocok untuk menanam padi, selain itu petani juga merasa kalau hasil dari berkebun sawit lebih menjanjikan dari pada menanam tanaman pangan. Petani yang menggarap lahan ini disebut sebagai petani swadaya.
- Petani yang sekarang menjadi pengurus gapoktan sudah mengenal RSPO jauh sebelum gapoktan terbentuk. Salah seorang petani yang sekarang menjadi pengurus gapoktan pernah menghadiri rapat RSPO 7 di Bali pada tahun 2008, ketika pembentukan gapoktan masih tengah digagas. Dan Semenjak itu, hingga sekarang, Gapoktan Tanjung Sehati aktif terlibat di dalam rapat, diskusi dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh RSPO.
- Banyak manfaat yang didapatkan oleh Gapoktan. Manfaat terbesar salah satunya adalah jejaring. Gapoktan Tanjung Sehati sekarang banyak dikenal oleh pemerintah, perusahaan, lembaga penelitian, LSM Internasional & Lokal, serta tentu saja oleh kelompok tani lainnya. Sebagai contoh, Gapoktan Tanjung Sehati diundang ke Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan pada bulan September 2012.
- Pusat penelitian tersebut sudah terbentuk semenjak tahun 1916 dan telah banyak melakukan kajian kelapa sawit. Kunjungan ke PPKS memberikan banyak pembelajaran bagi petani, terutama mengenai pemilihan bibit kelapa sawit unggul dan cara mengetahui asal-usul bibit yang jelas.

d. Transparansi dan akuntabilitas lembaga

- Setiap tahun Gapoktan mengadakan rapat anggota di mana seluruh anggota diundang. Di Rapat anggota tahunan ini pengurus membacakan laporan pertanggung jawaban ke anggota. Jika suami tidak bisa hadir,

bisa digantikan oleh istri. Rapat anggota tahun lalu banyak dihadiri oleh istri, yaitu sekitar 40%.

- Selain rapat tahunan, Gapoktan juga akan mengadakan rapat yang mengundang semua anggota setiap ada hal baru yang akan diputuskan. Gapoktan selalu membuat keputusan secara bersama-sama. Dan setiap rapat, Gapoktan selalu membuat notulensi rapat.
- Semua informasi disimpan di sekretariat Gapoktan yang terbuka untuk semua anggota. Anggota boleh mengakses informasi apa saja yang mereka butuhkan. Anggota juga bisa datang untuk sekadar berdiskusi dengan sesama pengurus atau dengan anggota lainnya.
- Hingga saat ini, Gapoktan sudah melakukan 3 kali rapat tahunan (RAP) yang diselenggarakan di gedung sekolah di desa. Biaya untuk rapat tahunan anggota masih disubsidi oleh Yayasan SETARA Jambi.

e. Tata kelola: pemahaman AD/ART, kepatuhan terhadap regulasi

- *Group manager* memiliki panduan operasional/SOP yang mengatur sistem dokumentasi dari kelompok dan bertanggungjawab membuat keputusan di dalam kelompok, panduan ini terdapat dalam AD/ART organisasi.
- Setiap anggota memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus dan juga terlibat dalam kegiatan gapoktan seperti pelatihan, dan lain-lain.
- Jika ada anggota yang tidak patuh terhadap ketentuan organisasi, anggota bisa dikeluarkan dengan terlebih dahulu diberikan peringatan secara lisan dan tertulis.
- Anggota yang sudah diberikan peringatan dan masih belum berubah maka mereka akan di non aktifkan. Jika anggota melakukan langkah perbaikan selama masa non aktif, Ia bisa kembali menjadi anggota.
- Jika anggota akan dikeluarkan, keputusan akhir ditentukan dalam rapat pengurus. Petani bisa dikeluarkan selama 5 tahun, setelah itu, jika ingin kembali bergabung bisa dipertimbangkan kembali.

f. Sertifikasi sawit berkelanjutan

- Upaya Gapoktan Tanjung Sehati untuk menerapkan prinsip dan kriteria RSPO tidak mudah, hal ini karena pengurus dan anggota belum begitu paham dengan manfaat dari sertifikat RSPO yang akan mereka terima, meski pengurus dibantu oleh yayasan SETARA Jambi sudah mensosialisasikannya.
- Berbeda dengan di Ukui, di mana PT IIS yang membeli TBS dari asosiasi amanah adalah anggota RSPO, di Merangin, PT SAL yang membeli TBS dari petani bukanlah anggota RSPO.
- Tetapi meski manfaat sertifikasi masih belum jelas, petani yakin dengan manfaat langsung yang akan mereka dapatkan jika mereka menerapkan GAP dan Prinsip dan kriteria RSPO.
- Secara umum, tahapan sertifikasi petani swadaya yang dilakukan oleh Gapoktan adalah melalui tahapan berikut: 1) membangun kelembagaan (termasuk struktur ICS), 2) memberikan pelatihan HCV, 3) pelatihan GAP, 4) pelatihan Prinsip dan Kriteria RSPO, 5) pengadaan perlengkapan kerja, 6) pengadaan alat peringatan di kebun.
- Praktik bertani sawit secara berkelanjutan sudah lama di sosialisasikan kepada anggota gapoktan, yaitu dimulai sekitar tahun 2009, melalui yayasan SETARA Jambi yang bekerja sama dengan Hivos. Dari hasil sosialisasi dan pelatihan, petani mulai mengenal mengenai cara atau praktik bertani yang baik (GAP) dan Sistem penjaminan mutu internal (SPI). Pada waktu itu, petani sudah mulai meminimalisir penggunaan pupuk kimia dengan memanfaatkan pupuk organik.
- Baru setelah itu, ketika petani merasa siap untuk melakukan sertifikasi RSPO, sosialisasi prinsip dan kriteria RSPO dan persiapan menghadapi sertifikasi dilakukan. Sebagai contoh di bulan November 2010, dilakukan sosialisasi dan pelatihan tentang penerapan prinsip dan kriteria RSPO.
- Menurut staf pendamping dari Yayasan SETARA Jambi yang secara intensif mendampingi petani dalam proses mencapai sertifikasi RSPO, pelatihan hanya salah satu metode untuk membuat petani paham mengenai prinsip dan kriteria RSPO, tetapi faktor penting lain adalah informasi yang diberikan pada waktu pelatihan tersebut secara

perlahan-lahan, berulang, dan terus menerus harus disampaikan ke petani.

- Meningkatkan pemahaman petani mengenai prinsip dan kriteria RSPO dapat dilakukan melalui diskusi di kebun, di sekretariat Gapoktan, atau obrolan santai di sore hari di teras rumah. Karena jika tidak, sehari sehabis pelatihan petani akan lupa, hal ini bisa dikarenakan faktor usia dan banyak faktor lainnya.
- Setelah pelatihan dan pemahaman petani meningkat faktor penting lainnya adalah secara terus-menerus dan perlahan, staf pendamping dan pengurus gapoktan mengajak petani untuk menerapkan prinsip dan kriteria tersebut. Sangat wajar bagi petani yang tidak lagi muda bahwa habis pelatihan esoknya mereka sudah lupa, makanya pemahaman mengenai prinsip dan kriteria RSPO perlu di ulang terus-menerus.
- Prinsip dan Kriteria di buku panduan menggunakan bahasa teknis yang agak sulit dipahami petani, sedangkan pendidikan petani yang relatif rendah membuat mereka kesulitan untuk bisa dengan cepat memahami isi buku tersebut.
- Gapoktan Tanjung Sehati merasa terbantu dengan kehadiran staf pendamping dari Yayasan SETARA Jambi. Staf tersebut membantu menerangkan prinsip dan kriteria yang ada di dalam buku tersebut ke dalam bahasa yang sederhana, bahasa yang lebih bisa dipahami oleh petani, dan juga melakukan diskusi dan tanya jawab untuk lebih memperkuat pemahaman petani.
- Istilah dalam prinsip dan kriteria RSPO agak sulit dicerna oleh petani, makanya perlu penerjemahan dan memberikan analog dengan menggunakan bahasa sehari-hari petani. Disamping itu sebenarnya petani juga memiliki cara-cara tradisional dalam merawat kebun yang ternyata mempunyai nilai *sustainability*, indigenous knowledge yang sudah ada di petani ini perlu digali lebih mendalam. Menemukan kesamaan dari hal yang sudah dilakukan oleh petani, akan membantu petani dalam memahami dan menerapkan prinsip dan kriteria RSPO.
- PT SAL selama ini perusahaan cukup aktif membantu petani dalam menyediakan pelatihan teknis budidaya dan perawatan kebun sawit,

pelatihan ini sangat membantu petani dalam memahami bagaimana bertani sawit secara baik, benar dan tepat.

- TBS besertifikat RSPO milik gapoktan di jual ke PT SAL. Sudah terjalin hubungan jual beli yang baik antara PT SAL dengan Gapoktan Tanjung Sehati. Sebagai bentuk apresiasi atas kualitas TBS yang sudah meningkat dan usaha dari kelompok tani dalam mendapatkan sertifikasi, PT SAL memberikan harga sedikit lebih tinggi dari pada harga yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi.
- Banyak pihak yang memberikan dukungan kepada Gapoktan Tanjung Sehati, hal ini juga diwujudkan dalam kunjungan untuk melihat kesiapan petani dalam menghadapi sertifikasi. Di akhir bulan Januari 2013, Gapoktan Tanjung Sehati mendapatkan kunjungan dari kedutaan Belanda dan RSPO. Selain itu, juga hadir perwakilan dari pemerintah lokal, yakni dinas perkebunan merangin, pihak kecamatan, dan pemerintah desa.
- Kunjungan-kunjungan tersebut membuat petani merasa diperhatikan dan membuat petani menjadi lebih bersemangat dan memiliki tekad untuk membuktikan kalau mereka bisa memperoleh sertifikasi RSPO.

g. Persiapan dan pelaksanaan sertifikasi RSPO

- Sertifikasi dilakukan dengan mengacu pada RSPO Prinsip dan Kriteria untuk Sawit Berkelanjutan, Petani swadaya, Indonesia, Juli 2010. *Assesment* Sertifikasi dilakukan oleh TUV Rheinland Malaysia pada tanggal 19-21 November 2013.
- Selama *assesment* sertifikasi yang dilakukan oleh TUV Rheinland, terdapat tujuh ketidaksesuaian (*non forminities*); 5 ketidaksesuaian dalam hal indikator *major compliance* dan 2 ketidaksesuaian dalam hal Indikator *Minor Compliance*.
- Gapoktan Tanjung Sehati telah berhasil dalam menerapkan Prinsip dan Kriteria RSPO hal dibuktikan dengan sertifikat RSPO yang mereka peroleh pada tanggal 16 Juni 2014. Meski demikian, sertifikat RSPO bukan tujuan akhir dari petani. Benar mereka berharap ada peningkatan harga dari sertifikat yang didapatkan, tetapi lebih dari itu, di sebagian pengurus dan anggota sudah terbentuk kesadaran bahwa adalah

tanggung jawab mereka juga untuk menjaga lingkungan dan menjadi petani yang bertanggungjawab sehingga generasi mendatang masih dapat hidup merasakan keindahan alam.

- Petani tidak lagi menggunakan pupuk kimia atau pestisida secara berlebihan. Meminimalisasi pencemaran udara dan air dan menghindari kontaminasi. Petani telah menggunakan masker dan peralatan *safety* lainnya sehingga sekarang mereka lebih sehat dan jauh dari penyakit.
- Yang menjadi poin penting juga adalah pencatatan, karena dalam sertifikasi nantinya perlu bukti-bukti yang meyakinkan bahwa petani sudah melakukan dengan cara-cara yang baik, ini juga menjadi sedikit kendala karena belum terbiasanya petani untuk mencatatkan aktivitas mereka di atas kertas.
- Sewaktu audit dilakukan, petani haruslah sudah mematuhi semua prinsip dan kriteria tersebut, baik yang mayor dan juga minor. Bagaimanapun, misalkan ketentuan minor masih belum terpenuhi, tetapi semua mayor terpenuhi, hal tersebut tidak masalah. Temuan yang sifatnya minor tidak menjadi masalah asalkan disaat *surveillance* tahun depan, temuan minor tersebut sudah diperbaiki.
- Ditemukan tujuh *nonconformities* atau ketidaksesuaian, yaitu: 5 indikator mayor dan 2 indikator minor. 5 *nonconformities* Indikator mayor tersebut adalah: 4 dari persyaratan sertifikasi RSPO grup dan 1 RSPO prinsip dan kriteria petani independen.
- Berikut adalah temuan mayor:
 1. Tidak terdapat bukti bahwa grup manajer telah melakukan penilaian internal secara regular sebagaimana yang dipersyaratkan oleh standar RSPO untuk sertifikasi kelompok.
 2. Mekanisme/alur kerja yang telah dirancang dan disepakati masih belum handal dalam memastikan bahwa TBS yang tidak besertifikasi tidak dijual sebagai TBS besertifikat. Auditor menemukan adanya TBS dari areal kuburan dan kebun dusun yang tidak termasuk sebagai anggota dikategorikan sebagai TBS besertifikasi pada periode penjualan bulan Oktober 2013.

3. Didalam surat pengantar buah/surat jalan yang diterbitkan oleh Gapoktan Tanjung Sehati belum menginformasikan nama produk, model rantai suplai dan tujuan pengiriman.
 4. Didalam surat pengantar TBS/surat jalan yang diterbitkan oleh Gapoktan Tanjung Sehati pada Periode Oktober 2013 belum menginformasikan tujuan pengiriman.
 5. Gapoktan belum memiliki SPPL sesuai dengan Permen LH No. 13 Tahun 2010.
- Dua temuan minor adalah sebagai berikut:
 1. Kelembagaan petani belum memiliki hasil identifikasi dampak lingkungan dan catatan pelaksanaannya.
 2. Gapoktan sudah memiliki sistem identifikasi dan penghitungan kompensasi atas pengambilalihan hak legal/hak adat tanah yang dibuat pada september namun belum ada bukti prosedur tersebut disosialisasikan dan disepakati dengan pemangku kepentingan relevan (wakil masyarakat dan institusi lain).
 - Gapoktan Tanjung Sehati melakukan langkah perbaikan (*corrective*) merespons temuan auditor. Kemudian tim audit merekomendasikan bahwa Gapoktan Tanjung Sehati lulus audit dan berhak mendapatkan sertifikat RSPO.
 - Tantangan terbesar bagi Gapoktan Tanjung Sehati dalam mempersiapkan kelompok menuju sertifikasi RSPO adalah “pencatatan”. Dalam audit yang akan menentukan apakah Gapoktan memenuhi ketentuan untuk mendapatkan sertifikat atau tidak, diperlukan bukti-bukti yang meyakinkan, tertulis, dan jelas yang menunjukkan bahwa petani telah melakukan cara-cara bertani sesuai dengan ketentuan sertifikasi. Tetapi petani tidak terbiasa dengan pencatatan misalkan petani tidak terbiasa dengan membuat notulensi disaat rapat. Masyarakat masih mengandalkan budaya lisan. Sedangkan pembuktian adalah sangat penting dalam audit.

h. Peran Sistem Pengendali Internal

- Gapoktan Tanjung Sehati sudah mengenal ICS jauh sebelum adanya rencana mengikuti sertifikasi RSPO. Waktu itu, ICS dikenalkan oleh BIOCert yang didukung oleh Hivos.
- Tahapan Internal audit (bagian dari ICS) yang dilakukan gapoktan adalah sebagai berikut: 1) membuat jadwal internal audit, 2) melakukan penilaian di kebun petani, 3) hasil *assesment* akan dilaporkan setelah tujuh hari ke pengurus gapoktan, 4) jika tidak ada masalah atau temuan akan dipublikasikan oleh pengurus, 5) jika terdapat temuan, pengurus akan berdiskusi dengan anggota terkait, dan bersama-sama merencanakan perbaikan., 6) perbaikan akan dilakukan dalam tempo satu bulan untuk temuan mayor dan minor dan akan dimulai satu hari setelah rapat.
- Gapoktan Tanjung Sehati dibantu oleh fasilitator daerah (FASDA) Jambi dalam melakukan inspeksi internal untuk melihat kesiapan petani terhadap sertifikasi RSPO. Tim Fasda Jambi melakukan survei selama kurang lebih tiga hari, kegiatan berupa kunjungan ke kebun, dan mendiskusikan hasil temuan mereka, serta memberikan saran untuk perbaikan. Misal, perihal keselamatan kerja.
- Gapoktan memiliki panduan dalam mengkomunikasikan rencana perbaikan (CARs) yang terdiri atas tahapan sebagai berikut: 1) membicarakannya dengan petugas gapoktan, 2) melakukan *assesment* lapangan, 3) laporan akan diserahkan 7 hari setelah rapat selesai, 4) temuan atau hasil akan disimpan oleh gapoktan dan anggota terkait, langkah perbaikan akan dilakukan. 5) perbaikan akan dilakukan selama satu bulan untuk temuan minor dan mayor. 7) ada juga *form* yang terdiri atas rencana perbaikan selanjutnya yang terdiri atas tujuan dan jadwal pelaksanaan.
- Gapoktan Tanjung Sehati memiliki kebijakan dan aturan mengenai monitoring, termasuk dalam melakukan penilaian risiko, *surveillance* tahunan anggota gapoktan.
- Gapoktan Tanjung Sehati memiliki data anggota yang secara berkala diperbaharui, yang terdiri atas: nama, alamat, kontak detail, jenis

kepemilikan lahan, luas lahan, lokasi, dan lain-lain, jenis bibit, batas wilayah, dan lain-lain.

- Gapoktan memiliki data produksi setiap anggotanya yang terdiri atas data produksi tahunan, produksi tahun lalu, dan estimasi produksi di tahun berjalan. Setiap kelompok memiliki data produksi tahun lalu.
- Salah satu contoh dari beberapa langkah perbaikan yang dilakukan oleh Gapoktan Tanjung Sehati, merespons temuan audit internal adalah memasang plang di lokasi strategis yang banyak dilalui dan memungkinkan petani yang lewat menyampaikan pesan yang disampaikan. Pesan tersebut berisi seruan atau langkah perubahan agar kebun menjadi lebih baik. Misalkan, plang yang bertuliskan “Stop Pembakaran Lahan!”
- Perbaikan yang dilakukan oleh Gapoktan Tanjung Sehati untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencatat atau mendokumentasikan informasi, kegiatan, dan hasil adalah dengan membangun kantor sekertariat yang nyaman yang menjadi tempat berkumpul anggota dan menjadi tempat di mana tugas-tugas administrasi dilakukan. Saat ini Gapoktan sudah memiliki bangunan yang berfungsi sebagai sekertariat, peralatan kerja seperti laptop dan printer juga ada. Gapoktan Tanjung Sehati juga tengah berusaha merekrut tenaga muda profesional untuk melakukan pencatatan dan merapikan arsip kegiatan Gapoktan.

i. Lacak balak atau *traceability*

- Petani Gapoktan menjual TBS ke unit penjualan buah gapoktan, proses penimbangan disaksikan oleh petani. Petani puas dengan proses penimbangan yang transparan dan tidak pernah dirugikan.
- Petani menerima nota yang berisi jumlah TBS, data yang sama juga disimpan oleh petugas yang melakukan penimbangan (anggota kelompok).
- Buah yang bersertifikat tidak dicampur dengan buah yang tidak bersertifikat. Buah tersebut dikirimkan langsung ke pabrik pengolahan PT SAL dengan menggunakan mobil sewa. Pengantar buah membawa surat jalan TBS yang nantinya ditandatangani oleh pihak pabrik yang menerima.

- Gapoktan tidak mengalami kesulitan jika suatu ketika gapoktan harus melacak buah yang terkirim, baik dikarenakan kualitas atau untuk keperluan lainnya. Bagaimanapun proses pencatatan dan pelacakan sudah termasuk di dalam sistem ICS gapoktan.

j. Keberlanjutan

- Keberlanjutan usaha sawit—ulasan berdasarkan pengamatan atas prospek keberlanjutan usaha.
- Gapoktan menilai bahwa kunci sukses organisasi dalam memperoleh sertifikasi RSPO adalah meningkatnya kekuatan gapoktan secara lembaga. Hal ini ditandai dengan adanya struktur dan pembagian tugas yang jelas, adanya AD/ART, SOP dan kebijakan organisasi lainnya yang transparan dan dapat diakses anggota. Meningkatnya kepercayaan sesama anggota, sesama pengurus dan antara pengurus dan anggota. Meningkatnya kapasitas pengurus gapoktan sehingga pengurus bisa menjalankan organisasi menjadi lebih baik.
- Gapoktan Tanjung Sehati, yang dulu bernama sawit lestari, pertama kali terbentuk adalah agar bisa lepas dari cengkraman tengkulak. Pada waktu itu, tengkulak membeli TBS dari petani dengan sangat murah, bahkan bisa mencapai 50% lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Kerjasama yayasan SETARA Jambi dengan Gapoktan Tanjung Sehati dimulai dari upaya untuk meningkatkan kualitas buah yang dihasilkan oleh petani. Berbagai pelatihan seperti GAP, manajemen hama terpadu, termasuk ICS dikembangkan.
- Disaat yang sama, setara yang merupakan anggota RSPO juga menerima tantangan untuk membuktikan bahwa sertifikasi RSPO untuk petani sawit swadaya bisa diterapkan.
- Gapoktan menerima tantangan tersebut, dan yayasan SETARA secara aktif melakukan pendampingan. Yayasan SETARA bekerjasama dengan perusahaan dan pemerintah dalam mempersiapkan petani menghadapi sertifikasi.
- Dan akhirnya sertifikasi tersebut berhasil diraih. Tetapi petani belum merasakan manfaat langsung dari selebar sertifikat pembuktian yang

didapatkan. Saat ini, dengan dibantu oleh yayasan SETARA Jambi, Gapoktan Tanjung Sehati berusaha menjual sertifikat tersebut kepada Green Palm, model yang juga dikenal dengan istilah book and claim. Tetapi hingga saat wawancara, sertifikat RSPO Gapoktan Tanjung Sehati masih belum laku terjual.

- Salah satu metode lain yang mungkin adalah model segregasi. Tetapi untuk ini, perusahaan yang ada di sekitar Gapoktan Tanjung Sehati juga haruslah anggota RSPO dan sudah melakukan sertifikasi RSPO. Semua TBS bersertifikat yang dijual secara khusus diantar ke pabrik penggilingan (segregasi), dan produk yang sama akan sampai ke *buyer*, tanpa tercampur dengan produk lain.
- Saat diwawancara, posisi kas Gapoktan untuk kegiatan umum minus, tetapi untuk modal usaha masih ada. Pemasukan yang berasal dari jual beli TBS masih belum maksimal, keuntungan yang didapat dari selisih harga yang diberikan oleh perusahaan di atas harga yang ditetapkan pemerintah terus diputar sebagai modal pembelian TBS ke petani. Selain dari penjualan TBS, Gapoktan juga memperoleh pendapatan dari penjualan pupuk bersubsidi. Tetapi semua keuntungan, dikurangi dengan biaya operasional, masih belum sebanding.
- Yayasan SETARA pernah memberikan modal usaha untuk pembelian TBS dari petani yaitu sebanyak 50 juta yang dibayarkan secara bertahap, yaitu 30 juta dan 20 juta.
- Gapoktan memiliki beberapa unit: 1) unit simpan pinjam, 2) unit penjualan buah, 3) unit saprotan, dan dalam setiap unit memiliki struktur kepengurusan masing-masing. Pengurus Gapoktan terdiri atas perwakilan ketua kelompok tani.
- Bendahara pengurusan induk mengelola dana dari hasil jasa penjualan pupuk, yang tidak dikelola oleh unit.
- Di setiap unit: simpan pinjam, penjualan buah, dan saprotan, sudah terdapat kesepakatan *fee* masing-masing unit, yaitu *fee* yang akan diserahkan ke Gapoktan induk yang akan menjad biaya operasionalnya Gapoktan. Sewaktu wawancara, unit yang sudah menyerahkan *fee* ke Gapoktan baru dua unit, yaitu: dari penjualan buah dan saprotan.

- *Fee* atau keuntungan disetor ke pengurus induk setiap bulannya, untuk buah jumlah *fee* ditentukan berdasarkan kg penjualan buah, setiap 1 kg buah akan dipotong sebesar 5 rupiah.
- Dalam ketentuan gapoktan, tidak ada iuran dari anggota, tetapi keuntungan yang disetor ke gapoktan induk setiap bulannya, kurang lebih memiliki fungsi yang sama dengan iuran anggota. Sistem ini baru berjalan, di tahun 2013 dari unit penjualan buah sudah ada 4 kali penyetoran. Tetapi hal tersebut juga belum berjalan optimal, karena dana yang terkumpul sering dipinjam kembali oleh petani.
- Modal pembelian buah Gapoktan berasal dari hibah yayasan SETARA Jambi dan dari dana puap pemerintah. Dana yang dipinjam oleh anggota adalah dana 5 rupiah dari setiap kilo penjualan buah setiap bulannya, tetapi pengurus yang mengelola unit penjualan tidak memotong langsung, dengan kata lain, dipinjamkan dulu ke petani tersebut, dan nanti petani tersebut menyetorkan ke gapoktan sesuai dengan jumlah pemotongan yang belum dibayarkan, tetapi petani tidak menyetorkannya.
- Usaha saprotan yang dikelola langsung oleh pengurus induk menguntungkan. Keuntungan disetorkan rutin ke Gapoktan setiap bulannya. Perkarung pupuk, Gapoktan mengambil keuntungan sebesar Rp. 5,000 rupiah.
- Gapoktan masih berfikir mengenai cara untuk mengembangkan usaha, sehingga gapoktan bisa memiliki dana yang cukup untuk biaya operasional pengurus dan juga untuk membayar biaya *surveillance* tahunan. Tetapi Gapoktan masih belum menemukan ide usaha lain, karena sebagian dari pengurus juga sudah memiliki usaha sendiri, Gapoktan sungkan jika harus menyaingi usaha pengurus. Misal, Gapoktan melihat kalau ada peluang mendatangkan uang dari usaha warung serba ada, tetapi karena salah satu pengurus sudah memiliki warung tersebut, gapoktan tidak jadi mengembangkan usaha tersebut. Terdapat kendala nilai yaitu “ketika mau melangkah maju, tidak boleh mematikan usaha orang lain.”

- Gapoktan juga sudah mulai memberikan insentif “uang lelah” untuk jasa pengurus, tetapi belum ada ketentuan jumlah yang diterima setiap bulannya. Saat ini model yang dikembangkan adalah sebagai berikut: Modal pembelian pupuk per karung adalah Rp100.000, harga jual adalah Rp. 120,000, keuntungan yang diambil adalah Rp. 20,000. Tetapi hal tersebut juga bisa berubah, terkadang Gapoktan hanya mengambil Rp. 10.000, bahkan hanya Rp. 5,000, terkadang malah tekor.
- Saat ini, Gapoktan Tanjung Sehati menjual TBS yang sudah bersertifikat ke PT SAL. PT SAL bukanlah anggota RSPO. Tidak ada insentif harga yang diberikan dikarenakan sertifikat tersebut, tetapi PT Sal memberikan apresiasi atas usaha petani dan juga peningkatan kualitas TBS dengan membeli beberapa rupiah per kilo lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Estimasi keuntungan yang bisa didapat oleh Gapoktan Tanjung Sehati jika sertifikat RSPO mereka terjual adalah sebagai berikut. Total TBS yang diklaim adalah 4500, CPO dari TBS tersebut adalah $20\% \times 4500 = 900$ Ton. Satu ton CPO sama dengan satu sertifikat. 1 sertifikat harganya 15 USD. Jika ada yang *buyer* yang beli, maka Gapoktan Tanjung Sehati akan menerima sekitar Rp. 135 juta setiap tahunnya. Perusahaan konsumen yang membeli mendapatkan keuntungan bahwa mereka bisa mengklaim kalau sawit mereka adalah sawit yang diproduksi oleh petani secara berkelanjutan.
- Jika sertifikat Gapoktan terjual setiap tahunnya (5 kali), maka uang yang terkumpul akan cukup untuk membayar biaya sertifikasi selanjutnya setelah masa berlaku sertifikat tersebut berakhir, dan Gapoktan juga berkemungkinan bisa membayar biaya kunjungan surveilaince tiap tahun dari tahun kedua hingga tahun kelima.
- Tetapi jika sertifikat tersebut tidak terjual, keberlanjutan sertifikat RSPO yang sudah diperoleh oleh Gapoktan akan terancam, kecuali, jika perusahaan atau pemerintah ada yang mau mensubsidi biaya audit.
- Petani masih trauma dengan pengalaman masa lalu yang membuat mereka tidak mudah percaya untuk kembali aktif berorganisasi. Meski pengurus sekarang tidak memiliki hubungan dengan pengalaman masa

lalu mereka, tidak serta merta membuat masyarakat percaya dan menerimanya. Pengurus gapoktan mengibaratkan pengalaman buruk berorganisasi petani di mekar jaya “bagaikan bangunan kukuh yang sudah runtuh, untuk bisa tegak kembali seperti sedia kala akan sangat sulit.”

- Tetapi secara perlahan, jumlah petani yang yakin dengan keberadaan gapoktan semakin meningkat dan mereka memilih untuk bergabung. Meskipun masih ada rasa ragu, dan masih butuh kerja keras dari pengurus untuk mensosialisasikan manfaat menjadi anggota Gapoktan.
- Menurut pengurus, anggota akan keberatan jika diminta iuran tahunan keanggotaan. Untuk mau bergabung menjadi anggota Gapoktan saja sudah sebuah perjuangan, hal ini membutuhkan kerja keras pengurus untuk meyakinkan petani untuk bergabung dengan gapoktan dan menerapkan prinsip dan kriteria RSPO. Ditakutkan, jika iuran diberlakukan, maka anggota akan mundur. Tetapi pengurus sudah mencoba cara lain, yaitu dengan pengembangan tiga unit usaha tadi, hanya saja, usaha tersebut belum berjalan optimal.
- Keberlanjutan lembaga akan tergantung dari pendanaan, kepemimpinan dan kapasitas dari pengurus. Saat ini, Gapoktan Tanjung Sehati masih mendapat banyak dukungan dari yayasan SETARA Jambi. Tidak hanya dalam bentuk dana, pelatihan, pendampingan, bahkan juga dalam berkomunikasi dengan RSPO, auditor dan pihak lainnya. Secara perlahan, Gapoktan sudah mulai mengambil alih peran setara, seperti, untuk penjualan TBS ke perusahaan, Gapoktan sudah berkomunikasi secara langsung.
- Demikian halnya dalam berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan disbun Jambi. Tetapi kemampuan dasar komputer pengurus gapoktan masih terbatas, pengurus belum bisa menggunakan email di mana merupakan alat komunikasi yang vital pada saat ini, karena lebih murah dan berbeda dengan pembicaraan di telepon, pembicaraan lewat email lebih bisa dipertanggungjawabkan.
- Untuk beberapa tahun ke depan, Gapoktan masih akan membutuhkan pendampingan dari yayasan SETARA Jambi dan lembaga lainnya, tetapi

fokus ke depan lebih mempersiapkan *phasing out* yayasan SETARA Jambi, dan bagaimana pengurus gapoktan bisa secara mandiri mengurus semua hal terkait dengan pengembangan organisasi, pengembangan usaha, penerapan inspeksi, dan sistem manajemen mutu internal organisasi.

- Selain itu juga ada provokasi yang dilakukan oleh segelintir pihak yang tidak suka melihat perkembangan Gapoktan. Ada ketakutan kalau usaha mereka akan terancam seiring berkembangnya Gapoktan. Selain itu juga ada faktor iri secara personal atas popularitas ketua dari gapoktan.
- Popularitas gapoktan juga sempat menarik perhatian parpol pada saat pilkada kemarin, sejumlah partai politik tertentu menawarkan bantuan yang ditolak secara halus oleh pengurus gapoktan. Penolakan ini juga berkemungkinan mengakibatkan kecewa dan sakit hati.
- Kepercayaan antara sesama pengurus, dan antara pengurus dengan anggota menjadi kunci penting dari keberlanjutan Gapoktan. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih meningkatkan lagi transparansi dan komunikasi intensif dengan anggota, serta terus menjaga kejujuran dan tidak pernah mengulang kesalahan yang sama dengan pengalaman koperasi lalu.



07

PARTISIPASI DALAM FORUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL



“

Hivos termasuk lembaga donor pertama yang memberikan pendanaan untuk petani sawit swadaya dalam upaya menerapkan P&K RSPO. Pada waktu itu belum banyak lembaga donor yang memberikan dukungan kepada petani sawit swadaya.

”

Partisipasi di RSPO

HARI KEDUA PERTEMUAN RSPO RT 7 di Kuala Lumpur, merupakan giliran Yayasan SETARA Jambi untuk mempresentasikan pengalamannya dalam mendampingi petani swadaya untuk menerapkan Prinsip dan Kriteria (P&K) RSPO di Desa Bungo Tanjung, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Yayasan SETARA Jambi menyambut baik kesempatan berharga yang diberikan tersebut.

Berbicara di pertemuan RSPO yang dihadiri oleh berbagai stakeholder baik dari perusahaan sawit, pengambil kebijakan, peneliti, *buyer*, petani sawit swadaya dari berbagai daerah, dan banyak pihak lainnya merupakan sebuah peluang bagi Yayasan SETARA Jambi dalam rangka meyakinkan stakeholder yang hadir untuk turut memerhatikan nasib dari petani sawit kecil, terutama petani sawit swadaya.

Yayasan SETARA Jambi berusaha untuk mempersiapkan bahan presentasi sebaik-baiknya. Slide presentasi yang disusun bersama dengan Gapoktan Tanjung Sehati kemudian dikonsultasikan kepada Hivos dan BIOCert. Konsultasi dilakukan melalui email, telepon, dan juga bertemu secara langsung (menjelang keberangkatan menuju Kuala Lumpur) untuk membahas mengenai bahan yang akan dipresentasikan secara lebih mendalam di kantor Hivos, Jakarta. Sama halnya dengan Yayasan SETARA Jambi, Hivos juga menganggap bahwa presentasi Yayasan SETARA Jambi di RSPO RT 7 sebagai sebuah peluang strategik.

Hivos termasuk lembaga donor yang pertama yang memberikan pendanaan untuk petani sawit swadaya dalam upaya menerapkan P&K RSPO. Pada waktu itu belum banyak lembaga donor yang memberikan dukungan kepada petani sawit swadaya, jikalau ada, fokus mereka masih dalam penyelesaian konflik lahan, serta penanggulangan dari hak-hak petani sawit yang dilanggar oleh perusahaan baik swasta atau perusahaan milik pemerintah, bukan dalam hal peningkatan produktivitas kebun atau peningkatan mutu.

Sebelumnya Hivos juga termasuk lembaga donor yang mendukung program serupa, tetapi kemudian Hivos merasa kalau pendekatan yang ril dan nyata di tingkat petani sawit juga perlu dilakukan; pendekatan yang lebih *sustainable* dengan berorientasi kepada pasar. Banyak petani sawit swadaya yang tidak

memiliki pengetahuan bertaman sawit yang memadai, rendahnya pemahaman dalam memilih bibit, keterbatasan dalam mengakses pupuk serta banyak hambatan lainnya.

Dengan menerapkan P&K maka masalah dasar petani yang diuraikan sebelumnya akan terselesaikan dengan sendirinya. Hanya saja masih banyak pihak yang meragukan bahwa petani sawit swadaya mampu untuk menerapkan P&K RSPO. Presentasi Yayasan SETARA Jambi diharapkan dapat merubah keraguan tersebut, sehingga dengan demikian, akan lebih banyak pihak yang memberikan dukungan pada petani sawit swadaya. Dengan semakin banyak pihak yang terlibat.

Jika pihak lain (lembaga donor, pemerintah atau pihak swasta) bersedia membantu petani sawit swadaya maka praktik sawit berkelanjutan yang diharapkan akan menjadi lebih nyata seiring dengan bertambahnya skala dukungan. Dengan semakin banyak pihak yang terlibat, artinya, akan lebih banyak lagi petani sawit swadaya yang akan terbantu baik dari segi jumlah dan juga dari segi luas wilayah. Pendanaan dari Hivos terbatas, Hivos tidak bisa membantu seluruh petani swadaya yang ada di Indonesia, oleh karena itu keterlibatan dari pihak-pihak lain sangat diharapkan.

Diskusi lebih lanjut antara Yayasan SETARA Jambi, Gapoktan Tanjung Sehati (ICS Bungo Tanjung), dan BIOCert memutuskan bahwa presentasi di RT RSPO tersebut akan disampaikan oleh pimpinan ICS Bungo Tanjung, Sayuti, bukan oleh pimpinan Yayasan SETARA Jambi, Rukaiyah Rofiq. Keputusan ini didasarkan atas pertimbangan agar petani mampu menyuarakan kebutuhan mereka sendiri. Salah satu dari kegiatan program yang dilakukan oleh Yayasan SETARA Jambi adalah memperkuat kelembagaan dari petani sawit swadaya, memperkuat kapasitas dan wawasan pengurus serta anggota.

Dengan sekian banyak pelatihan, rapat, workshop yang diberikan untuk kelompok tani sawit mandiri diharapkan agar petani mampu menyuarakan kebutuhan mereka sendiri. Yayasan SETARA Jambi dan Hivos hanya menjadi fasilitator dari perubahan tersebut, tetapi petani, mereka adalah agen perubah, mereka harus mampu untuk memengaruhi pihak lain agar perubahan yang mereka inginkan terwujud.

Petani sawit swadaya lebih mengetahui masalah yang mereka hadapi, dan mereka juga merupakan orang yang paling tepat untuk menceritakan manfaat yang mereka dapatkan dengan bekerjasama dengan Yayasan SETARA dan Hivos yang sudah dimulai semenjak tahun 2008. Selama ini petani sawit swadaya sering tidak dianggap, terpinggirkan, dan tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan suara mereka.

Oleh karena itu, Hivos dan Yayasan SETARA Jambi menjadikan kesempatan yang di berikan oleh RSPO kepada Yayasan SETARA Jambi menjadi kesempatan dari petani sawit swadaya untuk berbicara- menyuarakan pengalaman mereka ke banyak pihak. Pimpinan ICS Bungo Tanjung, Sayuti, setuju untuk melakukan presentasi.

Dalam presentasinya di RSPO RT 7, Sayuti menceritakan mengenai berbagai macam pelatihan yang sudah mereka dapatkan semenjak bekerjasama dengan Yayasan SETARA Jambi, pelatihan tersebut sangat bermanfaat karena selama ini mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari pemerintah. Sebelum bekerja sama dengan Yayasan SETARA belum banyak petani yang mengetahui keberadaan RSPO, apalagi mengenai Prinsip dan Kriteria RSPO, tetapi sekarang sudah, bahkan banyak petani yang berminat untuk menerapkan P&K RSPO.

Sayuti menjelaskan bahwa meski mereka memahami manfaat dari menerapkan P&K RSPO, mereka juga berkeinginan untuk menjadi petani yang bertanggung jawab, mereka tidak ingin dipersalahkan sebagai perusak lingkungan, hanya saja untuk menerapkan P&K RSPO ada berbagai macam hambatan yang harus mereka selesaikan terlebih dahulu. Sebagai contoh pupuk, yang terkait dengan prinsip 4: praktik yang baik.

Sering sekali petani tidak bisa membeli pupuk (terutama pupuk bersubsidi) karena tidak tersedia di pasaran, atau jikalau ada harganya sangat mahal dan petani tidak mampu untuk membelinya. Hambatan lain adalah mereka masih belum memiliki lembaga. Sedangkan untuk mendapatkan sertifikasi kelompok RSPO, mereka harus memiliki lembaga.

Hanya saja masyarakat di Desa Bungo Tanjung serta masyarakat di beberapa desa lain di Jambi trauma dalam berorganisasi, hal ini karena pengalaman buruk yang mereka alami dalam berkolaborasi, di mana pengurus

koperasi menyalah gunakan wewenang mereka dan mengorupsi aset dan simpanan anggota. Satu per satu hambatan yang mereka hadapi di ceritakan dengan jelas dan lancar oleh Sayuti.

Untuk menerapkan P&K RSPO, petani swadaya di Desa Bungo Tanjung bersama dengan Yayasan SETARA Jambi harus bekerja sangat keras dalam mengatasi hambatan yang menjadi penghalang mereka dalam menerapkan P&K RSPO, salah satu caranya adalah dengan mendorong petani untuk berorganisasi, membentuk kelompok dan memperkuat kelompok tersebut.

Dengan dibantu oleh BIOCert, petani sawit swadaya di Desa Bungo Tanjung telah berhasil membentuk kelompok Internal Control System (ICS), kelompok ICS inilah yang akan membantu petani dalam penerapan P&K RSPO yaitu dengan melakukan kontrol, selain itu pengurus kelompok juga akan melakukan lobi, negosiasi, dan advokasi ke berbagai pihak dalam rangka mengatasi permasalahan yang mereka hadapi.

Dalam waktu kurang lebih satu tahun, pelatihan dan pendampingan yang mereka dapatkan dari Yayasan SETARA Jambi telah berhasil meningkatkan produktivitas kebun mereka secara nyata, selain itu, mereka juga sudah mampu bernegosiasi untuk mendapatkan harga jual TBS yang kompetitif. Dari lobi yang mereka lakukan, pemerintah bersedia memperbaiki jalan ke kampung mereka sehingga proses pengiriman TBS ke *Milling* akan lebih lancar dan kualitas TBS mereka akan lebih terjaga.

Petani sawit swadaya di Desa Bungo Tanjung telah menyadari kalau mereka juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan dengan menerapkan P&K RSPO, mereka bisa mengatakan kalau mereka telah memenuhi tanggungjawab sosial dan lingkungan mereka, selain itu, menerapkan P&K RSPO juga akan lebih meningkatkan keuntungan mereka secara ekonomi, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengikuti skema sertifikasi RSPO untuk petani swadaya. Presentasi berjalan lancar. Presentasi tersebut menarik perhatian perwakilan petani swadaya di Thailand & Filipina, perusahaan sawit, akademisi, serta beberapa organisasi internasional.

Meski presentasi tersebut mendapatkan banyak apresiasi, tetapi Yayasan SETARA Jambi juga menuai kritikan. Beberapa orang perwakilan dari asosiasi perusahaan sawit Malaysia menganggap kalau presentasi petani sawit

swadaya yang mewakili yayasan SETARA Jambi dapat menjatuhkan kredibilitas RSPO. Pada saat itu Yayasan SETARA Jambi belumlah menjadi anggota RSPO.

Hal ini menunjukkan bahwa forum sawit RSPO masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar atau kelompok pemilik modal, sehingga presentasi dari petani marjinal dianggap bisa merusak citra RSPO sebagai forum elit dan bergengsi. Yayasan SETARA Jambi menyadari kalau untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit marjinal masih merupakan proses yang panjang.

Bagaimanapun juga presentasi Yayasan SETARA Jambi dan Gapoktan Tanjung Sehati di RSPO RT 7 di Kuala Lumpur telah berhasil membangun diskusi mengenai keterlibatan petani sawit swadaya dalam rantai sertifikasi RSPO. Hal ini membuat RSPO berpikir kalau mereka tidak bisa mewajibkan sertifikasi RSPO untuk petani sawit swadaya tanpa ikut membantu mengatasi hambatan yang mereka hadapi.

Banyak pihak yang baru menyadari bahwa penerapan P&K RSPO di tingkat petani swadaya tidak semudah yang mereka bayangkan. Jika petani swadaya diharapkan untuk terlibat dalam sertifikasi RSPO maka pertanyaan mengenai siapa pihak yang akan membantu untuk memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan kapasitas mereka dan mengatasi hambatan yang mereka hadapi dalam menerapkan P&K RSPO haruslah lebih dahulu di jawab.

Pemerintah Indonesia atau pemerintah Jambi khususnya, terlepas dari keinginan mereka untuk mendorong praktik sawit berkelanjutan di tingkat petani sawit swadaya, kemampuan mereka terbatas, baik dalam hal anggaran dan juga dalam hal kapasitas.

Oleh karena itu kita tidak bisa menjawab pertanyaan di atas dengan mengatakan kalau pemerintahlah yang bertanggung jawab membangun kapasitas petani sawit swadaya. Sebaliknya pemerintah berpendapat kalau perusahaanlah yang berkewajiban untuk melakukan pendampingan dan pembinaan pada petani sawit kecil, baik plasma ataupun mandiri.

Yayasan SETARA Jambi menyimpulkan dibutuhkan kerja sama multi-pihak, baik perusahaan, pemerintah, lembaga donor, *buyer* sawit, dan juga lembaga donor serta pihak-pihak lain yang peduli dengan keberlanjutan lingkungan. Dukungan yang diberikan oleh Hivos telah berhasil membuktikan kalau

petani swadaya tertarik untuk menerapkan P&K RSPO, dan bahwa mereka memiliki kapasitas dan mampu untuk mendapatkan sertifikat RSPO hanya saja dampaknya sangat kecil jika dukungan hanya berasal dari Hivos.

Paska RSPO RT 7, INA-SWG memperoleh mandat dari RSPO untuk merumuskan P&K RSPO petani sawit swadaya. P&K RSPO tersebut haruslah sesuai dengan karakteristik petani swadaya di Indonesia, sehingga P&K RSPO yang dikembangkan tersebut bisa dijalankan dan realistis untuk diterapkan. Yayasan SETARA Jambi diundang untuk menghadiri pertemuan dalam perumusan P&K RSPO untuk petani swadaya tersebut.

Yayasan SETARA Jambi banyak memberikan masukan berdasarkan pengalaman lapangnya bekerjasama dengan petani sawit swadaya dalam menerapkan draft P&K RSPO untuk petani kecil. Akhirnya P&K RSPO untuk petani saawit mandiri tersebut disahkan dan menjadi panduan bagi petani swadaya dalam menerapkan P&K dan untuk mendapatkan sertifikasi RSPO.

Aktif di INA-SWG

Dalam perkembangannya, Hivos mulai dipandang sebagai organisasi yang mengusung kepedulian tentang penguatan masyarakat di tingkat basis. Untuk program Sustainable Economic Development/Green Entrepreneurship, penguatan ini bukan hanya sebatas penguatan atas hak-hak yang mereka miliki namun juga terhadap penguatan posisi dan peran mereka pada rantai komoditas.

Menyadari hal ini, INA-SWG mengundang Hivos untuk memberikan sumbang saran terhadap bagaimana cara-cara penguatan kelembagaan petani untuk bisa sukses mendukung sertifikasi. Sumbang saran ini dilakukan melalui presentasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2010.

Dalam presentasi tersebut, Hivos mengajak berbagai pihak untuk menyadari bahwa dalam sertifikasi diperlukan kepatuhan dari petani swadaya sebagai anggota dalam suatu kelompok terhadap kesepakatan yang dibuat di tingkat organisasi petani swadaya. Walaupun sifatnya ialah kepatuhan, namun kepatuhan ini harus dibangun berdasarkan kesepakatan bersama dari para anggota. Dengan demikian diperlukan pemahaman mengenai syarat dan

kondisi yang memungkinkan kerjasama yang berkelanjutan antara lembaga petani dengan para petani sendiri.

Sertifikasi sendiri bisa dilakukan kalau dilaksanakan secara berkelanjutan, termasuk dalam hal biayanya. Dalam hal biaya tersebut, bisa diperhitungkan untuk membayar sertifikat dari hasil kelembagaan petani tersebut. Tentu saja hal ini baru akan tercapai kalau syarat perhitungan keekonomian (margin penjualan) bisa menutup biaya-biaya tersebut. Subsidi dari pihak ketiga bisa diberikan pada fase-fase awal namun harus dilakukan dengan skema menurun.

Perlu dipikirkan ada mekanisme pengaman bilamana harga sawit turun atau hasil kebun terganggu sehingga para petani mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Cara kedua ialah sertifikat disubsidi oleh pihak ketiga, yaitu bisa berasal dari dalam negeri (pemerintah, *national trust fund*, kemitraan dengan dunia usaha) atau dari luar negeri (RSPO, lembaga-lembaga asing (multilateral/bilateral), *international trust fund*).

Dalam tingkatan kelembagaan petani sendiri ada tantangan besar yaitu kelompok petani swadaya rata-rata tergabung dalam kelembagaan yang kecil. Perlu dipikirkan untuk memperbesar skala unit kerja yaitu melalui:

- Memperbesar ukuran koperasi primer yang sudah ada
- Membangun koperasi baru dengan tata kelola dan manajemen yang mampu mendukung pertumbuhan koperasi tersebut dalam jangka waktu dekat untuk bisa menjadi lembaga yang besar. Koperasi ini bisa bekerjasama dengan kelompok-kelompok petani (bukan kelompok tani secara individual)
- Membentuk koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi-koperasi primer
- Koperasi-koperasi primer (dan sekunder) berkumpul dan bersepakat untuk membentuk perusahaan yang fokus menangani penjaminan mutu dan perdagangan.

Namun demikian, harus dipertimbangkan bahwa masyarakat sendiri sering mempunyai persepsi yang salah mengenai perkoperasian. Banyak orang melihat koperasi sebagai lembaga yang didirikan untuk melayani misi sosial semata, walaupun melalui kegiatan-kegiatan perekonomian. Selain itu banyak masyarakat trauma terhadap perkoperasian karena pengalaman-pengalaman

buruk di masa lalu. Profesionalisasi koperasi untuk bisa beroperasi sebagai badan usaha yang dapat diandalkan untuk berbicara sebagai aktor rantai yang mempunyai kekuatan untuk berinteraksi dengan berbagai aktor rantai lainnya menjadi syarat mutlak.

Pengakuan dari Kalangan Pemerintah

1. Pemerintah Jambi—surat Gubernur Jambi mendukung penerapan RSPO

Apa yang dilakukan oleh yayasan SETARA Jambi mendapatkan dukungan dari Gubernur Jambi, H. Zulkifli Nurdin, hal ini diperkuat dengan adanya surat dari Gubernur tertanggal 14 April 2009 mengenai pengembangan kelapa sawit berkelanjutan/RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil), yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan sawit yang ada di Jambi.

Inti dari surat tersebut adalah kurang lebih sebagai berikut: 1) Pemerintah menyetujui dan mendukung pengembangan sawit berkelanjutan dalam forum Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO), 2) Mendorong dan menganjurkan perusahaan untuk berpartisipasi dalam sertifikasi RSPO. Pada Surat tersebut juga dijelaskan kalau pemerintah melalui dinas perkebunan Provinsi Jambi sudah melakukan sosialisasi mengenai RSPO di bulan November tahun 2008 di Kota Jambi.

Adanya surat himbuan pemerintah Provinsi Jambi untuk menerapkan praktik budidaya sawit berkelanjutan tentunya tidak terlepas dari pendekatan yang dilakukan oleh Yayasan SETARA Jambi. Dari beberapa kali kunjungan dan juga diskusi yang dibangun, pemerintah menjadi sadar mengenai manfaat jika menerapkan praktik sawit berkelanjutan, yang salah satunya dibuktikan dengan sertifikasi RSPO.

Pemerintah meminta agar perusahaan menerapkan P&K RSPO, dan juga ikut mensosialisasikan mengenai RSPO kepada petani sawit baik plasma atau mandiri yang berada di sekitar lokasi perusahaan. Surat tersebut ditembuskan kepada Menteri pertanian Republik Indonesia, Direktur Jenderal pertanian di Jakarta, Para Bupati se-Provinsi Jambi, kepala Dinas perkebunan Provinsi Jambi dan Yayasan SETARA Jambi.

Nama Yayasan SETARA Jambi secara jelas dicantumkan pada surat tersebut, surat yang juga diterima oleh menteri pertanian Indonesia. Hal ini menunjukkan bukti keberhasilan kerja Yayasan SETARA Jambi sehingga peran dan kiprahnya dalam mendukung sawit berkelanjutan dikenal dan diakui oleh pemerintah.

Tidak hanya Yayasan SETARA Jambi yang mendapat pengakuan dari pemerintah, kelompok ICS Bungo Tanjung/Gapoktan Tanjung Sehati yang didampingi oleh Yayasan SETARA Jambi juga dijadikan oleh pemerintah sebagai percontohan di Jambi, yaitu sebagai kelompok petani sawit swadaya yang telah menerapkan praktik sawit berkelanjutan. Semua petani swadaya yang ada di Jambi dihimbau untuk menerapkan apa yang sudah diterapkan oleh Gapoktan Tanjung Sehati dan untuk itu, mereka bisa menimba ilmu dari Gapoktan Tanjung Sehati dan Yayasan SETARA.

2. Pemerintah Kabupaten Merangin

Dengan semakin meningkatnya dukungan dari pemerintah, akses petani terhadap pupuk kimia bersubsidi menjadi lebih mudah. Demikian halnya akses terhadap informasi budidaya berkebun dan juga akses untuk mendapatkan bibit berkualitas. ICS Bungo Tanjung/Gapoktan Tanjung Sehati juga mendapatkan prioritas untuk menerima manfaat dari beberapa program pemerintah lainnya, misalkan Gapoktan Tanjung Sehati menerima dana dari program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP). Tidak hanya itu, Gapoktan Tanjung Sehati mendapatkan 35 ekor sapi sebagai tambahan pendapatan petani, selain itu kotoran ternak dari sapi tersebut juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik.

Dukungan yang diperoleh petani saat ini dari pemerintah Kabupaten Merangin cukup banyak, hal ini sangat berbeda dengan dulu. Dulu pemerintah pernah memberikan label kalau petani sawit swadaya adalah petani sawit ilegal, tetapi sejak petani sawit swadaya bekerja sama dengan Yayasan SETARA Jambi dalam menerapkan P&K RSPO, pandangan pemerintah menjadi berubah.

Petani sawit swadaya tidak lagi dianggap sebagai perusak hutan, hal ini karena petani sawit swadaya berhasil membuktikan bahwa mereka telah

menerapkan praktik sawit berkelanjutan yang memerhatikan aspek sosial dan lingkungan. Bahkan apa yang dilakukan oleh petani sawit swadaya tersebut termasuk yang pertama, oleh karena itu, pemerintah ingin agar petani sawit kecil lainnya di Jambi juga melakukan hal yang sama.

Bukti pengakuan pemerintah terhadap kerja-kerja Yayasan SETARA Jambi dan Gapoktan Tanjung Sehati adalah kehadiran dan kesediaan mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan SETARA Jambi. Sebagai contoh pada bulan November 2010, Fasilitator Daerah (Fasda) Provinsi Jambi bekerja sama dengan Yayasan SETARA Jambi dalam mensosialisasikan dan memberikan pelatihan mengenai penerapan P&K RSPO untuk petani sawit swadaya di desa Mekar Jaya.

Kerja sama tidak mungkin terwujud jika tidak ada kepercayaan terhadap Yayasan SETARA. Kerja sama antara Yayasan SETARA Jambi dengan Fasda bukan hanya terjadi satu atau dua kali saja, tetapi sudah sering. Fasda sudah dianggap sebagai mitra kerja oleh Yayasan SETARA Jambi demikian juga sebaliknya.

Contoh lain dari kerja sama Fasda dengan Yayasan SETARA Jambi dalam melakukan uji coba audit P&K RSPO yang dilaksanakan pada bulan Februari 2013. Tim Fasda melakukan penilaian terhadap kesiapan petani untuk memperoleh sertifikasi RSPO. Hasil temuan dari penilaian/audit dipresentasikan kembali kepada petani: apa yang masih kurang, dan langkah perbaikan seperti apa yang harus dilakukan.

Fasda tidak hanya datang pada kegiatan pelatihan saja, tetapi hampir dalam setiap kegiatan di mana kehadiran mereka dibutuhkan maka Fasda akan hadir. Seperti pada bulan Januari 2013, Fasda turut mendampingi Gapoktan Tanjung Sehati yang pada saat itu menerima kunjungan dari atase pertanian kedutaan Belanda dan Rombongan RSPO.

Kedekatan Yayasan SETARA Jambi dengan pemerintah tidak terlepas dari komunikasi dan pendekatan yang dilakukan. Yayasan SETARA Jambi selalu berusaha melibatkan pemerintah dalam kerja-kerja mereka. Dengan demikian pemerintah juga merasa bertanggung jawab dan menjadi bagian dari program tersebut. Yayasan SETARA Jambi selalu mencari peluang untuk berkolaborasi, tidak hanya dengan Fasda, Yayasan SETARA Jambi

juga bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam memberikan pelatihan mengenai lingkungan untuk petani.

Dinas perkebunan Kabupaten Merangin mengatakan kalau Yayasan SETARA Jambi memiliki reputasi bagus di Jambi. Di mata pemerintah, Yayasan SETARA adalah sedikit dari banyaknya organisasi masyarakat sipil yang ada di Jambi yang sudah memberikan kontribusi nyata. Dinas perkebunan kabupaten Merangin menjelaskan kalau anggaran pemerintah kabupaten Merangin untuk pengembangan sawit sangat terbatas.

Selain itu pemerintah mengatakan bahwa masalah perkebunan terkait dengan petani sawit swadaya masih sangat kompleks, tidak seperti petani sawit plasma. Pemerintah menyadari arti penting dari sertifikasi, dan mendukung upaya untuk sertifikasi tetapi pemerintah belum mampu untuk melakukan kerja pendampingan dan mempersiapkan kelompok sawit mandiri untuk mendapatkan sertifikasi RSPO.

Anggaran dinas perkebunan kabupaten Merangin sangat terbatas, dan anggaran itu juga bukan seluruhnya untuk sawit tetapi harus dibagi untuk pengembangan komoditas lainnya seperti karet, adapun penggunaan anggaran untuk sawit masih pada penyediaan bibit. Prioritas tersebut akan disesuaikan setiap tahunnya, bagaimanapun pendampingan dari pemerintah untuk mempersiapkan petani sawit kecil memperoleh sertifikasi RSPO masih belum menjadi prioritas dalam waktu dekat.

Oleh karena itu pemerintah menghargai kerja-kerja dari Yayasan SETARA Jambi. Apalagi dengan keberhasilan Yayasan SETARA Jambi dalam mendampingi Gapoktan Tanjung Sehati sehingga mendapatkan sertifikat RSPO. Pemerintah Kabupaten Merangin turut bangga bahwa Gapoktan Tanjung Sehati menjadi kelompok tani sawit mandiri yang kedua di Indonesia atau yang ketiga di dunia dalam mendapatkan sertifikat tersebut. Pemerintah juga optimis bahwa jika sertifikasi RSPO yang mendapat pengakuan internasional bisa didapatkan, maka jika sertifikasi ISPO (nasional) diwajibkan bagi petani swadaya maka besar kemungkinan Gapoktan Tanjung Sehati juga akan sukses memperolehnya.

Pemerintah menganggap bahwa Yayasan SETARA adalah aset Provinsi Jambi. Yayasan SETARA yang sudah berpengalaman dalam sertifikasi RSPO

diharapkan juga bisa membantu pemerintah dalam mempersiapkan petani swadaya menghadapi sertifikasi ISPO jika hal tersebut sudah diwajibkan. Pemerintah juga melihat kalau Yayasan SETARA Jambi juga sudah menjalin kerja sama yang cukup baik dengan perusahaan sawit yang ada di Jambi, pemerintah berharap kalau perusahaan sawit tersebut juga bersedia memberikan dana pendampingan dengan bekerja sama dengan yayasan SETARA Jambi untuk mempersiapkan petani sawit swadaya yang ada di Jambi mendapatkan sertifikasi. Sudah menjadi kewajiban perusahaan yang ada di Jambi membantu petani swadaya, yang juga bentuk tanggung jawab mereka terhadap lingkungan.

Yayasan SETARA selalu mengundang dan melibatkan pemerintah dalam setiap kegiatannya, dan pemerintah selalu berupaya untuk memenuhi undangan tersebut. Sebaliknya, pemerintah juga mengundang Yayasan SETARA dalam kegiatan-kegiatan yang mereka selenggarakan. Pemerintah melihat Yayasan SETARA Jambi sebagai mitra kerja, di mana Yayasan SETARA mengisi gap kerja pemerintah.

Ketika Yayasan SETARA Jambi memulai program di Desa Bungo Tanjung, jalanan untuk menuju ke desa tersebut masih belum diaspal, yang jika hujan jalanan berlubang dan berlumpur membuat mobil tersangkut hingga berjam-jam. Tetapi ketika kurang lebih satu tahun pendampingan berjalan, jalanan ke desa Bungo Tanjungpun diaspal, sehingga petani tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengantarkan hasil TBS mereka ke *milling*, mobilitas petani menjadi lebih tinggi, akses informasi menjadi lebih baik, dan harga barang di desa menjadi lebih terjangkau.

Petani Sawit di Desa Bungo Tanjung dulunya juga belum memiliki listrik, sehingga pendapatan mereka yang terbatas juga harus mereka sisihkan untuk membeli bensin untuk menyalakan genset. Genset tersebut hanya dipakai untuk penerangan rumah selama 3-4 jam. Sebagian besar petani sawit tidak memiliki TV. Tetapi sekarang listrik yang mereka impikan juga sudah mereka dapatkan. Banyak dari mereka yang memiliki TV sehingga mereka juga bisa mengikuti berita nasional, termasuk berita mengenai perkembangan bisnis sawit di tingkat lokal, nasional, dan global.

Dukungan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Merangin tidak terbatas hanya pada hal-hal terkait dengan pengembangan sawit. Tetapi keberhasilan Gapoktan Tanjung Sehati dalam menerapkan praktik sawit berkelanjutan juga dikenal oleh pemerintah Jambi lainnya diluar sektor pertanian dan perkebunan. Pemberitaan media masa yang cukup gencar mengenai keberhasilan Gapoktan membuat Gapoktan dikenal oleh dikalangan pemerintahan. Keberhasilan Gapoktan Tanjung Sehati membuat pemerintah kabupaten Merangin bangga, sehingga mereka akan selalu siap untuk mendukung dan bekerjasama dengan Gapoktan.

Pengakuan dari Dunia Usaha

Hasil kerja Yayasan SETARA Jambi dalam melakukan pendampingan terhadap petani sawit swadaya telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk perusahaan Asian Agri. PT Asian Agri adalah salah satu perusahaan sawit terbesar dan juga memiliki mitra petani plasma terbanyak di Indonesia. Tidak puas dengan hanya mendengar kisah sukses Yayasan SETARA Jambi, Asian Agri membuktikan dengan mengunjungi ke lokasi proyek dan berdiskusi dengan Gapoktan Tanjung Sehati yang merupakan petani dampingan Yayasan SETARA Jambi.

Asian Agri yang tertarik untuk menjadi anggota RSPO, berkunjung sebanyak tiga kali ke lokasi proyek Yayasan SETARA di tahun 2010 dan tahun 2011. Mereka terinspirasi dengan keberhasilan yang sudah diraih oleh Yayasan SETARA Jambi. Mereka meminta Yayasan SETARA Jambi untuk melakukan pendampingan pada petani sawit swadaya yang berada di wilayah kerja mereka, yaitu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

PT Sari Aditya Loka (SAL) yang meski bukan anggota RSPO juga telah mendengar hasil dari kerja-kerja Yayasan SETARA. Yayasan SETARA melakukan pendekatan yang sama dengan pendekatan yang mereka lakukan pada pemerintah. Mereka juga berusaha untuk melibatkan PT SAL dalam kegiatan dan pelatihan yang mereka lakukan.

Yayasan SETARA menyadari kemampuan mereka yang terbatas dalam pengetahuan teknis budidaya sawit sedangkan PT SAL yang merupakan perusahaan sawit besar; memiliki semua tenaga ahli yang mereka butuhkan.

Pendekatan yang dilakukan oleh Yayasan SETARA Jambi membuahkan hasil. PT SAL dengan senang hati bersedia memberikan pelatihan teknis budidaya sawit seperti pemupukan, pemeliharaan kebun, pengendalian hama dan banyak lainnya secara gratis.

PT SAL yang pernah bersengketa lahan dengan petani plasma di Desa Bungo Tanjung, menjadi lebih ramah dan bersedia membantu petani sawit swadaya di desa tersebut yang merupakan anak atau keluarga dari petani plasma. Hal ini terjadi karena lobi dan pendekatan yang dilakukan oleh Yayasan SETARA Jambi. PT SAL menyadari bahwa apa yang mereka lakukan, akan menguntungkan mereka juga.

Dengan pelatihan yang mereka berikan, maka kualitas TBS dari petani akan meningkat, dan produktivitas kebun juga akan meningkat. PT SAL juga sudah membangun kerja sama terkait dengan pemasaran dari TBS petani tersebut. PT SAL menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar TBS yang ditetapkan oleh pemerintah. Petani diuntungkan dengan harga yang lebih tinggi yang mereka peroleh, PT SAL juga diuntungkan dengan kualitas TBS yang mereka dapatkan.

Selain mendukung petani swadaya di Merangin, PT SAL juga membantu petani sawit swadaya di Desa Bungo Tanjung dengan membuat sebuah training centre. PT SAL kagum dengan perubahan yang telah dicapai oleh petani mandiri di Desa Bungo Tanjung, dan PT SAL ingin untuk ikut memiliki andil agar mereka bisa lebih berkembang lagi. Petani sawit swadaya lebih terorganisir, memiliki manajemen yang baik, jujur, dan juga kualitas TBS jauh lebih baik dari pada sebelumnya. PT SAL mengaku kalau mereka senang bisa bekerja sama dengan Yayasan SETARA Jambi dan Gapoktan Tanjung Sehati.

Pengakuan atas Prestasi Yayasan SETARA Jambi

1. Dukungan terhadap Mitra dari Organisasi Lain

Dukungan kerjasama dengan Hivos telah membuka peluang Yayasan SETARA untuk bekerjasama dengan pihak-pihak lain dalam mengembangkan sawit berkelanjutan di tingkat petani swadaya. Beberapa proyek yang

dijalankan oleh Yayasan SETARA menjelang berakhirnya kerjasama atau setelah berakhirnya kerjasama dengan Hivos adalah sebagai berikut:

a. Kerjasama dengan RSPO

Yayasan SETARA mengajukan proposal ke RSPO untuk persiapan sertifikasi RSPO di Gapoktan Tanjung Sehati. Proposal tersebut kemudian disetujui oleh RSPO. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan SETARA terkait dengan kerjasama dengan RSPO adalah sebagai berikut: Memberikan pelatihan ICS, Pelatihan P&K RSPO, Pelatihan GAP, Pelatihan HCV dan pengendalian hama terpadu, melakukan pemetaan kebun petani swadaya yang tergabung dalam Gapoktan Tanjung Sehati, melakukan uji coba audit terhadap petani sawit swadaya yang telah menerapkan P&C RSPO, dan kemudian audit oleh lembaga sertifikasi resmi untuk mendapatkan sertifikat RSPO. Gapoktan Tanjung Sehati menjadi kelompok tani swadaya yang kedua di Indonesia atau yang ketiga di dunia yang mendapatkan sertifikat RSPO merupakan salah satu hasil dari program ini.

b. Kerjasama dengan Solidaridad dan PT. Asian Agri

Yayasan SETARA Jambi mendapatkan tawaran kerja sama dari Solidaridad, lembaga non profit Belanda yang bekerjasama dengan PT Asian Agri, salah satu perusahaan sawit terbesar di Asia yang belakangan ini dikenal sebagai salah satu pionir yang mendukung peningkatan pendapatan dan kualitas hidup petani sawit swadaya. Mereka meminta Yayasan SETARA Jambi melakukan pendampingan untuk petani sawit swadaya yang tinggal di sekitar lokasi perkebunan Asian Agri.

Yayasan SETARA Jambi diharapkan untuk membantu petani menerapkan P&K RSPO hingga mereka siap untuk di audit dan mendapatkan sertifikat RSPO. Sebelumnya, PT Asian Agri juga sudah melakukan beberapa kali kunjungan ke lokasi program Yayasan SETARA Jambi dan berdiskusi langsung dengan anggota dan pengurus Gapoktan yang merupakan kelompok petani swadaya yang didampingi oleh Yayasan SETARA Jambi dan berhasil mendapatkan sertifikat RSPO. Solidaridad dan Asian Agri berharap agar kisah sukses yang sama bisa

replikasi pada petani swadaya lainnya terutama yang tinggal di sekitar perkebunan Asian Agri.

Pengakuan atas Prestasi BIOCert

1. BIOCert menjadi konsultan untuk penyusunan Skema Sertifikasi Kelompok RSPO

Pada pertemuan Smallholder Group Working Group RSPO yang diadakan sehari sebelum Roundtable 5 (RT5) RSPO pada bulan November 2007 di Kuala Lumpur, BIOCert diberikan kesempatan menyampaikan gagasan mengenai Sertifikasi Kelompok untuk petani sawit. Pengalaman BIOCert dalam pengembangan sistem pengawasan internal untuk sertifikasi kelompok di komoditas tanaman pangan sebagai dasar dalam gagasan tersebut.

Minimnya pengetahuan mengenai kondisi persawitan dan karakteristik petani sawit (petani kemitraan dan swadaya) disadari menjadi kendala dalam pengembangan skema sertifikasi kelompok untuk petani sawit.

Selain itu, terdapat pertanyaan penting yang muncul mengenai standar RSPO yang mana yang digunakan untuk sertifikasi kelompok. Karena saat itu, hanya terdapat Prinsip dan Kriteria RSPO untuk perusahaan perkebunan dan Prinsip dan Kriteria RSPO Petani Kemitraan sebagai standar RSPO. RSPO belum memiliki Prinsip dan Kriteria untuk petani swadaya.

Pada RT6 RSPO di Bali pada tanggal 18-20 November 2008, BIOCert menyampaikan presentasi mengenai Skema Sertifikasi Kelompok Untuk Petani Sawit. Skema tersebut mengadopsi sistem pengawasan internal yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik petani sawit.

Pertanyaan kritis muncul mengenai keterlacakan rantai pasok sawit, seperti model ketelusuran apa yang digunakan untuk sertifikasi kelompok RSPO¹¹ mengingat banyaknya pelaku dalam rantai pasok TBS dari petani hingga Pabrik Kelapa Sawit. Lalu pertanyaan lainnya mengenai apa produk (TBS atau CPO) yang akan disertifikasi sebagai keluaran dari program sertifikasi kelompok.

11 Seperti diketahui, terdapat 4 model ketelusuran produk yang diakui oleh RSPO, yaitu Identity Preserve, Segregasi, Mass Balance dan Book & Claim.

Pada bulan Mei 2009, BIOCert ditunjuk oleh RSPO sebagai konsultan untuk penyusunan Skema Sertifikasi Kelompok bagi Petani Sawit Swadaya. Pada bulan November 2008, BIOCert mempresentasikan skema Sertifikasi Kelompok bagi Petani Sawit Swadaya di RT7 RSPO di Kuala Lumpur.

Di Skema Sertifikasi Kelompok terdapat sebuah unit terpusat yang memastikan kelompok mengadopsi sistem standarisasi dan menjalankan sistem pengawasan internal. Semua kebun petani kecil kemudian disertifikasi secara bersamaan. Produk yang akan disertifikasi berupa tandan buah segar dan pabrik kelapa sawit tidak dilibatkan dalam skema sertifikasi ini.

Kemudian Dr. Vengeta Rao sebagai sekretaris jenderal RSPO menyampaikan dalam RT7 tersebut bahwa Draf Skema Sertifikasi Kelompok dan Panduannya sedang dalam revisi tahap akhir sebelum persetujuan di RSPO Board. Panduan Pelatihan dan pelatihan bagi fasilitator sedang disiapkan. Pelatihan dasar dan audit percobaan akan dilakukan di Indonesia dan Malaysia.

Pada 26 Agustus 2010, Dewan RSPO mensahkan dua dokumen yang digunakan untuk program sertifikasi petani swadaya, yaitu (1) Standar RSPO untuk Sertifikasi Kelompok, (2) Persyaratan Akreditasi dan Sertifikasi untuk Sertifikasi Kelompok RSPO.

2. BIOCert terlibat dalam INA-SWG dan RSPO

BIOCert masuk dalam Kelompok Kerja Petani Indonesia (Smallholder Working Group, INA-SWG) RSPO pada tahun 2009. Bapak Dr. Asril Darussamin sebagai ketua INA-SWG menyampaikan pentingnya melibatkan petani-petani swadaya di Indonesia ke dalam program sawit berkelanjutan, karena jumlahnya yang besar dan TBS yang dihasilkannya dibeli dan diproses di berbagai pabrik kelapa sawit.

Untuk memasukan petani swadaya dalam RSPO, INA-SWG menyusun Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Petani Swadaya di Indonesia sebagai standar RSPO bagi petani swadaya, dan skema sertifikasi kelompok untuk petani sawit swadaya. BIOCert terlibat aktif dalam penyusunan kedua hal tersebut.

Selain itu, BIOCert terlibat dalam penyusunan buku Panduan Pelatihan Fasilitator untuk Prinsip dan Kriteria RSPO bagi petani swadaya di Indonesia. Buku panduan ini diterbitkan oleh Kementerian Pertanian dan WWF pada tahun 2011 sebagai modul pelatihan RSPO bagi fasilitator petani swadaya.

3. Dukungan terhadap Mitra dari Organisasi Lain

a. Penelitian Dasar Sertifikasi Kelompok RSPO di Kabupaten Merangin Jambi

Pada Agustus 2008, BIOCert melakukan studi Dasar Sertifikasi Kelompok RSPO di Kabupaten Merangin Jambi. Studi ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik perkebunan sawit yang dikelola oleh petani kemitraan dan petani swadaya; mengidentifikasi kesesuaian penerapan prinsip dan kriteria RSPO bagi petani sawit di lokasi studi; mengidentifikasi peluang dan risiko dari replikasi sertifikasi kelompok produk organik bagi penerapan program sertifikasi RSPO bagi kelompok petani sawit disesuaikan dengan prinsip dan kriteria RSPO bagi petani sawit; memberikan rekomendasi bagi pengembangan program sertifikasi kelompok di lokasi studi. Informasi lengkap tentang Penelitian Dasar ini dapat dibaca di Bab 4 buku ini.

b. Konsultan Sistem Pengawasan Internal untuk Sertifikasi Kelompok RSPO di SETARA Jambi

Pada periode Januari-Desember 2009, BIOCert menjadi konsultan di SETARA Jambi untuk pengembangan sertifikasi kelompok RSPO bagi petani swadaya berlokasi di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Pelatihan Sistem Pengawasan Internal di petani-petani dampingan SETARA Jambi dilakukan oleh BIOCert pada tanggal 22-24 Oktober 2009.

c. Pelatihan Skema Sertifikasi Kelompok untuk Malaysia Palm Oil Board

Pada tanggal 20-22 September 2010, BIOCert memberikan pelatihan mengenai Skema Sertifikasi Kelompok bagi Petani Sawit RSPO di Malaysia Palm Oil Board (MPOB). Pelatihan ini diikuti oleh para penyuluh perkebunan sawit di seluruh wilayah Malaysia.

Pelatihan dilanjutkan dengan studi banding penerapan sistem pengawasan internal untuk komoditas gula kelapa di KSU Jatirogo Yogyakarta pada tanggal 22-24 Oktober 2009.

d. Pelatihan Skema Sertifikasi Kelompok untuk WWF

BIOCert memfasilitasi pelatihan Sertifikasi Kelompok RSPO untuk WWF-Asosiasi Amanah pada bulan April 2012. Pelatihan ini bertujuan untuk membangun sistem pengawasan internal bagi program sertifikasi kelompok RSPO bagi petani sawit swadaya binaan WWF Riau. Pelatihan ini menjadi pengetahuan dasar bagi Asosiasi Amanah yang akan menjadi manajer kelompok dalam program sertifikasi kelompok RSPO.



08

BUTIR-BUTIR PEMBELAJARAN



“ Hivos berhasil meyakinkan para pemangku kepentingan untuk memberikan ruang lebih besar bagi para pelaku utama perubahan, walaupun mereka adalah para petani kecil dan mempunyai berbagai keterbatasan. ”

Hivos

- » DUKUNGAN UNTUK MENINGKATKAN kapasitas produsen kecil dalam isu sawit berkelanjutan tidak lepas dari tujuan Hivos dalam meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Namun demikian dalam strategi pelaksanaannya Hivos mengalami perubahan dari strategi awal yang mengedepankan penguatan hak menjadi bagaimana melakukan intervensi yang tidak terlepas dari kondisi petani sebagai aktor dalam rantai komoditas.

Perubahan strategi ini mempunyai konsekuensi bukan hanya pada tingkat Hivos dengan mitra yang ada, tapi juga mengharuskan Hivos mencari mitra-mitra baru yang lebih memungkinkan tujuannya tercapai, yaitu mitra-mitra yang mempunyai visi dan mau membangun kapasitas bersama-sama dengan petani dalam hal-hal sehubungan dengan praktik pengelolaan kebun yang baik menurut aspek-aspek agronomis, lingkungan dan sosial.

- » Dalam mengembangkan program dukungan untuk sertifikasi petani swadaya, Hivos mengkombinasikan kompetensi yang telah dikembangkan selama ini oleh Hivos dan para mitranya, yaitu dalam isu kualitas petani kecil melalui BIOCert yang dikembangkan oleh mitra Hivos yaitu Asosiasi Organik Indonesia (AOI) dengan mitra baru yang mempunyai pengetahuan dan basis petani kecil sawit yaitu Yayasan SETARA Jambi.

Selain itu Hivos mencoba memperkuat dukungan dari mitra lainnya yaitu perkoperasian sebagai pendekatan pengorganisasian melalui Rekadesa dan pendekatan pengembangan rantai komoditas dari Swisscontact. Kombinasi berbagai kemampuan ini memang dalam banyak hal membantu Yayasan SETARA Jambi untuk tumbuh menjadi lembaga yang memiliki kemampuan dalam isu petani sawit swadaya.

Namun dirasakan bahwa kombinasi berbagai lembaga ini belum optimum karena perbedaan cara kerja dari berbagai lembaga yang terlibat serta kondisi Yayasan SETARA Jambi yang sibuk dengan implementasi di lapangan sementara tidak didukung oleh fasilitasi, kepemimpinan dan pengawalan program yang memadai dari Hivos.

- » Teori perubahan (*theory of change*) yang dikembangkan Hivos untuk program ini yaitu penguatan pengorganisasian petani dengan menggunakan tema implementasi standar bagi petani kecil terbukti membawa dampak positif bagi para petani kecil sendiri. Petani yang tergabung dalam Gapoktan Tanjung Sehati mampu meningkatkan posisinya dalam mengakses bibit secara langsung (bahkan didatangi oleh PPKS), mengakses pupuk, menarik minat kerjasama dari pemerintah dan dunia usaha, serta meningkatkan persepsi mengenai kapasitas para petani yang selama ini dianggap sebagai pihak yang sangat terbatas kemampuan dan pengetahuannya. Penguatan organisasi petani telah terbukti sebagai pintu masuk yang efektif untuk mengembangkan program pendampingan petani.
- » Dukungan Hivos kepada Yayasan SETARA Jambi menunjukkan bahwa kombinasi dukungan dari berbagai mitra terkait secara berhasil bisa meningkatkan kapasitas mitra di tingkat lokal untuk mempunyai kapasitas untuk berpartisipasi dalam isu global. Melalui program yang didukung Hivos, Yayasan SETARA berhasil memobilisasi dukungan dari berbagai pihak seperti RSPO, Solidaridad, PPKS (lembaga penelitian dan penghasil benih sawit utama) dan dunia usaha untuk mengembangkan program-program pendampingan ini di tempat-tempat lainnya. Para petani dampingan juga memperoleh berbagai akses sejalan dengan menguatnya posisi mereka sebagai produsen kecil sawit yang berhasil memenuhi standar-standar keberlanjutan yang diakui secara internasional.
- » Pada tahapan selanjutnya, Yayasan SETARA Jambi sekarang menjadi lembaga referensi dalam bidang sawit berkelanjutan dan memengaruhi berbagai diskusi mengenai pengembangan standar sawit berkelanjutan petani swadaya di tingkat internasional. Pengembangan pengetahuan dan pembelajaran Yayasan SETARA Jambi ini sangat erat hubungannya dengan dukungan dan kesempatan-kesempatan yang terbuka melalui pelaksanaan program Hivos.
- » Program ini juga berhasil memperkuat BIOCert untuk memengaruhi proses pembentukan standar dalam isu sawit berkelanjutan. Untuk diketahui, BIOCert merupakan organisasi pertama yang melemparkan ide untuk aplikasi pendekatan ICS atau SPI untuk sertifikasi petani kecil di isu sawit,

baik itu untuk petani plasma dan petani swadaya. Ide ini disambut baik sebagai pilihan yang taktis dan secara praktis bisa dilaksanakan oleh berbagai pihak. BIOCert, yang sebelumnya banyak terlibat dalam diskusi mengenai pengembangan standar bagi petani kecil dalam tingkat nasional, meningkatkan leverage untuk berkontribusi dalam pengembangan standar di tingkat global.

- » Konsistensi Hivos untuk mengedepankan para pelaku utama dalam perubahan yaitu para petani kecil baik dalam tingkat lokal, nasional maupun internasional teruji ketika mempresentasikan program ini pada pertemuan tahunan RSPO yang merupakan acara dalam tingkat global. Hivos berhasil meyakinkan para pemangku kepentingan untuk memberikan ruang lebih besar bagi para pelaku utama perubahan walaupun merupakan para petani kecil mempunyai berbagai keterbatasan.
- » Kepercayaan terbangun cukup cepat antara Hivos dengan Yayasan SETARA Jambi karena walaupun dukungan langsung baru saja terjalin namun sebelumnya sudah terhubung secara tidak langsung melalui keanggotaan Yayasan SETARA Jambi di Sawit Watch dan promosi yang dilakukan oleh AidEnvironment yang sudah beberapa kali berdiskusi dalam pengembangan program Sawit Watch.

Dalam diskusi yang berkembang antara Yayasan SETARA Jambi dan Hivos, banyak kesamaan visi bisa di-share mengenai perlunya melakukan kerja-kerja teknis di tingkat petani pengelola kebun dan strategisnya pengembangan program melalui isu penjaminan mutu. Namun demikian, Hivos dan Yayasan SETARA Jambi melihat bahwa program ini bukan semata-mata bertujuan untuk mengejar sertifikasi petani namun lebih sebagai intervensi yang integral untuk meningkatkan keberdayaan petani kecil dalam rantai komoditas.

- » Tantangan besar dalam mendukung para petani sawit swadaya ialah kelemahan mereka dalam berorganisasi. Berbeda dengan petani plasma yang organisasinya terjaga lewat Koperasi Unit Desa (KUD) yang mempunyai peran penting untuk penjualan TBS dan pengembalian kredit, petani swadaya mengembangkan kewirausahaan di bidang perkebunan

sawit tanpa dukungan teknis, menggunakan pengetahuan sendiri seadanya dan dibiayai oleh dana milik sendiri.

- » Di satu sisi, tanpa mengembangkan kelembagaan, tidak mungkin dikembangkan suatu intervensi yang bisa menjangkau petani swadaya yang berusaha sendiri-sendiri. Namun di sisi lain, pengembangan kelembagaan dianggap merupakan pekerjaan rumah masa lalu yang seharusnya sudah selesai oleh Hivos.
- » Koperasi sebagai lembaga usaha menghadapi hambatan terbesar dari trauma yang ada di kalangan para petani sendiri. Trauma ini bisa dipahami timbul karena di masa lalu ada pengalaman-pengalaman merugikan yang dialami oleh para petani karena masalah-masalah seperti koperasi salah urus, berbagai kasus penggelapan dana dan kooptasi koperasi oleh segelintir pengurus.
- » Secara ideal, memang ICS atau SPI harusnya dikelola sebagai bagian terpadu dari koperasi sebagai divisi yang befokus pada penjaminan mutu produk petani, di mana koperasi juga bisa mengelola dana-dana yang dibutuhkan untuk operasional unit SPI, pemeliharaan data, inspeksi berkala dan perpanjangan sertifikat.
- » Namun, ketika koperasi tidak mungkin dikembangkan, pilihan kelembagaan lain yang mungkin mempunyai berbagai kekurangan dibandingkan dengan koperasi harus dipikirkan walau tiak serta merta Hivos sebagai pemrakarsa program melupakan isu kelembagaan usaha bersama dalam bentuk koperasi atau lainnya.
- » Ketidاكلancaran dalam mengembangkan program untuk aspek kelembagaan melalui koperasi yang kuat dan perspektif pengembangan rantai komoditas untuk petani kecil berkontribusi dalam keterbatasan capaian program ini. Salah satu dampak yang paling terasa ialah masih terbatasnya minat lembaga keuangan untuk bekerjasama dengan kelompok dampingan, yang pada gilirannya akan membantu membuka peluang intervensi bagi program dengan berwawasan pendanaan dan kewirausahaan.
- » Bilamana Hivos lebih ingin maksimum dalam mengembangkan suatu program, diperlukan fasilitasi, kepemimpinan dan pengawalan program yang memadai. Pada saat itu, fasilitasi, kepemimpinan dan pengawalan

program tidak dapat dilakukan karena keterbatasan dukungan sumber daya di Hivos di mana Programme Officer menangani berbagai program pertanian dan keuangan mikro. Pragmatisme dari Hivos untuk membatasi fokus pengembangan lingkup program dan kemudian pilihan Programme Officer tidak melanjutkan program sawit merupakan kondisi yang harus dipahami dalam keterbatasan dukungan ini.

- » Fokus kepada pengembangan produk berkualitas di tingkat Hivos secara global juga mengalami perubahan. Bila semula Hivos menjadikan pendekatan kualitas sebagai arus utama dalam pengembangan program, sejak tahun 2009 fokus tersebut berkurang dan tujuan perluasan intervensi lebih terhadap para petani miskin di pedesaan dengan program-program yang bisa menunjukkan keberhasilan dalam jangka waktu dekat.
- » Di samping itu, untuk isu sawit berkelanjutan Hivos melihat bahwa pemrakarsa utamanya ialah lembaga-lembaga besar lainnya seperti WWF dan Oxfam-Novib di mana kalau Hivos terlibat kontribusi realnya bisa dipertanyakan. Walaupun Hivos mendukung program di Jambi secara lebih jangka panjang, intensif dan komprehensif, program ini tidak begitu bergaung dengan kurangnya dukungan dari Hivos secara global. Selain itu juga dipertanyakan bahwa kondisi petani sawit dianggap lebih sejahtera dibandingkan petani-petani lainnya seperti petani pangan, sehingga ada pandangan belum perlu dibantu.
- » Ingatan bersama dalam Hivos yang berkontribusi cukup penting dalam mendorong inisiatif awal yang membuka kemungkinan para petani kecil bisa mengembangkan pendekatan untuk penjaminan mutu tidak begitu secara mendalam dipahami oleh para personel Hivos secara global. Hivos dikenal semata sebagai lembaga pendukung petani secara umum sementara pengkhususan dalam pembedaan isu kualitas petani kecil tidak begitu terangkat.

BIOCert

- » Saat awal keterlibatan dalam pengembangan program sawit berkelanjutan bagi petani swadaya, BIOCert memiliki pengetahuan yang minim mengenai

- isu persawitan meskipun BIOCert berpengalaman dalam pengembangan program sertifikasi kelompok untuk komoditas tanaman pangan. Hal ini menuntut BIOCert untuk belajar mengenai karakteristik perkebunan sawit secara umum dan yang dikelola oleh petani kemitraan dan petani swadaya.
- » Hal ini amat penting untuk menyusun Skema Sertifikasi Kelompok RSPO Bagi Petani Swadaya dan penyusunan Prinsip dan Kriteria RSPO bagi Petani Swadaya di Indonesia, sekaligus modal bagi kapasitas BIOCert sebagai penyedia layanan bagi pengembangan sertifikasi kelompok RSPO.
 - » Keterlibatan BIOCert dalam isu persawitan menjadi pertanyaan di internal AOI sebagai pemegang saham BIOCert karena beberapa anggota AOI menganggap perkebunan sawit banyak melakukan pelanggaran terhadap isu sosial dan lingkungan. Melalui perdebatan panjang di internal, BIOCert memposisikan dirinya hanya menjadi lembaga konsultasi untuk penguatan petani sawit swadaya dalam kegiatan sawit berkelanjutan.
 - » Diterimanya dokumen yang disusun BIOCert oleh RSPO sebagai dokumen bagi sertifikasi kelompok merupakan pencapaian tersendiri bagi BIOCert. Pencapaian ini mengenalkan BIOCert ke para pelaku sawit di Indonesia dan internasional, sekaligus BIOCert turut memengaruhi perkembangan standar sawit berkelanjutan dunia. Hal ini amat bermanfaat bagi BIOCert untuk membangun jaringan dengan para pelaku industri persawitan.

Yayasan SETARA Jambi

- » Memiliki staf yang ahli di bidang budidaya sawit adalah salah satu kunci sukses pendampingan Yayasan SETARA Jambi.
 - Ketika proyek tahap I dengan Hivos berjalan, Yayasan SETARA Jambi masih belum memiliki staf yang ahli di bidang budidaya sawit, Yayasan SETARA hanya memiliki staf dengan keahlian di bidang pengorganisasian masyarakat, penguatan institusi lokal, manajemen organisasi, dan advokasi.

Sedangkan pada saat itu, petani sawit yang tidak memiliki pengetahuan dasar dalam berkebun sawit, lebih membutuhkan dukungan teknis dalam mengelola kebun sawit mereka, misal dalam

hal pemilihan bibit, jenis dan takaran pupuk, penanganan hama, dan banyak hal lainnya.

Ketika permasalahan dasar petani ini belum diselesaikan, Yayasan SETARA Jambi mengalami kesulitan dalam membuat perencanaan penerapan P&K dan sertifikasi RSPO. Barulah setelah Yayasan SETARA Jambi merekrut staf ahli di bidang budidaya sawit yang juga menguasai prinsip pemberdayaan, petani lebih terbuka untuk berdiskusi mengenai penerapan P&K RSPO.

- » Jarak kantor pusat Yayasan SETARA Jambi yang jauh dari lokasi proyek membuat monitoring tidak berjalan dengan optimal
 - Kantor pusat Yayasan SETARA Jambi yang berada di kota Jambi berjarak sekitar 320 km ke lokasi proyek di Desa Bungo Tanjung/Mekar Jaya atau sekitar 5 hingga 6 jam perjalanan dengan mobil membuat kegiatan monitoring tidak berjalan optimal. Untuk mengatasi hal ini Yayasan SETARA Jambi mengharuskan staf-nya untuk *live in* di desa.

Strategi *live in* cukup berhasil, tetapi tetap saja, dukungan lebih intensif dari pimpinan Yayasan SETARA Jambi masih dibutuhkan, dan tetapi karena jarak kantor Yayasan SETARA Jambi yang jauh dari lokasi proyek membuat hal tersebut tidak berjalan optimal.

- » Pendampingan teknis dari berbagai ahli/konsultan telah meningkatkan kapasitas Yayasan SETARA Jambi dan Gapoktan Tanjung Sehati.
 - Ketika memulai pendampingan, kapasitas Yayasan SETARA Jambi terkait dengan peningkatan standar mutu dan sawit berkelanjutan masih terbatas. Tetapi melalui beberapa konsultan yang diperbantukan oleh Hivos, kapasitas Yayasan SETARA Jambi meningkat secara signifikan. Tidak hanya terkait dengan mutu, wawasan Yayasan SETARA mengenai koperasi, gender, dan banyak lainnya juga meningkat. Dukungan teknis dari konsultan dirasakan jauh lebih efektif dibandingkan dengan hanya pelatihan.
- » Pendampingan menjadi efektif ketika staf dari lembaga pendamping *live in* di desa.

- Yayasan SETARA Jambi menempatkan dua orang staf di Desa Bungo Tanjung, hal ini berbeda dengan tenaga penyuluh pertanian pemerintah yang hanya datang melakukan kunjungan tetapi tidak menetap di desa. Dengan ditempatkan di desa, staf dapat lebih memahami kondisi sosial budaya dan dinamika yang ada di desa tersebut, staf juga bisa mengidentifikasi konflik yang ada, aktor yang terlibat, dan juga menganalisa tokoh-tokoh di desa yang memiliki peran strategis, yang dapat menjadi penunjang atau penghambat kesuksesan program.

Dengan memahami ini staf dapat melakukan pendekatan lebih baik, sehingga kemungkinan program menjadi lebih sukses. Selain itu, ketika staf tinggal di desa, staf tidak hanya membantu petani sebatas hal berhubungan dengan perkebunan sawit atau persiapan sertifikasi saja, tetapi staf juga ikut andil dalam aktivitas pembangunan yang sedang berlangsung di desa dengan berbagi keahlian dan keterampilan lain yang dia miliki, misal, membantu mengajarkan cara penggunaan komputer dan kamera bagi anak-anak muda di desa, membantu desa dalam membuat proposal, menyumbangkan pemikiran untuk pembangunan di desa untuk mulai dari pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan banyak lainnya.

Dengan tinggal di desa, staf juga memiliki banyak waktu untuk mentransfer ilmu kepada petani seperti mengajarkan cara membuat pupuk organik dan cara memanfaatkan lahan untuk kebun sayuran demi memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Dengan adanya staf yang ditempatkan di desa menjadikan kepercayaan petani terhadap Yayasan SETARA Jambi karena hal ini menunjukkan tingkat keseriusan Yayasan SETARA Jambi dalam memperjuangkan kepentingan petani sawit swadaya.

Yayasan SETARA Jambi memberlakukan jam kerja yang fleksibel sehingga staf juga tidak dirugikan, yaitu dengan bekerja selama tiga minggu di desa, kemudian libur selama satu minggu penuh, begitulah seterusnya. Strategi ini berjalan sangat efektif.

- » Hasil dan biaya yang dikeluarkan tidak sebanding.
 - Terlepas dari keberhasilan petani sawit swadaya Gapoktan Tanjung Sehati yang didampingi oleh Yayasan SETARA Jambi tetapi dari segi jumlah, petani sawit swadaya yang didukung masih sangat terbatas, persentase petani swadaya yang difasilitasi oleh Yayasan SETARA Jambi masih merupakan persentase kecil dari seluruh petani swadaya yang ada di Jambi.

Hasil yang dicapai tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan. Dukungan dari Hivos untuk pendampingan di desa Mekar Jaya dari tahun 2008 hingga 2013, yang kemudian dilanjutkan dengan dukungan proyek selama satu tahun dari RSPO, hanya berhasil mengantarkan sebanyak 215 orang petani mendapatkan sertifikat RSPO. Hanya sebanyak 215 petani selama lebih kurang enam tahun adalah hasil yang sangat sedikit. Rendahnya jumlah petani yang mendapatkan sertifikasi RSPO ini dikarenakan tenaga Yayasan SETARA Jambi terbatas.

Untuk memperbesar cakupan dampingan, memperbesar dan memperluas dampak program, dibutuhkan tenaga yang lebih banyak pula, dari segi biaya hal ini tidak masalah, karena pada fase dua program yang didukung oleh Hivos, biaya penambahan staf sudah diperhitungkan, hanya saja, proses rekrutmen staf tidak berjalan sesuai dengan harapan. Seharusnya jumlah petani yang sudah menerapkan P&K RSPO bisa lebih banyak lagi.

Yayasan SETARA Jambi kesulitan untuk mendapatkan tenaga terdidik yang mau ditempatkan di daerah pedesaan. Gaji yang ditawarkan oleh Yayasan SETARA Jambi cukup kompetitif tetapi itupun juga masih belum berhasil. Banyak orang yang enggan untuk bekerja di LSM, karena ketidakjelasan jenjang karir, tidak ada jaminan keberlanjutan, sehingga banyak orang lebih memilih untuk bekerja di kantor pemerintahan atau perusahaan swasta.

- Biaya pendampingan atau biaya yang dikeluarkan untuk mempersiapkan petani menuju sertifikasi RSPO tidaklah murah, yang jika tanpa bantuan lembaga donor, perusahaan, atau pemerintah, kecil kemungkinan Yayasan SETARA Jambi atau petani sanggup membayarnya.

Biaya yang dibutuhkan adalah biaya untuk berbagai macam pelatihan, biaya untuk menghadiri rapat tahunan RSPO, biaya operasional lembaga pendamping, biaya untuk rapat dan koordinasi, serta beberapa biaya terkait lainnya, termasuk biaya audit untuk mendapatkan sertifikat RSPO. Yayasan SETARA Jambi dan juga pihak yang tertarik mendukung biaya sertifikasi petani swadaya harus mempertimbangkan cara efektif untuk menekan biaya tanpa harus mengorbankan hasil yang manfaat yang diperoleh.

- » Regenerasi dan kesulitan Yayasan SETARA Jambi dalam mencari staf
 - Masih terkait dengan kesulitan perekrutan staf. Hal ini juga akan mengakibatkan terancamnya regenerasi dan keberlanjutan Yayasan SETARA Jambi. Setelah keberhasilan Gapoktan Tanjung Sehati memperoleh sertifikasi RSPO, Yayasan SETARA Jambi menerima banyak tawaran kerja sama dari banyak pihak baik dari lembaga donor, dan perusahaan, atau gabungan dari keduanya. Misal Yayasan SETARA Jambi mendapatkan tawaran kerja sama dari Solidad, lembaga non profit Belanda yang bekerjasama dengan Asian Agri.

Mereka meminta Yayasan SETARA Jambi melakukan pendampingan di petani sawit swadaya yang ditinggal di kawasan perkebunan Asian Agri. Mereka meminta Yayasan SETARA Jambi untuk membantu petani menerapkan P&K RSPO hingga mereka siap untuk di audit dan mendapatkan sertifikasi RSPO. Selain itu, Yayasan SETARA Jambi juga menerima beberapa tawaran kerja sama lainnya. Hal ini adalah kesempatan Yayasan SETARA Jambi untuk melakukan up scaling, sehingga jumlah petani sawit swadaya yang dibantu dan menerapkan praktik sawit berkelanjutan bertambah, hanya saja, Yayasan SETARA Jambi tidak memiliki jumlah staf yang cukup untuk melakukan pendampingan.

- Berbagai cara sudah dilakukan oleh Yayasan SETARA Jambi, mulai dari memasang iklan lowongan pekerjaan di koran lokal, di website Yayasan SETARA Jambi, dan di *mailing list* dan juga dengan menempelkan informasi lowongan pekerjaan di beberapa universitas yang ada di

Jambi. Adapun yang tertarik lebih memilih untuk ditempatkan di kantor sedangkan staf yang dicari adalah staf yang bersedia bekerja di lapangan/tinggal bersama dengan masyarakat dan melakukan pendampingan pada masyarakat tersebut.

Yayasan SETARA Jambi bahkan juga sudah mengumumkan informasi lowongan pekerjaan tersebut kepada seluruh jejaring yang ada: LSM di Jambi, dan juga jaringan LSM di tingkat nasional. Yayasan SETARA Jambi telah membuka kesempatan untuk menerima staf dari luar Jambi, tetapi pencaharian tersebut juga tidak membuahkan hasil. Yayasan SETARA Jambi menyimpulkan bahwa minat masyarakat Jambi untuk bekerja di isu sosial sudah semakin berkurang, terkikis oleh kemajuan zaman yang lebih mengandalkan pencapaian materi dan status pekerjaan, sedangkan LSM tidak memiliki keduanya.

- Staf yang dicari adalah staf yang memiliki nilai-nilai kepedulian terhadap masyarakat yang kurang beruntung, bukan staf yang berharap bisa mendapatkan pekerjaan aman, terjamin, dan bergaji besar. Meskipun demikian Yayasan SETARA Jambi juga tengah berjuang memikirkan cara memberikan perlindungan, jaminan pekerjaan dan kompensasi yang layak bagi staf.
- » Keterlibatan perempuan masih rendah, sedangkan jumlah perempuan yang bekerja di kebun juga signifikan.
 - Banyak perempuan yang bekerja di kebun membantu suami. Bahkan tak jarang perempuan bekerja dengan jumlah jam atau frekuensi yang lebih dari pada suami, tetapi pelibatan perempuan dalam rapat-rapat dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Yayasan SETARA Jambi masih rendah. Peningkatan kapasitas dan pengetahuan di tingkat petani laki-laki tidak terjadi pada petani perempuan.

Pertemuan sering dilakukan di malam hari di mana secara budaya hal ini menjadi hambatan perempuan untuk mengikuti kegiatan. Hal yang dapat dilakukan oleh Yayasan SETARA Jambi adalah mengirimkan undangan dengan nama perempuan itu sendiri, bukan atas nama suami, dan pelaksanaan dilakukan di siang hari dengan mempertimbangkan

waktu yang nyaman bagi perempuan, yaitu waktu di mana mereka sudah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.

Tetapi selain itu, juga ada tugas besar yang dilakukan, yaitu memberikan pendidikan gender yang tidak hanya pada perempuan tetapi juga pada laki-laki. Partisipasi perempuan masih akan rendah jika pekerjaan domestik masih menjadi tanggung jawab penuh perempuan, sehingga suami harus memiliki kesadaran untuk membantu pekerjaan di rumah, sehingga perempuan juga memiliki waktu untuk berpartisipasi di ruang publik. Hal ini harus dilakukan dengan melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh yang ada di kampung dan juga tokoh agama untuk memberikan pengertian kepada laki-laki bahwa keterlibatan perempuan dalam pertemuan dan pelatihan akan membuat mereka bisa menjadi lebih sukses lagi.

- » Kemampuan Yayasan SETARA dalam membangun hubungan dengan banyak pihak, terutama pemerintah sudah sangat baik.
 - Pengakuan dan juga bantuan yang didapatkan oleh Gapoktan Tanjung Sehati merupakan salah satu keberhasilan Yayasan SETARA dalam melakukan lobi dan advokasi. Tetapi Yayasan SETARA juga selalu melibatkan petani dalam setiap lobi atau pertemuan yang mereka lakukan baik dengan petani ataupun dengan pemerintah.

Petani mengaku kalau mereka banyak belajar dengan cara seperti ini. Setara juga memberikan ruang, kesempatan, dan mendorong petani untuk menyampaikan gagasan dan pendapat mereka dikalangan pemerintah. Dalam hal ini, telah terjadi peningkatan kapitas yang berrti pada petani dalam hal lobi dan advokasi.

- » Motivasi kunci sukses dari sertifikasi RSPO pada petani swadaya
 - Petani Sawit Bungo Tanjung memiliki motivasi walaupun mereka tidak sekolah mereka mampu. Dari menjalani kegiatan ini mereka banyak belajar, tidak hanya belajar mengenai bagaimana kebun mereka bisa lebih lagi, atau bagaimana cara berorganisasi, mereka juga bertemu dengan banyak orang dari berbagai macam budaya di Indonesia dan juga dengan banyak orang dari luar Indonesia.

Mereka terkesan dengan bagaimana orang dari berbagai belahan dunia bersatu dan berkumpul mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah mengenai isu sawit. Sehingga mereka, yang menggantungkan hidup dari sawit juga seharusnya peduli, dan juga sudah semestinya mereka terlibat sehingga mereka juga mengetahui perkembangan mengenai sawit.

- Hal yang menarik dari petani sawit swadaya tanjung sehati adalah keinginan dan motivasi kuat mereka untuk belajar, hal yang menjadi salah satu kunci dalam proyek ini.
- » Perluasan dan replikasi di tempat lain
 - Organisasi pendamping seperti Yayasan SETARA Jambi bersama pengurus atau anggota gapoktan tanjung penting untuk berbagi pengalaman mereka dalam forum atau kegiatan yang mendorong sertifikasi sawit petani swadaya. Saat ini, melalui jejaring yang ada, yayasan SETARA Jambi sering diundang untuk menjadi pembicara atau pemateri mengenai sertifikasi sawit petani swadaya.

Tetapi jaringan ini masih terbatas pada RSPO. Dengan mengelola website sendiri, di mana Setara mengupload materi, modul, laporan, dan bahkan video pembelajaran di website tersebut maka akan lebih banyak lagi pihak yang dapat mengakses informasi tersebut; petani swadaya, perusahaan atau NGO yang ingin membantu petani swadaya, dan banyak pihak lainnya.

Gapoktan Tanjung Sehati

- » Pentingnya berkumpul dalam sebuah organisasi
 - Sebagian besar petani sawit banyak yang enggan ketika diminta untuk membentuk sebuah organisasi, hal ini dikarenakan pengalaman buruk yang mereka alami (atau yang dialami oleh orang tua mereka) dalam berkoperasi. Masing-masing petani memperjuangkan kepentingan masing-masing. Tetapi sekarang setelah organisasi terbentuk dan cukup kuat mereka menyadari sebuah kekuatan kelompok, yang mereka ibaratkan sebagai sapu lidi.

Sekarang ketika mereka bersatu mereka bisa lebih mudah menyelesaikan masalah mereka. Suara mereka sebagai kelompok juga lebih didengar dibandingkan dengan suara individu. Banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok dibandingkan kepada individu, tetapi untuk itu biasanya pemerintah akan mencari kelompok yang sudah kuat dan yang memiliki struktur yang jelas, dan pertanggungjawaban yang jelas.

Sedangkan organisasi seperti itu masih sulit di temukan di Jambi oleh karena itu, pemerintah akan kembali menawarkan kesempatan tersebut kepada mereka, karena mereka adalah salah satu kelompok yang kuat dan berkapasitas. Mereka tidak menyadari ini ketika awak terlibat dalam proyek, tetapi setelah beberapa tahun mendapatkan pendampingan dari Yayasan SETARA Jambi, setelah organisasi mereka berjalan seperti saat ini barulah mereka menyadari kalau apa yang mereka dapatkan saat ini tidak mungkin mereka raih jika mereka tidak tergabung dalam kelompok Gapoktan Tanjung Sehati.

- » Terlepas dari manfaat yang didapatkan, masih banyak petani lainnya yang enggan bergabung dengan gapoktan.
 - Gapoktan merasakan banyak manfaat dari program. Dengan menerapkan P&K RSPO produktivitas kebun mereka lebih baik dari sebelumnya, kualitas TBS juga meningkat yang juga menyebabkan peningkatna harga. Gapoktan masih membuka kesempatan bagi petani swadaya lainnya untuk bergabung dengan gapoktan tetapi banyak petani yang masih enggan, mereka menganggap kalau bergabung dengan gapoktan hanya menambah kesibukan, dan manfaat yang didapat tidak sebanding.
- » Transparansi harus dijaga dan kepercayaan dipertahankan.
 - Mengingat pengalaman buruk dimasa lalu, maka besar kemungkinan Gapoktan Tanjung Sehati akan pecah jika kepercayaan yang diberikan anggota ke pengurus di rusak. Saat ini, Gapoktan Tanjung Sehati mengelola beberapa jenis usaha (simpan pinjam, saprotan, penjualan TBS, dan lain-lain) dan juga beberapa dana hibah dari pemerintah.

Usaha tersebut sebagian sudah mendatangkan untung. sedikit untung tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dari Gapoktan, perawatan jalan, dan juga membayar insentif dari pengurus. Tetapi mekanisme pelaporan mengenai berapa pendapatan dan berapa pengeluaran terhadap anggota masih belum jelas.

Pengeluaran keuntungan usaha juga tidak melalui persetujuan dari anggota, hanya persetujuan dari pengurus saja. Hal ini kedepan ditakutkan akan menimbulkan kecurigaan di anggota, oleh karena itu gapoktan sudah harus memikirkan cara sehingga semua anggota memiliki informasi terbaru secara rutin mengenai status keuangan gapoktan. Salah satunya mungkin dengan menempelkan laporan keuangan di depan posko gapoktan setiap bulannya, sehingga anggota mengetahui pendapatan dan juga pengeluaran keuangan gapoktan. Saat ini informasi tersebut hanya diketahui oleh pengurus dan ketua dari enam kelompok.

- » Legalitas petani sawit swadaya perlu dibantu.
 - Pada umumnya banyak petani swadaya yang tidak memiliki sertifikat lahan. Bagi petani yang belum di sertifikasi dan ingin bergabung dengan gapoktan umumnya mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan administrasi, salah satunya sertifikat lahan itu tadi. Agar jumlah petani yang menerapkan ketentuan P&K RSPO terus bertambah maka, hal terkait legalitas harus dibantu oleh pengurus Gapoktan dan juga lembaga pendamping. Jika bukan sertifikat tanah, minimal berupa SKT.
 - Banyak petani baru yang ingin bergabung masih belum menyerahkan data-data, hal ini kemungkinan mereka kesulitan dalam melakukan pengisian, sehingga pengurus Gapoktan seharusnya bisa membantu. Selain itu juga sebagian petani juga belum yakin dengan manfaat yang akan mereka peroleh jika mereka menerapkan P&K RSPO. Mereka tidak mengerti dengan sertifikasi, manfaat dari selebar kertas.
- » Regenerasi pengurus akan menjadi tantangan, generasi muda tidak lagi tertarik bekerja di kebun.

- Anak dari petani sawit banyak yang sudah memiliki pendidikan tinggi, yaitu tamat SMA dan juga tamat perguruan tinggi, kebanyakan dari mereka tidak lagi tertarik untuk bekerja di kebun, mereka berharap bisa untuk menjadi pegawai pemerintah atau pegawai perusahaan swasta. Mereka juga tidak mau bekerja di kantor sekretariat Gapoktan meski digaji dengan tarif yang kompetitif.

Dengan berkembangnya Gapoktan maka dibutuhkan orang dengan keahlian dan pendidikan tinggi, orang yang mampu mengelola administrasi (data kebun maupun laporan keuangan), orang yang memiliki skill ini tidak bisa ditemukan dari pengurus atau anggota Gapoktan sekarang, yang mayoritas memiliki pendidikan terbatas. Banyak anggota juga tidak berminat menjadi pengurus, karena pengurus identik dengan kerja keras dan tidak digaji. Agar gapoktan bisa mendapatkan orang terdidik dan terampil maka mereka harus memberikan insentif untuk pengurus dan juga harus memberikan gaji yang kompetitif bagi generasi muda terampil yang bersedia bekerja di gapoktan.

- » Yayasan SETARA Jambi masih harus membantu komunikasi Gapoktan dengan RSPO dan juga dengan pihak luar.
 - Komunikasi Gapoktan dengan pihak luar termasuk dengan RSPO dan lembaga yang melakukan audit masih dibantu oleh Yayasan SETARA. Mereka masih belum memiliki keberanian untuk berkomunikasi langsung. Hal ini dikarenakan kapasitas yang terbatas, takut salah bicara, keterbatasan sarana komunikasi (internet) dan banyak alasan lainnya. Yayasan SETARA sudah mengajarkan bagaimana cara mengirimkan pesan lewat email, tetapi pengurus banyak yang tidak bisa menggunakan komputer, jika hal ini tidak segera diatasi maka ketika pendampingan Yayasan SETARA berhenti maka jejaring lain yang telah dibangun oleh Gapoktan sejak bekerjasama dengan Yayasan SETARA juga akan mati.
- » Petani perlu diedukasi lebih lanjut mengenai manfaat sertifikasi sehingga petani akan terus melanjutkan sertifikasi ini.

- Petani senang karena sudah mendapatkan sertifikasi RSPO, senang karena mereka berhasil membuktikan kalau mereka, sebagai petani sawit kecil, juga mampu untuk mendapatkan sertifikasi tersebut meski untuk itu mereka harus bekerja keras. Namun banyak petani, termasuk juga pengurus belum memahami mengenai manfaat langsung dari segi ekonomi dari sertifikasi RSPO tersebut.

Mereka mendapatkan kenaikan harga dari peningkatan mutu bukan dari sertifikasi, padahal untuk mendapatkan sertifikat mereka harus menunjuk lembaga audit yang sudah terdaftar di RSPO untuk melakukan audit, memeriksa apakah kebun mereka sudah memenuhi ketentuan P&K RSPO, untuk mendatangkan auditor atau lembaga sertifikasi tersebut Gapoktan Tanjung Sehati harus mengeluarkan biaya yang tidak murah.

Pada sertifikasi kali ini, biaya tersebut ditanggung oleh RSPO, tetapi untuk kedepan, pada saat perpanjangan, petani mungkin akan mempertimbangkan ulang untuk masih melakukan audit jika merasa kalau tidak ada manfaat ekonomi atau manfaat ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan.

- Sertifikasi RSPO hanya bersifat optional, tidak wajib, hal ini artinya petani bisa memilih melakukan sertifikasi jika mereka mendapatkan insentif tetapi bisa juga tidak melanjutkannya jika merasa kalau manfaat yang didapat tidak seperti yang diharapkan, oleh karena itu, penting bagi lembaga pendamping dan juga RSPO untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai keuntungan ekonomi yang bisa di dapat, misalkan dengan menjual sertifikat ke Green Palm.

Penjualan sertifikat ke Green Palm masih dibantu oleh Yayasan SETARA Jambi, disini terlihat kalau Gapoktan masih sangat tergantung dengan Yayasan SETARA Jambi, dan Yayasan SETARA Jambi masih akan dibutuhkan untuk beberapa tahun kedepan, setidaknya hingga Gapoktan Tanjung Sehati kembali mengajukan perpanjangan sertifikasi jika masa berlaku sertifikasi sudah habis.

- » Lembaga pendamping masih sangat dibutuhkan, sehingga dukungan yayasan SETARA untuk Gapoktan Tanjung Sehati masih harus terus berlanjut.
 - Lembaga pendamping sangat penting, tanpa kehadiran lembaga pendamping, gapoktan akan mengalami kesulitan. Komunikasi masih melalui perantara, yaitu Setara. Ilmu, informasi, pendanaan, pelatihan dana dari Setara, kesempatan studi banding, jejaring (pemerintah dan juga swasta).
 - Yayasan SETARA Jambi selalu membawa perwakilan gapoktan menghadiri pertemuan RSPO. Seperti kata pepatah “seeing is believing” dengan melihat dan menghadiri forum inilah petani mulai mempercayai apa yang dijelaskan oleh Yayasan SETARA Jambi. sehingga untuk pendampingan ke petani lainnya, maka hal yang sama juga harus dilakukan.

Dahulu, biaya transportasi, biaya pendaftaran dan biaya lainnya di dukung oleh Hivos, sekarang yayasan SETARA Jambi dan Gapoktan Tanjung Sehati harus mencari sumber pembiayaan lain agar bisa menghadiri pertemuan tersebut. Karena hanya dengan melihat maka petani akan percaya, dan jika mereka percaya mereka akan bekerja lebih serius dalam menerapkan P&K RSPO.
- » Kehadiran program, telah meningkatkan posisi tawar petani terhadap tengkulak, sehingga harga penjualan petani TBS petani meningkat
 - Pendampingan Yayasan SETARA tidak hanya bermanfaat bagi gapoktan saja, tetapi petani yang belum tergabung ke dalam gapoktan juga merasakan manfaat yang sama. Mereka mendapatkan harga yang kompetitif dari tengkulak. Tengkulak juga menjadi lebih transparan, berbeda dengan dulu sebelum program dimulai.
- » Gapoktan Tanjung Sehati sudah mulai merasakan manisnya manfaat dari penjualan sertifikasi RSPO sebagai hasil dari kerja keras mereka dalam menerapkan P&K RSPO.
 - Didalam websitenya Yayasan SETARA Jambi menginformasikan kalau sertifikat RSPO milik Gapoktan Tanjung Sehati sudah terjual. Sertifikat

tersebut di beli seharga 31.620 US\$, atau sekitar 411.060.000 selama dua tahun oleh pembeli dari Jerman. Jumlah TBS yang disertifikasi RSPO adalah sebanyak 4500/per tahun. Gapoktan tidak pernah membayangkan kalau mereka juga akan mendapatkan manfaat langsung dari sertifikat RSPO yang mereka dapatkan. Bagaimanapun untuk penjualan sertifikat tersebut Gapoktan masih butuh bantuan Yayasan SETARA Jambi.



09

PENUTUP



“

Hivos memberikan kontribusi yang sangat penting dalam memungkinkan terjadinya pengembangan sistem sertifikasi untuk petani swadaya.

”

KEMBALI KE MAKSUD penulisan buku ini sebagai dokumentasi pembelajaran yang telah dilakukan dan berkembang melalui keterlibatan Hivos dalam isu minyak sawit berkelanjutan melalui dukungan spesifik terhadap para petani kecil, dapat dilihat bahwa Hivos memberikan kontribusi yang sangat penting dalam memungkinkan terjadinya pengembangan sistem sertifikasi untuk petani swadaya. Kontribusi ini diberikan melalui: (1) program yang didukung secara finansial oleh Hivos, dan (2) interaksi yang berkembang antar berbagai lembaga dan kelompok dampingan yang terlibat dalam pelaksanaan program dukungan Hivos, dan (3) keterlibatan Hivos dalam berbagai forum terkait program tersebut.

Dalam mengupayakan kontribusi ini, perlu diperhatikan mengenai kompetensi Hivos sebagai fasilitator bagi lembaga-lembaga yang didukung dengan tata kelola isu di mana program tersebut diletakkan. Komitmen organisasi secara keseluruhan menjadi penting untuk menjamin bahwa kontribusi Hivos ini bisa secara integral menjadi bagian dari dinamika Hivos sebagai organisasi untuk berkontribusi dalam peningkatan tata kelola global yang lebih ramah terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

Isu keberlanjutan dalam sektor sawit sendiri merupakan isu yang mengandung kontroversi. Sementara bagi banyak orang ekspansi sawit yang telah mengakibatkan perubahan lingkungan dan sosial bagi negara-negara produsen merupakan hal yang sulit dipahami, namun bilamana perkembangan sektor ini melibatkan para petani kecil bisa mengundang pertanyaan bagi Hivos bilamana berpangku tangan saja. Paling tidak, dengan buku ini dapat dipahami bagaimana Hivos berupaya menjawab hal-hal tersebut bersama para mitranya.



REFERENSI





- Badrun, M. 2010. *Tonggak perubahan: melalui PIR Kelapa Sawit Membangun Negeri*. Bekasi: Citra Widya Edukasi
- Direktur Tanaman Tahunan. 2011. Penerapan Sertifikasi Perkebunan Lestari, presentasi pada Hotel Santika Jakarta, 29 Juli 2011
- Fitzherbert, E.B., Struebig, M.J., Morel, A., Danielsen, F., Bruhl, C.A., Donald, P.F. & Phalan, B. (2008). How will oil palm expansion affect biodiversity?, *Trends in Ecology & Evolution*, 23: 538-545
- Hivos. 2004. Policy Paper 2004-2007: Sustainable Economic Development. Internal Document
- Ikpe, E. 2013. Lessons for Nigeria from Developmental States: The Role of Agriculture in Structural Transformation. Dalam Fine, B., Saraswati, J. & Tavasci, D. *Beyond the Developmental State: Industrial Policy into the Twenty-First Century*, London: Pluto Press
- Juga, B.S. & Hendaryati, D.D. 2012. *Statistik Perkebunan Indonesia 2011-2013*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan
- Lee, K.T. & Boateng, C.O. 2013. *Sustainability of Biofuel Production from Oil Palm Biomass*. Singapore: Springer
- Mackie, J.A.C. 1971. *The Indonesian Economy, 1950-1963*. Dalam Glassburner, B. *The Economy of Indonesia: Selected Readings*, Jakarta: Equinox Publishing
- Rival A and Levang P. 2014. *Palms of controversies: Oil palm and development challenges*. Bogor: CIFOR.
- RSPO, 2014. *ACOP DIGEST 2013/2014: A Snapshot of RSPO Members' Annual Communications of Progress*, Malaysia: RSPO Secretariat Sdn Bhd
- Soeharto, R. 2010. *Why Indonesia needs ISPO?*, Jakarta Post, 2 Desember 2010
- SPKS. 2014. *Market Transformation by Palm Oil Smallholders*. Bogor
- Teoh, C.H. 2010. *Key Sustainability Issues in the Palm Oil Sector: A Discussion Paper for Multi-Stakeholders Consultations (commissioned by the World Bank Group)*, Pennsylvania: IFC.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Identifikasi Kesesuaian Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Petani Sawit

Lokasi : Desa Bungo Tanjung dan Desa Rawa Jaya, Kec. Tapir Selatan Kab. Merangin Jambi ¹²

Perusahaan inti : PT Sari Aditya Loka-1 (PT SAL)

Acuan : Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Untuk Petani Kelapa Sawit Republik Indonesia, Final Document. November 2007

No	Kriteria	Kesesuaian			Temuan Di Lapangan
		Ya	Tidak	NA	
Prinsip 1 : Komitmen terhadap transparansi					
1	Kriteria 1.1. Pihak perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit memberikan informasi yang memadai kepada stakeholder lainnya mengenai isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan kriteria RSPO dalam bahasa dan bentuk yang sesuai, untuk memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan.		X		<ul style="list-style-type: none"> - Petani mitra tidak memperoleh informasi yang memadai terkait dengan program kemitraan perkebunan sawit. - Petani mitra tidak memperoleh informasi mengenai isu lingkungan, sosial dan hukum. - Petani tidak memperoleh salinan kontrak kemitraan. - Kelompok tani tidak memiliki formulir standar untuk kegiatan pencatatan dan atau pelaporan dari para anggotanya.

¹² Identifikasi kesesuaian ini dilakukan bagi petani swadaya dan petani yang telah menyelesaikan masa kreditnya dengan PT SAL. PT SAL tidak dapat dikonfirmasi mengenai kemitraan yang dibangun.

No	Kriteria	Kesesuaian			Temuan Di Lapangan
		Ya	Tidak	NA	
					<p><u>Catatan:</u> Indikator nasional (major): rekaman permintaan informasi, rekaman permintaan tanggapan terhadap permintaan informasi tidak tersedia. PT SAL tidak dapat dikonfirmasi mengenai kemitraan yang dibangun.</p>
2	<p>Kriteria 1.2 Dokumen perusahaan tersedia secara umum, kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan atau sosial.</p>		X		<p>Petani kemitraan: Sertifikat tanah diberikan kepada petani setelah selesai masa kredit. Terdapat ketidaksesuaian luasan dan bentuk kebun sawit yang diterima dengan sertifikat tanah. Hal ini baru diketahui setelah masa kredit selesai, di mana sertifikat tanah baru diterima petani. Petani mitra (kelompok tani) dan masyarakat di sekitar lokasi PT SAL tidak memperoleh informasi dan dokumen. (1). Sosial: aktifitas sosial dan hubungan masyarakat yang dilakukan PT SAL. (2). Lingkungan: dokumen AMDAL dan laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Laporan RKL-RPL). (3). Legal:</p> <p><u>Untuk petani swadaya:</u> Sertifikat tanah LP dimiliki oleh petani swadaya. Untuk sertifikat kebun plasma diterima petani yang telah lunas masa kreditnya. Terdapat ketidaksesuaian</p>

No	Kriteria	Kesesuaian			Temuan Di Lapangan
		Ya	Tidak	NA	
					luasan dan bentuk kebun sawit yang diterima dengan sertifikat tanah. Hal ini baru diketahui setelah masa kredit selesai, di mana sertifikat tanah baru diterima petani. Kelompok tani tidak memiliki dokumen aktivitas organisasi dan sosial
Prinsip 2 : Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku					
3	Kriteria 2.1. Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku baik lokal, nasional maupun internasional yang telah diratifikasi.		X		<p><u>Untuk seluruh petani:</u> Petani tidak mengetahui hukum penting yang relevan dan terkait dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit</p> <p><u>Untuk petani kemitraan:</u> Petani kemitraan tidak dilibatkan dalam penyusunan aturan skema kerjasama, namun menginformasikan kepada petani mengenai isi skema kerjasama tersebut (isi perjanjian kemitraan atau isi perjanjian kredit). Petani kemitraan dengan pola KKPA tidak memperoleh informasi dan salinan dokumen Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil NO.: 73/Kpts/OT.210/2/98 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa di Bidang Perkebunan dengan Pola kemitraan melalui Pemanfaatan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya. Petani kemitraan dengan pola</p>

No	Kriteria	Kesesuaian			Temuan Di Lapangan
		Ya	Tidak	NA	
					pola PIR tidak memperoleh informasi dan salinan dokumen KepMenTan NO. : 60/Kpts/KB.510/2/98 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Inti Rakyat, dan lain-lain.
4	Kriteria 2.2. Hak untuk menguasai dan menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan.	X	X	X	Terdapat ketidaksesuaian luasan dan bentuk kebun sawit yang diterima dengan sertifikat tanah. Hal ini baru diketahui setelah masa kredit selesai, di mana sertifikat tanah baru diterima petani. <u>Petani Swadaya:</u> Sertifikat tanah LP dimiliki oleh petani swadaya. Untuk sertifikat kebun plasma diterima petani yang telah lunas masa kreditnya. Petani Kemitraan Sertifikat tanah diberikan kepada petani setelah selesai masa kredit.
5	Kriteria 2.3. Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak berdasarkan hukum dan hak tradisional pengguna lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka.		X		Petani menyerahkan lahan LU1 dan LU2 seluas 3,25 ha kepada PT SAL untuk dikembangkan menjadi kebun sawit. Kebun diserahkan kembali ke petani pada masa akad kredit melalui mekanisme pengundian. Umumnya petani mitra mendapatkan lahan masing-masing seluas 2 ha (disebut kapling) di lokasi yang berbeda dengan lahan miliknya. Selain itu, luas dan bentuk lahan tidak

No	Kriteria	Kesesuaian			Temuan Di Lapangan
		Ya	Tidak	NA	
					<p>sesuai dengan sertifikat lahan sebenarnya. Terjadi penyusutan luasan dan perbedaan bentuk lahan dengan yang tercantum di sertifikat tanah. Hal ini diketahui oleh petani setelah masa kredit selesai karena selama masa kredit berjalan, sertifikat tanah yang dikelola petani dipegang oleh pihak bank. Penyusutan luas lahan disebabkan pertama karena pihak perusahaan membagi lahan berdasarkan banyaknya pohon sawit di kebun. Untuk lahan 2 ha seharusnya ditanam 240 pohon sawit dengan jarak tanam 9 x 9 meter. Namun pada kenyataannya jarak tanam pohon sawit beragam dan kurang dari 9x9 meter. Kedua, perusahaan beralasan penyusutan luas lahan karena adanya pembuatan jalan di antara kebun sawit untuk transportasi pengangkutan TBS. PT SAL tidak memberikan catatan proses dan kesepakatan negosiasi (disertai peta/denah lokasi) tentang penyerahan lahan LU1 dan LU2 untuk digunakan bagi pengembangan lahan sawit.</p>

No	Kriteria	Kesesuaian			Temuan Di Lapangan
		Ya	Tidak	NA	
Prinsip 3 : Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang					
6	Kriteria 3.1. Terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan yang ditujukan untuk mencapai keamanan ekonomi dan keuangan dalam jangka panjang.	X	X		<p>Salah satu tujuan pembentukan kelompok tani untuk rencana persiapan menghadapi peremajaan tanaman sawit. Namun petani dan kelompok tani tidak memiliki dokumen rencana kerja operasional kebun termasuk rencana persiapan menghadapi peremajaan tanaman. Petani tidak mengetahui informasi tentang prediksi produksi kebun saat akad kredit. Petani tidak memperoleh akses informasi teknologi baru dan informasi pasar/ harga dari PT SAL</p> <p><u>Untuk petani kemitraan:</u> Koperasi, kelompok tani dan petani mengetahui jumlah kredit yang ditanggung tiap petani dan mekanisme agunannya, namun mereka tidak terlibat dalam perhitungan kredit, perjanjian kerjasama dengan bank. Mandor kebun PT SAL memberikan penyuluhan secara reguler ke kelompok tani mengenai pengelolaan kebun.</p> <p><u>Untuk petani swadaya:</u> Petani tidak mendapatkan pembinaan dari instansi pemerintah terkait, petugas penyuluh lapangan, pabrik yang membeli TBS mereka</p>

No	Kriteria	Kesesuaian			Temuan Di Lapangan
		Ya	Tidak	NA	
					<p>(PT SAL) dan tengkulak. SPKS Jambi sebagai organisasi rakyat untuk petani sawit berencana melakukan pembinaan dan penyebaran informasi dan teknologi ke petani sawit di lokasi studi. Namun saat ini SPKS Jambi baru pada tahap persiapan pembentukan organisasi. Petani tidak memperoleh fasilitas dari pemerintah untuk keberlanjutan usahanya. Petani swadaya tidak memperoleh Buku Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Departemen Pertanian sebagai dokumen rencana kerja operasional.</p> <p>Di desan Bungo Tanjung, kelompok tani memiliki rencana menghadapi peremajaan tanaman sawit. Tiap anggota kelompok tani berkontribusi Rp 10 per kg TBS yang dijual ke tengkulak (CV Pangrupo Jiwo) untuk dana perbaikan jalan kebun dan rencana peremajaan tanaman sawit. Namun kelompok tani belum memiliki rencana teknis menghadapi peremajaan tanaman sawit.</p>

No	Kriteria	Kesesuaian			Temuan Di Lapangan
		Ya	Tidak	NA	
Prinsip 4 : Penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik					
7	Kriteria 4.1. Prosedur operasi didokumentasikan secara tepat dan diimplementasikan dan dipantau secara konsisten.		X		Petani mitra tidak memperoleh informasi mengenai <i>Good Agriculture Practices</i> (GAP) dan SOP PT SAL. Petani swadaya tidak memiliki dokumen Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perkebunan Departemen Pertanian Republik Indonesia sebagai GAP yang mencakup namun tidak terbatas pada: kesuburan tanah, teknik mempertahankan kesuburan tanah, faktor-faktor yang memengaruhi erosi dan degradasi tanah (rorak, terassing, tapak kuda), faktor yang dapat memengaruhi kualitas air (penanaman dipinggir sungai dan lereng, pemupukan, aplikasi pestisida), Upaya menghindari pencemaran air oleh pestisida dan pupuk, konsep dan Pengelolaan Hama Terpadu (penggunaan musuh alami), pestisida yang boleh digunakan menurut peraturan yang berlaku, cara aplikasi pestisida yang aman, cara menyimpan pestisida dan membuang sisa dan wadahnya secara aman.

No	Kriteria	Kesesuaian			Temuan Di Lapangan
		Ya	Tidak	NA	
8	Kriteria 4.2. Praktik-praktik mempertahankan kesuburan tanah, atau bilamana mungkin meningkatkan kesuburan tanah, sampai pada tingkat yang memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan	X	X		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat Rekaman aplikasi pemupukan dan rekaman produktivitas kebun selama 3 tahun terakhir. - Kelompok tani tidak melakukan pengujian kualitas saprodi yang mereka terima sebelum disalurkan kepada petani anggotanya. - PT SAL tidak memfasilitasi informasi mengenai kualitas saprodi yang disediakan/ digunakan oleh petani mitra. - Kelompok tani dan PT SAL tidak membina anggota tani dan petani mitranya untuk melakukan pencatatan sederhana mengenai kegiatan perkebunannya. - Beberapa petani mitra memanfaatkan janjang kosong untuk petani kemitraan sepanjang tersedia di PT SAL.
9	Kriteria 4.3. Praktik-praktik meminimalisasi dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah	X		X	<ul style="list-style-type: none"> - Kebun pada lokasi studi sebagian besar berada di lokasi yang rata. Kebun dengan kemiringan lebih dari 20% pada lokasi studi tidak ditemukan. - Pembuatan drainase di daerah gambut dan areal rendahan

No	Kriteria	Kesesuaian			Temuan Di Lapangan
		Ya	Tidak	NA	
10	Kriteria 4.4 Praktik-praktik mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.		X		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat rekaman penggunaan pestisida dan pemupukan - Petani menanam tanaman sawit berjarak kurang dari 2 meter dari alur anak sungai. Tanah sekitar tanaman tersebut dipupuk dengan Urea, NPK, Kcl dan disemprot herbisida
11	Kriteria 4.5. Hama, penyakit, gulma dan spesies introduksi yang berkembang cepat (invasif) dikendalikan secara efektif dengan menerapkan teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang memadai.		X		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya laporan hasil pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman sawit. - Petani kemitraan tidak mengetahui PHT.
12	Kriteria 4.6. Agrokimia digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Tidak ada penggunaan propilaktik (pencegahan) dari pada pestisida, kecuali dalam kondisi khusus sebagaimana dimuat dalam panduan praktik terbaik Apabila agrokimia yang digunakan tergolong sebagai Tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam, maka perkebunan secara aktif mencari alternatif dan proses ini dokumentasikan.		X		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat rekaman mengenai penggunaan agrokimia (pupuk dan herbisida) yang digunakan, termasuk dosis, cara dan waktu penggunaannya. - Petani yang menerapkan agrokimia tidak menggunakan peralatan perlindungan keselamatan (masker, sarung tangan, sepatu boot). Tidak terdapat bukti pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam aplikasi agrokimia - Kemasan bekas herbisida dikumpulkan di belakang rumah atau di buang/ dikubur di lahan tanpa dibersihkan terlebih dahulu.

No	Kriteria	Kesesuaian			Temuan Di Lapangan
		Ya	Tidak	NA	
					- Petani tidak memiliki manual sederhana GAP budidaya perkebunan kelapa sawit (lihat juga kriteria 4.1).
13	Kriteria 4.7. Rencana kesehatan dan keselamatan kerja didokumentasikan, disebarluaskan dan diimplementasikan secara efektif.		X		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat rencana kerja yang aman mengenai praktik pada perkebunan yang berisiko tinggi. - Tidak terdapat catatan penggunaan agrokimia (merek, dosis, cara aplikasi). - Petani yang menerapkan agrokimia tidak menggunakan peralatan perlindungan keselamatan (masker, sarung tangan, sepatu boot). - Petani memperoleh pelatihan mengenai praktik kerja yang aman, namun bukti terkait tidak tersedia. - Tidak tersedia pedoman penanganan kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat disusun oleh PT SAL, kelompok tani atau dinas perkebunan setempat. - Tidak ada program monitoring yang dilakukan oleh PT SAL dan kelompok tani mengenai pelaksanaan keselamatan kerja.
14	Kriteria 4.8 Seluruh staf, karyawan, petani dan kontraktor harus terlatih secara memadai.	X	X X		Pelatihan bagi petani kemitraan dilakukan secara reguler dalam masa kredit, namun tidak terdapat program tertulis mengenai pelatihan yang akan dilakukan bagi kelompok tani.

No	Kriteria	Kesesuaian			Temuan Di Lapangan
		Ya	Tidak	NA	
					Pekerja pada perkebunan kemitraan dan swadaya mendapatkan penyuluhan dari pemilik kebun dan organisasi tani. Petani swadaya tidak memperoleh pelatihan dari instansi pemerintah setempat dan organisasi petani .
Prinsip 5 : Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati					
15	Kriteria 5.1 Aspek manajemen perkebunan dan pabrik, termasuk <i>replanting</i> yang menimbulkan dampak lingkungan diidentifikasi, dan rencana-rencana untuk mengurangi/mencegah dampak negatif dan mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan yang kontinu.		X		<ul style="list-style-type: none"> - Bagi petani kemitraan, kelompok tani tidak memiliki akses dokumen AMDAL atau UKL dan UPL milik PT SAL - Petani kemitraan dan petani swadaya tidak mengetahui dampak negatif dari kegiatan mereka dan tidak mengetahui cara meminimalkannya (terutama: pembersihan lahan, pemupukan, aplikasi pestisida, erosi pinggir sungai).
16	Kriteria 5.2. Status spesies-spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat dengan nilai konservasi tinggi, jika ada di dalam perkebunan atau yang dapat terpengaruh oleh manajemen kebun dan pabrik harus diidentifikasi dan konservasinya diperhatikan dalam rencana dan operasi manajemen dan atau kelembagaan petani.		X		<ul style="list-style-type: none"> - Untuk petani kemitraan dan petani swadaya: Tidak terdapat bukti hasil identifikasi spesies yang dilindungi.yang disimpan di organisasi tani - Tidak ada informasi tentang identifikasi spesies yang dilindungi telah dilaksanakan oleh PT SAL sesuai dengan dokumen AMDAL.

No	Kriteria	Kesesuaian			Temuan Di Lapangan
		Ya	Tidak	NA	
17	Kriteria 5.3. Limbah dikurangi, didaur ulang, dipakai kembali, dan dibuang dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara lingkungan dan sosial		X		<ul style="list-style-type: none"> - Petani menyimpan bekas kemasan agrokimia di belakang rumah, dibuang atau dikubur di kebun tanpa dibersihkan dahulu. - Alat dan tangki penyemprotan herbisida dicuci di belakang rumah. - Tidak terdapat pengelolaan limbah dan rencana pembuangan limbah
18	Kriteria 5.4. Efisiensi penggunaan energi dan penggunaan energi terbarukan dimaksimalkan.			X	Kriteria ini tidak berlaku untuk petani.
19	Kriteria 5.5 Penggunaan api untuk pemusnahan limbah dan untuk penyiapan lahan, guna penanaman kembali dihindari kecuali dalam kondisi spesifik, sebagaimana tercantum dalam kebijakan ASEAN atau panduan lokal serupa.			X	Kondisi kebun saat ini sudah produksi. Rencana re-plating sekitar 10 tahun lagi. Saat awal pengembangan kebun sawit, pembukaan lahan dengan cara pembakaran.
20	Kriteria 5.6. Rencana-rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, disusun, diimplementasikan dan dimonitor.			X	Kriteria ini tidak berlaku untuk petani.

No	Kriteria	Kesesuaian			Temuan Di Lapangan
		Ya	Tidak	NA	
Prinsip 6 : Tanggung Jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari kebun dan pabrik					
21	Kriteria 6.1 Aspek manajemen perkebunan dan pabrik termasuk <i>replanting</i> yang mempunyai dampak sosial diidentifikasi dengan cara partisipatif dan rencana penanganan dampak negatif dan pengembangan dampak positif disusun, dilaksanakan dan dimonitor untuk menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan.			X	Petani menjelaskan dampak sosial kegiatan perkebunan mereka terhadap masyarakat lokal (Suku Anak Dalam), tergusurnya Suku Anak Dalam dari komunitas tinggalnya karena terjadi perubahan fungsi hutan menjadi kebun sawit. Konflik sosial yang terjadi karena permasalahan tanah dan kecemburuan sosial. Selain itu terdapat permasalahan sosial terkait kolaborasi PT SAL dengan aparat pemerintah (kepala desa, polisi) dalam masalah kemitraan yang dibangun dengan petani. Namun dalam penyelesaian masalah, PT SAL tidak menyelesaikannya secara partisipatif baik dalam menyelesaikan dan monitoring penanganan permasalahan sosial tersebut.
22	Kriteria 6.2. Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan/atau pabrik, masyarakat lokal, dan kelompok lain yang terkena dampak atau berkepentingan.		X		- PT SAL tidak transparan dalam mekanisme kemitraan yang dibangun. Petani mitra dan masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan selama akad kredit dan selama masa kredit. Mekanisme kemitraan diputuskan secara sepihak oleh PT SAL.

No	Kriteria	Kesesuaian			Temuan Di Lapangan
		Ya	Tidak	NA	
					- Organisasi tani tidak mempunyai rekaman komunikasi dan konsultasi dengan anggota organisasi tani, masyarakat dan PT SAL
23	Kriteria 6.3. Terdapat sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk mengurus keluhan dan ketidakpuasan yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak		X		- Tidak terdapat sistem dan rekaman di organisasi tani (termasuk di koperasi) untuk menerima keluhan/keluhan/ keberatan, penanganan keluhan /keberatan, dan pelaporan bila terdapat permasalahan sosial. - Tidak terdapat mekanisme dan dokumentasi proses dan hasil penyelesaian perselisihan dengan pihak yang terkena dampak.
24	Kriteria 6.4. Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal atau hak tradisional dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan komunitas adat dan stakeholder lain memberikan pandangan pandangnya melalui institusi perwakilan mereka sendiri.		X		Petani dan komunitas lokal tidak memperoleh kompensasi atas kehilangan hak legal dan hak tradisional dari PT SAL akibat pembukaan kebun sawit dan program kemitraan PT SAL.

No	Kriteria	Kesesuaian			Temuan Di Lapangan
		Ya	Tidak	NA	
25	Kriteria 6.5 Upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi karyawan dan karyawan dari kontraktor harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.	X			Saat panen, petani dibantu oleh anggota keluarga dan tenaga lepas. Tenaga lepas dibayar Rp. 100 per kg TBS yang dipanen. Pekerja lepas dapat memperoleh Rp. 100 ribu per hari, bahkan lebih.
26	Kriteria 6.6 Perusahaan menghormati hak seluruh karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai dengan pilihan mereka dan untuk tawar menawar secara kolektif. Ketika hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka perusahaan memfasilitasi pendamping yang tidak berpihak, gratis dan melakukan tawar menawar bagi seluruh karyawan.			X	Kriteria ini tidak berlaku untuk petani.

No	Kriteria	Kesesuaian			Temuan Di Lapangan
		Ya	Tidak	NA	
27	Kriteria 6.7. Anak-anak tidak dipekerjakan dan dieksploitasi. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak hanya diperbolehkan pada perkebunan keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa dan tidak mengganggu program pendidikan mereka. Anak-anak tidak boleh terpapar oleh kondisi kerja membahayakan.	X			Petani yang dibantu oleh anggota keluarga (istri, anak dewasa). Anak petani yang masih sekolah membantu saat liburan sekolah dan tidak melakukan pekerjaan berat dan yang membahayakan dirinya.
28	Kriteria 6.8. Segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur dilarang	X			Tidak ada diskriminasi dalam pekerjaan di kebun petani. Petani mempekerjakan pekerja berdasarkan kompetensi.
29	Kriteria 6.9. Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak reproduksinya, disusun dan diaplikasikan.			X	Tidak ada tenaga kerja lepas perempuan. Istri pekerja dapat mengatur waktu kerjanya sendiri.

No	Kriteria	Kesesuaian			Temuan Di Lapangan
		Ya	Tidak	NA	
30	Kriteria 6.10 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis lokal lainnya.		X		- Petani mitra tidak memperoleh perjanjian tertulis mengenai kemitraan dari PT SAL dan sertifikat tanah selama masa kredit. - Organisasi tani tidak terlibat dalam penentuan harga TBS
31	Kriteria 6.11 Perkebunan dan pabrik berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan bilamana dianggap memadai.	X			Petani swadaya dalam organisasi tani berkontribusi terhadap pembangunan lokal melalui perbaikan jalan kebun.
Prinsip 7 : Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung Jawab					
32	Kriteria 7.1 Dilakukan analisis dampak sosial dan lingkungan hidup secara komprehensif dan partisipatif sebelum membangun kebun atau operasi baru memperluas perkebunan yang sudah ada dan hasilnya dimasukkan ke dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi.		X		Petani kemitraan tidak mengetahui dampak sosial dan lingkungan sebelum pembangunan perkebunan dilaksanakan. Analisa dampak sosial dan lingkungan seharusnya terdapat dalam analisa AMDAL. Petani tidak memperoleh dokumen AMDAL PT SAL.

No	Kriteria	Kesesuaian			Temuan Di Lapangan
		Ya	Tidak	NA	
33	Kriteria 7.2 Menggunakan survai tanah dan informasi topografi untuk merencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru dan hasilnya digabungkan ke dalam perencanaan dan operasi		X		Petani tidak memperoleh informasi topografi dari PT SAL dan instansi pemerintah terkait.
34	Kriteria 7.3 Penanaman baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (<i>High Conservation value</i>)	X			Penanaman kebun sawit baru di lokasi studi sebelum 2005.
35	Kriteria 7.4 Dihindari memperluas perkebunan di atas lahan yang curam, dan atau di tanah marjinal serta rapuh.		X		Organisasi tani tidak memiliki peta realisasi pembukaan lahan. Tidak tersedia rekaman tentang tidak adanya penanaman berlebihan pada lahan yang curam dan/atau tanah marjinal yang rapuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petani tidak memperoleh informasi topografi dari PT SAL dan instansi pemerintah terkait.

No	Kriteria	Kesesuaian			Temuan Di Lapangan
		Ya	Tidak	NA	
36	Kriteria 7.5 Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri.		X		Organisasi tani dan koperasi tidak memiliki bukti bahwa tidak terdapat penolakan dari masyarakat adat dan lokal terhadap pembangunan perkebunan tersebut.
37	Kriteria 7.6 Masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati dengan persetujuan sukarela yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan		X		Lihat temuan dalam kriteria 6.4
38	Kriteria 7.7 Dilarang membuka perkebunan baru dengan membakar, kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana dalam ASEAN Guidelines atau regional Best Practices lainnya		X		Petani tidak mengetahui teknik penyiapan lahan sawit tanpa bakar Petani belum pernah mengikuti pelatihan/kursus penyiapan lahan tanpa bakar.

No	Kriteria	Kesesuaian			Temuan Di Lapangan
		Ya	Tidak	NA	
Prinsip 8 : Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktifitas					
39	Kriteria 8.1 Perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara teratur memonitor dan mengkaji ulang aktifitas mereka dan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata yang kontinu pada operasi-operasi utama .		X		Petani kemitraan pada masa kredit memperoleh pelatihan secara teratur dari PT SAL mengenai pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Petani swadaya tidak memperoleh pelatihan

Lampiran 2. Pengalaman Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah, Kabupaten Pelalawan, Riau

Petani sawit, usaha dan keluarganya

1. Usaha sawit petani:

- » Asosiasi petani sawit swadaya amanah beranggotakan sebanyak 349 petani, yang berasal dari 10 kelompok yang tersebar di tiga desa yaitu: desa Trimulya Jaya, Bukit Jaya, dan Air Mas, dengan total luas lahan 763 Ha.
- » Petani sawit swadaya yang tergabung dalam Asosiasi amanah rata-rata menanam sawit di awal tahun 2000-2001, dengan sedikit pengecualian di mana terdapat petani yang menanam sawit di tahun 1998-1999.
- » Kebun kelapa sawit asosiasi amanah tengah berada pada usia produktif, yaitu rata-rata berumur 14 tahun. *Replanting* belum akan dilakukan dalam waktu dekat.
- » Kebun sawit dikerjakan oleh suami, terkadang dibantu oleh istri. Tetapi saat ini istri tidak lagi aktif membantu suami bekerja di kebun. Berbeda dengan dulu ketika sawit masih baru ditanam yang masih butuh perawatan dan perhatian yang intensif. Sekarang istri lebih banyak mengurus pekerjaan domestik, yaitu belanja ke pasar, memasak, dan menjaga anak.
- » Istri yang tidak lagi memiliki anak kecil biasanya suka bekerja bersama dengan suami di kebun. Mereka tidak mengupahkannya, biar pemasukan tidak dikurangi oleh biaya upah, hal ini dikarenakan kebutuhan biaya yang tinggi, misal untuk uang kuliah anak. Dalam situasi ini, suami dan istri akan saling membantu. Biasanya, laki-laki bertugas memanen buah, dan perempuan mengutip gondolan.
- » Disaat suami tidak bisa memanen buah dikebun, apakah karena sedang bepergian ke luar kota, atau karena sedang sakit, istri akan mengupahkan pekerjaan tersebut ke orang lain. Perempuan/istri tidak ada yang melakukan pemanenan, hal ini dikarenakan pohon sawit yang

tinggi dan pekerjaan memanen dianggap berat dan terlalu berisiko untuk perempuan.

- » Waktu yang dialokasikan oleh perempuan yang bekerja di kebun adalah sekitar 2-3 jam tetapi tidak setiap hari. Istri ke kebun untuk pekerjaan seperti membersihkan piringan dan membantu memupuk. Sebagian istri mengatakan kalau sebenarnya suami tidak menganjurkan atau mengizinkan mereka bekerja di kebun.
- » Perempuan tidak begitu mengetahui tentang sertifikasi RSPO, menurut mereka hal tersebut adalah pekerjaan laki-laki dan mereka tidak tertarik untuk terlibat. Meski mereka tidak begitu mengetahui sertifikasi RSPO, mereka bisa merasakan manfaat dari keterlibatan suami mereka di asosiasi amanah. Mereka mengatakan bahwa semenjak suami bergabung dengan asosiasi amanah pendapatan mereka meningkat. Sebelumnya harga jual rendah dan fluktuatif karena harga dipermainkan oleh tengkulak.
- » Meski sedikit, ada juga perempuan yang mengetahui perihal sertifikasi RSPO. Mereka mendapatkan informasi dari suaminya: suami suka bercerita mengenai hal yang ia pelajari sehabis pelatihan. Meskipun demikian istri tidak ingin terlibat, dan merasa cukup puas hanya mendengarkan saja dari suami. Istri merasakan kalau sekarang mereka menjadi lebih sejahtera, harga lebih stabil dan lebih terjamin.
- » Hampir tidak ada anak yang membantu orang tua di kebun dikarenakan harus bersekolah. Petani sawit pada umumnya bekerja di pagi hari yaitu sekitar 2-3 jam, dan pada saat itu anak-anak masih di sekolah.
- » Beberapa orang tua tidak memperbolehkan anaknya yang masih SD dan SMP untuk bekerja di kebun meski di hari libur. Anak tetap tinggal di rumah; menonton TV atau sekadar beristirahat dan bermain. Anak SMA yang kos biasanya pulang ke rumah di akhir pekan, mereka juga tinggal di rumah bukan bekerja di kebun.
- » Banyak orang tua lebih menyukai anak mereka tinggal di rumah dan belajar. Bagi mereka pendidikan lebih penting. Meski kebutuhan hidup mereka tercukupi dari hasil sawit tetapi mereka berharap agar anak

mereka memiliki profesi berbeda; yaitu menjadi pegawai kantoran atau guru bukan menjadi petani seperti mereka.

- » Mencari tenaga upah tidak sulit. Biasanya pekerjaan bersifat borongan, dan dikerjakan oleh suami-istri, sehingga upah yang diterima oleh laki-laki atau perempuan tidak bisa dibedakan karena seluruh hasilnya dimanfaatkan bersama.
- » Asosiasi amanah sudah memberikan pelatihan kepada beberapa tenaga upah mengenai beberapa hal terkait degan prinsip dan kriteria RSPO. Tenaga upah sudah bisa memanen sawit sesuai dengan umur dan standar kematangan buah yang sudah ditetapkan dan juga melakukan penyemprotan dengan ketentuan yang mengacu pada prinsip dan kriteria RSPO.
- » Tenaga upah yang bekerja di kebun juga diharuskan untuk mematuhi aturan kesehatan dan keselamatan, seperti menggunakan helm pelindung dan memakai sepatu.

2. Petani sawit dan keluarganya:

- » Di masing-masing desa tempat tinggal anggota asosiasi amanah terdapat sekolah dasar (SD). Jarak tersebut tidak jauh dari rumah dan bisa dicapai dengan berjalan kaki. Selain SD juga ada pendidikan untuk anak usia dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK)
- » Untuk sekolah menengah pertama (SMP) terletak di Bukit Jaya, yang dulunya merupakan desa induk sebelum terjadi pemekaran. SMP ini juga tak jauh dari rumah petani dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki.
- » Sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) terletak di ibu kota kecamatan yaitu di Ukui, dan bisa dicapai dengan kendaraan; baik mobil atau sepeda motor. Tetapi sayangnya kendaraan umum hampir tidak tersedia, sehingga banyak anak yang berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Di Ukui sudah banyak terjadi kecelakaan sepeda motor yang menyebabkan mereka dirawat di rumah sakit, karena luka dan patah tulang, bahkan meninggal.

- » Sebagian orang tua mengkhawatirkan keselamatan anaknya yang harus mengendarai sepeda motor ke sekolah, sehingga sebagian memilih untuk menyekolahkan anaknya ke kecamatan atau kabupaten lain, dan meminta anaknya untuk tinggal ngekos atau tinggal dengan saudara. Biaya hidup anak yang ngekos termasuk dalam pengeluaran besar rutin bulanan yang harus ditanggung.
- » Semenjak ada bantuan dana BOS, iuran SPP untuk SD hingga SMA di sekolah negeri sudah tidak ada lagi, kalau di sekolah swasta terkadang masih ada. Meski SPP gratis, orang tua masih harus mengeluarkan biaya untuk seragam sekolah anak, sepatu, dan juga buku.
- » Selain pendidikan formal, di tiga desa tersebut juga memiliki Tempat Pendidikan Alquran (TPA) yang dikelola secara mandiri di mana anak-anak mendapatkan pendidikan agama.
- » Sebesar petani sawit anggota asosiasi amanah sanggup membiayai anaknya bersekolah hingga ke tingkat universitas. Anak dari petani anggota asosiasi amanah banyak yang melanjutkan kuliah di Pekan Baru dan juga di Pulau Jawa. Orang tua yang memiliki anak yang kuliah diluar kota atau Provinsi juga harus menyediakan uang dalam jumlah besar setiap bulannya dan lebih besar lagi ketika bayaran semester yaitu satu kali per enam bulan.
- » Keanggotaan kelompok asosiasi amanah adalah kepala rumah tangga yang diwakili oleh laki-laki. Undangan untuk mengikuti kegiatan kelompok, seperti meeting dan pelatihan biasanya ditujukan untuk laki-laki. Hanya pada kasus tertentu, dan tetapi jarang, istri ikut hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh asosiasi amanah, itupun hanya jika suami tidak bisa hadir, sehingga istri datang mewakili. Istri merasa kalau kegiatan yang diadakan oleh asosiasi amanah diperuntukkan untuk laki-laki dan istri juga tidak memiliki ketertarikan untuk terlibat.
- » Suami merasa tidak perlu untuk bercerita pada istri mengenai pelajaran yang didapatkan dari pelatihan-pelatihan budidaya sawit berkelanjutan yang diikutinya. Biasanya suami mendiskusikan ilmu dan informasi yang mereka peroleh dari pelatihan dengan sesama anggota kelompok yang juga laki-laki. Hanya terkadang jika istri bertanya

mengenai kegiatan yang barusan diikuti, suami bercerita apa yang telah dia pelajari, biasanya ketika suami dan istri sedang duduk dan mengobrol santai di sore hari.

- » Selain mengurus rumah tangga, sebagian besar perempuan juga terlibat dalam beberapa kegiatan di luar rumah seperti: Yasinan (3 kali dalam seminggu), Arisan RT (1 kali sebulan), Pengajian (1 kali sebulan), PKK (1 kali sebulan). Sebagian besar perempuan yang ditanya tidak pernah terlibat dalam rapat desa. Diskusi perempuan di luar rumah selain membahas agama, juga mengenai anak dan keluarga tetapi tidak membahas mengenai sawit.
- » Perempuan memiliki perwakilan yang berpartisipasi di rapat-rapat desa seperti musrembang, PNPM. Mereka menyuarakan kepentingan perempuan di desa. Perempuan tersebut biasanya adalah bidan desa/petugas kesehatan, guru, dan tokoh perempuan lainnya.
- » Keputusan mengenai usaha tani di tingkat keluarga biasanya dimusyawarahkan bersama. Tetapi keputusan yang bersifat rutin dan berulang yang sudah sudah menjadi kesepakatan kelompok, misal, mengenai waktu pemupukan dan pemanenan, tidak lagi diputuskan bersama dengan istri. Dikarenakan kelompok sudah menyepakati dan sudah memiliki rencana kerja kelompok untuk pengelolaan kebun, istri mengikuti saja. Istri percaya kalau keputusan dibuat oleh kelompok yang diwakili oleh suami adalah keputusan terbaik bagi usaha sawit mereka sekeluarga.
- » Di setiap desa di mana anggota tinggal, terdapat koperasi yang berfungsi dan berjalan dengan baik. Koperasi tersebut terbentuk untuk mewadahi kepentingan petani plasma. Petani yang tergabung sebagai anggota di asosiasi amanah dan memiliki kebun plasma juga tergabung sebagai anggota koperasi tersebut.
- » Asosiasi amanah memanfaatkan lembaga yang sudah ada dengan bekerjasama dengan tiga koperasi di tiga desa tersebut. Pembayaran hasil penjualan TBS dari petani yang diterima oleh asosiasi amanah dari perusahaan, diserahkan ke petani melalui koperasi di desa mereka masing-masing.

- » Setiap petani di berikan slip pembayaran, yang merinci jumlah total yang diterima dan pemotongan biaya jika ada. Seperti halnya slip pembayaran gaji, petani menerimanya setiap bulan. Dikarenakan adanya slip, istri mengetahui jumlah pendapatan yang diterima dari sawit setiap bulannya.
- » Suami meyakini kalau istri lebih pintar dalam mengelola keuangan rumah tangga, sehingga uang yang mereka terima diserahkan kepada istri setelah sebelumnya dipotong oleh biaya rutin bulanan suami yang telah disepakati bersama (bensin, rokok, pulsa, dan lain-lain).
- » Baik istri dan suami bebas membelanjakan uang untuk pengeluaran rutin masing-masing, tetapi mereka akan merundingkan terlebih dahulu jika ada pembelian yang bersifat non rutin dengan jumlah yang relatif besar, seperti pembelian TV atau sepeda motor.

3. Kelembagaan:

Bentuk dan Struktur Lembaga Petani

- » Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah terbentuk melalui inisiatif petani sawit swadaya dan didukung oleh WWF Indonesia yang bertindak sebagai konsultan untuk membantu mempersiapkan kelompok dalam menghadapi sertifikasi RSPO. Selain WWF Indonesia, juga ada Carrefour Foundation yang mendukung dalam bentuk dana melalui WWF.
- » Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah berdiri pada tanggal 24 April 2012. Organisasi tersebut berbadan hukum dan memiliki akta notaris. Asosiasi Amanah adalah organisasi yang berbasiskan anggota tetapi tidak ada iuran yang dipungut dari anggota.
- » Keanggotaan asosiasi amanah terbuka untuk semua petani swadaya asalkan mereka bisa memenuhi persyaratan utama yaitu kepemilikan lahan kebun harus jelas. Ketika bergabung menjadi anggota, petani akan menandatangani formulir persetujuan yang berisi ketentuan mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota.

- » Saat ini Asosiasi Amanah memiliki anggota sebanyak 349 orang yang berasal dari 10 kelompok tani (KT) dari tiga desa yaitu: 1 KT dari desa Air Emas, 2 KT dari desa Bukit Jaya, dan 7 KT dari desa Trimulya Jaya.
- » Kelompok tani ini sudah ada sebelum asosiasi amanah terbentuk dan berjalan cukup baik dalam memperjuangkan kepentingan anggota kelompok. Asosiasi amanah memanfaatkan kelompok yang sudah ada, bukan membentuk kelompok baru. Dengan kata lain, asosiasi amanah juga merupakan gabungan dari kelompok tani.

Bentuk lembaga

- » Struktur kepengurusan berbeda dengan koperasi. Pengurus asosiasi adalah sama dengan pengurus Internal Control System (ICS). Struktur tertinggi di ICS adalah *group manager*. Orang-orang yang dipilih sebagai pengurus dianggap sebagai orang-orang yang memiliki keahlian manajerial yang bagus, memiliki pengetahuan mengenai sawit dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
- » Struktur ICS terdiri atas 25 orang yaitu: 1 orang *Group Manager* sebagai pimpinan tertinggi, 4 orang komite persetujuan, 10 orang di bagian penyuluhan dan pendaftaran, 8 orang tim penilaian internal, dan 3 orang dibagian pembelian dan pemasaran.
- » Tidak ada struktur pembina dan pengawas sebagaimana umum ditemukan dalam struktur kepengurusan sebuah organisasi. Tidak ada ada rapat anggota sebagai mekanisme pengambilan keputusan tertinggi seperti halnya di koperasi.
- » Sesuai dengan namanya, pengurus berfungsi sebagai pengontrol bahwa anggota sudah melaksanakan hal-hal yang disepakati yaitu melakukan melakukan praktik kebun terbaik sesuai dengan standar RSPO, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Berikut adalah contoh dari hal-hal yang menjadi komitmen anggota di mana pengurus asosiasi atau ICS akan memastikan hal tersebut berjalan:
 1. Menggunakan alat perlindungan diri pada saat beraktifitas dikebun.
 2. Aplikasi pupuk terjadwal, sesuai kondisi dan usia tanaman.
 3. Memanen TBS sesuai dengan kriteria buah matang.

4. Pengendalian Gulma menggunakan jasa tim unit semprot (TUS). TUS dikelola oleh asosiasi amanah dan mempekerjakan perempuan yang sudah dilatih dalam menggunakan pestisida dan herbisida.
5. Dan banyak lainnya.
 - » Selain struktur ICS, di tingkat kelompok juga terdapat seorang ketua, sekertaris dan bendahara. Frekuensi pertemuan di tingkat kelompok lebih sering dari pada pertemuan di tingkat asosiasi. Kelompok melakukan pertemuan jika ada hal-hal yang ingin dibicarakan atau dibahas. Pertemuan bisa satu kali dalam sebulan, terkadang lebih.
 - » Setiap kelompok memiliki perwakilan di kepengurusan asosiasi amanah/ICS. Terkadang di satu kelompok terdapat lebih dari satu perwakilan yang duduk di kepengurusan asosiasi amanah. Pengurus asosiasi amanah atau pengurus ICS juga merupakan anggota asosiasi amanah. Pengurus atau tim ICS hanya diperbolehkan bagi anggota asosiasi dan tertutup buat non-anggota.
 - » Di tingkat asosiasi, rapat atau pertemuan hanya dihadiri oleh perwakilan kelompok. Ketua kelompok akan memberitahukan perkembangan kegiatan kelompoknya di rapat pengurus. Masing-masing ketua kelompok akan menyampaikan hal yang dibicarakan di dalam rapat kepada anggota kelompoknya.
 - » Petani sawit swadaya yang menjadi anggota asosiasi amanah merasakan banyak manfaat semenjak bergabung dengan asosiasi amanah. Di antara beberapa manfaat yang dirasakan oleh petani adalah sebagai berikut:
 - Penjualan TBS lancar

Sebelum bergabung dengan amanah, TBS terkadang ditolak oleh perusahaan dikarenakan *over supply*. Biasanya setelah hari raya. Perusahaan terpaksa mengambil kebijakan untuk lebih mengutamakan petani plasma terlebih dahulu, dan menolak TBS dari petani swadaya.
 - Jalan ke kebun bagus terawat

Sebagian kecil hasil penjualan dipotong untuk biaya perbaikan jalan sesuai kesepakatan di kelompok masing-masing. Anggota kelompok bergotong royong memperbaiki jalan ke kebun yang memudahkan

pengangkutan hasil kebun. Anggota kelompok menjadi lebih dekat dan saling percaya semenjak tergabung di asosiasi amanah.

- Harga lebih pasti dan lebih baik

Berbeda sewaktu penjualan buah masih ke tengkulak, harga jual saat ini jauh lebih baik. Selain itu, dengan peningkatan kualitas melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh asosiasi amanah dan juga hasil lobi pengurus amanah dengan pihak perusahaan, petani mendapatkan harga penjualan terbaik. PT IIS membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Akses pupuk lebih baik & Pengetahuan mengenai pemupukan bertambah

Setiap kelompok telah memiliki jadwal pemupukan, dan pupuk tersedia di koperasi. Petani tidak mengalami kesulitan mendapatkan pupuk karena petani swadaya juga dibantu oleh PT IIS. Petani secara rutin memupuk lahan mereka, sehingga kebun menjadi lebih produktif, buah yang dihasilkan lebih banyak.
- Pengetahuan teknis perawatan sawit dan pengendalian hama meningkat

PT IIS juga menurunkan tenaga ahli sawit perusahaan untuk memberikan pelatihan pada petani anggota asosiasi amanah mengenai cara perawatan kebun dan pengendalian hama. Pengetahuan dan keahlian yang didapat oleh petani dari pelatihan telah mengurangi kerugian yang mungkin timbul dikarenakan oleh hama dan penyakit seandainya pelatihan tidak diberikan. Selain PT IIS, melalui kerjasama dengan WWF petani anggota asosiasi amanah juga memperoleh pelatihan lainnya seperti: Pelatihan ICS, GAP, P&C RSPO dan banyak pelatihan lainnya. Tenaga pelatih ada yang berasal dari perusahaan, ada juga yang didatangkan dari luar Riau, seperti BIOCert dari Bogor.
- » Dukungan dan pendampingan yang dilakukan oleh WWF terhadap asosiasi amanah memungkinkan asosiasi amanah belajar banyak hal mengenai kelembagaan seperti: mengembangkan struktur, fungsi dan tanggung jawab, AD/ART, SOP organisasi, administrasi dan dokumentasi, dan banyak lainnya. Kesuksesan dalam mendapatkan sertifikasi RSPO sangat tergantung dari kuat tidaknya kelembagaan organisasi tersebut.

Organisasi yang solid dan kuat yang memiliki struktur yang jelas kemungkinan besar akan lebih berhasil dalam menerapkan P&C RSPO dan memperoleh sertifikat.

- » Masa jabatan pengurus yang terpilih adalah 5 tahun. Setelah 5 tahun, pengurus akan dipilih kembali oleh anggota. Pengurus saat ini, masih merupakan pengurus lama, yang dibentuk semenjak asosiasi amanah berdiri.
- » Menurut pengurus, asosiasi amanah baru saja mendapatkan sertifikat RSPO, yang proses untuk mendapatkan dan nanti untuk mempertahankannya tidak mudah, ditakutkan jika kepengurusan diganti dengan orang-orang baru (kaderisasi) mereka tidak bisa bekerja optimal. Anggota tidak berkeberatan dan meminta agar pengurus lama melanjutkan kepemimpinannya.
- » Kaderisasi baik dengan mendidik anak muda atau petani anggota potensial untuk menjadi pengurus nantinya, telah terfikirkan, tetapi saat ini belum ada rencana atau strategi kaderisasi yang telah dikembangkan.
- » Di kepengurusan ICS atau asosiasi amanah, tidak ada perempuan, bahkan di rapat-rapat atau kegiatan asosiasi amanah partisipasi perempuan juga masih sangat rendah. Melibatkan perempuan dalam kepengurusan masih menjadi pekerjaan yang sulit, dan usaha yang dilakukan oleh asosiasi amanah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatannya juga masih kurang.

Pengalaman lembaga

- » Sebagian anggota dari asosiasi amanah, khususnya yang tinggal di desa Trimulya Jaya, telah tergabung dalam koperasi Bakti sejak 2004. Koperasi Bakti terletak di desa Trimulya Jaya, yang sebelum pemekaran disebut dusun Trimulya.
- » Tetapi KUD Bakti hanya mengelola TBS yang dihasilkan oleh petani plasma, sedangkan petani sawit swadaya tidak menjadi prioritas. Petani plasma menjual sawit langsung ke perusahaan, sedangkan petani

swadaya atau petani plasma yang memiliki kebun mandiri menjual hasil TBS ke tengkulak.

- » Harga TBS dipermainkan oleh tengkulak, harga rendah, jalanan menuju ke lokasi kebun becek dan jelek yang membuat mobil pengangkut buah susah masuk.
- » Melihat permasalahan yang dihadapi oleh petani swadaya, PT IIS menyarankan agar petani sawit swadaya membentuk sebuah organisasi, terpisah dari koperasi yang sudah ada. WWF juga bersedia memberikan dukungan.
- » *Group manager* atau ketua asosiasi amanah saat ini, Narno, juga merangkap sebagai ketua koperasi Bakti.
- » Semenjak bergabung dengan asosiasi amanah, petani dan pengurus asosiasi amanah mendapatkan banyak pelatihan, mengikuti berbagai pertemuan dan forum tingkat nasional dan internasional. Asosiasi amanah memiliki banyak kenalan baru, jejaring mereka bertambah.
- » Sebagai organisasi yang baru terbentuk, asosiasi memiliki pengalaman kerja yang masih terbatas. Pengalaman amanah sejauh ini hanya dalam penerapan P&C dan mendapatkan sertifikasi RSPO. Kerjasama formal asosiasi amanah dengan pihak lain hanya dengan WWF dan PT IIS.

Transparansi dan akuntabilitas lembaga

- » *Group manager* yang diangkat harus mendeklarasikan perihal konflik kepentingan, hal ini tercantum di dalam SOP mereka.
- » Anggota selalu memperoleh informasi dari ketua kelompok, selain itu mereka juga bisa membaca langsung informasi yang ditempel di papan pengumuman di kantor asosiasi amanah, seperti informasi harga jual TBS.
- » Tidak ada rapat tahunan untuk seluruh anggota seperti halnya di koperasi, juga tidak ada laporan tertulis yang diberikan kepada anggota asosiasi. Pengurus memiliki laporan keuangan tertulis yang disampaikan secara lisan oleh *group manager* kepada sesama pengurus dan perwakilan anggota yang hadir. Di dalam rapat dijelaskan mengenai

jumlah kas organisasi, jumlah pengeluaran, dan rincian pengeluaran, misal: biaya konsumsi selama pelatihan, dan biaya listrik.

- » Asosiasi amanah hanya memfasilitasi penjualan TBS petani swadaya ke PT. IIS. Harga jual sawit dari petani sama dengan harga sawit yang berlaku di pasar. Tetapi perusahaan memberikan tambahan harga untuk setiap kilo yang dijual diatas harga yang telah ditetapkan. Selisih tersebut menjadi pemasukan atau keuntungan asosiasi amanah. Keuntungan yang didapat dan juga pengeluaran dari uang tersebut dilaporkan dalam rapat-rapat pengurus.
- » Pengurus selalu membuat notulensi di dalam setiap rapat. Notulensi disimpan di folder di kantor dan boleh diakses oleh siapapun, termasuk petani anggota, jika mereka tertarik untuk membacanya.
- » TBS dari kebun akan diantar ke TPH. TBS di timbang oleh anggota kelompok tani, biasanya diwakili oleh ketua, sekertaris atau perwakilan anggota kelompok, pemilik kebun juga hadir menyaksikan proses penimbangan. Kelompok sudah memiliki jadwal panen, dan pemanenan dilakukan sesuai dengan jadwal.
- » Pembayaran buah sawit dilakukan setiap bulan melalui koperasi di masing-masing desa tempat tinggal petani. Petani menerima slip pembayaran yang berisi rincian pemasukan dan pengeluaran. Misal: berapa ton buah yang dijual, berapa uang yang diterima, dikurangi dengan hutang di koperasi jika ada, serta biaya lain yang sudah disepakati bersama. Jika ada hal yang kurang jelas, petani bisa mengklarifikasi ke ketua kelompok masing-masing atau ke *group manager*.

Tata kelola: pemahaman AD/ART, kepatuhan terhadap regulasi

- » Petani mengajukan permohonan menjadi anggota dengan mengisi formulir yang berisi informasi seperti nama, alamat, luas lahan, data produksi, dan lain-lain. Tim ICS bagian penyuluhan dan pendaftaran, akan memeriksa informasi yang diberikan dan mengadakan kunjungan lapang untuk memverifikasi data.
- » Jika petani lulus verifikasi dan diterima menjadi anggota, petani diharuskan untuk menandatangani formulir dan berjanji untuk

mematuhi kebijakan, AD/ART dan SOP asosiasi amanah. Petani harus memiliki komitmen untuk merubah cara bertani dari konvensional ke bertani secara berkelanjutan dengan memerhatikan aspek sosial dan lingkungan.

- » Kebijakan dan SOP asosiasi mengarah pada keberhasilan penerapan prinsip dan kriteria RSPO, untuk memperoleh sertifikasi, mempertahankan serta memperbaharui sertifikasi tersebut. Dikarenakan sertifikasi RSPO adalah sertifikasi kelompok, maka setiap anggota memiliki tanggungjawab dan kewajiban yang sama dalam menerapkan praktik sawit berkelanjutan sesuai dengan panduan yang ada.
- » Hal yang penting dalam sertifikasi adalah pendokumentasian informasi yang akan diminta sewaktu proses audit, jika petani asosiasi amanah gagal dalam memberikan bukti yang diminta akan berakibat pada kegagalan memperoleh sertifikasi atau kegagalan dalam mempertahankan sertifikasi yang sudah diperoleh. Misal, Petani diharuskan melakukan pencatatan terhadap jumlah pestisida yang mereka gunakan, dan beberapa pencatatan lainnya sesuai dengan buku panduan yang mereka miliki.
- » Ketua kelompok dan perwakilan kelompok yang mendapatkan pelatihan diharuskan untuk mentransfer ilmu ke petani di kelompoknya sehingga petani memiliki pemahaman yang sama dan mampu menerapkan standar RSPO dikebun mereka.
- » Jika sewaktu inspeksi internal ditemukan petani yang tidak mematuhi standar yang sudah disepakati, bagian penilaian internal akan membuat laporan tertulis dan menyerahkannya ke bagian komite persetujuan. Petani yang tidak lolos inspeksi akan didatangi ke rumah, hasil temuan akan di diskusikan dan langkah perbaikan akan disepakati bersama.
- » Jika petani tersebut masih gagal memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan, maka petani akan mendapatkan teguran, dan keanggotaan petani bisa dinonaktifkan bahkan diberhentikan, dengan kata lain petani yang tidak mematuhi AD/ART, SOP dan kebijakan asosiasi dapat

dikeluarkan. Keputusan tersebut akan dibuat secara musyawarah ditingkat pengurus.

Sertifikasi sawit berkelanjutan

1. Sertifikasi dan kelompok tani
 - » Untuk bisa terlibat dalam sertifikasi kelompok petani sawit swadaya harus tergabung dalam asosiasi amanah, sertifikasi hanya diperuntukkan bagi anggota.
 - » Anggota harus menandatangani perjanjian tertulis kalau mereka akan mematuhi aturan/SOP yang ditetapkan terkait dengan budidaya sawit berkelanjutan dan pemenuhan prinsip dan kriteria RSPO.
 - » Dengan struktur ICS yang ada sekarang, asosiasi amanah telah mampu memenuhi persyaratan administrasi untuk sertifikasi yang dibutuhkan. Selain pengurus, asosiasi juga dibantu oleh staf admin kompeten non-anggota yang merapikan dan merekapitulasi semua transaksi jual beli TBS, dan mengatur pembayaran ke petani.
 - » Asosiasi amanah memiliki sarana dan prasarana, seperti bangunan kantor lengkap dengan aliran listrik yang stabil, komputer dan printer serta fasilitas internet. *Group manager* dan sebagian Tim ICS lainnya bisa mengoperasikan komputer dan internet. Bangunan kantor yang ditempati oleh asosiasi amanah sekarang adalah bangunan milik koperasi bakti, kedepannya amanah berencana untuk membangun kantor mereka sendiri.
 - » Semua komunikasi baik dengan RSPO, WWF, PT IIS, lembaga audit dan pihak lainnya sudah langsung melalui *group manager*. Jika ada hal yang *group manager* kurang mengerti, *group manager* akan menghubungi staf lembaga pendamping meski sekarang hubungan komunikasi lebih bersifat informal semenjak kontrak kerjasama lembaga berakhir di bulan Desember 2012 lalu.
 - » Data dan informasi yang dikumpulkan disimpan di kantor asosiasi amanah, tetapi beberapa dokumen juga dipegang langsung oleh petani, yaitu seperti: fotokopi formulir pendaftaran, data panen, hasil dari inspeksi internal, CARs, peta kebun, dan slip penjualan sawit. Tim ICS

menginventori semua data petani yang tergabung dalam asosiasi amanah, data tersebut dicek dan diperbaharui secara berkala.

- » Tim ICS bertanggungjawab untuk memastikan anggota memenuhi ketentuan prinsip dan kriteria RSPO, oleh karena itu, tim ICS setiap tiga bulan sekali akan melakukan tinjauan atau inspeksi ke kebun petani yang terpilih (*random* atau *purpose sampling*).
- » Kunjungan diprioritaskan bagi petani yang belum pernah diinspeksi. Tim ICS harus memastikan bahwa semua petani sawit swadaya anggota asosiasi amanah di inspeksi minimal sekali selama masa berlaku sertifikat yaitu 5 tahun.

2. Pemahaman sertifikasi

- » Pada awalnya petani tidak mengetahui mengenai sertifikasi RSPO dan manfaatnya. Tetapi setelah beberapa kali menghadiri kegiatan sosialisasi mengenai sertifikasi, petani memutuskan untuk bergabung. Meski masih belum begitu paham petani yakin kalau sertifikasi akan bermanfaat dan mereka bersedia terlibat di dalamnya.
- » Setelah bergabung sebagai anggota asosiasi amanah, petani memperoleh berbagai pelatihan. Pelatihan diikuti oleh perwakilan kelompok, di antaranya adalah ketua dan sekretaris. Atau bisa juga dikatakan kalau pelatihan diikuti oleh Tim ICS yang merupakan perwakilan dari 10 kelompok.
- » Pemahaman yang lebih mendalam mengenai sertifikasi ada di pengurus asosiasi amanah. Masing-masing pengurus yang juga merupakan perwakilan dari kelompok, akan melakukan pertemuan kembali dengan kelompoknya sepulang dari pelatihan untuk mentransfer ilmu yang mereka peroleh agar anggota kelompok juga memiliki pemahaman yang sama mengenai sertifikasi.
- » Bagaimanapun meski petani mengatakan mereka cukup paham dengan adanya ICS dan fungsinya, mengerti Prinsip dan Kriteria RSPO, petani juga menjelaskan bahwa beberapa istilah di dalam panduan tersebut masih asing bagi mereka, terkadang mereka tidak bisa menjelaskan meski mengerti maksudnya. Transfer ilmu dapat berupa diskusi di kebun, rumah anggota/ketua dan juga melalui pertemuan kelompok.

3. Pelaksanaan sertifikasi
 - » Audit yang dilakukan oleh BSI, pada asosiasi amanah mengacu pada standar RSPO Group Certification, Juli 2010; Indonesia nasional interpretasi P&C untuk petani swadaya (INA-SWG; July 2010) dan RSPO Supply Chain Certification Systems: November 2011.
 - » Kebun kelapa sawit adalah milik petani yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN. TBS yang dihasilkan dijual ke PT IIS.
 - » Sewaktu audit *assesment*, ditemukan dua *nonconformities* mayor, yaitu terhadap indikator 2.2.2 dan 2.2.3 RSPO Group Certification Standar, dan dua *nonconformities* minor terhadap indikator 4.3.3 dan 4.6.4 dari RSPO P & C untuk Petani Independen. Tujuh peluang untuk perbaikan juga ditekankan.
 - » Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah telah menanggapi dengan memberikan rencana tindakan perbaikan (CAP) untuk *nonconformities* minor dan peluang untuk perbaikan. BSI juga telah menerima bukti mengenai *nonconformities* mayor yang dapat diterima dan telah selesai. CAPs akan diverifikasi pada kunjungan *surveillance* berikutnya.
 - » Petani sawit swadaya yang tergabung dalam asosiasi amanah dinyatakan lulus audit dan mendapatkan sertifikat RSPO yang berlaku selama lima tahun. Sertifikasi ini adalah sertifikasi untuk petani swadaya yang pertama di Indonesia, atau nomor dua di dunia setelah Thailand, yang merupakan sebuah prestasi yang membuat asosiasi amanah bangga.
 - » Tantangan terberat yang dihadapi oleh tim ICS dan petani adalah sewaktu membantu petani dalam melengkapi persyaratan mayor yang dibutuhkan, terkait dengan pembuktian kepemilikan tanah adalah berkoordinasi dengan berbagai pihak dari kantor pemerintah, termasuk dengan bupati. Pengalaman berhubungan dengan institusi formal dan birokrasi adalah hal yang baru bagi pengurus ICS dan petani. Petani sangat terbantu dengan bimbingan dari staf lembaga pendamping yang menemani dan mengawal petani sehingga petani mendapatkan persyaratan yang dibutuhkan.

- » Asosiasi amanah berharap agar kedepan pemerintah mendukung dan memastikan petani mendapatkan SHM, STDB, SPLP, dengan proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih terjangkau.
4. Perbaikan menuju sertifikasi
- » *Group manager* bersama dengan tim ICS lainnya bertindak dengan cepat dalam merespons temuan audit dari BSI. Pengurus dan anggota segera melakukan rapat, dan mendiskusikan mengenai kekurangan dokumen atau bukti yang harus mereka lengkapi. Mereka juga segera membuat rencana perbaikan untuk hal yang memang belum bisa mereka lakukan sekarang, misal tim ICS telah membuat rencana kunjungan audit internal ke anggota kelompok.
5. Peran Sistem Pengendali Internal
- » Tim ICS atau pengurus adalah kunci penting dalam kesuksesan memperoleh sertifikasi. Adanya Tim ICS akan memastikan pemenuhan kualitas dan ketentuan yang sudah disepakati. Auditor dapat menanyakan semua informasi yang dibutuhkan melalui tim ICS/pengurus.
 - » Tim ICS, terutama yang bertanggungjawab terhadap pendokumentasian informasi/data harus memiliki keahlian admin yang baik, rapi, detail, dan memiliki kemampuan komputer yang memadai. Pada tahapan awal, asosiasi amanah banyak dibantu oleh staf WWF yang secara intensif mendampingi koperasi amanah dalam memenuhi semua persyaratan dokumen sertifikasi yang dibutuhkan.
 - » Tim ICS juga memperoleh pelatihan ToT sehingga mereka memiliki skill yang dibutuhkan untuk mengedukasi anggota di kelompok masing-masing.
 - » Anggota yang belum mengerti diperbolehkan bertanya kepada ketua kelompok atau kepada sesama anggota yang sudah lebih paham. Dengan cara seperti, petani memahami dengan baik mekanisme sertifikasi.
 - » Pada prinsipnya petani tidak mengalami kesulitan menerapkan ICS/RSPO P&C, tetapi ada beberapa hal yang petani belum terbiasa dan sering lupa, yang menjadi temuan oleh tim inspeksi internal. Misalkan,

pada saat memanen, petani diharuskan untuk memakai perlengkapan safety, tetapi petani sering lupa untuk menggunakan helm dan sepatu boot, pelanggaran ini tidak disengaja, dan peraturan terkait safety juga tidak sulit untuk dilakukan, hanya saja petani membutuhkan proses adaptasi karena selama ini belum terbiasa. Langkah perbaikan yang dilakukan salah satunya adalah antara sesama anggota kelompok saling mengingatkan.

- » Tim ICS yang melakukan inspeksi juga memberikan masukan/saran perbaikan ketika ditemukan ada petani yang tidak mematuhi ketentuan berdasarkan SOP yang ada, sehingga dari masukan langsung dari tim ICS tersebut petani bisa lebih paham mengenai sertifikasi dan hal yang harus dilakukan untuk memenuhi itu. Tim ICS dan anggota asosiasi terus berusaha untuk bisa mematuhi ketentuan standar RSPO. Tim ICS telah menerbitkan sebanyak 40 prosedur mengenai standar sertifikasi kelompok demi mendukung upaya tersebut.

6. Lacak balak atau *traceability*

- » Asosiasi amanah sudah memiliki sistem pencatatan penjualan TBS dengan kode yang berisi nama kelompok, tanggal, jumlah, dan lain-lain. Asosiasi atau setiap kelompok juga sudah memiliki rencana panen, dan panen dilakukan berdasarkan tanggal yang sudah disepakati itu.
- » TBS diantarkan dengan mobil sewa ke PT IIS dengan surat pengiriman TBS yang ditandatangani dari pihak perusahaan yang menerima sawit tersebut. TBS yang ada bisa dilacak hingga ke tingkat kelompok. Dengan bantuan dari form pencatatan yang dipegang oleh kelompok dan petani dan direkap oleh staf admin asosiasi amanah serta dengan jadwal panen yang telah dibuat memungkinkan asosiasi atau perusahaan untuk melacak hingga ke tingkat kelompok.

Keberlanjutan

1. Keberlanjutan usaha sawit

- » Sawit yang dihasilkan dijual ke PT IIS, sudah ada kontrak pembelian, dan perusahaan membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi.

- » Selisih harga dari harga jual yang diberikan oleh perusahaan dengan harga yang berlaku di pasaran menjadi sumber pemasukan asosiasi amanah. Uang tersebut dikelola oleh pengurus atau tim ICS.
- » Selain uang yang terkumpul dari penjualan TBS, asosiasi amanah juga menerima uang dari hasil penjualan sertifikat RSPO ke Green Palm untuk satu tahun.
- » Pengurus asosiasi amanah hanya perlu memastikan bahwa asosiasi amanah bisa lulus dari kunjungan *surveillance*, dengan kata lain, sertifikat yang berlaku untuk lima tahun tersebut bisa dipertahankan dikarenakan petani anggota amanah konsisten dan memenuhi aturan.
- » Untuk sertifikasi saat ini, asosiasi amanah di bantu oleh WWF & Carefour, tidak hanya berupa dana untuk persiapan menghadapi sertifikasi dan tetapi lembaga pendamping juga memberikan dana hibah untuk biaya audit. *Group manager* tidak mengetahui biaya persis yang dikeluarkan untuk audit, karena proses pembayaran dilakukan oleh lembaga pendamping.
- » *Group manager* dan tim ICS mengetahui gambaran kasar biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi, tetapi biaya tersebut juga tidak tetap dari tahun ke tahun, dan juga tergantung dari penawaran yang diberikan oleh perusahaan audit tersebut. Dengan kata lain, besar kemungkinan biaya akan mengalami perubahan setelah 5 tahun.
- » Biaya *surveillance* yang dilakukan setiap tahunnya juga tidak tetap tergantung dari penawaran auditor, tergantung dari harga tiket pesawat, akomodasi dan biaya lainnya. Bagaimanapun amanah mengetahui kisaran biayanya, dan untuk kunjungan *surveillance* tahun ini, amanah bisa memenuhinya dari kas yang ada.
- » Untuk biaya audit selanjutnya setelah sertifikat pertama yang berlaku lima tahun berakhir, amanah sudah mengantisipasi untuk pembiayaannya. Amanah optimis kalau mereka bisa menanggung biaya tersebut. Yang harus dilakukan oleh amanah adalah memastikan kunjungan *surveillance* positif, bahwa amanah konsisten mematuhi SOP yang sudah dibuat (GAP, P&C, dan lain-lain), sehingga diharapkan kalau sertifikat mereka dibeli setiap tahunnya. Jika sertifikat RSPO mereka

dibeli selama lima tahun, uang yang terkumpul dari penjualan sertifikat tersebut cukup untuk membayar biaya sertifikasi.

- » Saat ini amanah hanya meneruskan apa yang sudah didukung oleh WWF dan Carrefour. Jika Amanah konsisten menerapkan apa yang sudah dipelajari maka dengan jalan yang sudah terbuka, usaha sawit petani swadaya yang berkelanjutan dapat terwujud dan tidak hanya itu, keuntungan ekonomis juga bisa diperoleh.
2. Keberlanjutan kelembagaan
- » Uang yang terkumpul dari selisih harga penjualan TBS dan uang hasil penjualan sertifikat dikelola oleh pengurus yang dipergunakan untuk membiayai biaya operasional kantor, membayar gaji staf admin dan keuangan, biaya rapat dan juga untuk honor pengurus (tim ICS). Dengan adanya sumber pemasukan yang stabil dan regular lembaga akan tetap bertahan.
 - » Asosiasi amanah memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan PT IIS, kerjasama yang positif ini akan berkontribusi positif terhadap keberlangsungan organisasi amanah. Dukungan dan komitmen perusahaan untuk terus bekerjasama dengan amanah sangat penting demi keberlanjutan lembaga.
 - » Amanah juga terbuka untuk bekerjasama dengan lembaga lain, baik lembaga non profit ataupun pemerintah. Saat ini mayoritas petani sawit memiliki banyak waktu produktif yang tidak dimanfaatkan. Jika saja waktu ini digunakan untuk mengembangkan usaha lainnya yang bisa menjadi komplementari dari pendapatan sawit maka petani akan lebih sejahtera, dan juga lebih tidak berisiko ketika terjadi fluktuasi harga. Asosiasi amnaah memikirkan untuk mengembangkan usaha ternak sapi, atau usaha sejenis lainnya.





Jl. Kemang Selatan XII No. 1
Jakarta Selatan 12560 | Indonesia
Tel. +62-21 7892489
Fax. +62-21 7808115
www.hivos.nl